BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025, dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun ketiga Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, serta untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dan menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan:

a. Renja Perangkat Daerah;
b. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 berisi arah kebijakan pembangunan, program dan kegiatan pembangunan, dan indikator kinerja beserta kerangka pendanaannya yang disusun berdasarkan kajian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 beserta capaian kinerjanya yang tertuang dalam Lampiran RKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Kepala BAPPELITBANGDA setiap triwulan.

Pasal 6

Kepala BAPPELITBANGDA bertanggungjawab dalam pelaksanaan Peraturan ini dengan berkewajiban melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD yang tertuang dalam renja Perangkat Daerah serta menghimpun dan menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. **Secara substansial,** memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. **Secara normatif,** menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. **Secara operasional,** memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. **Secara faktual,** menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan hasil penjaringan usulan masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan kesepakatan antarpelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Selain itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari daerah provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 diupayakan sinkron dan bersinergis dengan kebijakan pemerintah melalui 4 pilar keberpihakan pembangunan yaitu *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment.*

Berdasarkan hal tersebut di atas, RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2020 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratis

Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis dan berbasis kinerja. Pendekatan ini tercermin dari:

a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
b) Rumusan status/capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pencapaian target RPJMD;
c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD;
d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan;
e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);
f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja;
g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;

h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya;

i) Kejelasan penanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

2. Pendekatan Partisipatif

Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa:

a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pada tahapan penyusunan RKPD;

b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;

c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;

d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;

e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD;

f) Pelibatan media;

g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif;

h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program.

3. Pendekatan Politis

Pendekatan perencanaan pembangunan melalui proses politik dilakukan melalui :

a. Penerjemahan dan penjabaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 secara tepat dan sistematis, sebagai rencana pembangunan tahun kelima, guna penjabaran dan pencapaian Visi dan Misi Bupati–Wakil Bupati Purbalingga terpilih.

b. Pertimbangan pokok–pokok pikiran dan aspirasi DPRD melalui penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD antara lain melalui :

b.1. Rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

b.2. Penyampaian pokok-pokok pikiran dalam forum musrenbang.

Penelaahan terhadap dua hal tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

4. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya:

a) Sinergi dengan RKPD dan Renja PD Provinsi Jawa Tengah, RKP dan Renja Kementerian/Lembaga;
b) Konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Purbalingga;
c) Konsistensi dengan RTRW Daerah;
d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem;
e) Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Sustainable Development Goals (SDG's)*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
f) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Substansi RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2020 akan menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Renja OPD Kabupaten Purbalingga tahun 2020. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2020 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2020.

Disamping itu, cakupan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 pada semua bidang pembangunan merupakan dokumen yang efektif sebagai indikator kemajuan proses *learning by doing* penerapan nilai-nilai positif pembangunan, seperti akuntabilitas, kedisiplinan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan, serta kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kualitas

jajaran birokrasi diharapkan semakin baik dalam melaksanakan kebijakan melalui keharusan penyusunan rencana kerja perangkat daerah masing-masing.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tetang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

1.3. Hubungan Antardokumen Perencanaan

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarurusan pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten, baik dokumen perencanaan yang bersifat spasial maupun aspasial. Substansi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 selaras dengan prioritas, kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga tahun 2005 – 2025.

Selain itu, mengingat wilayah Kabupaten Purbalingga secara administratif dan geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang, Banyumas, Banjarnegara dan Pekalongan, maka penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) keempat kabupaten tersebut, sehingga dapat terwujud keselarasan antarwilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun ke depan.

Selanjutnya, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 harus menjadi pedoman dan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat OPD. Terkait dengan hal tersebut, hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Hubungan RKPD Kabupaten Purbalingga dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah :

1. Menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah untuk tahun 2020;
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2020;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;

3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, provinsi maupun kabupaten.

1.3. Hubungan Antardokumen Perencanaan

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Bagian menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi

Berisi kondisi umum geografi diantaranya mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Demografi

Berisi kondisi umum demografi diantaranya mengenai kondisi kependudukan dan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berisi kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Berisi kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

Berisi kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing

Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berisi permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Pembangunan Daerah

Berisi permasalahan pembangunan daerah yang menjadi isu strategis dan menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi Pemerintah Daerah. Isu Strategis permasalahan pembangunan daerah menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi atau rekomendasi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisi tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun 2020 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2020.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Kondisi Umum

2.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (± 3.254 ribu Ha). Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan, 996 dusun, 1.558 RW dan 5.092 RT. Rata-rata setiap Desa/Kelurahan memiliki enam rukun warga dan 21 rukun tetangga.

Wilayah Kabupaten Purbalingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan di sebelah Utara; Kabupaten Banjarnegara di sebelah Timur dan Selatan; Kabupaten Banyumas di sebelah Barat. Pada bagian Selatan merupakan bagian dari DAS Kali Serayu dengan sungai-sungai anakan seperti Kali Pekacangan, Klawing, Gintung dan sebagainya. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu wilayah di kawasan andalan Jawa Tengah Selatan (Hal. 13, Lampiran IX, PP No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah).

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Purbalingga

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Purbalingga terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak pada posisi 109°11′-109°35′ Bujur Timur dan 7°10′-7°29′ Lintang Selatan. Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan di sebelah Selatan berbatasan denganKabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak ibu kota Kabupaten Purbalingga dengan ibu kota Provinsi sejauh 191 km.

C. Kondisi Topografi dan Geomorfologi

Fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara zona Serayu Utara dan zona Vulkanik Kwarter. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 23 meter – 3.432 meter dari permukaan laut, dengan klasifikasi ketinggian Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Purbalingga tersebut masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus seperti diuraikan sebagai berikut :

a. Daerah Ketinggian 7 – 25 meter dpl merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.
b. Daerah Ketinggian 25 – 100 meter dpl merupakan daerah dengan sebagian wilayah masih berpotensi untuk tanah persawahan dan sebagian wilayah pada ketinggiannya antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi yang lebih besar.
c. Daerah Ketinggian 100 – 500 meter dpl merupakan daerah berpotensi utama untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
d. Daerah Ketinggian 500 – 1.000 meter dpl merupakan daerah berpotensi untuk wilayah perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, mengingat wilayah tersebut cukup dingin.
e. Daerah Ketinggian diatas 1.000 meter dpl merupakan daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang. Daerah dengan topografi demikian berpotensi sebagai wilayah non budidaya atau kawasan hutan lindung.

Dataran tinggi di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara dan sebagian Kecamatan Kutasari, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Bobotsari.

Sedangkan dataran rendah di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kejobong, sebagian Kecamatan Kutasari, Kecamatan Padamara dan Kecamatan Kemangkon.

Kabupaten Purbalingga memiliki karakter topografi yang beragam, dari dataran rendah, daerah perbukitan hingga daerah pegunungan. Karakteristik wilayah berdasarkan kondisi permukaan tanah menunjukkan sebaran sebagai berikut :

a. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan kelerengan >40%. Daerah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
b. Bagian tengah merupakan daerah dengan kelerengan 25%-40%. Daerah ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari.
c. Bagian selatan merupakan daerah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Gambaran kondisi topografi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Purbalingga

D. Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri dari batuan sedimen klasik berupa batuan andesit, sirtu, batu pasir darat, batu lempung, dan trass dengan persebaran sebagai berikut:

Komposisi litologi batuan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

- Alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung, umumnya bersifat kedap air.
- Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.
- Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.
- Endapan vulkanik tua yang terdiri dari aliran lava yang bersifat andesit sampai basalt dan breksi. Kelulusan terhadap air rendah sampai sedang.

- Batu pasir tufaan, batupasir, konglomerat, tufa, breksi dan lempung dengan kelulusan terhadap air rendah.
- Napal, napal lempungan dan napal globigerina dengan sisipan tipis tufa pasiran, batu gamping pasiran, batu pasir, batu lempung dan lempung tufaan dengan kelulusan terhadap air rendah

Gambaran kondisi Geologi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini.

Gambar 2.3.
Peta Struktur Geologi Kabupaten Purbalingga

E. Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Purbalingga dikategorikan menjadi 9 jenis dengan karakteristik yang berbeda. Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Purbalingga adalah latosol coklat dan regosol coklat seluas 14.943,75 ha (19,22%) dari seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga dan yang terkecil adalah jenis tanah litosol yang hanya sebesar 568,75 ha (0,73%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

NO	Jenis Tanah	Luas Wilayah	
		Ha	%
1	Latosol coklat dan Regosol coklat	14.943,750	19,22
2	Aluvial Coklat tua	13.837,500	17,79
3	Latosol coklat dari bahan induk Vulkanik	8.490,625	10,92
4	Latosol merah kuning	4.498,375	5,78
5	Latosol coklat tua	6.237,500	8,02
6	Andosol coklat	5.662,500	7,28
7	Litosol	568,750	0,73
8	Padmolik merah kuning	10.050,000	12,92
9	Gromosol kelabu	13.475,122	17,33
Jumlah		**77.764,122**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga

- Tanah Latosol

  Di Kabupaten Purbalingga tanah latosol dirinci menjadi: Tanah Latosol coklat yang berasosiasi dengan regosol coklat; Tanah Latosol coklat dari bahan induk vulkanik; Tanah latosol merah kuning; dan Tanah Latosol coklat tua

- Tanah alluvial

  Tanah ini biasanya berwarna kelabu, coklat, dan hitam, bersifat peka terhadap erosi, karena merupakan endapan tanah liat dan pasir, maka terdapat di sepanjang sungai yang cukup besar, seperti Sungai Gintung bagian tengah dan hilir, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan dan Sungai Serayu bagian tengah dan hilir.

- Tanah Andosol

  Jenis tanah ini berbentuk dari batuan bekuan dan intermedior, mempuyai sifat peka terhadap erosi, berwarna coklat atau hitam kelabu. Jenis tanah ini banyak terdapat di sekitar puncak Gunung Slamet.

- Tanah litosol

  Tanah ini berbentuk dari batuan endapan dan bekuan, sangat peka terhadap erosi, kurang baik untuk pertanian. Jenis tanah ini banyak terdapat di Kecamatan Rembang bagian timur.

- Tanah Gromosol

  Tanah ini berbentuk dari endapan liat dan bekuan. Berwarna kelabu sampai hitam, bersifat peka terhadap erosi, dapat dijadikan tanah pertanian dan perkebunan. Jeni tanah ini banyak terdapat di Kecamatan Karangreja, Bobotsari, Karanganyar, Karangmoncol dan Rembang.

Gambaran jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini.

Gambar 2.4.
Peta Jenis Tanah Kabupaten Purbalingga

F. Kondisi Klimatologi

Curah hujan sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan letak tempat itu sendiri. Tidak terkecuali untuk wilayah Kabupaten Purbalingga yang memiliki ketinggian 23 m – 3,432 m dari permukaan laut, dengan puncak gunung Slamet sebagai titik tertingginya. Purbalingga yang memiliki iklim tropis yang relatif basah dengan kelembaban relatif antara 74,6 % sampai 87,6 %, suhu udara 26ºC – 31ºC, dan curah hujan rata-rata 3.938 mm, dengan bulan basah (curah hujan > 200 mm) mencapai 10 bulan, bulan lembab (CH antara 100 – 200) 2 bulan dan bulan kering (CH 0-100 mm) 0 bulan. Dengan demikian menurut typologi Zona Agroklimat dapat

diklasifikasikan pada kelas A1 menurut Oldeman atau klas A menurut Schmit-Fergusson.

Gambar 2.5.
Peta Curah Hujan Bulanan Kabupaten Purbalingga

G. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya, sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga belum dimanfaatkan secara optimal, baik untuk pengairan tanah pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya. Tetapi sungai yang memungkinkan untuk dibuat bendungan, dam dan waduk-waduk kecil lainnya yang tidak banyak mengeluarkan dana, telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk pengairan sawah, perikanan dan sebagainya.

Debit air sungai itu sendiri dalam setahunnya tidak tetap, karena debit air sungai dipengaruhi oleh curah hujan di daerah hulu. Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 (dua) macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu sungai Pekacangan, sungai Serayu dan sungai Klawing.

Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga dan berpotensi untuk pengairan yaitu :

- Sungai Ponggawa
- Sungai Tungtung Gunung
- Sungai Gemuruh
- Sungai Laban
- Sungai Kajar
- Sungai Kuning
- Sungai Lembereng
- Sungai Wotan
- Sungai Tlahap
- Sungai Gintung
- Sungai Soso
- Sungai Tambra
- Sungai Lebak
- Sungai Muli

Gambar 2.6.
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purbalingga

H. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari potensi kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031. Kawasan budidaya terdiri atas: (1) kawasan peruntukan hutan produksi; (2) kawasan peruntukan pertanian (3); kawasan peruntukan perkebunan; (4) kawasan peruntukan perikanan; (5) kawasan peruntukan pertambangan; (6) kawasan peruntukan industri; (6) kawasan peruntukan pariwisata; (8) kawasan peruntukan permukiman; dan (9) kawasan peruntukan lainnya.

(1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Purbalingga adalah kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Kawasan ini merupakan areal hutan yang dikuasai oleh Perhutani BKPH Gunung Slamet Timur yang terdiri dari 4 RPH, yaitu RPH Serang, RPH Picung, RPH Karangreja, dan RPH Tunjungmulih. Kawasan hutan produksi diperuntukkan bagi areal hutan yang diproduksi baik melalui tebangan maupun pengambilan produksi bentuk lainnya. Oleh karena itu jika terdapat areal dengan hak atas tanah dan masyarakat atau badan hukum, wajib diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria:

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 683/KPTS/Um8/1990 dan nomor 837/KPTS/UM11/1980, kriteria hutan produksi ialah kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor 125-174, di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konservasi lainnya.

Sesuai hasil analisis luasan berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2015 dan data *.shp hutan yang diberikan Kementrian LHK, luas hutan produksi di Kabupaten Purbalingga kurang lebih 3.854,91 (tiga ribu delapan ratus lima puluh empat koma sembilan satu) hektar, meliputi :

1. Hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 592.51 (lima ratus sembilan puluh dua koma lima satu) hektar yang meliputi wilayah :
    a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 70,49 (tujuh puluh koma empat sembilan) hektar;
    b. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) hektar;
    c. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 243,39 (dua ratus empat puluh tiga koma tiga sembilan) hektar;
    d. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 135,45 (seratus tiga puluh lima koma empat lima) hektar;
    e. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 20,57 (dua puluh koma lima tujuh) hektar;

f. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 45,14 (empat puluh lima koma satu empat) hektar;
g. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 9,53 (sembilan koma lima tiga) hektar; dan
h. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

2. Hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.262,39 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) hektar yang meliputi wilayah :
   a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 526,11 (lima ratus dua puluh enam koma satu satu) hektar;
   b. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 7,73 (tujuh koma tujuh tiga) hektar;
   c. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 501,10 (lima ratus satu koma satu nol) hektar;
   d. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 709,93 (tujuh ratus sembilan koma sembilan tiga) hektar;
   e. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 639,42 (enam ratus tiga puluh sembilan koma empat dua) hektar;
   f. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 80,40 (delapan puluh koma empat nol) hektar;
   g. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 67,67 (enam puluh tujuh koma enam tujuh) hektar;
   h. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 147,25 (seratus empat puluh tujuh koma dua lima) hektar; dan
   i. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 582,78 (lima ratus delapan puluh tujuh koma tujuh delapan) hektar.

Hutan produksi di luar kawasan hutan pada tanah negara yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan hak pinjam pakai atau hak milik sesuai dengan syarat subjek sebagai pemegang hak.Kawasan hutan produksi yang ada dan fisiknya masih berupa hutan, tetap dipertahankan untuk hutan produksi. Sedangkan apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi misalnya paling tidak menjadi kawasan hutan produksi dengan tebang pilih.

Diadakan penertiban penguasaan, pemeliharaan batas hutan dan pemilikan tanah serta pernbinaan dan pemanfaataannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan atau penggunaan non hutan lainnya dan sudah menjadi garapan rakyat. Bentuk penertiban dapat melalui kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ataupun bentuk-bentuk lain yang sesuai.

(2)Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 26.983,45 (dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma empat lima) hektar yang terdiri atas kawasan pertanian tanaman lahan basah dan kawasan pertanian tanaman lahan kering. Kawasan budidaya pertanian ini mempunyai kriteria sebagai unit lahan yang mempunyai tingkat kesesuaian bagi peruntukan pola usaha pertanian dan tidak dialokasikan untuk kawasan lindung.

a. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah

Kawasan peruntukan pertanian lahan basah adalah kawasan yang berupa sawah beririgasi (baik teknis, setengah teknis maupun sederhana) dan lahan sawah tadah hujan. Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 17.533,54 (tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh tiga koma lima empat) hektar yang meliputi seluruh wilayah kecamatan.

Dalam pengelolaannya, perlu pengaturan debit air irigasi, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air, perlu pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi serta mengendalikan permukiman dan budi daya lainnya. Pada lereng >8 % perlu memperhatikan pengelolaan teknis budi daya padi sawah sesuai SK Menteri Pertanian No. 175/KPTS/-RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di Daerah Aliran Sungai.

Kawasanini hanya diperuntukkan bagi tanaman padi sesuai dengan penetapan bupati. Penggunaan jenis tanaman lainnya selain padi diperkenankan apabila air tidak mencukupi atau adanya pertimbangan pencapaian target produksi optimal seperti palawija. Untuk mengoptimalkan produksi tersebut wajib berpedoman pada pola tanam yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Usaha pertanian berupa tegalan atau kebun campur, kebun sayur atau hutan rakyat pada areal yang potensial untuk

memperoleh irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah mampu menjangkau tanah yang dimilikinya, maka pemilik wajib mengembangkan untuk diubah menjadi sawah. Pembangunan gedung, perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan ini tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi.

Untuk perkampungan atau bangunan fisik yang ada tidak diperkenankan melebar atau meluas ke areal sawah yang saat ini dan dinyatakan sebagai kawasan pertanian lahan basah atau bukan sawah tetapi berpotensi untuk berkembang menjadi sawah. Perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan tanah.

Pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana, serta berfungsi utama melindungi sumber daya alam dan warisan budaya. Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan atau perdesaan) dan letak serta luas tanah dilakukan secara bertahap. Kegiatan yang diizinkan adalah pengolahan lahan dan penelitian. Jenis bangunan yang diizinkan yaitu prasarana irigasi.

Penyediaan bibit unggul oleh petani secara mandiri perlu dikembangkan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bibit unggul produksi daerah lain. Sehingga sektor partanian di Kabupaten Purbalingga akan menjadi kuat yang pada akhirnya akan menghambat berkembangnya sektor industri yang tidak berbasis potensi lokal.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering

Kawasan peruntukan pertanian lahan kering adalah kawasan yang berupa ladang dan tegalan. Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 9.449,90 (sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan koma sembilan nol) hektar yang meliputi seluruh wilayah kecamatan.

Kawasan pertanian lahan kering merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lainnya, dikecualikan untuk kegiatan industri skala menengah dan besar, dengan syarat di luar lahan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan memberi nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

Alih fungsi lahan agar disesuaikan dengan rencana rinci tata ruang dan rencana detail tata ruang.

Berdasarkan hasil identifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Purbalingga dan rencana perubahan pemanfaatan lahan bahwa luas KP2B seluas 23.000,00 (dua puluh tiga ribu) hektar, yang terbagi menjadi pertanian lahan basah seluas 17.546,52 Ha yang merupakan sawah beririgasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana) dan sawah tadah hujan, serta pertanian lahan kering seluas 5.453,48 Ha yang terdiri dari ladang dan tegalan.

Tabel 2.2.
Luas Areal Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
Kabupaten Purbalingga

No.	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Pertanian			KP2B		
		Lahan Basah	Lahan Kering	Total Luasan	Lahan Basah	Lahan Kering	Total Luasan
1	Bobotsari	903,49	179,89	1.083,39	869,20	23,24	892,44
2	Bojongsari	1.031,28	494,87	1.526,15	955,12	385,68	1.340,80
3	Bukateja	2.117,82	37,37	2.155,20	1.884,68	7,09	1.891,77
4	Kaligondang	1.172,68	468,83	1.641,51	1.145,00	397,14	1.542,15
5	Kalimanah	1.096,15	0,00	1.096,15	1.022,32	0,00	1.022,32
6	Karanganyar	1.037,17	323,08	1.360,25	966,11	154,69	1.120,80
7	Karangjambu	737,22	554,63	1.291,85	697,91	245,97	943,88
8	Karangmoncol	1.311,57	684,73	1.996,29	1.196,48	244,56	1.441,04
9	Karangreja	300,31	1.937,58	2.237,89	271,26	1.751,41	2.022,67
10	Kejobong	254,79	520,71	775,50	230,92	391,75	622,67
11	Kemangkon	2.009,20	11,61	2.020,80	1.863,24	8,31	1.871,55
12	Kertanegara	781,13	229,06	1.010,20	730,12	82,07	812,19
13	Kutasari	862,19	1.222,49	2.084,68	790,36	1.110,51	1.900,88
14	Mrebet	1.262,60	757,01	2.019,62	1.194,76	462,41	1.657,18
15	Padamara	1.055,60	2,00	1.057,59	960,96	0,00	960,96
16	Pengadegan	70,05	627,47	697,51	60,67	462,02	522,69
17	Purbalingga	448,72	6,49	455,21	407,25	5,56	412,80
18	Rembang	1.081,59	1.392,07	2.473,66	927,64	1.093,59	2.021,23
	Jumlah	**17.533,54**	**9.449,90**	**26.983,45**	**16.174,02**	**6.826,00**	**23.000,02**

Sumber : Hasil Digitasi Peta Citra Satelit dan Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW, 2017

Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka pengaturannya dengan melihat sebaran potensi sumber daya lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan kawasan budidaya pertanian. Dengan kondisi tersebut, maka perlu dikembangkan melalui program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.

Pada kawasan pertanian, untuk perluasan perkampungan bagi permukiman yang telah ada dan industri diizinkan tetapi hanya terbatas pada kawasan pertanian lahan kering.

Gambar 2.7
Peta Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
Kabupaten Purbalingga

(3) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan berupa kebun campur (agroforestri) yaitu sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan. Kebun campur menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk kawasan perkebunan adalah ketinggian <2000 m, kelerengan <40 %, dan kedalaman efektif lapisan tanah >30 cm. Disamping itu perlu peningkatan budiaya tanaman keras yang sudah ada dan perlu melakukan tindakan konservasi tanah dan air. Budidaya lain yang sudah ada diperbolehkan dengan syarat memperhatikan azas konservasi.

Kawasan dengan peruntukan perkebunan di Kabupaten Purbalingga direncanakan seluas 14.683,40 (empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga koma empat nol) hektar yang meliputi seluruh wilayah kecamatan :

1. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 482,18 (empat ratus delapan puluh dua koma satu delapan) hektar;
2. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 251,19 (dua ratus lima puluh satu koma satu sembilan) hektar;
3. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 164,24 (seratus enam puluh empat koma dua empat) hektar;
4. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 1.358,87 (seribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan tujuh) hektar;
5. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 785,03 (tujuh ratus delapan puluh lima koma nol tiga) hektar;
6. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 1.646,71 (seribu enam ratus empat puluh enam koma tujuh satu) hektar;
7. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 1.226,39 (seribu dua ratus dua puluh enam koma tiga sembilan) hektar;
8. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 679,57 (enam ratus tujuh puluh sembilan koma lima tujuh) hektar;
9. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 1.293,65 (seribu dua ratus sembilan puluh tiga koma enam lima) hektar;
10. Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 34,32 (tiga puluh empat koma tiga dua) hektar;
11. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 605,41 (enam ratus lima koma empat satu) hektar;
12. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 433,16 (empat ratus tiga puluh tiga koma satu enam) hektar;
13. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 695,81 (enam ratus sembilan puluh lima koma delapan satu) hektar;
14. Kecamatan Padamara seluas kurang lebih 1,36 (satu koma tiga enam) hektar;
15. Kecamatan Pengadegan seluas kurang lebih 2.191,81 (dua ribu seratus sembilan puluh satu koma delapan satu) hektar;
16. Kecamatan Purbalingga seluas kurang lebih 15,89 (lima belas koma delapan sembilan) hektar; dan
17. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 2.817,81 (dua ribu delapan ratus tujuh belas koma delapan satu) hektar.

(4)Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha perikanan darat, baik berupa kegiatan budidaya perikanan secara khusus maupun kegiatan budidaya perikanan secara tumpang sari dengan pertanian lahan basah beririgasi. Jenis ikan yang dikembangkan di Kabupaten Purbalingga antara lain nila merah, lele, patin, mas, gurami, bawal, tawes dan melem. Ikan-ikan tersebut selain dibudidayakan juga berkembang di perairan umum.

Kawasan yang sesuai untuk perikanan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor kelerengan <8 % dan persediaan air cukup, luas genangan dan kedalaman air. Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan tersebut. Perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Kawasan budidaya perikanan darat meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pemasaran yang tersebar di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumberdaya air untuk kegiatan budidaya perikanan.

Kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan perikanan berupa budidaya kolam yang dalam pelaksanaannya perlu dipertimbangkan keamanan dan kelestarian kolam. Kegiatan yang diizinkan di sekitar kegiatan perikanan adalah pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan. Kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan perikanan tetap dipertahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan atau pengembangan. Untuk mengembangkan kegiatan perikanan, Pemerintah Daerah mendorong dan/atau menfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan melalui pendekatan minapolitan.

(5) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki potensi bahan tambang yang bernilai ekonomis, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, yang pemanfaatannya perlu dikendalikan agar terjaga kelestariannya sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Penetapan kawasan pertambangan merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Kawasan peruntukan

pertambangan meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan panas bumi.

a. Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral

Kawasan peruntukan pertambangan mineral adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud mineral. Kawasan ini berupa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Di Kabupaten Purbalingga hanya terdapat WUP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi seluruh wilayah kecamatan, dengan potensi bahan galian mineral bukan logam dan batuan berupa : batu gamping, andesit, diorit, pasir dan batu (sirtu), tanah liat, tanah urug dan tras. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi seluruh wilayah kecamatan.

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan yang memungkinkan untuk dilakukan kegiatan pertambangan mineral non bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut :

- Bahan galian terletak di daerah dataran, perbukitan yang bergelombang atau landai kemiringan lereng antara (0% - 17%), curam (17% - 36%) hingga sangat curam
- (>36%)}, pada alur sungai dan cara pencapaian
- Lokasi tidak berada di kawasan hutan lindung;
- Lokasi tidak terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai (yang umumnya bergradien dasar sungai yang tinggi);
- Lokasi penggalian di dalam sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi;
- Jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan untuk dieksplorasi;
- Lokasi penggalian tidak terletak di daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, banjir dan sebagainya.
- Pengelolaan :
- Kegiatan penambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;

- Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
- Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat;
- Pelaku kegiatan pertambangan dapat membangun prasarana jalan khusus untuk mendukung kegiatan penambangannya setelah memperoleh izin Pemerintah Daerah;
- Untuk menghasilkan asas manfaat bagi masyarakat, serta mendorong proses pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu ditetapkan kawasan potensial utama sebagai lokasi bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Diperlukan adanya kontrol berupa peraturan, sanksi dan arahan dari pemerintah Kabupaten khususnya dalam mengatur aktivitas pertambangan dan pemanfaatannya.
- Kegiatan yang diizinkan adalah penelitian, penambangan, pengangkutan, pengolahan serta pemantauan dan pengawasan kawasan. Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjangnya, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.

b. Kawasan Peruntukan Panas Bumi

Kawasan peruntukan panas bumi berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden, dimana sebagian wilayah Kabupaten Purbalingga masuk dalam WKP tersebut.

Kawasan peruntukan panas bumi merupakan kawasan yang masuk dalam sistem panas bumi yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi. Lokasinya adalah wilayah Kabupaten Purbalingga yang masuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden meliputi :

- sebagian wilayah Kecamatan Bojongsari;
- sebagian wilayah Kecamatan Karangreja; dan
- sebagian wilayah Kecamatan Kutasari.

Kegiatan pemanfaatan sumber energi dari panas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi panas bumi, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; Kegiatan pemanfaatan sumber energi dari panas bumi dilakukan dengan prinsip konservasi dan keberlanjutan; Meminimalisir bukaan lahan, terutama kawasan lindung dan menggantinya

dengan lahan yang lain; Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan pemanfaatan potensi panas bumi, sekaligus disertai pengendalian yang ketat.

Pelaku kegiatan pemanfaatan potensi panas bumi dapat membangun prasarana jalan khusus untuk mendukung kegiatan pemanfaatan potensi panas bumi setelah memperoleh izin Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diizinkan adalah penelitian, pemanfaatan potensi panas bumi serta pemantauan dan pengawasan kawasan. Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan pemanfaatan potensi panas bumi berupa power plant pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTB) dan bangunan penunjangnya; sumur eksplorasi, sumur ekploitasi dan penunjangnya; jaringan pipa dan penunjangnya; pos pengawasan; serta kantor pengelola.

Laporan Akhir

Gambar 2.8
Peta Wilayah Usaha Pertambangan Kabupaten Purbalingga

(6)Kawasan Peruntukan Industri

Penentuan lokasi industri di Kabupaten Purbalingga diarahkan pada pengembangan lokasi industri yang dapat menampung industri kecil, menengah dan besar. Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah diarahkan untuk menunjang industri kerajinan dan industri rumah tangga terutama yang

berbasis pada potensi setempat. Sedangkan industri besar diarahkan pada kawasan-kawasan tertentu.

Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

1) Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
2) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
3) Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan; dan
4) Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Tabel 2.3.
Kriteria Pemilihan Lokasi Industri

No	Kriteria Pemilihan Lokasi	Faktor Pertimbangan
1	Jarak ke Pusat Kota	Maksimal 15 – 20 Km
2	Jarak terhadap permukiman	Minimal 2 (dua) km
3	Jaringan jalan yang melayani	Arteri primer
4	Sistem jaringan yang melayani	Jaringan listrik Jaringan telekomunikasi
5	Prasarana angkutan	Tersedia pelabuhan laut / outlet (export /import)
6	Topografi / kemiringan tanah	Maks 0 - 15 derajat
7	Jarak terhadap sungai	Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV
8	Daya dukung lahan	Sigma tanah : 0,7 – 1,0 kg/cm^2
9	Kesuburan tanah	Relatif tidak subur (non irigasi teknis)
10	Peruntukan lahan	Non Pertanian Non Permukiman Non Konservasi
11	Ketersediaan lahan	Minimal 25 Ha
12	Harga lahan	Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)
13	Orientasi lokasi	Aksessibilitas tinggi Dekat dengan potensi Tenaga kerja
14	*Multiplier Effects*	Bangkitan lalu lintas= 5,5 smp/ha/hari. Kebutuhan lahan industri dan multipliernya = 2 x luas perencanaan KI. Kebutuhan rumah .(1,5 TK ~ 1 KK) Kebutuhan Fasum – Fasos.

Sumber: Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/M/SK/1997 tentang Standar Teknis Kawasan Industri

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka untuk industri rumah tangga maupun industri kecil dan menengah memerlukan pembinaan dalam rangka pemberdayaaan kualitas usaha. Untuk industri rumah tangga/kecil dan menengah, lokasinya dapat tersebar di seluruh wilayah seperti industri kerajinan, pengolahan hasil pertanian dan makanan lainnya. Selain itu, dari industri rumah tangga/kecil tersebut diharapkan akan muncul keterkaitan ekonomi yang luas agar timbul dampak lanjutan yang positif, sehingga dapat menunjang perkembangan industri yang lebih besar. Sedangkan untuk industri besar perlu ditempatkan pada kawasan yang potensial bagi perkembangkan dalam skala luas.

Pengaturan bagi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga sebaiknya disesuaikan dengan kriteria-kriteria di atas. Rujukan yang dapat dipakai dalam menentukan klasifikasi lokasi industri di antaranya Keputusan Kepala Bapedal No. 56 tahun 1994 tentang Pedoman mengenai ukuran Dampak Penting, serta Keputusan Meneg Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Dalam pengembangan aktivitas industri di Kabupaten Purbalingga perlu ada spesifikasi. Spesifikasi ini secara makro dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap teknologi, sumberdaya dan modal seperti :

1. Lokasi di kota besar (*citylocation*) untuk kota inti adalah industri yang membutuhkan :
   - Diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah yang besar;
   - Proses produksi sangat tergantung pada fasilitas-fasilitas yang umumnya hanya terdapat dikota besar saja seperti listrik, gas, dll.;
   - Kontak dengan supplier dekat dan cepat; dan - Sarana transportasi dan komunikasi mudah didapatkan.
2. Lokasi di pinggir kota :
   - Semi-skilled atau female labor mudah diperoleh.
   - Menghindari pajak yang berat seperti halnya kalau lokasi yang terletak di kota besar;
   - Tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik;
   - Rencana ekspansi pabrik dapat dengan mudah dibuat; dan
   - Populasi tidak begitu besar sehingga masalah lingkungan tidak banyak timbul.

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 889,61 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma enam satu) hektar meliputi :

1. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) hektar;
2. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 8,75 (delapan koma tujuh lima) hektar;
3. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 138,93 (seratus tiga puluh delapan koma sembilan tiga) hektar;
4. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 67,60 (enam puluh tujuh koma enam nol) hektar;
5. Kecamatan Kalimanah seluas kurang lebih 73,51 (tujuh puluh tiga koma lima satu) hektar;
6. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
7. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) hektar;
8. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektar;
9. Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 485,03 (empat ratus delapan puluh lima koma nol tiga) hektar;
10. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 6,72 (enam koma tujuh dua) hektar;
11. Kecamatan Padamara seluas kurang lebih 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) hektar; dan
12. Kecamatan Purbalingga seluas kurang lebih 27,45 (dua puluh tujuh koma empat lima) hektar.

Selain pada kawasan peruntukan industri, untuk kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengelolaan kawasan peruntukan industri tergantung oleh jenis pengelompokkan industri yang akan dikelola. Selain itu, perlu juga disediakan sarana dan prasarana ke dan di kawasan yang akan dijadikan kawasan bagi peruntukkan industri, seperti prasarana jalan, listrik dan telepon, fasilitas air bersih untuk kegiatan industri, fasilitas pengolahan dan pembuangan limbah.

Pengelolaan limbah buangan hasil kegiatan industri (baik limbah cair atau limbah padat), yang bersifat B3 (berbahan bahaya dan beracun) harus diolah terlebih dahulu, sehingga kapasitas bahan B3 yang terkandung pada limbah berada di bawah ambang batas yang telah diperkenankan sebelum dibuang ke perairan umum.

Kegiatan industri, terutama yang menggunakan fasilitas penanaman modal (industri besar) yang berpotensi menimbulkan pencemaran tidak diperkenankan membangun industri di luar wilayah kawasan yang diperuntukkan bagi industri. Kegiatan industri menengah yang mengandung polusi dan industri besar diarahkan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri.

Pengembangan industri rumah tangga, kecil, menengah, dan pergudangan yang tidak menimbulkan polusi dan/atau limbah berbahaya dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian kawasan dan dukungan infrastruktur kawasan. Pengembangan industri melalui plasma industri yang tidak menimbulkan polusi dan/atau limbah berbahaya dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian kawasan dan dukungan infrastruktur kawasan. Pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan pergudangan yang berpotensi mencemari lingkungan disatukan di kawasan peruntukan industri dan dilengkapi dengan dengan IPAL serta kawasan sabuk hijau.

Gambar 2.9.
Peta Rencana Lokasi Industri Kabupaten Purbalingga

(7) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi (baik alam, ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya) yang dapat dikembangkan sebagai kawasan yang dapat dikunjungi. Kegiatan berwisata sebagai kebutuhan manusia bertujuan untuk mendapatkan ketenangan, rasa puas dan kesegaran kembali melalui suatu aktivitas dalam ruang dan waktu tertentu. Dengan konsep ini, maka kegiatan wisata harus memberikan pengalaman/experience baru bagi seseorang, sehingga kejenuhan yang dialami dalam keseharian akan bergeser ke kondisi yang segar/fresh baik secara fisik maupun psikis. Mengingat kegiatan wisata erat kaitannya dengan keberadaan tempat (*place*) dan ruang (*space*), maka untuk mendapatkan kesegaran dan kenikmatan dalam berwisata, seseorang seringkali harus melakukan perjalanan dalam rangka mencapai tujuan berwisata.

Sesuai dengan SK Menteri Pariwisata, Pos, don Telekornunikasi No. KM. 98/PW. 1 02/MPPT.87, SK Dirien Pariwisata KEP 18/4/11/88 tentang Kawasan Pariwisata ditetapkan dengan kriteria : keindahan alam dan panorama; masyarakat dan kebudayaan tinggi dan diminati oleh wisatawan; bangunan peninggalan budaya dan/atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

Lokasi pariwisata:

1. Pariwisata alam meliputi :
    a. Pendakian Gunung Slamet;
    b. Goa Lawa;
    c. Agrowisata Serang; dan
    d. Pariwisata alam lainnya.
2. Pariwisata budaya meliputi :
    a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang;
    b. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja yang berada di Kecamatan Purbalingga ;
    c. Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga;
    d. Situs cagar budaya yang berada di seluruh wilayah kabupaten;
    e. Desa Wisata yang berbasis budaya; dan
    f. Pariwisata budaya lainnya.
3. Pariwisata buatan meliputi :
    a. Kolam Renang Tirto Asri Walik yang berada di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari;
    b. Obyek Wisata Air Bojongsari (OWABONG) yang berada di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
    c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas yang berada di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara; dan
    d. Sanggaluri Park yang berada di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari.
    e. Bumi Perkemahan Munjul Luhur di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari;
    f. Pancuran Ciblon yang berada di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari; dan
    g. Pariwisata buatan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengelola kawasan pariwisata dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat serta bekerja sama dengan sektor swasta. Dalam hal ini pemerintah daerah berperan dalam fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana guna memberikan kenyamanan bagi para wisatawan serta melakukan promosi destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Purbalingga dalam berbagai event pariwisata dan kebudayaan.

Kegiatan yang diizinkan adalah kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, perniagaan dan pengawasan, dan pengelolaan kawasan. Jenis bangunan yang diizinkan adalah gardu pemandangan, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi dan olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi pariwisata.

Gambar 2.10.
Peta Rencana Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga

(8)Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman yaitu kawasan selain kawasan lindung sebagai tempat aktivitas manusia, sedangkan perumahan yaitu kawasan yang terdiri dari rumah-rumah dan merupakan permukiman yang sudah mempunyai fasilitas.

Kawasan permukiman dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

a. Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah ruang yang diperuntukkan bagi pengelompokan permukiman penduduk dengan dominasi kegiatan non pertanian

(pemerintahan, perdagangan dan jasa dan lain lain) untuk menampung penduduk pada saat sekarang maupun perkembangannya di masa yang akan datang. Kawasan permukiman perkotaan berupa rumah individu dan real estate.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.914,70 (enam ribu sembilan ratus empat belas koma tujuh nol) hektar, tersebar di seluruh pusat pelayanan yang terkonsentrasi di PKWp, PKL, PKLp, dan PPK.

b. Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah ruang yang diperuntukkan bagi pengelompokkan permukiman penduduk yang terikat dengan pola lingkungan pedesaan, yang dominasi usahanya adalah di bidang pertanian dan sarana prasarana pertanian.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 13.538,80 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh delapan koma delapan nol) hektar, tersebar di seluruh kabupaten di luar PKWp, PKL, PKLp, dan PPK.

Kawasan Peruntukan Permukiman ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan;
- Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
- Menghindari pemakaian tanah pertanian subur atau beririgasi teknis.

Perencanaan luas tiap kawasan permukiman harus sesuai kebutuhan dan seoptimal mungkin sehingga tidak ada lahan yang terbuang yang mengakibatkan pengurangan bagi peruntukan lahan yang lain terutama pertanian.

Penempatan kawasan sebaiknya membentuk kelompok dan tidak berhubungan langsung dengan jalan utama untuk menghindari terbentuknya lorong pada jalan utama yang berdinding bangunan di kiri-kanannya, namun kemudahan mencapai sarana angkutan umum terdekat tetap perlu diperhitungkan. Pertimbangan ini juga bertujuan menambah faktor kenyamanan dan keamanan bagi pelaku aktivitas dan pemakai jalan.

Penetapan lokasi harus mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung, untuk kawasan perlindungan setempat, sekitar mata air harus memperhatikan faktor fisik litologi, bila kesarangan dan kelulusan air tinggi diusahakan potensi air tanah yang ada tidak terganggu yang pada akhirnya kondisi sumber air yang seharusnya dilindungi tetap terjaga walaupun kawasan permukiman dikembangkan di dekatnya.

Sumur resapan sampai saat ini dianggap salah satu solusi pelestarian sumber daya air tanah yang efektif, sebab mampu menjaga kedalaman muka air tanah dangkal dan memperkecil fluktuasi di musim penghujan - musim kemarau. Selain itu adanya sumur resapan akan mengurangi limpasan air permukaan (*runoff*) ke areal yang tidak diinginkan seperti pekarangan dan jalan. Sosialisasi dan perencanaan konstruksi sumur resapan perlu di lakukan pada kawasan permukiman.

Lahan kawasan terbuka hijau perlu di siapkan dan direalisasikan untuk tujuan estetika dan kenyamanan selain sebagai paru-paru dan areal resapan. Perencanaan dan pembangunan instalasi pengolah limbah air perlu dipertimbangkan pada suatu kawasan permukiman, akan lebih baik lagi bila mampu melakukan proses daur ulang sehingga air limbah dapat dipergunakan kembali, walaupun mengalami degradasi mutu dan kegunaan langkah tersebut merupakan upaya pelestarian sumber daya air yang sangat berarti.

Kebutuhan prasarana suatu kawasan permukiman (jalan, listrik, air, telepon, sistem sanitasi dan drainase dll.) perlu dipersiapkan dengan baik dan seoptimal mungkin sehingga kawasan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan mempermudah manusia yang beraktivitas di dalamnya dan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

Perencanaan fasilitas sektor kegiatan yang akan di sediakan perlu memperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi atau potensi lokal tiap kota kecamatan, agar penyediaan fasilitas tidak menjadi optimal.

Penataan ruang tiap sektor kegiatan perlu memperhatikan tata letak dan aspek geometris sirkulasi sehingga teratur, efisien dan nyaman, pemberian izin mendirikan bangunan perlu memperhatikan keselarasan fungsi, desain, dan kebutuhan lahan.

Sistem permukiman Kabupaten Purbalingga diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1) Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan perkotaan, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan.
2) Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan dan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan.

3) Peningkatan penyediaan prasarana dan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian dan pelayanan, memperkuat keterkaitan (linkage) sehingga terwujud pemerataan pembangunan.

Sedangkan pembangunan perumahan diarahkan agar lebih dapat berbentuk pola-pola kawasan terbangun yang menyebar, tidak terkonsentrasi di sepanjang jalur jalan. Pola permukiman intensif (bangunan bertingkat) perlu dikembangkan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif. Dengan membentuk pola permukiman dan membentuk kantung-kantung unit lingkungan, akan mempermudah pengembangan struktur pelayanan fasilitas. Dengan demikian pemakaian, perawatan dan pemeliharaan prasarana yang ada dapat lebih efektif dan efisien.

Gambar 2.11.
Peta Rencana Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga

(9) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan negara dan keamanan.

Lokasi :

a. Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga yang meliputi Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkon;

b. Bataliyon Infantri 406 Candrakusuma yang berada di Kecamatan Purbalingga;
c. Instalasi militer yang berada di Kecamatan Bojongsari; dan
d. Medan Latih Militer yang berada di Kecamatan Kutasari.

Perencanaan luas tiap kawasan khusus harus sesuai kebutuhan dan seoptimal mungkin mampu melayani dinamika masyarakat yang terus berkembang. Penempatan kawasan sebaiknya disesuaikan dengan jangkauan pelayanan yang akan ditangani. Hal ini untuk memenuhi kriteria jarak dan kemudahan informasi yang berkembang antara fasilitas dengan permukiman masyarakat.

Gambar 2.12.
Peta Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Purbalingga

I. Wilayah Rawan Bencana

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 5 (lima) lokasi kawasan rawan bencana alam, meliputi kawasan rawan bencana banjir; kawasan rawan bencana tanah longsor; kawasan rawan bencana kekeringan; kawasan rawan bencana

letusan Gunung Api Slamet; dan kawasan rawan bencana angin topan.

Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 12.245 hektar meliputi:

1. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, dan Desa Jetis yang berada di Kecamatan Kemangkon;
2. Desa Toyareja, Desa Jatisaba, dan Kelurahan Bancar yang berada di Kecamatan Purbalingga;
3. Desa Lamongan, Desa Penaruban, Desa Tejasari, dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
4. Desa Galuh dan Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;
5. Desa Kaliori, Desa Margasana, dan Desa Kalijaran yang berada di Kecamatan Karanganyar;
6. Desa Bajong dan Desa Bukateja yang berada di Kecamatan Bukateja.

Wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta di bawah ini.

Gambar 2.13.
Peta Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana tanah longsor seluas 16.510 hektar, meliputi:

1. Desa Jetis, Desa Kedungbenda, dan Desa Pegandekan yang berada di Kecamatan Kemangkon;

2. Desa Sidareja dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
3. Desa Karangjambu, Desa Sirandu, Desa Sanguwatang, Desa Purbasari, Desa Jingkang, dan Desa Danasari yang berada di Kecamatan Karangjambu;
4. Desa Kaliori, Desa Kalijaran, Desa Maribaya, Desa Brakas, Desa Margasana, dan Desa Banjarkerta yang berada di Kecamatan Karanganyar;
5. Desa Kertanegara, Desa Adiarsa, Desa Darma, Desa Langkap, dan Desa Karangasem yang berada di Kecamatan Kertanegara;
6. Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;
7. Desa Banjarsari dan Desa Karangmalang yang berada di Kecamatan Bobotsari;
8. Desa Sindang dan Desa Tangkisan yang berada di Kecamatan Mrebet;
9. Desa Wlahar, Desa Tanalum, Desa Bodaskarangjati, Desa Bantarbarang, Desa Wanogara Wetan, Desa Panusupan, Desa Gunungwuled, Desa Sumampir, Desa Makam, dan Desa Karangbawang yang berada di Kecamatan Rembang; dan
10. Desa Sirau, Desa Tajug, Desa Kramat, Desa Karangsari, dan Desa Pepedan berada di Kecamatan Karangmoncol.

Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta di bawah ini.

Gambar 2.14.
Peta Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana kekeringan seluas kurang lebih 29.044 hektar meliputi:

1. Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, Desa Larangan, Desa Panunggalan, Desa Bedagas, Desa Tumanggal, Desa Tegalpingen, Desa Tetel, dan Desa Pasunggingan yang berada di Kecamatan Pengadegan;
2. Desa Langgar, Desa Timbang, Desa Nangkasawit, Desa Pandansari, Desa Pangempon, Desa Kejobong, Desa Gumiwang, Desa Krenceng, dan Desa Lamuk yang berada di Kecamatan Kejobong;
3. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Pelumutan, Desa Majatengah, dan Desa Kedunglegok yang berada di Kecamatan Kemangkon;
4. Desa Slinga, Desa Arenan, Desa Sidanegara, Desa Pagerandong, Desa Sidareja, Desa Selakambang, Desa Sinduraja, dan Desa Kaligondang yang berada di Kecamatan Kaligondang;
5. Desa Sangkanayu, Desa Sindang, Desa Campakoah, Desa Pengalusan, dan Desa Binangun yang berada di Kecamatan Mrebet;
6. Desa Kalapacung, Desa Gunungkarang, dan Desa Banjarsari yang berada di Kecamatan Bobotsari;
7. Desa Kutabawa, Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul yang berada di Kecamatan Karangreja;
8. Desa Kaliori, Desa Banjarkerta, Desa Karanganyar, Desa Kalijaran, Desa Karanggedang, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
9. Desa Langkap yang berada di Kecamatan Kertanegara;
10. Desa Bumisari, Desa Pekalongan, Desa Banjaran, Desa Metenggeng, dan Desa Pagedangan yang berada di Kecamatan Bojongsari;
11. Desa Wlahar dan Desa Bantarbarang yang berada di Kecamatan Rembang;
12. Desa Karangsari, Desa Pepedan, Desa Rajawana, Desa Tajug, Desa Pekiringan, dan Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Karangmoncol.

2.1.2. Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Purbalingga pada akhir tahun 2017 sebanyak ± 916.427 jiwa, terdiri dari 452.723 laki-laki dan 463.704 perempuan. Dengan proporsi tersebut maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Purbalingga sebesar 98 persen. Sedangkan banyaknya rumah tangga mencapai 228.973 atau rata- rata anggota per rumah tangga 4,00 orang.

Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, setiap km^2 lahan di Purbalingga rata-rata dihuni sekitar 295 rumahtangga. Dengan rata-rata setiap rumah tangga terdiri atas empat orang anggota rumahtangga, maka dalam setiap km^2 wilayah Purbalingga memiliki kepadatan penduduk sekitar 1.178 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin pada Tahun 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dan Jenis KelaminTahun 2016 - 2017

No	Kecamatan	2016			2017		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Kemangkon	27.282	28.388	55.670	27.543	28.671	56.214
2.	Bukateja	34.531	35.228	69.759	34.862	35.571	70.433
3.	Kejobong	21.884	23.193	45.077	22.096	23.427	45.523
4.	Pengadegan	18.447	19.050	37.497	18.631	19.244	37.875
5.	Kaligondang	28.446	30.672	59.118	28.714	30.973	59.687
6.	Purbalingga	28.861	30.483	59.344	29.119	30.768	59.887
7.	Kalimanah	26.469	27.174	53.643	26.701	27.415	54.116
8.	Padamara	20.858	21.867	42.725	21.034	22.060	43.094
9.	Kutasari	29.270	29.562	58.832	29.516	29.818	59.334
10.	Bojongsari	29.896	29.567	59.463	30.150	29.825	59.975
11.	Mrebet	34.569	35.259	69.828	34.907	35.616	70.523
12.	Bobotsari	24.670	25.063	49.733	24.889	25.295	50.184
13.	Karangreja	20.884	20.969	41.853	21.092	21.186	42.278
14.	Karangjambu	12.613	12.390	25.003	12.740	12.529	25.269
15.	Karanganyar	17.968	18.606	36.574	18.165	18.260	36.425
16.	Kertanegara	15.636	16.016	31.652	15.809	16.217	32.026
17.	Karangmoncol	26.014	26.168	52.182	26.312	26.505	52.817
18.	Rembang	30.121	29.979	60.100	30.443	30.324	60.767
	Jumlah	448.419	459.088	907.507	452.723	463.704	916.427

Sumber: BPS.2018

Selanjutnya, berdasarkan data BPS, selama kurun waktu tahun 2017 dan tahun 2018,pertambahan penduduk Purbalingga mengalami perlambatan, dari 0,983%pada tahun 2017 menjadi 0,957%pada tahun 2018.Bila dilihat dari Angka kelahiran dan kematian (CBR dan CDR) dari tahun ke tahun mengalami pergerakan yang sulit untuk diterka, sepanjang tahun 2017 s/d 2018 angka kelahiran (CBR) berada pada posisi yang seragam yaitu 15,09%, Crude Birth Ratio (CBR)menunjukkan banyaknya kelahiran per1.000 penduduk ada sekitar 15 kelahiran dalam 1.000 penduduk. Adapun Crude DeathRatio (CDR) menunjukkan banyaknyakematian per 1.000 penduduk. CBRPurbalingga sebanyak 6,55%.

Dari tahun 2017 hingga 2018, ketergantungan penduduk yang tidak/belum produktif sedikit menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan penduduk yang berusia produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Pada tahun 2017 rasio ketergantungan penduduk sebesar 52.20%, dari setiap seratus penduduk berusia produktif, harus menanggung sekitar 52,2 penduduk yang tidak produktif. Pada tahun 2018 yang ditanggung masih berada di angka 52.12%orang. Adapun Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada Tahun 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kelompok Umur dan Jenis KelaminTahun 2017

No	Kecamatan	2017		
		L	P	Jumlah
1	0 – 4	40.513	38.510	79.023
2	5 – 9	39.939	37.853	77.792
3	10 – 14	38.063	36.521	74.584
4	15 – 19	37.465	36.354	73.819
5	20 – 24	33.788	34.637	68.425
6	25 – 29	29.956	32.069	62.025
7	30 – 34	30.591	32.973	63.564
8	35 – 39	31.390	33.637	65.027
9	40 – 44	29.901	31.185	61.086
10	45 – 49	28.694	30.546	59.240
11	50 – 54	26.456	29.778	56.234
12	55 – 59	24.367	26.404	50.771
13	60 – 64	22.999	21.683	44.682
14	65+	38.601	41.554	80.155
	Jumlah	**452.723**	**463.704**	**916.427**

Sumber : BPS. 2018

Dari tabel diatas, usia penduduk belum produktif (0-14 tahun) sejumlah 231.399 orang, penduduk tidak produktif lagi (65 tahun+) sejumlah 88.155 orang, dan penduduk produktif (15-64 tahun) sejumlah 604.837. sehingga tahun 2017, ketergantungan penduduk yang tidak/ belum produktif sedikit menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan penduduk yang berusia produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Pada tahun 2017, dari setiap 100 (seratus) penduduk berusia produktif, harus menanggung sekitar 51 penduduk yang tidak produktif.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, pada saat ini menggunakan tahun dasar 2010.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikitbergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Walaupun demikian kategori Pertanian masih memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga 2017 peranannya masih bertengger di 27,27 persen. Peranan terbesar selanjutnya di isi oleh kategori C, Industri Pengolahan yang berada pada kisaran 26,85 persen. Peranan terendah terjadi pada kategori D, Pengadaan Listrik danGas hingga 2017 hanya memberikan peran sebesar 0,05 persen.

Tabel 2.6.
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha harga berlaku
Kabupaten Purbalingga (persen) Tahun 2013 - 2017

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.83	29.45	29.28	29.53	27,27
B.	Pertambangan dan Penggalian	4.63	4.80	5.04	4.86	4,62
C.	Industri Pengolahan	24.81	25.60	25.86	26.33	26,85
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.12	0.11	0.11	0.10	0,10
F.	Konstruksi	5.72	5.72	5.72	5.76	5,94
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.27	12.70	12.41	12.41	12,65
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.98	3.06	3.19	3.15	3,32
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.21	2.24	2.25	2.36	2,33
J.	Informasi dan Komunikasi	1.64	1.58	1.52	1.53	1,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.25	2.17	2.19	2.29	2,30
L.	Real Estate	1.04	1.04	1.05	1.06	1,06
M,N.	Jasa Perusahaan	0.16	0.16	0.16	0.17	0,18
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.98	2.87	2.84	2.84	2,79
P.	Jasa Pendidikan	5.57	5.60	5.52	5.67	5,89
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.97	1.02	1.02	1.05	1,08
R,S,T,U.	Jasa lainnya	1.78	1.84	1.77	1.86	1,90
Produk Domestik Regional Bruto		**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber :BPS. 2013-2017

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2017 mencapai 5,12 persen,sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan pertumbuhan 4,78 persen. Pertumbuhanekonomi tertinggi pada lapangan usaha informasi dan

komunikasi sebesar 12,39 persen.Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016. Secara lebih jelas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana dalam tableberikut ini.

Tabel 2.7.
Produk Domestik Regional Brutodan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2013- 2017

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.54	1.03	5.03	2.53	2.53
B.	Pertambangan dan Penggalian	6.02	1.58	0.55	0.22	0.22
C.	Industri Pengolahan	7.46	7.80	6.01	5.64	5.64
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	8.26	6.39	2.35	6.75	6.75
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.25	3.44	1.62	2.10	6.25
F.	Konstruksi	4.86	4.41	6.01	7.63	8.43
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.89	4.73	4.19	4.91	6.18
H.	Transportasi dan Pergudangan	8.94	8.45	8.37	5.56	6.31
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.19	7.59	6.46	5.79	6.46
J.	Informasi dan Komunikasi	5.98	12.69	8.77	8.35	12.39
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.98	3.68	7.50	8.97	4.84
L.	Real Estate	9.59	7.09	7.52	6.73	6.08
M,N.	Jasa Perusahaan	12.88	7.60	8.34	10.42	8.74
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.29	0.75	5.30	2.39	1.97
P.	Jasa Pendidikan	9.36	9.16	7.56	7.70	8.06
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.59	11.28	6.53	9.70	8.75
R,S,T,U.	Jasa lainnya	9.23	8.53	3.23	8.53	8.70
Produk Domestik Regional Bruto		**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber :BPS. 2013-2017

Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu kategori usaha jasa kesehatan dan kegiatan socialsebesar 8,75 persen, diikuti kategori jasa perusahaan tumbuh sebesar 8,74 persen, jasa lainnya tumbuh sebesar 8,70 Persen, konstruksi tumbuh sebesar 8,43 persen, jasa pendidikan tumbuh sebesar 8,06 persen, pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 6,75 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 6,46 persen, transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 6,31 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 6,25 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan sebesar 6,18 persen, real estate tumbuh sebesar 6,08 persen, industri pengolahan tumbuh sebesar 5,64 persen, diikuti lapangan usaha yang lain yangmengalami pertumbuhan dibawah 5 persen.

B. PDRB Perkapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggaldi daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar hargaberlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.8.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rp.) 2014 – 2017

TAHUN	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	Pertahun	Perbulan	Pertahun	Perbulan
2014	18.600.997	1.550.083	14.985.217	1.248.768
2015	20.401.403	1.700.117	15.645.382	1.303.782
2016	21.999.964	1.833.330	16.315.632	1.359.636
2017	23.424.518	1.952.043	16.983.659	1.415.305

Sumber :BPS. 2014-2017

Pada tahun 2017, PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 23.424.518 rupiah atau sebesar 1.952.518 rupiah dalam satu bulan, dengan pertumbuhan sebesar 6,08 persen. Selama kurun waktu empat tahun pertumbuhan PDRB perkapita terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 8,82 persen, dan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2017 sebesar 6,08 persen. Jika diperhitungkan dengan harga konstan dari tahun 2014 - 2017, pertumbuhan pendapatan perkapita berada pada kisaran 3 hingga 5 persen setiap tahunnya. Hal ini berarti pada kenyataannnya masyarakat Purbalingga dalam kurun waktu empat tahun terakhir pendapatannya meningkat rata-rata kurang dari 5 persen setiap tahun. Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku yang memperhatikan adanya perubahan harga (inflasi), rata-rata setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pendapatan perkapita bertambah sekitar 6 hingga 9 persen.

C. Laju Inflasi

Perkembangan inflasi tahun kalender setiap tahunnya, tren perubahan yang terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah serta nasional menunjukkan pola yang hampir sama. Pada tahun 2017 inflasi Kabupaten Purbalingga berada pada 3,72 persen diatas inflasi provinsi dan nasional yang masing-masing sebesar 3,61 dan 3,71 persen. Sedangkan inflasi Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar 3,01 persen, sedikit lebih tinggi dari inflasi provinsi sebesar 2,82 persen, tetapi lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,13 persen.

Sumber: BPS, 2018

Gambar 2.17.
Laju Inflasi Tahun Kalender Kabupaten Pubalingga Tahun 2012-2018

D. Penduduk Miskin dan IPM

1. Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebesar 15,62 persen, menurun dari tahun 2017 sebesar 18,80 persen,walaupun masih lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar 11,32 persen. Kinerja penurunan persentase penduduk miskin tahun 2015 sampai dengan 2018 di Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Gambar 2.18.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 –2018

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebesar 144.160 jiwa (15,62 persen), dengan garis kemiskinan sebesar Rp 324.735,- jauh menurun dibandingkan dengan jumlah dan perentase kemiskinan tahun 2017 sebesar 171.880 jiwa (18,80 persen). Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 176.490 jiwa (19,70 persen) maka jumlah penduduk miskin telah menurun sebesar 4,08 persen.Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 11,32 persen.Kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9.
Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, 2014 -2018

Karakteristik Kemiskinan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penduduk miskin (ribu)	176,04	176,49	171,78	171,88	144.160
Persentase penduduk miskin (%)	19,75	19,70	18,98	18,80	15,62
Garis kemiskinan (Rp/kp/bln)	275.022	283.366	301.862	313.343	324.735

Sumber : BPS,2013-2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga terus mengalami penurunan yang signifikan. Capaian penurunan persentase kemiskinan Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 3,18 persen merupakan prestasi penurunan kemiskinan kedua tertinggi se-Jawa Tengah setelah Kabupaten Banyumas sebesar 3,55 persen. Dengan besarnya penurunan persentase kemiskinan, peringkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga satu tingkat lebih baik dari capaian tahun 2018. Pada tahun 2018 Kabupaten Purbalingga menempati peringkat yang ke 30 dari 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah, lebih baik dari peringkat tahun 2017 di posisi ke – 31 dari 35 kabupaten / kota. Upaya penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan melalui berbagai program yang mengarah pada pemenuhan hak dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi serta pangan; perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; yang pada prinsipnya merupakan upaya mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan penduduk miskin. Diharapkan dengan adanya program-program yang *pro poor* dapat mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin secara signifikan.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. IPM Purbalingga pada rentang 60 hingga 70, yang artinya berada pada klasifikasi sedang. Meskipun begitu, IPM Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2018. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Purbalingga mencapai 67,03 meningkat menjadi 68,41 pada tahun 2018. Perkembangan IPM Kabupaten Purbalingga dan kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

Tabel 2.10.
Nilai IPM Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2015-2018

Kabupaten	Nilai IPM			
	2015	2016	2017	2018
Cilacap	67,77	68,60	68,90	69,56
Banyumas	69,89	70,49	70,75	71,30
Purbalingga	67,03	67,48	67,72	68,41
Banjarnegara	64,73	65,52	65,86	66,54
Kebumen	66,87	67,41	68,29	68,80
Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,12

Sumber: BPS, 2016-2019

Nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2018 tercatat 68,41. Walaupun nilai ini masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar71,12bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPM Kabupaten Purbalingga masih berada diatas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih dibawah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

Kualitas kesehatan masyarakat Purbalingga secara bertahap terus mengalami peningkatan. Berdasarkan capaian usia harapan hidup Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 72.81 pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 72.98.

Mutu pendidikan penduduk Kabupaten Purbalingga juga mengalami peningkatan apabila dilihat berdasarkan meningkatnya capaian kinerja RLS dari 6,85 tahun menjadi 7,00 tahun. Secara rata-rata penduduk Purbalingga telah dapat mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP/sederajat. Meskipun RLS hanya sampai SLTP namun anak-anak pada awal masa pendidikan yaitu usia 7 tahun memiliki harapan bersekolah lebih lama. Hal ini ditunjukkan

dengan capaian HLS Kabupaten Ppurbalingga pada tahun 2015 sebesar 11,78 dan tahun 2018 sebesar 11,95.

Aspek ekonomi pada IPM diukur dengan menggunakan indikator pengeluaran perkapita penduduk, yang mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar Rp 8,938 juta menjadi Rp 9,786 juta rupiah per kapita per tahun pada tahun 2018.

Perkembangan indikator komposit IPM Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.11.
Komponen IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018

Komponen IPM	2015	2016	2017	2018*
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,81	72,86	72,91	72,98
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,78	11,93	11,94	11,95
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,85	6,86	6,87	7,00
Pengeluaran perkapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah PPP)	8.938	9.159	9.340	9.786

Sumber :BPS, 2016-2019

E. Angka Melek Huruf

Melek Huruf adalah kondisi dimana orang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab/hijaiyah atau huruf lainnya (contoh huruf jawa, kanji). Yang dimaksud kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subyek dan predikat.

Angka Melek Huruf menunjukkan persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi ini berkebalikan dengan angka buta huruf. Semakin tinggi angka melek huruf maka semakin rendah angka buta hurufnya.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa angka melek huruf penduduk berumur 15 tahun ke atas Kabupaten Purbalingga tahun 2017 dan 2018.

Tabel 2.12.
Persentase Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2018

Angka Melek Huruf	2017			2018		
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Buta Huruf	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Buta Huruf
Laki-laki	94,84	67,01	4,69	97,24	70,59	2,33
Perempuan	90,76	66,41	8,58	91,76	67,72	7,3

Sumber :BPS, 2018

Kemampuan membaca huruf Latin penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 untuk laki-laki sebesar 94,84 persen dan perempuan 90,76 dengan persentase buta huruf untuk laki-laki sebesar 4,69 persen dan perempuan 8,58 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 presentase angka melek huruf di Kabupaten Purbalingga meningkat lebih baik menjadi untuk laki-laki sebesar 97,24 persen dan perempuan 91,76 dengan persentase buta huruf untuk laki-laki sebesar 2,33 persen dan perempuan 7,3 persen Di samping itu, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa angka melek huruf penduduk perempuan lebih rendah dari angka melek huruf penduduk laki-laki. Hal ini sejalan dengan tingkat pendidikan laki-laki yang secara umum lebih baik dari perempuan yaitu persentase penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikannya di jenjang SD ke atas yang lebih banyak dari penduduk perempuan.

F. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran *antropometri* yang menggunakan indeks Berat Badan dan Tinggi Badan (BB/TB).Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2012-2018 cenderung fluktuatif, dari 0,11 % pada tahun 2012, naik lagi menjadi 0,81 % pada tahun 2013, dan mengalami penurunan menjadi 0,13 % pada tahun 2014, serta 0,11 % pada tahun 2015. Pada tahun 2016 sebesar 0,10 % (58 kasus)dan pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 0,08 % (58 kasus). Pada tahun 2018, prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,08 persen (56 kasus) dan semuanya telah mendapatkan penanganan. Penurunan tersebut terjadi karena berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui pemberian makanan tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk. Sementara, untu balita gizi kurang jumlahnya sedikit lebih banyak, namun

cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, terdapat 3,94 persen balita gizi kurang dan terus menurun menjadi 3,09 persen pada tahun 2018 atau 2.154 anak.

Gambar 2.19.
Tren Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Tahun 2010 - 2018

G. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 s/d 2017 selalu cenderung mengalami kenaikan. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2017 TPAK Purbalingga sebesar 71,68 ini berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas tersedia 71 orang yang siap bekerja.Dan untuk tahun 2018 cenderung mengalami penurunan yang pada tahun 2017 sebesar 71.68 menjadi 68.56 berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas tersedia 68 orang yang siap bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 s/d 2018 sebagaimana dalam grafik berikut ini.

Gambar 2.20.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Purbalingga, 2015 -2018

H. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran secara tidak langsung dapat memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kesehatan ekonomi suatu negara, karena tingkat pengangguran merupakan persentase individu yang ingin bekerja dan belum memiliki pekerjaan. Capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebesar 4,84 persen dan pada tahun 2017 sebesar 5,33 persen. Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Purbalingga sebesar 6,06 persen.

Gambar 2.21.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010-2018

Apabila dipilah, capaian TPT Kabupaten Purbalingga didominasi oleh pengangguran laki – laki. Pada tahun 2018, pengangguran laki – laki sebesar 6,79 persen, sedikit meningkat dari tahun 2017 sebesar 6,30 persen.

Gambar 2.22.
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017 dan 2018

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Oleh karena itu, indikator TPT selalu diumumkan setiap tahun pada Pidato Presiden tanggal 16 Agustus sebagai bukti kinerja Pemerintah Indonesia. Capaian TPT Kabupaten Purbalingga sebesar 6,06 persen yang berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas (angkatan kerja) ada sekitar 6 orang yang menganggur.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka ini dihitung berdasarkan perbandingan antara anak yang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk umur yang seharusnya anak duduk pada tingkat pendidikan tertentu. APK Kabupaten Purbalingga menurut tingkat pendidikan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	2015	2016	2017	2018
SD/MI	118,77	112,87	104,69	110,88
SMP/MTs	85,08	90,74	92,69	92,87

Sumber :BPS, 2018

Pada kurun waktu empat tahun terakhir, APK SD mengalami penurunan dari 118,77 pada tahun 2015, menurun menjadi 112,87 pada tahun 2016, menurun menjadi 104,69 pada tahun 2017 dan menjadi 110,88 pada tahun 2018. APK SD berada diatas 100 persen yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SD lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kelompok umur 7-12 tahun.Hal ini disebabkan adanya siswa yang berumur diatas 12 tahun tetapi saat ini masih bersekolah di tingkat SD dikarenakan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Selain itu, juga adanya siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diumur yang lebih muda (kurang dari 7 tahun).

Untuk APK SMP selama empat tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 85,08pada tahun 2015 menjadi 90,74 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 92,69 serta pada tahun 2018 menjadi 92,87.

Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tahun 2017 dan 2018, APK SD, dan SMP untuk laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah di seluruh janjang pendidikan bagi kaum laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

Tabel 2.14.
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan 2018

Tingkat Pendidikan	2017			2018		
	L	P	Jml	L	P	Jml
SD	101,18	108,26	104,69	114,38	107,35	110,88
SMP	98,43	87,16	92,69	85,82	99,80	92,87

Sumber : BPS, 2018

b. Angka Partisipasi Murni

Ukuran lainyang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan proporsi anak sekolah di suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka ini dihitung dengan perbandingan antara jumlah siswaumur tertentu pada pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok umur pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.15.
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Purbalingga, 2015-2018

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	2015	2016	2017	2018
SD	98,06	97,01	95,51	95,15
SMP	79,50	75,80	78,91	78,23

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2018, BPS Kebudayaan Kab. Purbalingga, 2018

Pada tabel di atas terlihat bahwa APM Kabupaten Purbalingga tahun 2018 untuk tingkat Sekolah Dasar adalah 95,15 dan untuk SMP adalah 78,23. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa untuk APM SD menunjukkan bahwa sebanyak 95,15 persen penduduk usia 7-12 tahunyang saat ini sedang bersekolah di SD. Hal ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Purbalingga sudah tepat waktu dalam menyekolahkan anak-anaknya ke SD setelah anak berumur 7 tahun. APM SMP sebesar 78,23 artinya ada sebanyak 78,23 persen penduduk usia 13-15 tahun yang saat ini sedang sekolah di SMP.Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 dan 2018 sebagaiman tabel berikut ini.

Tabel 2.16.
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan 2018

Tingkat Pendidikan	2017			2018		
	L	P	Jml	L	P	Jml
SD	95,23	95,80	95,51	94,98	95,33	95,15
SMP	80,74	77,14	78,91	72,71	83,66	78,23

Sumber : BPS, 2018

Pada tingkat pendidikan SD dan SMP tahun 2018, APM SD perempuan 95,33 menunjukkan bahwa dari seluruh perempuan 7-12 tahun, yang sedang bersekolah di tingkat SD sebanyak 95,33 persen. Sedangkan laki-laki yang berumur 7-12 tahun sebanyak 94,98 persen sedang bersekolah di tingkat SD. APM SMP perempuan 83,66 menunjukkan bahwa 83,66 persen dari perempuan umur 13-15 tahun sedang bersekolah di SMP, sementara 72,71 persen laki-laki umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SMP.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator lain untuk mengetahui tingkat pendidikan adalah angka partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya. APS untuk kelompok umur 7–12 tahun diperoleh dari persentase jumlah penduduk umur 7–12 tahun yang masih bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk umur 7–12 tahun. Demikian juga untuk kelompok umur sekolah berikutnya.

APS Kabupaten Purbalingga tahun 2018 untuk kelompok umur 7–12 tahun tercatat 99,14. Ini artinya bahwa pada jenjang sekolah dasar (umur 7-12 tahun) terdapat sebanyak 99,14 persen penduduknya sedang bersekolah atau dengan kata lain masih terdapat 0,43 persen penduduk umur 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Untuk kelompok umur 13-15 tahun terdapat 94,24 persen penduduknya yang statusnya masih atau sedang bersekolah, sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun ada sebanyak 59,45 persen penduduknya yang tidak sedang bersekolah. Ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu belum pernah bersekolah atau sudah tidak bersekolah lagi. Semakin tinggi kelompok umur sekolah maka partisipasi sekolahnya makin kecil.

Tabel 2.17.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2018

Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
7-12 tahun	98,74	99,14	98,87	100	98,81	99,57
13-15 tahun	91,80	89,68	95,10	98,72	93,48	94,24
16-18 tahun	60,91	55,31	61,04	64,65	60,97	59,45

Sumber : BPS. 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum pada kelompok umur sekolah 7-12 tahun dan 16-18 tahun, APS tahun 2017 sedikit lebih tinggi dari APS tahun 2016 atau tingkat partisipasi sekolahnya mengalami kenaikan. Sementara itu pada kelompok umur sekolah 13-15 tahun, APS 2017 mengalami sedikit penurunan dibandingkan APS 2016 pada kelompok umur sekolah yang bersesuaian.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, pola yang digambarkan antara penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan pada tahun 2017 lebih rendah dari penduduk laki-laki di kelompok umur sekolah 7-12 tahun dan 16-18 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun, partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada kelompok umur 7-12 tahun, partisipasi sekolah laki-laki 98,74 dan partisipasi sekolah perempuan 98,87. Partisipasi sekolah untuk laki-laki di kelompok umur 13-15 tahun sebesar 91,80, sedangkan partisipasi sekolah untuk perempuan sebesar 95,10. Sementara itu, di kelompok umur 16-18 tahun partisipasi sekolah laki-laki sebesar 60,91 dan partisipasi sekolah perempuan sebesar 61,04.

d. Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah.

Sejalannya dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar tingkat SD/MI,dan SMP/MTs sedikit mengalami perubahan. Pada jenjang SD/MI pada tahun 2014 tersedia SD / MI sebanyak 647 unit dan pada tahun 2018 sedikit meningkat menjadi berjumlah 650 unit. Sedangkan pada jenjang SMP / MTs pada tahun 2014 terdapat 114 unit sekolah pada tahun 2018 menjadi 117 unit sekolah karena terdapat pendirian beberapa sekolah baru.

Tabel 2.18.
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah SD/MI	647	644	647	650	650
2	Jumlah SMP/MTs	114	115	114	117	117
3	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 th	91.990	91.247	91.247	91.401	93.445
4	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 th	45.473	44.510	44.510	44.202	45.899

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2019

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah sebesar 70,33 dan pada tahun 2018 rasio tersebut sedikit mengalami penurunan menjadi 69.56. Kondisi tersebut menunjukan bahwa rasio ketersediaan SD/MI di Kabupaten Purbalingga cukup memadai. Untuk SMP/MTs, dalam kurun waktu 2014 – 2018 mengalami peningkatan dari 24,87 menjadi 25,49per 10.000 siswa. Data rasio ketersediaan sekolah selengkapnya tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Rasio Ketersediaan SekolahTerhadap 10.000 Jumlah PendudukUsia Sekolah SD/MI dan SMP/MTsKabupaten Purbalingga Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio SD/MI per 10.000 penduduk Usia 7-12 tahun	70,72	70,23	70,91	71,11	69,56
2	Rasio SMP/MTs per 10.000 penduduk Usia 13-15 tahun	24,87	25,29	25,61	26,47	25,49

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2019

e. Rasio Guru terhadap Siswa

Rasio guru terhadap siswa adalah jumlah guru per 10.000 jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal siswa untuk satu guru agar tercapai proses pembelajaran yang berkualias.

Pada periode waktu tahun 2013-2018, rasio guru terhadap siswa SD/MI di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 15,56 menjadi 15,85, yang menggambarkan ketersediaan guru telah relatif memenuhi kondisi ideal. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs tahun 2018 rasio guru dan siswa sebesar 17,81. Secara lebih lengkap jumlah guru dan siswa pada jenjang pendidikan dasar Kabupaten Purbalingga tahun 2013-2018 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.20.
Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	**SD/MI**						
	Jumlah guru	6.317	6.883	5.868	5.839	5.291	6.309
	Jumlah siswa	98,306	91,069	91,990	91,247	99.292	99.997
	Rasio	15,56	13,23	15,68	15,63	18,77	15,85
II	**SMP/MTs**						
	Jumlah guru	2.343	2.407	2.436	2.416	2.263	2.511
	Jumlah siswa	45.818	45.333	45.381	44.672	44.487	44.724
	Rasio	19,56	18,83	18,63	18,49	19,66	17,81

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2019

f. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak Indonesia, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan pendidikan anak sejak dini sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi tarpantau dan terbina. PAUD mendidik anak menjadi insan yang berkualitas di kemudian hari.

Keberhasilan kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. Capaian APK PAUD Kabupaten Purbalingga tahun 2012 – 2018 fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2012 capaian APK PAUD sebesar 51,48 persen, dan meningkat menjadi 58,32 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 77,03 dan pada tahun 2018 menjadi 57,86. Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Prubalingga dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2019

Gambar 2.23.
Angka Partisipasi Kasar PAUDKabupaten Purbalingga
Tahun 2012 – 2018

g. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasarpada tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuasi. Pada jenjang SD/MI, tahun 2014 sebesar 0,22 persen dan menurun menjadi 0,07persen pada tahun 2018. Selanjutnya untuk jenjang SMP/MTs, angka putus sekolah pada tahun 2014 sebesar 0,91 persen terus menurun menjadi 0,46 persen pada tahun 2018 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.21.
Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 – 2018

No	Jenjang	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI/SDLB	0,22	0,24	0,32	0,03	0,07
2	SMP/MTs/SMPLB	0,91	0,61	0,44	0,48	0,46

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2018

h. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan tungkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Kelulusan jenjang pendidikan dasar pada tahun 2014 – 2018 mengalami trend yang membaik, bahkan pada tahun 2018 angka kelulusan mancapai 100 peren.

Tabel 2.22.
Angka Kelulusan Pendidikan Dasar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 – 2018

No	Jenjang	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	SD/MI/SDLB	99,97	99,99	99,70	100	100		
2	SMP/MTs/SMPLB	99,99	99,75	99,45	99,72	100		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2019

i. Standar Pelayanan Minimal

Mendasarkan Pasal 18 dan pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaskanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Adapun pelayanan dasar dimaksud adalah Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum;Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; serta Sosial. Sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2108 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar tingkat kabupaten/ kota untuk Urusan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Mengingat bahwa saat ini rumusan teknis SPM sesuai Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 100 Tahun 2018 masih dalam proses perumusan pada masing – masing urusan wajib pelayanan dasar, maka capaian indikator SPM Kabupaten Purbalingga tahun 2017 dan 2018 menggunakan pendekatan pada indikator RPJMD/RKPD dengan capaian bidang pendidikan sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Capaian SPM	
		2017	2018
1	Pendidik SD/SDLB/MI berkualifikasi S1 / D4 (%)	97.04	97.45
2	Pendidik SMP/SMPLB/MTs berkualifikasi S1/D4 (%)	95.85	97.61
3	Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik (%)	57.65	60.29
4	Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik (%)	50.45	57.51
5	SD/SDLB/MI terakreditasi (%)	47.44	97.25
6	SMP/SMPLB/MTs terakreditasi (%)	45.41	97.41
7	SD/MI melaksanakan MBS dengan baik (%)	98.85	100
8	SMP/SMPLB/MTs melaksanakan MBS dengan baik (%)	99.34	100
9	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI (%)	0.03	0.07
10	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs (%)	0.48	0.47
11	Angka Kelulusan SD/SDLB/MI (%)	100	100
12	Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs (%)	100	100
13	Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar	100	100
14	APK SD/SDLB/MI/Paket A	99.92	107.01
15	APM SD/SDLB/MI/Paket A	101.97	94.37
16	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	102.05	97.44
17	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	101.70	72.03
18	Angka Kelulusan Kesetaraan Paket A, B, C (jumlah)	650	590
19	Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 (%)	156.53	58.77
20	Pendidik PAUD bersertifikat pendidik (%)	30.58	37.29
21	APK PAUD/TK (3 – 6 tahun)	77.03	57.86
22	Lembaga PAUD terakreditas (%)	45.14	47.21

j. Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* / SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainabale Development Goals* (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 10 tahun ke depan hingga tahun 2030. Sesuai Peratuean Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan

terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO). Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen SDGsjuga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal dan dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. Adapun 17 *global goals* dari SDGs adalah sebagai berikut :

1. **Tanpa Kemiskinan**

   Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. **Tanpa Kelaparan**

   Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. **Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan**

   Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. **Pendidikan Berkualitas**

   Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. **Kesetaraan Gender**

   Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. **Air Bersih dan Sanitasi**

   Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. **Energi Bersih dan Terjangkau**

   Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak**

   Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

   Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. **Mengurangi Kesenjangan**

    Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. **Keberlanjutan Kota dan Komunitas**

    Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.

12. **Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab**

    Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. **Aksi Terhadap Iklim**

    Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. **Kehidupan Bawah Laut**

    Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. **Kehidupan di Darat**

    Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. **Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian**

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Segala upaya dan program yang telah diimplementasikan pada urusan pendidikan dan dengan capaian kinerja bidang pendidikan, telah mendukung dan sinkron / sejalan dengan Tujuan ke – 4 TPB/MDGs yakni Pendidikan Berkualitas yakni Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua, dengan indikator sebagai berikut :

a. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
b. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat
d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat
e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat
f. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
g. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat;
h. Angka Melek Huruf

2. Kesehatan

a. Kasus/ Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013angka kematian ibu sebesar 170,90 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2018 menurun drastis menjadi 75.05 per 100.000 kelahiran hidup. Secara lebih jelas grafik angka kematian ibu di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2010 sampai dengan 2018 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Gambar 2.24.
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Purbalingga
dalam 5 tahunterakhir 2010 – 2018

Kasus kematian Ibu tertinggi pada tahun 2018 terdapat di Puskesmas Karanganyar dan Karangmoncol masing-masing dengan 2 kasus kematian dan terendah di Puskesmas Bojongsari, Serayu Larangan, Kemangkon, Karangtengah, Pengadegan dan Purbalingga masing – masing dengan 1 kasus kematian sedangkan di Puskesmas Kutawis, Kejobong, Kaligondang, Kalikajar, Bukateja, Bojong, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu dan Rembang masing-masing 0 kasus (tidak ada kasus kematian).

Sedangkan waktu kejadian kematian ibu maternal terjadi pada saat hamil sejumlah 3 kasus, saat bersalin sejumlah 5 kasus dan saat nifas sejumlah 3 kasus. Grafik kasus kematian ibu di Puskesmas wilayah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam grafik berikut ini.

Gambar 2.25.
Jumlah Kematian Ibumenurut Puskesmas
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

b. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA)

Perkembangan AKB di Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2010 – 2018 terus mengalami perbaikan. AKB di Kabupaten Purbalingga tahun 2010 sebesar 11,20 per 1.000 kelahiran hidup dan angka ini mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2018 menjadi sebanyak 7,51 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian, angka tersebut masih cukup tinggi disebabkan antara lain kehamilan resiko tinggi, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil sehingga menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan *konginental* pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Selanjutnya Angka Kematian Balita (AKBA) mengalami perkembangan dan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2010, capaian AKBA sebesar 1,84 per 1.000 kelahiran hidup, dan sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi 1,77 per 1.000 kelahiran hidup. Tren Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita dalam sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Purbalingga sebagaimana gambar di bawah ini.

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga. 2019

Gambar 2.26.
Tren Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi 2010 – 2018

c. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (AKN) merupakan jumlah kematian bayi umur kurang dari 28 hari (0-28 hari) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKN menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu

dan anak termasuk *antenatal care*, pertolongan persalinan, dan *postnatal* ibu hamil. Semakin tinggi angka kematian neonatal, berarti semakin rendah tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sebesar 5,58 (80 kasus) per 1.000 kelahiran hidup dan dibanding dengan tahun 2016 Angka Kematian Neonatal mengalami penurunan dari 5,86 (84 kasus) per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian neonatal tertinggi terdapat di Puskesmas Kemangkon sebanyak 10 kasus, sedang terendah adalah Puskesmas Bojong dengan 0 kasus.

d. Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan

Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat dengan melihat persentase keluhan kesehatan yang dialami pendudukpada satu bulan sebelum pencacahan atau angka kesakitan. Untuk seseorang yang mengalami dua keluhan pada saat yang bersamaan dihitung satu untuk masing-masing keluhan. Pada tahun 2017, penduduk dengan keluhan kesehatan sebesar 36,26 persen. Apabila dipilah, penduduk perempuan mengalami keluhan kesehatan lebih besar yakni sebesar 37,67 persen sedangkan penduduk laki – laki sebesar 34,81 persen.

Seseorang dikatakan sakit jika keluhan kesehatan yang dialami menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara normal sebagaimana biasanya. Persentase penduduk yang sakit disebut angka kesakitan. Angka kesakitan penduduk Kabupaten Purbalingga mencapai 16,71 persen. Berdasarkan jenis kelamin, angka kesakitan penduduk perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki (16,86 persen berbanding 16,56 persen).

Tabel 2.23.
Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga, 2015- 2017

Rincian	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Angka Kesakitan 2015	19,50	19,03	19,26

Angka Kesakitan 2016	16,52	17,30	16,91
Angka Kesakitan 2017	16,56	16,86	16,71

Sumber :BPS. 2018

Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tahun 2017, laki-laki dan perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tidak terlalu jauh berbeda yaitu laki-laki 16,56 persen dan perempuan 16,86 persen. Perempuan sedikit lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan laki-laki.

Kondisi yang agak berbeda terjadi pada tahun 2015 dimana perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih sedikit dibandingkan laki-laki yaitu perempuan 19,03 persen sementara laki-laki 19,50 persen. Namun secara umum kondisi di tahun 2017 lebih baik dibanding tahun 2015.

e. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu) dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu-lahir). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor resiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kebidanan.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang telah dianjurkan, dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Gambaran cakupan K1 dan K4 Kabupaten Purbalingga dengan Jawa Tengah tahun

2018 sebagaimana gambar berikut:

Sumber:BPS, 2018.

Gambar 2.27.
Cakupan K1 dan K4 Kabupaten Purbalingga dan Jawa Tengah Tahun 2018

f. Lamanya Terganggu

Untuk melihat tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk, maka dapat dilihat dari lamanya hari terganggu. Lama terganggu merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai intensitas keluhan kesehatan (penyakit) yang dirasakan oleh masyarakat. Menurunnya angka kesakitan tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan yang lebih baik, jika tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata lama terganggu. Semakin lama (hari) terganggu, maka keluhan kesehatan yang dialami masyarakat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas.

Pada tahun 2017, kisaran rata-rata lama terganggu berada di bawah 8 hari dengan persentase terbanyak di bawah 4 hari yaitu sekitar 58,63 persen dan 4 – 7 hari sebesar 27,53 persen dari penduduk yang terganggu kesehatannya. Hal ini dapat mengindikasikan secara umum bahwa penyakit yang banyak diderita penduduk adalah penyakit-penyakit ringan sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam proses penyembuhannya.

Tabel dibawah dapat menunjukkan distribusi penduduk yang sakit yaitu yang mempunyai keluhan kesehatan sampai mengakibatkan pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari terganggu di tahun 2016 dan 2017

menurut lamanya hari terganggu.

Tabel 2.24.
Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit
Menurut Lamanya Terganggu dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga, 2016-2017

Lamanya Sakit (Hari)	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 4	49,74	60,22	54,33	57,11	52,12	58,63
4 – 7	34,50	22,51	33,20	32,32	33,82	27,52
8 – 14	5,61	6,43	3,36	4,68	4,44	5,54
15 – 21	3,04	3,84	2,66	0,94	2,85	2,36
22 – 30	7,11	7,00	6,45	4,95	6,77	5,95
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS, 2018

Pada rata-rata lama terganggu di bawah 4 hari, pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan tahun 2016 yaitu di tahun 2017 sebesar 58,63 persen dan di 2016 sebesar 52,12 persen. Sedangkan untuk rata-rata lama terganggu 4-7 hari, tahun 2016 sebesar 33,82 persen lebih banyak dibandingkan di tahun 2017 yang sebesar 27,52 persen.

Pada lama terganggu 8 - 30 hari yang biasanya adalah penyakit berat dan menahun, tahun 2016 lebih sedikit dibandingkan tahun 2017 yaitu di tahun 2016 sebesar 4,44 persen dan di tahun 2017 sebesar 5,54 persen. Begitu pula untuk rata-rata lama terganggu 22-30 hari, di tahun 2016 lebih banyak yaitu sebesar 6,77 persen dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 5,95 persen.

g. Pemanfaatan Fasilitas dan Sarana Kesehatan

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, sehingga penduduk dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa mengalami kesulitan.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan. Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah

banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Tabel dibawah ini menyajikan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Penduduk yang berobat jalan pada tahun 2017 tercatat 52,55 persen, dan pada tahun 2018 menjadi 60,22 persen.

Tabel 2.25.
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Berobat Jalan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2017 – 2018

Rincian	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Berobat Jalan (%)	49,93	61,09	54,93	59,35	52,55	60,22
Tidak berobat jalan (%)	50,07	38,91	45,07	40,65	47,45	39,78

Sumber :BPS, 2018

Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa perempuan memiliki kecenderungan berobat jalan ke fasilitas kesehatan bila mengalami gangguan kesehatan dibandingkan laki-laki. Tercatat 59,35 persen dari kaum perempuan yang berobat jalan sedangkan pada kaum laki-laki sebesar 61,09 persen yang berobat jalan pada tahun 2018.

Pada tahun 2017 masih terdapat 47,45 persen penduduk yang tidak berobat jalan, dan menurun menjadi 39,78 pada tahun 2018. Kemungkinan yang dilakukan masyarakatadalah mengobati sendiri penyakitnya (swamedikasi) atau merasa tidak perlu untuk mengobati penyakitnya. Untuk itu perlu diketahui alasan apa saja yang menjadi penyebab masyarakat tidak berobat jalan. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Dengan semakin membanjirnya obat-obatan yang beredar bebas di pasaran dan semakin gencarnya promosi atau iklan obat di media cetak maupun elektronik serta semakin meningkatnya pendidikan dan pengetahuan, sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengatasi penyakitnya. Masyarakat cenderung mengobati sendiri penyakitnya dengan cara mengkonsumsi obat yang dibeli dari apotik ataupun toko obat terutama untuk penyakit-penyakit ringan.

Dari tabel dibawah terlihat bahwa sebagian besar penduduk yang tidak berobat jalan memilih untuk mengobati sendiri penyakitnya yaitu tercatat 50,13 persen di tahun 2016, 62,66 persen di tahun 2017 dan 64,64 pada tahun 2018.

Tabel 2.26.
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2016 - 2018

Alasan Tidak Berobat Jalan	2016	2017	2018
Tidak punya biaya berobat	0,78	1,18	0,00
Tidak ada biaya transport	0,24	-	0,21
Waktu tunggu pelayanan lama	0,84	0,85	2,64
Mengobati sendiri	50,13	62,66	64,64
Tidak ada yang mendampingi	0,48	0,79	0,19
Merasa tidak perlu	45,97	32,81	29,92
Lainnya	1,56	1,71	2,40
Jumlah	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS, 2018

Selain itu alasan utama lain penduduk sehingga tidak berobat jalan adalah karena merasa tidak perlu untuk diobati penyakitnya sebanyak 45,97 persen di tahun 2016,sebanyak 32,81 persen di tahun 2017 dan sebanyak 29,92 pada tahun 2018. Walaupun persentasenya cukup rendah, masih ada penduduk yang tidak berobat jalan dengan alasan tidak punya biaya berobat, tidak ada biaya transport, tidak ada sarana transport dan lainnya.

Salah satu indikator lain pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan (tempat pengobatan) yang banyak dikunjungi penduduk adalah tenaga kesehatan medis seperti praktek dokter/bidan/ klinik/praktek dokter bersama/ UKBM (34,76 persen), puskesmas/pustu (43,31 persen), rumah sakit pemerintah (6,17 persen), dan rumah sakit swasta (6,80 persen). Untuk pengobatan non medis seperti praktek pengobatan tradisional/alternatif dan lainnya persentasenya sangat kecil masing-masig 1,37 persen dan 0,15 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk akan pengobatan pada tenaga medis sudah cukup baik. Selain itu fenomena ini

juga dapat menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan sudah banyak dijumpai di hampir seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga baik di pedesaan maupun perkotaan sehingga akses masyarakat cukup mudah dan murah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan medis. Untuk tempat rawat jalan seperti rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, persentasenya tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Kabupaten Purbalingga sudah mempunyai asuransi kesehatan baik Askes ataupun Jamkesmas sehingga untuk berobat yang pertama adalah di dokter keluarga atau puskesmas sebagai pelayanan pertama. Penyakit yang diderita sebagian besar juga masih penyakit ringan.

Tabel 2.27.
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan
Menurut Tempat Berobat Jalan Kabupaten Purbalingga, 2016 - 2018

Tempat/Cara Berobat	2016	2017	2018
Rumah Sakit Pemerintah	3,31	4,12	6,17
Rumah Sakit Swasta	3,87	7,10	6,80
Praktek Dokter/Bidan/ Klinik/ Praktek Dokter Bersama/ UKBM	58,39	56,51	34,76
Puskesmas/Pustu	36,62	33,67	43,31
Praktek Batra/Alternatif	0,56	1,20	1,37
Lainnya	0,99	0,96	0,15

Sumber : BPS, 2018

Derajat kesehatan masyarakat diharapkan semakin membaik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Selain itu, akses masyarakat juga semakin mudah, murah dan merata terhadap pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menggalakkan program jaminan kesehatan nasional. Dengan adanya jaminan kesehatan maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka akan memperoleh manfaatnya. Pemerintah juga berupaya menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung premi jaminan

kesehatannya oleh pemerintah. Dari sini maka tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksa penyakitnya ke fasilitas kesehatan.Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut, diharapkan kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.28.
Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2016-2018

Jaminan	2016	2017	2018
BPJS Kesehatan	11,19	63,98	16,18
BPJS Ketenagakerjaan	1,45		
Askes/Asabri/Jamsostek	2,16		
Jamkesmas/PBI	45,70		54,31
Jamkesda	6,99	4,54	4,03
Asuransi Swasta	0,03	0,09	0,28
Perusahaan/Kantor	0,13	3,44	0,35
Tidak Memiliki	33,34	27,95	25,22

Sumber :BPS, 2018

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah Jamkesmas/PBI sebesar 54,31 persen, dan masih terdapat 25,22 persen masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.

h. Penolong Kelahiran Terakhir

Selain ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan, data mengenai penolong proses kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Jenis tenaga penolong proses kelahiran menentukan keberhasilan kelahiran dan akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi yang ditolong pasca kelahiran yaitu mengurangi kematian bayi dan kematian ibu (kematian maternal). Pelayanan yang aman dilakukan oleh dokter atau bidan pada saat proses kelahiran bayi.

Gambar 2.28.
Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Anak Terakhir Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan 2018

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Kabupaten Purbalingga dalam proses kelahiran anaknya ditolong oleh tenaga bidan yaitu sebesar 67,61 persen di tahun 2017 dan sebesar 70,86 di tahun 2018. Mudahnya akses yang didapat masyarakat serta biaya yang terjangkau, maka sebagian besar masyarakat cenderung lebih untuk melahirkan di bidan. Sementara itu perempuan yang persalinannya ditolong oleh tenaga dokter sebesar 29,9 persen di tahun 2017 dan 28,34 di tahun 2018.

Di tahun 2017 masih ada 1,63 persen perempuan 15-49 tahun di Kabupaten Purbalingga yang menggunakan tenaga non medis yaitu dukun bersalin. Hal ini kemungkinan terjadi di wilayah pedesaan yaitu masalah biaya dan jarak ke akses fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang cukup jauh serta tingkat pemahaman kesehatan yang masih rendah. Namun demikian, di tahun 2018 sudah tidak ada masyarakat Kabupaten Purbalingga yang mempercayakan proses kelahirannya kepada dukun bersalin.

Berdasarkan hal tersebut, secara umum masyarakat lebih cenderung memilih tenaga medis dalam proses penolong kelahiran. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa tingkat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2017 dan tahun 2018 sudah cukup baik.

i. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Selain penolong kelahiran, pemberian air susu ibu (ASI) sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Pola dan lama pemberian ASI memberikan pengaruh yang sangat positif pada kondisi kesehatan dan proses tumbuh kembang anak balita secara optimal.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selain mengandung zat kekebalan yang memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit, ASI juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan.

Melihat pentingnya manfaat ASI, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa "Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain".

Pada awalnya Pemerintah Indonesia menganjurkan para ibu menyusui bayinya hingga usia empat bulan. Seiring dengan kajian WHO mengenai ASI eksklusif, Menkes lewat Kepmen No 450/2004 menganjurkan perpanjangan pemberian ASI eksklusif hingga enam bulan.

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi tanpa ada makanan tambahan cairan lain misalnya air putih, susu formula, segala buah dalam bentuk jus, air teh, madu maupun tanpa ada makanan tambahan padat seperti halnya pisang, pepaya, bubur, nasi, biskuit, dan makanan lain yang sejenis.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, bayi perempuan yang berumur kurang dari 6 bulan lebih banyak yang diberi ASI eksklusif dari pada laki-laki (93,61 persen berbanding 79,23 persen). Secara umum, hal ini menggambarkan bayi perempuan lebih baik dalam pemberian ASI eksklusif dibanding laki-laki. Lama pemberian ASI memberikan pengaruh positif pada kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Sumber : BPS, 2017

Gambar 2.29.
Persentase bayi berumur 0-5 Bulan Menurut Jenis Kelamin yang Diberi ASI Ekslusif di Kabupaten Purbalingga, 2017

Pemberian ASI di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik. Menurut data Susenas, persentase bayi di bawah usia 2 tahun (baduta 0-23 bulan) yang pernah diberi ASI sebanyak 97,84 persen atau dengan kata lain sebanyak 2,16 persen dari seluruh baduta di Kabupaten Purbalingga tidak disusui pada tahun 2016. Dibandingkan tahun tahun 2017 terjadi peningkatan karena pada tahun ini semua baduta telah disusui. Persentase baduta menurut lamanya menyusui Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dan tahun 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.29.
Persentase Baduta (0-23 bulan) Menurut Lamanya Disusui Kabupaten Purbalingga, 2016-2017

S	**Lamanya Disusui (bulan)**	**2016**	**2017**
u	Tidak disusui	2,16	0,00
m	0 - 5	33,63	25,53
b	6 - 11	34,06	31,48
	12 – 17	19,12	21,54
e	18 – 23	11,03	21,45
r	**Jumlah**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS, 2018

Pemberian ASI dianjurkan oleh para ahli kesehatan karena dipercaya mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi ibu maupun untuk kesehatan bayi. Pada tahun 2017, Baduta 0-23 bulan yang diberi ASI selama 0-5 bulan sebanyak 25,53 persen, pemberian ASI 6-11 bulan 31,48 persen. Sementara itu untuk pemberian ASI dalam kurun waktu 12-17 bulan, tercatat 21,54 persen dan pemberian ASI 18-23 bulan 21,45 persen.

j. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2018 mengalami kenaikan dengan demikian beban pelayanan puskesmas semakin berat dan berpengaruh pada kualitas pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk setiap tahunnya belum memenuhi standar Kementrian Kesehatan RI yaitu satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Data selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.30.
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2012	22	875.096	1 : 39.777
2013	22	884.683	1 : 40.213
2014	22	894.062	1 : 40.639
2015	22	903.181	1 : 41.054
2016	22	907.507	1 : 42.250
2017	22	916.427	1 : 41.656
2018	22	985.543	1 : 44.797

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2019 (diolah)

k. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dalam kurun waktu tahun 2012 – 2018rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif. Namun demikian secara umum, berdasarkan standar rasio ideal kebutuhan tenaga medis tersebut masih membutuhkan penambahan jumlah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31.
Perkembangan Rasio Dokter Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2018

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio
2012	61	6,97	27	3,09	24	2,74
2013	88	9,95	31	3,50	17	1,92
2014	48	5,37	43	4,81	15	1,68
2015	94	10,41	21	2,33	17	1,88
2016	88	9,41	21	2,25	17	1,82
2017	140	15.43	69	7,60	24	2,64
2018	158	17,24	127	13,86	33	3,60

Sumber : BPS, 2018

l. Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012-2018 cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.32.
Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2018

Tahun	Perawat		Bidan		Ahli Gizi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2012	415	47,42	354	40,45	38	4,34
2013	415	46,91	354	40,01	38	4,30
2014	455	50,89	345	38,59	33	3,69
2015	455	50,38	218	24,14	33	3,65
2016	455	48,67	218	23,32	33	3,53
2017	1.088	119,89	582	64,13	54	5,95
2018	1.095	119,49	562	61,33	45	4,91

Sumber: BPS,2018

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Drainase, Persampahan.

1). Jalan dan Jembatan

Jalan merupakan infrastruktur/prasarana dasar yang mempunyai fungsi strategis dalam mendukung aksesibilitas masyarakat dalam bidang

sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Purbalingga tiap tahun mengalami peningkatan, Kondisi panjang jalan di Kabupaten Purbalinggaakhir tahun 2018sudah mencapai 888,087 km. Persentase jalan kondisi baik menunjukkan peningkatan dari sebesar80,70% pada tahun 2014 menjadi sebesar 85,66% pada tahun 2018.Kerusakan jalan antara lain disebabkan karena kondisi tanah yang cenderung labil (daya dukung tanah/DDT yang mudah mengalami penurunan) sehingga tidak mampu memikul beban lalu-lintas sesuai umur rencana, dan kerusakan akibat aliran permukaan (*run off*) yang tidak tertampung drainase atau tidak terbuang sebagaimana mestinya, namun melimpas diatas badan jalan, serta kerusakan yang disebabkan oleh beban/tonase kendaraan yang seringkali melebihi tonase jalan yang diijinkan.

Tabel 2.33.
Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Panjang jalan	km	710,204	784,233	784,233	888,087	888,087
2.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	80,70	86,57	89,59	80,75	85,66

Sumber : DPU PR Kabupaten Purbalingga, 2019

2). Drainase

Drainase adalah saluran pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan tanah. Saluran drainase merupakan prasarana yang melekat dengan lingkungan permukiman, yang dirancang bangun untuk menata lingkungan hidup yang aman, nyaman, bersih, dan sehat serta keberlanjutan.

Tabel 2.34.
Kondisi Jaringan Drainase di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2	%	20	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
	kali setahun							
2	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	2,10	10,02	10,56	10,87	9,56	6,33

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga.2018

Drainase di Kabupaten Purbalingga perlu direncanakan secara sistematis dalam lingkup kewilayahan yang terintegrasi dengan infrastruktur jalan, bangunan gedung dan permukiman sesuai karakteristik lingkungannya. Pada tahun 2012 drainase dalam kondisi baikbaru mencapai 20% dan meningkat menjadi 45,45% pada tahun 2017, namun masih dibawah target yang diharapkan. Kondisi ini menunjukan masih banyak saluran drainase dalam kondisi rusak, bahkan terdapat drainase yang tidak berfungsi. Kerusakan maupun penurunan fungsi drainase perlu segera mendapat penanganan secara teknis dan terintegrasi. Penurunan fungsi drainase sangat berpengaruh terhadap daya angkut air/pengaliran air permukaan yang dapat menyebabkan genangan, banjir maupun berimbas pada kerusakan infrastruktur jalan, bangunan, drainase itu sendiri, lingkungan sekitar, maupun infrastruktur drainase itu sendiri.

3). Sumber Daya Air

Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi sumber daya air yang cukup berlimpah, sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih dan air irigasi pertanian. Namun potensi sumber daya air yang ada tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya air untuk irigasi pertanian berdasar capaian kinerja pada indikator rasio jaringan irigasi selama 5 tahun terakhir 2014-2018 mengalami perubahan/peningkatan yaitu 17,2 m/ha pada tahun 2017 menjadi 17,29 m/ha pada tahun 2018, sedangkan luas jaringan irigasi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami perbaikan dari 36,01% pada tahun 2014 menjadi 44 persen pada tahun 2018.

Tabel 2.35.
Perkembangan Jaringan Irigasi dan Ketersediaan Air Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Jaringan Irigasi	m/ha	17,2	17,2	17,2	17,2	17,29
2.	Luas irigasi dalam kondisi baik	m2	6.900	7.388	8.643	8.085	8.429
3.	Luas Irigasi	m2	19.159	19.159	19.207	19.207	19.159
4.	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	36,01	38,56	45,0	42,2	44

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga

b. Penataan Ruang

Hasil Evaluasi dan Review RTRW menunjukkan tingkat rata-rata penyimpangan pemanfaatan tata ruang yang dilihat dari berbagai kriteria pembobotan masih dibawah 20 persen atau sebesar sebesar 13,22% . Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik yang disarankan yaitu sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, sedangkan untuk Kabupaten Purbalingga persentase ruang terbuka hijau publiknya pada tahun 2017 baru sebesar 19,13 persen. Perencanaan kembali Tata Ruang Wilayah dalam konteks regulasi yaitu peninjauan dalam 1 kali selama 5 tahun.

Hampir semua kawasan perkotaan telah memiliki RDTRK. Tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga nol, artinya tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Namun demikian, masih banyak bangunan yang belum memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB). Tentunya kedepan perlu ditingkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan optimalisasi perijinan IMB.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah sehat, menurut Badan Kesehatan Dunia(WHO)antara lain adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai minima l10m2 perkapita. Luasan ini memberikan kenyamanan anggota rumah tangga beraktifitas sehari-hari. Dari hasil Susenas diperoleh informasi persentase rumah yang luas perkapita lantainya ≤10m2. Rumah tangga yang menempati bangunan dengan luas lantai ≤10m2 di Kabupaten Purbalingga cenderung menurun. Hal ini menunjukkan kondisi yang semakin baik dalam tata perumahan di Purbalingga.

Kinerja pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari beberapa indikator seperti luas kawasan kumuh, Persentase rumah tidak layak huni; Persentase rumah tangga bersanitasi; Persentase rumah tangga menggunakan air bersih. Secara umum dalam kurun waktu

tahun 2016-2018 penataan lingkungan permukiman perlu ditingkatkan. Cakupan sanitasi dan air bersih sudah baik dengan capaian lebih dari 78,58% pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 sebesar 87,84%dengan rumah tangga menggunakan air bersih mencapai88,69%. Walaupun demikian kedepan perlu ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik, menuju universal access 100-0-100. Adapun secara langkap kondisi perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.36.
Kondisi Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2016	2017	2018
1	Luas kawasan kumuh	Ha	18,3	4,42	9,67
2	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	20.527	19.302	15.433
3	Persentase rumah tidak layak huni	%	8,32	7,83	6,26
4	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	78,58	84,27	87,84
5	Persentase rumah tangga menggunakan air bersih	%	82,78	87,60	88,69

Sumber: Dinrumkim Kabupaten Purbalingga. 2018

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu 2013 – 2018 mengalami trend meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 pada tahun 2013 sebesar 91 persen, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 100 persen dan tetap pada angka 100 persen pada tahun 2018. Sedangkan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Purbalingga juga mengalami trend menurun, dimana angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 13 persen, selanjutnya menurun pada tahun 2017 menjadi 2,46 persen dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 1,85 persen per 10.000 penduduk.

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat petugas Satpol PP dalam 24 jam sebanyak 3 (tiga) kali sehari selama kurun waktu 2013 – 2018 berjalan secara konsisten yaitu sebesar 162 kali. Dalam

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Satpol PP didukung sejumlah aparat. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga per 10.000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 1,5 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 1,048 karena beberapa telah purna tugas dan beralih penugasan.

Tugas Satpol PP menjaga ketertiban dan keamanan dibantu oleh masyarakat yang bertugas sebagai perlindungan masyarakat (linmas). Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Pendudukpada tahun 2013 sebesar 63,15 menurun di tahun 2018 hanya pada angka 25,8. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan oleh meningkatnya jumla penduduk yang tidak diimbangi dengan pengangkatan linmas baru.

Sementara untuk mendukung tugas linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan tersedia sarana berupa Pos Siskamling, pada tahun 2013 rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan sebesar3,58 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 41,84. Peningkatan rasio pos siskamling tersebut karena adanya pengembangan kegiatan siskamling dari Polri.Adapun Perkembangan Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37.
Perkembangan Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	92	92	93	93	100	100
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	91	92	93	94,40	100	100
3.	Angka kriminalitas	Kasus	392	368	188	NA	225	171
4.	Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	274	304	135	NA	156	134
		%	69,90	82,61	71,81	NA	69,33	78,36
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kali	162	162	162	162	162	162
6.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk	1,5	0,75	0,95	1,09	0,677	1,048
7.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	63.15	61.76	60.97	60.97	26,1	25,8
8.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Poskamling	3.58	3.85	6.80	6.80	41,84	41,84

Sumber: Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga. 2019

6. Sosial

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa negara menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi rakyatnya sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Untuk memenuhi amanat tersebut pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan sosial yang meliputi kebijakan, perencanaan, kerjasama, pembinaan bidang sosial, identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pelaksanaan, pengawasan, pelaporan bidang sosial, sarana dan prasarana bidang sosial dan pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial.

Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga dalam penanganan masalah sosial adalah jumlah PMKS yang jumlahnya cukup banyak.Pada tahun 2018 jumlah PMKS sebanyak 108.014 orang; yang sudah menerima bantuan sebanyak 92.438 orang atau sebesar 85,58 %, dan yang belum menerima bantuan sebesar 15.576 orang. Capaian layanan penerimaan bantuan PMKS tahun 2018 menghalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 68,56 %. Apabila mendasarkan pada PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Syandar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, cakupan PMKS di Kabupaten Purbalingga penerima bantuan sosial perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dalam rangka peningkatan capaian PMKS yang terlayani, perlu sinergitas lintas sektor berupa kemitraan dengan seluruh stakeholder sehingga mampu memberikan optimalisasi layanan PMKS, baik dari sisi pengaduan, kedaruratan, penyediaan permakanan, sandang, penyediaan

perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial, akses pendidikan dasar dan reunifikasi keluarga.

B. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun ke atas dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat seperti pada tahun 2016 ke tahun 2017 dari 68,79% menjadi 71,68%. Secara absolut juga mengalami peningkatan dari 479.808 orang menjadi 489.947 orang. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.44 di bawah ini.

Tabel 2.38.

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga, 2012-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2012	466.188	641.356	72,69
2	2013	337.714	642.988	52,52
3	2014	443.845	659.371	67,31
4	2015	430.097	664.192	64,76
5	2016	479.808	697.402	68,79
6	2017	463.809	683.554	71,68
7	2018	NA	NA	NA

Sumber:Dinnaker dan BPS, 2018

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TingkatPartisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel2.39.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2017

Jenis Kelamin	Tahun		
	2015	2016	2017

Laki-laki	83,81	85,48	83,52
Perempuan	53,02	55,61	60,39
Total	**68,05**	**70,62**	**71,68**

Sumber :BPS, 2018

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Menurut Sakernas, pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga menurut jenis kelamin pada tahun 2015 - 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.40.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018

Jenis Kelamin	Tahun			
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Laki-laki	6,86	6,43	6,30	6,79
Perempuan	1,79	1,52	4,07	5,05
Total	**4,84**	**4,66**	**5,33**	**6,06**

Sumber :BPS, 2018

d. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar dalam kurun waktu tahun 2012-2017 mengalami peningkatan dari 10,54% menjadi 47,15%. Namun demikian pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 32,05 % menjadi 32,04 %. Hal tersebut, secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.41.
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2018

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Pencari Kerja Ditempatkan	Persentase
2012	4.971	524	10,54
2013	13.959	3.128	22,41
2014	12.012	4.450	37,05

2015	12.913	4.138	32,05
2016	13.558	4.345	32,04
2017	13.048	6.152	41,50
2018	NA	NA	47,15

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, dan BPS,2018

e. Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Indikator yang mengukur tingkat kesempatan kerja penduduk adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu perbandingan penduduk usia kerja yang bekerja dengan angkatan kerja. Indikator ini berkebalikan dengan tingkat pengangguran.

Penduduk Kabupaten Purbalingga yang bekerja dari penduduk yang belum/tidak pernah sekolah sebanyak 8.772 orang, tidak/belum tamat SD sebanyak 72.308 orang, SD sebanyak 170.161 orang, SMP sebanyak 109.572 orang dan Diploma I/II/III/ Akademi sebanyak 9.024 orang. Masih besarnya penduduk bekerja dengan pendidikan SD kebawah menggambarkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga sebagian besar adalah tenaga kerja terampil yang tidak mengharuskan pendidikan tinggi. Jumlah penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 secara lengkap sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.42.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
Tidak/belum sekolah	8.772	-	8.772
Tidak/belum tamat SD	72.308	1.480	73.788
SD/MI	170.161	4.791	174.952
SLTP	109.572	8.930	118.502
SLTA	45.160	3.428	48.588
SMK	26.634	6.292	32.926
DI/DII/DIII/Akademi	9.024	-	9.024
Universitas	22.178	1.217	23.395
Jumlah	**463.809**	**26.138**	**489.947**

Sumber :BPS, 2018

Sementara itu jika dilihat menurut lapangan usaha utama penduduk usia kerja, sebagian besar penduduk Kabupaten Kabupaten Purbalinggabekerja di lapangan usaha industri yaitu sebanyak 156.316 orang, disusul oleh perdagangan, rumah makan dan perhotelan sebanyak 102.132 orang dan lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 93.668 orang. Industri merupakan lapangan usaha yang banyak digeluti penduduk Kabupaten Purbalingga dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor ini terutama disumbang oleh peran serta perempuan sebanyak 105.153 orang dan penduduk laki-laki sebanyak 51.163 orang. Industri yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah industri rambut palsu dan bulu mata palsu.

Untuk lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki sebanyak 70.766 orang, dan penduduk perempuan hanya 22.902 orang. Sementara untuk lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi hampir berimbang dilakukan oleh penduduk laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki sebanyak 56.971 orang dan perempuan 45.161 orang. Secara lebih lengkap Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.43.
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Lapangan UsahaUtama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perem-puan	Lk+Pr
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	70.766	22.902	93.668
Pertambangan dan Penggalian	3.560	1.721	5.281
Industri Pengolahan	51.163	105.153	156.316
Listrik, Gas dan Air	-	-	-
Bangunan	37.150	1.396	38.546
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	56.971	45.161	102.132
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	11.316	554	11.870
Keuangan, Asuransi, Persewaan, Tanah, Jasa Perusahaan	2.923	1.970	4.893
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	27.229	23.874	51.103
Jumlah	**261.078**	**202.731**	**463.809**

Sumber :BPS. 2018

Selanjutnya penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai sejumlah 186.870 orang yang terdiri dari laki-laki 92.397 orang dan perempuan 94.473 orang.

Tabel 2.44.
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut StatusPekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
Berusaha sendiri	51.372	47.535	98.907
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar	48.014	20.365	68.379
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	11.494	1.891	13.385
Buruh/Karyawan/Pegawai	92.397	94.473	186.870
Pekerja Bebas	47.054	9.877	56.931
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	10.747	28.590	39.337
Jumlah	**261.078**	**202.731**	**463.809**

Sumber :BPS, 2018

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Purbalingga tahun 2017 berdasarkan data BPS sebesar 60,39 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia kerja perempuan (15 tahun ke atas)(orang)	349.957
2	Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)	211.324
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	60,39

Sumber:BPS, 2018

b. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian karena pada tahun 2016 angkanya meningkat cukup signifikan, sehingga diperlukan langkah – langkah antisipatif dari segenap pihak yang terkait. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga tahun 2013 sampai dengan 2018 digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Sumber: DinsosdaldukKB dan P3A, 2018

Gambar 2.30.
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2018

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2017di Kabupaten Purbalingga seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46.
Kondisi Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2018

No	Uraian dan Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,06	1,02	1,03	1,02	0,9
2	Jumlah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	149.915	143.826	148.456	NA	NA
3	Persentase kepesertaan KB	79,47%	76,40%	77,96%	78,89%	77,69%
4	Jumlah peserta aktif KB pria	5.233	4.593	2.735	6.418	6.120
5	Cakupan peserta KB aktif/Contraseptive Prevalence Rate	153.419	143.826	148.456	147.167	147.650
6	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB	5	1	1	0	0
7	Persentase penanganan kasus terkait layanan KB	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinsosdalduk KB dan P3A, dan BPS, 2019.

Data Dinsosdalduk KB dan P3A menunjukkan bahwa Jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, dan sebaliknya jumlah keluarga sejahtera I mengalami kenaikan yang signifikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.47.
Perkembangan Jumlah Keluarga sesuai NKKBS
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2018

No	Uraian dan Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera	86.790	88.005	89.924	NA	NA
2	Jumlah keluarga pra sejahtera	71.844	71.948	70.439	65.256	60.524
3	Jumlah keluarga sejahtera I	58.112	57.910	62.790	63.150	65.213
4	Jumlah keluarga sejahtera (KS III dan KS III+)	80.843	81.135	160.996	80.347	87.609

Sumber: Dinsosdalduk KB dan P3A, 2019

4. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan;(d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga secara umum semakin baik, yang ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;

b. Ketersediaan pangan utama cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk, bahkan surplus69.797,4 ton beras;

c. Harga pangan relatif terkendali dan terjangkau masyarakat, baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;

d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

Adapun capaian urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2018 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.48.
Capaian Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 - 2018

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/th	164,5	167	168
2	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok dan Strategis Tk. Konsumen (Stabilisasi Harga)	%	Beras 5,05	Beras premium 5,5, beras medium 8,91 % dan beras murah 5,20 %	>5
3	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	83,34	85,23	85,5
4	Persentase pangan yang aman (pangan segar)	%	80	85	>85
5	Jumlah sertifikasi Prima 3 (PSAT)	Komodi tas	3	2	-

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018
6	Lumbung pangan	unit	127	118	109

Sumber: DKPP Kabupaten Purbalingga. 2019

Jumlah lumbung pangan pada tahun 2016 sejumlah 127 unit, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 109 unit. Penurunan ini disebabkan karena adanya kemacetan pada usaha simpan pinjam di beberapa lumbung, sehingga mengakibatkan tutup. Selain itu adanya kevakuman kepengurusan lumbung, serta terbatasnya regenerasi pengurus.

5. Pertanahan

Pelayanan umum kepada masyarakat urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Tabel 2.49.
Luas Wilayah dirinci Menurut Penggunaan Tanah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2017

Penggunaan Tanah	2015		2016		2017	
	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
Sawah	21.845	28,1	21.841	28,1	21.830	28,07
Perkampungan	19.087	24,54	19.091	24,54	19.100	24.56
Kebun Campur	4.532	5,83	4.532	5,83	4.532	5,83
Tegalan	17.344	22,3	17.344	22,3	17.344	22,30
Perkebunan	16	0,02	16	0,02	16	0,02
Perikanan	95	0,12	95	0,12	95	0,12
Hutan	11.328	14,57	11.328	14,57	11.328	14,57
Lain-lain	3.516	4,52	3.516	4,52	3.517	4,52
Jumlah	77.764	100,00	77.764	100,00	77.764	100

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2016-2018

6. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dapat ditunjukkan dengan penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu

informasi status mutu air, informasi status mutu udara dan jumlah pengaduan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti. Selengkapnya untuk kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabeldi bawah berikut ini.

Tabel 2.50.
Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Informasi status mutu air (SPM) sungai	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
2	Informasi status mutu udara ambien (SPM)	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
3	Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusak-an lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) %	100	100	100	100	100

Sumber: DLH Kabupaten Purbalingga, 2019

7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya, Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan dan lain sebagainya. Jumlah Kepala Keluarga dan kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.51.
Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu KeluargaPer Kecamatan 2018

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Kepemilikan KK			
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	Kemangkon	17.953	3.708	21.661	17.838	3.500	21.338	6,67
2	Bukateja	21.279	4.280	25.559	21.145	4.040	25.185	7,88
3	Kejobong	14.680	2.564	17.244	14.592	2.400	16.992	5,31
4	Kaligondang	18.217	3.848	22.065	18.154	3.706	21.860	6,84
5	Purbalingga	16.059	3.938	19.997	15.989	3.819	19.808	6,19
6	Kalimanah	15.653	3.018	18.671	15.575	2.900	18.475	5,78

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Kepemilikan KK			
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	%
7	Kutasari	17.816	2.827	20.643	17.715	2.688	20.403	6,38
8	Mrebet	21.863	3.439	25.302	21.712	3.203	24.915	7,79
9	Bobotsari	15.119	2.901	18.020	15.022	2.767	17.789	5,56
10	Karangreja	12.772	1.237	14.009	12.698	1.102	13.800	4,32
11	Karanganyar	11.179	2.097	13.276	11.085	1.989	13.074	4,09
12	Karangmoncol	15.533	2.469	18.002	15.402	2.210	17.612	5,51
13	Rembang	18.413	2.933	21.346	18.215	2.527	20.742	6,49
14	Bojongsari	17.201	2.767	19.968	17.107	2.612	19.719	6,17
15	Padamara	12.669	2.225	14.894	12.605	2.125	14.730	4,61
16	Pengadegan	11.734	1.869	13.603	11.663	1.761	13.424	4,20
17	Karangjambu	7.556	834	8.390	7.499	708	8.207	2,57
18	Kertanegara	10.010	1.869	11.879	9.952	1.767	11.719	3,66
	Jumlah	**275.706**	**48.823**	**324.529**	**273.968**	**45.824**	**319.792**	**100**

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 324.529 kepala keluarga di Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki Kartu Keluarga sampai akhir 2018 sebanyak 319.792 kepala keluarga. Jika menurut wilayah kecamatan, dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Bukateja merupakan wilayah dengan kepemilikan KK tertinggi sebanyak25.185 KK yang diikuti wilayah Kecamatan Mrebet yakni24.915 KK. Sedangkan persentase kepemilikan kartu keluarga terendah terdapat di wilayah Kecamatan Karangjambu sebanyak 8.207 KK.

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan publik lainnya di Kabupaten Purbalingga sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP-el. Sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP dan telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 729.697 jiwa (99,65%) dari wajib KTP sebanyak 732.224 jiwa sebagaimanadapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-el
di Kabupaten PurbalinggaTahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Memiliki KTP	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Persentase Kepemilikan KTP
1	Kemangkon	47.686	47.733	99,90
2	Bukateja	57.437	57.626	99,67
3	Kejobong	37.700	37.883	99,52
4	Kaligondang	48.359	48.517	99,67
5	Purbalingga	44.189	44.241	99,88
6	Kalimanah	42.052	42.102	99,88
7	Kutasari	45.649	45.779	99,72
8	Mrebet	56.260	56.493	99,59
9	Bobotsari	40.521	40.661	99,66
10	Karangreja	32.404	32.598	99,40
11	Karanganyar	29.957	30.054	99,68
12	Karangmoncol	42.872	43.032	99,63
13	Rembang	50.120	50.372	99,50
14	Bojongsari	44.847	45.014	99,63
15	Padamara	33.103	33.197	99,72
16	Pengadegan	29.926	30.070	99,52
17	Karangjambu	19.404	19.520	99,41
18	Kertanegara	27.211	27.332	99,56
	Jumlah	**729.697**	**732.224**	**99,65**

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa prosentase hasil perekaman KTP-el tertinggi di Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah Kecamatan Kemangkon yaitu sebesar 99,90 persen, adapun perekaman terendah adalah Kecamatan Karangreja yaitu sebanyak 99,40 persen.

c. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Akta catatan sipil merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdampak hukum terhaap status keperdataan seseorang. Oleh karenanya, setiap penduduk yangmengalami peristiwa penting wajib dicatat untukmendapatkan akta pencatatan sipil.

Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum

keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi dan lain-lain. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusnya sebuah perkawinan. Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologis.

Belum lengkapnya informasi yang diberikan oleh penduduk dalam mengisi Formulir F.1.01 khususnya informasi tentang kepemilikan akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh informasi tentang kepemilikan akta-akta catatan sipil oleh penduduk dari database kependudukan SIAK.

1) Kepemilikan Akta Kelahiran

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya. Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-UndangNomor 24 tahun 2013 dimana terdapat 3 (tiga) item pentingyang berkaitan dengan percepatan capaian kepemilikan akta pencatatan sipil yaitu:

a. Pelayanan gratis untuk memperoleh dokumen akta Pencatatan Sipil;

b. Dihapuskannya denda keterlambatan pembuatan akta pencatatan sipil.

Perubahan azas pencatatan sipil yang semula pada asas peristiwa menjadi azas domisili dimana penduduk dapat membuat akta pencatatan sipil di tempat domisili walaupun tempat terjadinya peristiwa penting berbeda. Adapun kepemilikan akta Kelahiran yang terdapat dalam database SIAK Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.53.
Penerbitan Akta Kelahiran per Kecamatan di Kabupaten PurbalinggaTahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
1	Kemangkon	63.589	22.757	35,79

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
2	Bukateja	77.789	31.700	40,75
3	Kejobong	50.683	17.477	34,48
4	Kaligondang	65.146	24.159	37,08
5	Purbalingga	58.479	22.449	38,39
6	Kalimanah	55.906	25.818	46,18
7	Kutasari	63.238	25.843	40,87
8	Mrebet	75.877	26.217	34,55
9	Bobotsari	54.270	18.505	34,10
10	Karangreja	44.625	15.607	34,97
11	Karanganyar	40.335	16.059	39,81
12	Karangmoncol	57.663	20.953	36,34
13	Rembang	67.841	23.288	34,33
14	Bojongsari	60.961	22.288	36,56
15	Padamara	44.877	17.853	39,78
16	Pengadegan	40.566	14.083	34,72
17	Karangjambu	26.768	10.106	37,75
18	Kertanegara	36.930	16.193	43,85
	Jumlah	**985.543**	**371.355**	**37,68**

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018 jumlah akta kelahiran yang diterbitkan sebanyak 371.355 akta lahir atau sebesar 37,68 persen. Persentase kepemilikan akta kelahiran terbesar adalah Kecamatan Kalimanah yaitu sebanyak46,18 persen, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Bobotsari yaitu sebanyak34,10 persen.

2) Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Namun perlu digaris bawahi bahwa data kepemilikan akta perkawinan ini dilayani oleh Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, hanya bagi penduduk yang beragama non Islam. Sementara bagi penduduk yang beragama Islam data kepemilikan akta perkawinan dalam bentuk surat

nikah berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Data kepemilikan akta perkawinan (non muslim)di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.54.
Jumlah Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian
Di Kabupaten Purbalingga, 2016 - 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Perkawinan	36	39	NA
2	Perceraian	10	11	NA

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga. 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk non muslim di Kabupaten Purbalingga yang bersatatus menikah dan mengurus akta perkawinan di tahun 2016 sebanyak 36 orang dan di tahun 2017 sebanyak 39 orang, dengan perceraian di tahun 2016 sebayak 10 orang dan di tahun 2017 sebanyak 11 orang.

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing desa tersebut memiliki status dan potensi desa yang berbeda-beda.Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di

desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa

Berdasar perkembangannya, desa terbagi menjadi 4 kelompok yakni Desa Tradisional, Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada. Adapun Desa Swasembada adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa Swasembada seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi, pekerjan yang beragam dan pola berpikir yang udah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun capaian indikator pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.55.
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2018

No.	Urusan PMD	Satuan	2017	2018
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,6394	0,65422
2	Jumlah Desa Swasembada	Desa	1	5
3	Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya (Rp)	2.170.000.000,-	2.600.000.000,-
4	Cakupan Desa dengan BUMDes Sehat	Persen	22,32 (50 Desa)	22,32 (50 Desa)

Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga. 2019

9. Perhubungan

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat guna meningkatkan kenyamanan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem

transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis.

Sampai dengan tahun 2018 marka jalan di Kabupaten Purbalingga sepanjang 224,4 Km dengan jumlah Rambu-rambu 817 unit, 13 unit Trafic light, dan 3.184 m2 Guardraill. Secara lengkap fasilitas lalu lintas di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.56.
Fasilitas Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

No.	Uraian	Satuan	2018
1	**Fasilitas Lalu Lintas**		
1.1	Marka	Km	224,4
1.2	Rambu-rambu	Unit	817
1.3	RPPJ	Unit	113
1.4	Deliniator	Unit	146
1.5	Safety Mirror	Unit	26
1.6	Guardraill	M2	3.184
1.7	Trafic light	Unit	13
1.8	Warning light	Unit	38
1.9	Road Barrier	Buah	125
1.10	Halte	Buah	7
1.11	Paku marka	buah	559
1.12	Trafic Cone	Unit	100
2	**Peningkatan Pelayanan Angkutan**		
2.1	Cakupan kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji KIR)	kendaraan	12.700
2.2	Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal	kendaraan	136.376
2.3	Jumlah penumpang terlayani angkutan	penumpang	1.134.184

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018

Dalam rangka menunjang kegiatan transportasi, di Kabupaten Purbalingga terdapat 4 buah terminal tipe C yaitu terminal Bukateja, Kejobong, Kutasari dan Kutabawa. Sedangkan untuk pelayanan angkutan, di Kabupaten Purbalingga terdapat 12.700 kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji KIR) dengan jumlah kendaraan umum yang masuk terminal sebanyak 136.376 kendaraan dengan melayani 1.134.184 penumpang.

10. Komunikasi dan Informasi

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2018 jumlah

OPD yang memiliki website sebanyak 34 OPD dengan intensitas updating setiap hari kerja. Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebanyak 34 unit. Sedangkan jumlah pelayanan publik perangkat daerah yang telah dilaksanakan secara online baru 6 unit.

11. Koperasi dan UKM

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi.

Jumlah UKM non BPR/LKM kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun di Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2013 sebanyak 25.560 unit dan di tahun 2014 menjadi 127.549 unit turun menjadi 86.877 unit di tahun 2017.Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat mendukung terhadap pemberdayaan UKM lokal, beberapa kebijakan guna pengembangan UKM diantaranya subsidi bunga yang disalurkan lewat lembaga keuangan, program *Bela* Beli, penggunaan batik asli Purbalingga untuk pakaian dinas. Adapun capaian Kinerja Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.57.
Perkembangan Capaian Kinerja Koperasi dan UKM Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah UKM non BPR/LKM	Unit	25.560	127.549	127.433	127.123	86.877
2	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM	%	98	99	-	-	99,71
3	Prosentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,80	1	1,20	1,70	2,54
4	Prosentase omset usaha mikro / rumah tangga terhadap total omset UMKM (%)	%	52	54	54,60	54,92	NA
5	Jumlah Produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI	Jenis	356	368	390	421	456
6	Prosentase Koperasi Aktif	%	67	67	69	79	71,86
7	Prosentase Koperasi Sehat	%	54	52	59	60	62

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM , 2018

12. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Jumlah ijin yang diterbitkan DPMPTSP selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2013 sebanyak 4.219 ijin, turun menjadi 4.181 dan 4.016 ditahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2016 naik cukup signifikan menjadi sebesar 4.618 ijin dantahun 2017 diterbitkan sebanyak 4.329 ijin, dimana yang diterbitkan paling banyak adalah Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Perkembangan capaian kinerja perijinan Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.58.
Perkembangan Capaian Kinerja Perijinan, 2014-2018

No	Jenis Izin	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	8	19	10	11	10
2	Izin Gangguan (HO)	788	787	772	619	0
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	725	572	641	922	633
4	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	731	755	1.004	1.036	644
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	751	708	1.016	1.046	657
6	IUI/TDI	18	21	30	42	50
7	IUI PHHK	8	-	-	-	-
8	Izin Reklame	966	962	913	512	390
9	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	145	147	143	87	90
10	Izin Mendirikan Perush. Pengangkutan	10	15	22	7	2
11	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	22	9	15	11	10
12	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	21	52	36	14
	Jumlah	**4.181**	**4.016**	**4.618**	**4.329**	**2.500**

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. 2019

Adapun perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59.
Realisasi Investasi Tahun 2012 – 2018

No	Tahun	Realisasi (Rp)
1	2012	339.768.000.000
2	2013	342.500.000.000
3	2014	477.115.287.000
4	2015	314.812.853.495
5	2016	230.003.281.000
6	2017	483.271.457.226
7	2018	617.870.000.000

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. 2019

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pendukung upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan dari pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan, patriotisme, nasionalisme serta mengembangkan jiwa sportifitas disamping juga dalam rangka meningkatkan kualitas jasmani generasi muda.

Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Purbalingga masih perlu untuk ditingkatkan. Dalam tahun 2017, fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kegiatan, sedangkan fasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 26 kegiatan. Adapun jumlah prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga di tingkat regional sebanyak 6 (enam) prestasi dan di tingkat nasional sebanyak 60 (enam puluh) prestasi. Selanjutnya pada tahun 2018, terjadi peningkatan prestasi olah raga. Pada tingkat regional / provinsi, terdapat 112 prestasi, sedangkat pada tingkat nasional terdapat 54 prestasi olah raga. Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat bidang olah raga sekaligus upaya peningkatan olah raga prestasi, pemerintah daerah terus berupaya melakukan peningkatan prasarana dan sarana pendukung olah raga, antara lain dengan dilakukannya revitalisasi GOR Goentoer Darjono dan pembangunan fasilitas lapangan olah raga indoor.

Salah satu tantangan dalam upaya pembangunan manusia khususnya dalam pembangunan kepemudaan adalah adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu peningkatan sosialisasi bahaya narkoba khususnya di kalangan generasi muda.

14. Statistik

Statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan maupun keterangan dalam berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Statistik juga sebagai peralatan analisis dan interpretasi data kuantitatif guna memperoleh suatu kesimpulan yang nantinya dijadikan bahan rumusan kebijakan. Dalam tahun 2018 terdapat kegiatan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang berisi 8 kelompok data. Dan juga kegiatan penyediaan data

dasar pembangunan daerah dengan output tersedianya publikasi buku Purbalingga Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, evaluasi IPM danbuku buku evaluasi kinerja pembangunan daerah yang berisi data-data PDRB, IHK dan data-data sosial seperti data susenas dan sakernas. Data statistik dimaksud dimanfaatkan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah.

15. Persandian

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan persandian meliputi: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan persandian di Kabupaten Purbalingga secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian kemampuan petugas dalam penggunaan peralatan santel perlu ditingkatkan guna mengantisipasi kebocoran atau penyadapan informasi pemerintah daerah oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

16. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya merupakan salah satu upaya pembangunan karakter bangsa. Seni budaya, khususnya seni budaya nasional merupakan wahana internalisasi nilai-nilai luhur yang perlu untuk terus ditanamkan dan dikembangkan untuk memperkokoh karakter dan integritas bangsa. Disamping itu, seni budaya secara umum dapat menjadi media untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Di tengah kehidupan yang semakin materialistis dan semakin menguatnya gelombang globalisasi, ada kecenderungan semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya bangsa.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan program yang nyata dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang bersifat tradisional. intensitas kegiatan kajian, fasilitasi, pementasan serta pengiriman duta seni maupun pembinaan organisasi dan kelompok kesenian yang ada perlu terus ditingkatkan. Demikian juga berbagai kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang sangat banyak di Kabupaten Purbalingga perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari

sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

17. Perpustakaan

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu dikembangkan semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca. Peran perpustakaan sangat penting dalam rangka mendorong dan mendukung pengembangan budaya membaca. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebanyak 930 unit yang terdiri dari 2 unit perpustakaan umum, 80 perpustakaan Desa/Kel,811 perpustakaan Sekolah/Madrasah, 8 perpustakaan Pondok Pesantren, 8 perpustakaan Rumah Ibadah, dan 4 Perpustakaan Khusus.

18. Kearsipan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; (b) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (c) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (e) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; (f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai

identitas dan jati diri bangsa; dan (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Cakupan OPD/ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2018 sebanyak 181 unit, dan jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik sebanyak 45.703 berkas. SIDOMAS merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan kinerja penyelenggarakan kearsipan, dengan Alih Media Sistem Informasi Dokumentasi Masyarakat (SIDOMAS) mampu melayani kearsipan sebanyak 40.616 KK.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Perikanan

Kinerja pembangunan perikanan salah satunya dapat dilihat dari Produksi perikanan Budidaya. Dalam kurun waktu tahun 2014-2018 terjadi penurunan produksi perikanan kolam dari sebesar 7.219 ton pada tahun 2014 menjadi sebesar 6.083 pada tahun 2018. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh para pembudidaya ikan.

Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga masih belum optimal. Pada tahun 2015 tingkat konsumsi ikan sebanyak 14,66 per kapita pertahun. Kondisi itu masih jauh dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang berada di angka 35 kilogram per kapita pertahun. Masih minimnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat karena ketersediaan ikan di masyarakat belum maksimal. Salah satunya mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan ikan di pasar. Penyebab lainnya yaitu masih belum dikenalnya produk olahan ikan di masyarakat. Selain itu masih ada anggapan olahan ikan masih berbau menyengat (amis). Sehingga

masyarakat masih enggan mengonsumsi olahan ikan itu. Produksi ikan, tingkat konsumsi ikan, produksi hasil olahan ikan dan jumlah pasar ikan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.60.
Produksi Ikan, Tingkat Konsumsi Ikan, Produksi Hasil Olahan Ikan DanJumlah Pasar Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014– 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi Ikan di kolam	Ton	7.219	4.872	5.001	6.303	6.083
2	Produksi Ikan di Sungai	Ton	243,17	249,50	254	253,4	230,57
3	Produksi ikan di UPR	Ekor (ribu)	305.068	115.442	116.379	174.293	228.352
4	Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/kapita /tahun	10,73	8,27	8,73	13	14,66
5	Jumlah produksi hasil olahan ikan	Ton	2.961	1.590	1.511	1.742,9	1.896,5
6	Jumlah Pasar Ikan	Unit	12	12	12	12	12

Sumber: DKPPKab. Purbalingga, 2019

2. Pariwisata

Sektor Pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun dengan membuat obyek wisata buatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan suatu daerah.

Kabupaten Purbalinggabeberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pariwisata. Pendapatan dari sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Purbalinggatahun 2017 sebesar Rp 33.846.965.238,-naik menjadi Rp 46.317.676.181,- pada tahun 2018. Data jumlah wisatawan dan pendapatan dari sektor Pariwisata sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.61.
Jumlah Wisatawan dan Pendapatan dari Obyek Wisata Menurut Bulandi Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan Tahun 2018

Bulan	2017			2018		
	Wisatawan		Pendapatan (rupiah)	Wisatawan		Pendapatan (rupiah)
	Manca-Negara	Domestik		Manca-negara	Domestik	

Januari	11	152.615	2.953.198.847	13	201.886	2.995.355.979
Februari	2	113.072	1.785.013.727	0	193.834	2.450.220.284
Maret	5	142.149	2.543.575.668	11	259.489	3.867.884.879
April	5	158.199	2.779.040.074	5	458.341	5.322.382.376
Mei	15	180.917	2.993.294.084	4	215.708	2.668.270.480
Juni	10	157.409	4.019.956.023	9	306.494	6.223.821.139
Juli	7	177.976	4.513.537.267	5	581.367	5.115.514.278
Agustus	4	71.007	1.192.686.195	11	174.769	1.732.934.926
September	16	107.830	2.015.885.429	0	235.797	3.083.269.845
Oktober	0	108.281	2.042.102.341	0	212.304	2.527.604.334
November	5	122.042	1.984.928.757	11	242.210	2.562.995.741
Desember	30	256.402	5.023.746.826	19	710.985	7.767.421.920
Jumlah	**110**	**1.747.899**	**33.846.965.238**	**88**	**3.793.184**	**46.317.676.181**

Sumber : BPS. 2018 dan Dinporapar Kab. Purbalingga 2019

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 5 (lima) obyek wisata unggulan yaitu Owabong, Gua Lawa, Sanggaluri Park, Pancuran Mas Purbayasa dan Desa Wisata Serang. Perkembangan wisata di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.62.
Perkembangan Pariwisata
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	5	5	5	12	12
2	Jumlah wahana baru pada obyek wisata	Unit	9	9	9	-	-
3	Jumlah kelompok sadar wisata / pemandu wisata	Kelom-pok	9	11	13	15	15
4	Jumlah kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	Org	1.457.719	1.318.883	1.343.147	1.748.009	3.793.272
5	Rata-rata tingkat hunian hotel	%	15,00	17,86	20,97	35,21	-
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,5	2	4	1,32	-
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,782	1,822	1,86	1,9	-
8	Jumlah restoran	Unit	20	20	20	20	40
9	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	11	11	11	11	14

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2018 dan Dinporapar Kab. Purbalingga

3. Pertanian

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan Sarana Pertanian; pengembangan prasarana pertanian;

pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; serta pemberian Perizinan Usaha Pertanian. Kewenangan yang dimiliki tersebut menjadi landasan bagi Kabupaten Purbalingga dalam pengelolaan di sektor pertanian.

Sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 27,27%. Potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Purbalingga meliputi padi sebesar 281.368ton, jagung 36.835 ton, ubi kayu 82.556ton, dan kedele 11.461 ton. Dilihat dari produktivitasnya, baik padi, ubi kayu maupun kedelai dalam kurun waktu tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan. Hal ini didukung dengan berbagai upaya revitalisasi pertanian serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian. Namun demikian tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian masih tinggi. Hal ini tentunya perlu dikurangi agar dapat mengurangi pencemaran dan dapat mempertahankan kesuburan tanah pertanian. Secara rinci perkembangan produksi pertanian tanaman pangan, pupuk dan peternakan sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.63.
Perkembangan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan Penggunaan Pupuk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi pertanian tanaman pangan (per jenis komoditas)						
	Padi	Ton	213.030	219.211	226.707	237.887	281.368
	Jagung	Ton	51.945	35.704	43.095	52.151	36.835
	Kedele	Ton	823	201	134	126	11.461
	Ubi kayu	Ton	2.556	68.448	62.513	64.303	82.556
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	Padi Sawah	Kw/Ha	59,23	56,48	55,79	54,71	66,44
	Jagung	Kw/Ha	54,73	56,34	52,64	61,13	53,71
	Kedele	Kw/Ha	16,11	14,15	15,07	14,98	13,61
	Ubi kayu	Kw/Ha	281,19	272,16	280,07	274,37	323,85
3	Tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian (Ton)						
	Urea	Ton	15.237	14.819	15.425	16.490	13.182,5
	ZA	Ton	1.098	891	865	1.000	580,2

	SP36	Ton	1.407	1.340	1.402	1.053	NA
	Phonska (NPK)	Ton	2.901	5.101	5.998	7.500	5.035
	Organik (Pabrikan)	Ton	732	3.172	992	171,9	351,8

Sumber: BPS. 2019

Adapun jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian dalam kurun waktu 6 tahunmengalami penurunan, dari 127.818 orang di tahun 2012 menjadi 93.668 orang pada tahun 2017. Adapun kecenderungan tingkat penurunannya sebagaimana gambar berikut ini.

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 2012-2016 dan Purbalingga Dalam Angka. 2018

Gambar 2.31.
Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2017

Potensi peternakan di Kabupaten Purbalingga yang utama adalah sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam buras, dan ayam ras potong. Jumlah ternak sapi potong cenderung mengalami penurunan, tahun 2014 tercatat sebayak 13.210 ekor turun menjadi sebesar 11.509 ekor di tahun 2017 dan meningkat menjadi sebesar12.029 di tahun 2018. Sedangkan untuk populasi kambing pada tahun 2014 berjumlah 293.362 ekor dan pada tahun 2018turun menjadi 259.180 ekor. Jumlah populasi ternak dan produksi hasil peternakan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.64.
Jumlah Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah populasi ternak per jenis:						
	Sapi potong	Ekor	13.210	13.522	11.472	11.509	12.029
	Sapi perah	Ekor	189	116	110	80	81
	Kerbau	Ekor	1.194	1.152	1.215	948	930
	Kambing	Ekor	293.362	375.471	394.245	194.747	259.180
	Domba	Ekor	44.876	56.821	59.662	22.489	25.781
	Ayam buras	Ekor	1.485.104	2.139.738	2.246.725	2.996.084	1.115.359
	Ayam Ras petelur	Ekor	725.459	738.009	774.909	326.067	828.918
	Ayam Ras pedaging	Ekor	3.470.585	4.570.760	4.799.298	1.006.678	4.072.000
	Itik	Ekor	99.645	119.326	62.636	54.277	75.600
	Puyuh	Ekor	56.128	57.610	82.894	2.993	114.700
2.	Jumlah produksi hasil peternakan						
	Daging	Kg	962.493	NA	NA	1.031.719	15.864.990
	Telur	Ton	6.529	5.396	5.835	7.835	14.970
	Susu	Liter	268.888	269.941	157.562	157.562	205.279

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, 2019

4. Energi dan SumberDaya Mineral

Kewenangan pemerintah daerah pada urusan energi dan sumberdaya mineral sangat terbatas, hanya terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan yaitu Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. Kinerja pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rasio elektrifikasi, dan Jumlah sumber energi / pembangkit listrik non PLN.

Rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 166.984 rumah tangga pada tahun 2012 meningkat menjadi 228.036 rumah tangga pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 26,8 persen. Meningkatnya kebutuhan listrik diikuti pula dengan peningkatan daya listrik terpasang yang semula sebesar 142.065.896 KVA di tahun 2012 naik menjadi 199.645.416 KVA pada tahun 2016.

Data tahun 2015, rasio elektrifikasi di wilayah Kabupaten Purbalingga sebesar 81,41%, dan tahun 2017 sebesar 92,75% artinya masih

ada 7,25% rumah yang belum terjangkau listrik. Keterbatasan pelayanan listrik PLN di Kabupaten Purbalingga di wilayah yang agak terpencil menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan listrik. Untuk meningkatkan ketersediaan listrik pada wilayah yang belum terjangkau PLN, telah dikembangkan pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan. Jumlah sumber energi / pembangkit listrik non PLN pada tahun 2016 sebanyak 3 unit. Tentunya diperlukan penambahan pembangkit listrik non PLN agar rasio elektrifikasi rumah tangga meningkat.

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Purbalingga, diantaranya berasal dari sumber mata air yang dikelola oleh PDAM. Penyalurannya dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Data air PDAM yang telah disalurkan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.66.
Jumlah Air PDAM yang Disalurkan, Debit Mata Air dan Debit Sungai diKabupaten Purbalingga Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satu-an	Capaian Kinerja				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Air PDAM disalurkan	m^3	8.713.470	8.748.210	9.607.779	10.808.023	11.613.926
2	Debit mata air	m^3/dtk	80-1000	75 - 975	75 – 975	75 – 975	75 – 975
3	Debit sungai	m^3/dtk	0,026-17,33	0,026-17,33	0,026-17,33	0,026-17,33	0,026-17,33

Sumber : Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2018

5. Perdagangan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perdagangan mencakup Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; serta Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Di Kabupaten Purbalingga, kinerja urusan perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik. Penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran diselenggarakan oleh DPMPTSP. Berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana, terlihat bahwa Persentase pasar yang memenuhi persyaratan capaiannya hanya sebesar 90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat pasar yang memerlukan perbaikan sehingga kondisinya menjadi layak. Sementara itu berkaitan dengan PKL kinerjanya

sudah baik, dengan capaian persentase PKL yang tertata sebesar 10%.

Total nilai ekspor dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat dari sebesar Rp 1.671.732.496.600,- pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 3.042.711.573.350,- pada tahun 2017 dan Rp 3.029.223.587.134,- pada tahun 2018. Tentunya jumlah ekspor ini perlu ditingkatkan dengan menambah produk yang bisa diterima pasar internasional melalui pemasaran dan perbaikan mutu produk industri. Adapun berkaitan dengan perlindungan konsumen, kinerjanya sudah optimal ditunjukkan dengan indikator tingkat terlindunginya konsumen yang mencapai 100%, artinya dari seluruh pasar tradisional dan pasar modern yang ada telah dilakukan pengawasan. Data perkembangan kondisi perdagangan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.67.
Perkembangan Kondisi Perdagangan
di Kabupaten PurbalinggaTahun 2013-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Terlindunginya konsumen	%	100	100	100	100	100	100
2	Penanganan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
3	Total nilai ekspor	Rupiah	1.671.732.496.600	1.877.254.061.453	3.116.675.176.271	3.334.842.438.610	3.042.711.573.350	3.029.223.587.134
4	Pembangunan promosi pedagangan Internasional	%	10	10	10	10	10	10
5	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	4	4	4	4	4	4
6	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	10	10	10	10	10	10
7	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	90	90	90	90	90	90
8	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2019

6. Perindustrian

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian mencakup Perencanaan Pembangunan Industri; Perizinan; dan Sistem

Informasi Industri Nasional. Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun dari sebesar 42.108unit pada tahun 2014 menjadi sebanyak 43.239 unit pada tahun 2018. Jumlah sentra industri juga menunjukan peningkatan dari sebanyak 198 pada tahun 2014 menjadi 230 pada 2018.

Berkaitan dengan inovasi iptek, jumlah industri mikro kecil dan menengah menggunakan inovasi teknologi sampai dengan tahun 2014 sebanyak 642 unit dan meningkat pada tahun 2018 menjadi sebanyak 655 unit. Sementara itu persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi selama 5 tahun menunjukkan peningkatan, dari 23,28% pada tahun 2014 menjadi 28,80% di tahun 2018. Berkaitan dengan penggunakan bahan baku, Jumlah industri berbahan baku lokal meningkat dari sebanyak 25.120 unit pada tahun 2014 menjadi 30.250 unit pada tahun 2018. Adapun perkembangan indikator kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68.
Perkembangan Kondisi Perindustrian Kabupaten Purbalingga 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2,83	3,25	3,72	3,75	3,80
2	Jumlah industri (rumah tangga, kecil, menengah) yang menggunakan inovasi teknologi	Unit	642	645	649	652	655
3	Jumlah penerapan standar-isasi produk industri (SNI)	Unit	7	7	8	8	9
4.	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	42.108	42.719	42.929	43.127	43.239
5.	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	2-3	2-3	2-3	2-4	2-4
6.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	23,08	26,22	28,74	28,77	28,80
7.	Persentase klaster industri yang berkembang	%	39,42	41,02	42,18	43,15	43,20
8.	Jumlah sentraindustri	Unit	198	205	212	225	230
9.	Jumlah industri berbahan baku lokal	Unit	25.120	25.374	25.405	30.225	30.250

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2019

7. Transmigrasi

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk salah satunya dilakukan dengantransmigrasi penduduk. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk

dari daerah yang kepadatan penduduknya tinggi ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Tujuan dari transmigrasi yaitu melakukan penempatan penduduk secara merata diseluruh daerah. Realisasi pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Purbalingga 6 (enam) tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69.
Pemberangkatan Transmigrasi
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2018

No	Pemberangkatan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Transmigran Umum	15 KK / 66 jiwa	2 KK/ 5 jiwa	2 KK/ 7 jiwa	10 KK/33 jiwa	0	0

Sumber :Dinaker Kabupaten Purbalingga. 2019

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kecenderungan praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan kuatnya semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik *(good governance)*. Kecenderungan ini didorong oleh semakin derasnya tuntutan demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak memperoleh informasi yang benar). Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Ada beberapa ukuran untuk menilai tatakelola pemerintahan daerah antara lain kepuasan masyarakat, pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja sebuah pemerintahan. Indeks kepuasan masyarakat yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai 79 dan meningkat dari tahun 2016 menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai 77,96. Sedangkan opini laporan keuangan sudah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Indikator kinerja lain yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang profesional adalah nilai akuntabilitas kenerja instansi pemerintah, pada 2 (dua)

tahun terakhir nilai AKIP baru mencapai nilai CC. Selangkapnya nilai akuntabilitas secara rinci tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.70.
Nilai Akuntabilitas Kinerja PemerintahKabupaten Purbalingga 2015 – 2018

Komponen		Skor				
		2015	2016	2017	2018	Skor Maksimum
1	Perencanaan Kinerja	18,45	17,84	18,88	19,15	30
2	Pengukuran Kinerja	7,47	9,55	12,24	12,39	25
3	Pelaporan Kinerja	9,71	8,96	10,05	10,32	15
4	Evaluasi Internal	5,25	5,62	5,27	6,06	10
5	Capaian Kinerja	9,32	8,06	11,31	10,86	20
Nilai Hasil Evaluasi		50,20	50,03	57,75	58,79	100
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	CC	AA

Sumber : Kemenpan dan RB, 2016 –2019

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

A. Rata-Rata Pengeluaran Penduduk

Pengeluaran rata-rata penduduk per kapita sebulandi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebesar Rp 897.401,-.Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 742.830,- per kapita sebulan.Kenaikan ini dimungkinkan karena naiknya harga berbagai jenis kebutuhan penduduk yang ditandai dengan adanya inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2018.

Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Purbalingga digunakan untuk kebutuhan makanan sebesar Rp. 471.610,- atau sebesar 52,55 persen, sedangkan sisanya sebesar Rp 425.791,- atau

47,45 persen untuk kebutuhan bukan makanan. Secara lengkap Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.71.
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis PengeluaranKabupaten Purbalingga, 2015-2018

Jenis Pengeluaran	2015		2016		2017		2018	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
Makanan	318.784	49,11	335.432	51,38	387.634	52,18	471.634	52,55
Bukan Makanan	330.363	50,89	317.361	48,62	355.196	47,82	425.791	47,45
Jumlah	**649.147**	**100**	**652.793**	**100**	**742.830**	**100**	**897.401**	**100**

Sumber : BPS. 2018

Persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan selama kurun waktu 2015-2018 mengalami kenaikan dari 49,11 persen pada tahun 2015 menjadi 52,55 persen pada tahun 2018. Sebaliknya persentase pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan menurun dari 50,89 persen di tahun 2015 menjadi 47,45 persen di tahun 2018.

Pola pengeluaran penduduk seharusnya bergeser dari yang sebelumnya sebagian besar untuk pengeluaran makanan menuju pengeluaran untuk non makanan. Perubahan pendapatan seseorang diharapkan akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, diharapkan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Jembatan dan Jalan

Jalan merupakan infrastruktur/prasarana dasar yang mempunyai fungsi strategis dalam mendukung aksesibilitas masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Purbalingga tiap tahun mengalami peningkatan, Kondisi panjang jalan di Kabupaten Purbalinggaakhir tahun 2018sudah mencapai 888,087 km. Persentase jalan

kondisi baik menunjukkan peningkatan dari sebesar 80,70% pada tahun 2014 menjadi sebesar 85,66% pada tahun 2018. Kerusakan jalan antara lain disebabkan karena kondisi tanah yang cenderung labil (daya dukung tanah/DDT yang mudah mengalami penurunan) sehingga tidak mampu memikul beban lalu-lintas sesuai umur rencana, dan kerusakan akibat aliran permukaan (*run off*) yang tidak tertampung drainase atau tidak terbuang sebagaimana mestinya, namun melimpas diatas badan jalan, serta kerusakan yang disebabkan oleh beban/tonase kendaraan yang seringkali melebihi tonase jalan yang diijinkan.

Tabel 2.72.
Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
3.	Panjang jalan	km	710,204	784,233	784,233	888,087	888,087
4.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	80,70	86,57	89,59	80,75	85,66

Sumber : DPU PR Kabupaten Purbalingga, 2019

2. Drainase

Drainase adalah saluran pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan tanah. Saluran drainase merupakan prasarana yang melekat dengan lingkungan permukiman, yang dirancang bangun untuk menata lingkungan hidup yang aman, nyaman, bersih, dan sehat serta keberlanjutan.

Tabel 2.73.
Kondisi Jaringan Drainase di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45
2	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	10,02	10,56	10,87	9,56	6,33	6,18

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga. 2019

Drainase di Kabupaten Purbalingga perlu direncanakan secara sistematis dalam lingkup kewilayahan yang terintegrasi dengan infrastruktur jalan, bangunan gedung dan permukiman sesuai karakteristik lingkungannya. Pada tahun 2013sampai dengan 2018 drainase dalam kondisi baik mencapai 45,45%.Kondisi ini menunjukan masih banyak saluran drainase dalam kondisi rusak, bahkan terdapat drainase yang tidak berfungsi. Kerusakan maupun penurunan fungsi drainase perlu segera mendapat penanganan secara teknis dan terintegrasi. Penurunan fungsi drainase sangat berpengaruh terhadap daya angkut air/pengaliran air permukaan yang dapat menyebabkan genangan, banjir maupun berimbas pada kerusakan infrastruktur jalan, bangunan, drainase itu sendiri, lingkungan sekitar, maupun infrastruktur drainase itu sendiri.

3. Penataan Wilayah Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga dengan luas kurang lebih 889,61 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma enam satu) hektar meliputi :

1) Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) hektar;
2) Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 8,75 (delapan koma tujuh lima) hektar;
3) Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 138,93 (seratus tiga puluh delapan koma sembilan tiga) hektar;
4) Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 67,60 (enam puluh tujuh koma enam nol) hektar;
5) Kecamatan Kalimanah seluas kurang lebih 73,51 (tujuh puluh tiga koma lima satu) hektar;
6) Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
7) Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) hektar;

8) Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektar;
9) Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 485,03 (empat ratus delapan puluh lima koma nol tiga) hektar;
10) Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 6,72 (enam koma tujuh dua) hektar;
11) Kecamatan Padamara seluas kurang lebih 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) hektar; dan
12) Kecamatan Purbalingga seluas kurang lebih 27,45 (dua puluh tujuh koma empat lima) hektar.

Selain pada kawasan peruntukan industri, untuk kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan Ketertiban

Keamanan adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Adapun pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tugas Satpol PP menjaga ketertiban dan keamanan dibantu oleh masyarakat yang bertugas sebagai perlindungan masyarakat (linmas). Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk pada tahun 2013 sebesar 63,15 menurun di tahun 2018 hanya pada angka 25,8. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan oleh meningkatnya jumla penduduk yang tidak diimbangi dengan pengangkatan linmas baru.

Sementara untuk mendukung tugas linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan tersedia sarana berupa Pos Siskamling, pada tahun 2013 rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan sebesar 3,58 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 41,84. Peningkatan rasio pos siskamling tersebut karena adanya pengembangan kegiatan siskamling dari Polri.Adapun Perkembangan Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74.
Perkembangan Kondisi Keamanan dan Kertertiban
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	92	92	93	93	100	100
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	91	92	93	94,40	100	100
3.	Angka kriminalitas	Kasus	392	368	188	NA	225	171
4.	Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	274	304	135	NA	156	134
		%	69,90	82,61	71,81	NA	69,33	78,36

Sumber: Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga. 2019

2. Kemudahan Perijinan

Dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan pelayanan public di Kabupaten Purbalingga dikeluarkan kebijakan dengan pemberian kemudahan perijinan melalui perijinan terpadu satu pintu (PTSP) serta layanan perijinan secara online. Adapun kemudahan perijinan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari indikator sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.75.
Indikator Kemudahan Perijinan di Kabupaten Purbalingga 2017-2018

No	Uraian	Satuan	2017	2018
1	Lama Waktu Perijinan Investasi	Hari	5,2	5,0
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan	Angka	78,51	79,37

Sumber: DPMPT SP Kabupaten Purbalingga. 2019

D. Sumber Daya Manusia

1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun+) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakintinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggungpenduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktifdan penduduk yang tidak produktif lagi. Selanjutnya akan semakin besar pula hambatan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Dari seluruh penduduk Kabupaten Purbalingga hasil Susenas 2016, sebanyak 25,25 persen adalah kelompok umur anak-anak (0-14 tahun);66,00 persen adalah kelompok umur produktif (15-64 tahun) dan 8,75 persennya adalah kelompok umur tua (65 tahun ke atas).

Tabel 2.76.
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Purbalingga, 2015– 2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Rasio ketergantungan muda	41,17	39,38	38,26	34,27
Rasio ketergantungan tua	12,18	13,01	13,25	17,87
Rasio ketergantungan	53,35	52,72	51,51	52,14

Sumber : BPS. 2018

Rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2018sebesar 52,14 yang artinya diantara 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 52 orang penduduk tidak produktif yaitu 34 anak-anak dan 18 orang lansia. Rasio ketergantungan ini mengalami penurunan disbanding tahun 2015 dimana 100 penduduk produktif harus menanggung beban 53 orang penduduk tidak produktif yaitu 41 anak-anak dan 12 orang lansia.

Angka rasio ketergantungan muda lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan tua. Hal ini menunjukkan perlunya program-program pembangunan yang diprioritaskan untuk memperkecil rasio ketergantungan anak, misalnya penguatan program Keluarga Berencana (KB) dan program pendidikan untuk penduduk usia muda.

2. Rasio Lulusan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk juga dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Penduduk dengan pendidikan hingga SD termasuk mereka yang belum pernah sekolah tercatat sekitar 65,00 persen, dengan rincian; tidak/belum pernah sekolah sebanyak 2,71 persen, tidak/belum menamatkan pendidikannya di bangku Sekolah Dasar sebanyak 24,07 persen, dan yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Dasar sebesar 38,22 persen. Proporsi yang cukup tinggi ini membawa konsekuensi antara lain upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun keterampilan mereka yang cukup minim. Secara lengkap rasio lulusan pendidikan penduduk Kabupaten Purbalingga 10 tahun ke atas pada tahun 2016-2017 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.77.
Persentase Penduduk 10 tahun Ke Atas
Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan
Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2017

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Tidak/belum sekolah	1,69	2,62	3,69	4,60	2,71	3,63
Tidak/belum tamat SD	23,70	20,55	24,43	23,58	24,07	22,10
Tamat SD/MI	37,59	36,46	38,82	31,37	38,22	33,86
Tamat SMP/MTs	16,66	21,90	17,23	23,97	16,95	22,95
Tamat SMA/SMK	16,36	14,22	11,73	11,87	14,00	13,02
Diploma/Universitas	4,00	3,62	4,10	4,61	4,05	4,44
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber :BPS. 2018

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Realisasi RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

2.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Kinerja pembangunan Urusan Pendidikan ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian seperti tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.79.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018 (%)	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pendidikan Anak Usia Dini									
1.	APK PAUD	%	57,57	100	92,7	69.86	75.36	69.86	●
2.	Cakupan Guru PAUD memenuhi kualifikasi	%	34,5	43	38,6	83.07	215.21	193.19	●
Program Wajar Dikdas 9 Tahun									
3.	APK SD/Sederajat	%	108,89	110	109.39	106.32	97.19	96.65	●
4.	APM SD/Sederajat	%	90,98	93,5	91.3	92.32	101.12	98.74	●
5.	APK SMP/Sederajat	%	99,71	100,3	100.24	101.62	101.38	101.32	●
6.	APM SMP/Sederajat	%	69,3	72,5	69.95	73.19	104.63	100.95	●
Program Pendidikan Non Formal									
7	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	%	40	100	76	3	3.95	3.00	▼
8.	Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	11	100	56	4	7.14	4.00	▼
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
9.	Jumlah pendidik/tenaga kepedidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional	%	1	8	5	2	40.00	16.00	▼
10.	Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan	%	74.93	100	95	94.43	99.40	94.43	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018 (%)	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
11.	Persentase sertifikasi pendidik	%	56.93	100	90	82.52	91.69	82.52	●
12.	Persentase pendidik lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	75.84	100	90	24.53	27.26	28.14	▼
Program Manajemen Pendidikan									
13.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
14.	Persentase akreditasi PAUD	%	30	45	39	24.1	61.79	53.56	▶
15	Persentase akreditasi SD/Sederajat	%	22	45	30	97.85	326.17	217.44	●
16	Persentase akreditasiSMP/sederajat	%	80	85	83	94.83	114.25	111.56	●
17.	Cakupan capaian SPM :SD/sederajat	%	83.96	98.04	89.55	90.89	101.50	92.71	●
18.	Cakupan capain SPM: SMP/sederajat	%	76.84	90.52	79.24	84.91	107.16	93.80	●
19.	Persentase angka kelulusan : SD/sederajat	%	99.75	100	100	100	100.00	59.99	▶
20.	Persentase angka kelulusan SMP/sederajat	%	99.96	100	100	100	100.00	60.00	▶
21.	% angka melanjutkan: SD/sederajat	%	86.21	86.07	87.6	81.98	93.58	60.58	●
22.	% angka melanjutkan: SMP/sederajat	%	81.39	84.29	85.49	76.07	88.98	56.31	▶
23.	% angka putus sekolah : SD/sederajat	%	0.24	0.17	0.19	0.03	633.33	351.85	●
24.	% angka putus sekolah SMP/sederajat	%	0.61	0,69	0.79	0.47	59.49	46.72	▶
25.	% angka mengulang:SD/sederajat	%	5.3	4,80	5	3.68	73.60	50.16	▶
26.	% angka mengulang : SMP/sederajat	%	0.24	0,20	0.22	0.24	109.09	66.36	●
27.	Indek integritas UN	%	90	96	93	100	107.53	41.08	▶
Program Pendidikan Anak Usia Dini									

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018 (%)	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
1.	APK PAUD	%	57,57	100	92,7	69.86	75.36	69.86	●
2.	Cakupan Guru PAUD memenuhi kualifikasi	%	34,5	43	38,6	83.07	215.21	193.19	●
Program Wajar Dikdas 9 Tahun									
3.	APK SD/Sederajat	%	108,89	110	109.39	106.32	97.19	96.65	●
4.	APM SD/Sederajat	%	90,98	93,5	91.3	92.32	101.12	98.74	●
5.	APK SMP/Sederajat	%	99,71	100,3	100.24	101.62	101.38	101.32	●
6.	APM SMP/Sederajat	%	69,3	72,5	69.95	73.19	104.63	100.95	●
Program Pendidikan Non Formal									
7	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	%	40	100	76	3	3.95	3.00	▼
8.	Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	11	100	56	4	7.14	4.00	▼
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
9.	Jumlah pendidik/tenaga kepedidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional	%	1	8	5	2	40.00	16.00	▼
10.	Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan	%	74.93	100	95	94.43	99.40	94.43	●
11.	Persentase sertifikasi pendidik	%	56.93	100	90	82.52	91.69	82.52	●
12.	Persentase pendidik lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	75.84	100	90	24.53	27.26	28.14	▼
Program Manajemen Pendidikan									
13.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis Sekolah	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
14.	Persentase akreditasi PAUD	%	30	45	39	24.1	61.79	53.56	▶

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018 (%)	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
15	Persentase akreditasi SD/Sederajat	%	22	45	30	97.85	326.17	217.44	●
16	Persentase akreditasiSMP/sederajat	%	80	85	83	94.83	114.25	111.56	●
17.	Cakupan capaian SPM :SD/sederajat	%	83.96	98.04	89.55	90.89	101.50	92.71	●
18.	Cakupan capain SPM: SMP/sederajat	%	76.84	90.52	79.24	84.91	107.16	93.80	●
19.	Persentase angka kelulusan : SD/sederajat	%	99.75	100	100	100	100.00	59.99	▶
20.	Persentase angka kelulusan SMP/sederajat	%	99.96	100	100	100	100.00	60.00	▶
21.	% angka melanjutkan: SD/sederajat	%	86.21	86.07	87.6	81.98	93.58	60.58	●
22.	% angka melanjutkan: SMP/sederajat	%	81.39	84.29	85.49	76.07	88.98	56.31	▶
23.	% angka putus sekolah : SD/sederajat	%	0.24	0.17	0.19	0.03	633.33	351.85	●
24.	% angka putus sekolah SMP/sederajat	%	0.61	0,69	0.79	0.47	59.49	46.72	▶
25.	% angka mengulang:SD/sederajat	%	5.3	4,80	5	3.68	73.60	50.16	▶
26.	% angka mengulang : SMP/sederajat	%	0.24	0,20	0.22	0.24	109.09	66.36	●
27.	Indek integritas UN	%	90	96	93	100	107.53	41.08	▶

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinas Pendidikan dan Kebudayan*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Pendidikan, terlihat bahwa dari 27 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 16 target indikator berstatus telah tercapai, 7 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 4 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2018 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

B. Kesehatan

Kinerja Urusan Kesehatan ditunjukkan dalam 62 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.80.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018 (%)	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program pelayanan KIA, remaja dan Usila									
1.	Angka Kematian Ibu	per 100.000	135,78	110	125	75.05	166.56	219.30	●
2.	Kasus Kematian Bayi	per 1.000	10,06	9,2	9.5	7.5	126.67	186.84	●
3.	Angka Kematian Balita	per 1.000	11,81	11,65	11.7	9.28	126.08	189.87	●
Program pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan									
4.	Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	60	100	90	96	106.67	100	●
5.	Persentase ketersediaan obat generik dan esensial sesuai standar dan kebutuhan	%	80	95	90	100	111.11	95	●
Program peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan kesehatan									
6.	Jumlah Puskesmas perawatan	Unit	11	13	12	11	91.67	84.62	●
7.	Jumlah puskesmas mampu bersalin	Unit	12	22	20	14	70.00	63.64	●
8.	Jumlah Puskesmas Poned	Unit	5	7	7	7	100.00	100.00	●
9.	Jumlah RS Ponek	Unit	1	2	2	2	100.00	100.00	●
10.	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	0	22	20	22	110.00	100.00	●
11.	Jumlah RS terakreditasi	Unit	0	3	2	6	300.00	200.00	●
Program perbaikan gizi masyarakat									
12.	Prevalensi balita gizi kurang	%	3	2,5	2,5	3,09	80,91	153.76	●
13.	Cakupan bayi dengan BBLR	%	5,3	5	5,2	5,2	100,00	167.53	●
14.	Cakupan kecamatan bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100,00	60.00	●
15.	Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi	%	100	100	100	100	100,00	59.60	▶

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018 (%)	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
	beryodium baik								
Program promosi kesehatan dan Pemeberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan									
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100.00	60.00	●
17.	Cakupan kepemilikan jamban keluarga	%	74,1	90	82	73.91	90.13	82.12	●
18.	Cakupan akses jamban keluarga	%	64,85	100	95	87.59	92.20	87.59	●
19.	Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	74,06	100	95	87	91.58	87.00	●
20.	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	67,8	100	80	75.1	93.88	75.10	●
21.	Cakupan desa Open Defecation Free (ODF)	ds	14	82	68	48.12	70.76	48.12	▶
22.	Cakupan rumah tangga ber PHBS	%	74,8	93	89	85	95.51	91.40	●
23.	Cakupan Posyandu Mandiri	%	57,54	75	67	87	129.85	87.00	●
24.	Cakupan kepesertaan KB aktif	%	88,07	95	90	79.91	88.79	84.12	●
25.	Cakupan rumah sehat	%	69,87	87	80	71.3	89.13	81.95	●
26.	Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM	%	74,06	100	95	95.82	100.86	95.82	●
27.	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	%	90,54	100	93	100	107.53	100.00	●
28.	Proporsi Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) yang memenuhi syarat	%	53,17	85	70	75.3	107.57	88.59	●
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta kesehatan matra									
29.	Cakupan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100.00	100	●
30.	Prevalensi malaria	%	0.04	0.04	0.04	0	0	500	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018 (%)	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
31.	Case Notification Rate (CNR) TBC per 10.000	%	121.24	121.24	121.24	125	96.99	169.69	●
32.	Prevalensi HIV/AIDS	%	0.001%	0.001%	0.001	20.6	0.00	0.02	▼
33	Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani	%	5.45	5.45	5.45	5.45	100.00	208.81	●
34.	Angka penemuan kasus baru kusta	Ks	24	24	24	18	133.33	200.00	●
35.	Accute Flacid Paralysis (AFP)	Ks	4	4	4	12	33.33	111.11	●
36.	Incident Rate DBD per 10.000	ks/10.000	27.4	27.4	27.4	21	130.48	197.41	●
37.	Case Fatality Rate (CFR) DBD	%	2	2	2	1.58	126.58	179.21	●
38.	Cakupan balita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100.00	60.00	●
39.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	%	100	100	100	100	100.00	60.00	●
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan									
40.	Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	%	100	100	100	62.65	62.65	62.65	●
41.	Cakupan pelatihan tenaga kesehatan	%	100	100	100	92.27	92.27	92.27	●
42.	Rasio dokter umum per jumlah penduduk	%	10.51	40	40	15.84	39.60	39.60	▼
43.	Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk	%	4.92	6	5	4.48	89.60	74.67	●
44.	Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk	%	83.66	118	84	61.93	73.73	52.48	▶
45.	Rasio bidan per jumlah penduduk	%	51.45	77	56	48.95	87.41	63.57	●
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat									
46.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100,00	100	100.00	●
47.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	%	100	100	100	100,00	100	100.00	●
48.	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	%	72,2	100	95	93	97,89	93.00	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018 (%)	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengawasan Obat dan Makanan									
49	Cakupan pengawasan peredaran obat	%	100	100	100	100	100	60.00	●
50.	Cakupan pemeriksaan makanan dan minuman yang diperdagangkan	%	100	100	100	100	100	60.00	●
Program Pemantapan Fungsi Managemen Kesehatan									
51.	Cakupan BLUD pada Fasilitas Pelayan Kesehatan Pemerintah	Unit	1	23	0	0	0	0.00	▼
52.	Cakupan Puskesmas terakreditasi	%	0	22	20	22	110.00	100.00	●
53.	Cakupan Rumah Sakit terakreditasi	%	0	3	2	6	300.00	200.00	●
54.	Cakupan pelayanan perijinan/registrasi kesehatan	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
55.	Cakupan pemanfaatan SIM pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	%	0	100	100	100	100.00	100.00	●
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar									
56.	Jumlah layanan rawat jalan Puskesmas	Orang/ hari		250	125		0.00	0.00	●
57.	Bed Occupancy Ratio (BOR)	%	50.97	80	65	44.11	67.86	29.15	▼
58.	Net Death Rate (NDR)	%	0.7	10	5	0.6	12.00	7.50	▼
59.	Gross Death Rate (GDR)	%	0.6	20	2	0.59	29.50	7.93	▼
60.	Length Of Stay (LOS)	%	0	9	3	3	100.00	27.50	▼
61.	Turn Over Interval (TOI)	%	2.69	3	3	34.44	1148.00	282.93	●
62.	Bed Turn Over (BTO)	%	66.6	50	50	7.6	15.20	23.84	▼

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinas Kesehatan*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ : *Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kesehatan, terlihat bahwa sebanyak 62 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 50 target indikator berstatus telah tercapai bahkan ada yang sudah melebihi target pertahunnya, 3 target yang akan tercapai atau sudah sesuai harapan target per tahunnya dan 9 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2018 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan dalam 12 indikator, dengan capaian pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Penataan Ruang Daerah									
1.	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	Doku-men	1	1	0	0	100,00	100.00	●
2.	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan	%	100	100	100	75,5	75,50	55.10	▶
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan									
3.	Persentase bangunan cagar budaya yang terpelihara	%	100	100	100	100	100,00	100	●
4.	Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan	Doku-men	1	1	1	1	100,00	100	●
Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan									
5.	Jumlah taman kota	Bh	10	12	12	12	100.00	100.00	●
6.	Luas taman	Ha	4,57	5,37	4.97	5.3779	108.21	100.15	●
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan									
7.	Penambahan jalan	M	784.233	826.186	804.6 63	888.080	110.37	107.49	●
8.	Jumlah jembatan	unit	273	275	274	275	100.36	100.00	●
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air									
9.	Persentase bendung dan irigasi kondisi	%	38.5	40	38.8	41.57	107.14	103.93	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
	baik								
10.	Jumlah bendung	Bh	179	184	181	206	113.81	111.96	●
11.	Jumlah irigasi	Bh	253	256	256	258	100.78	100.78	●
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan									
12.	Persentase bangunan pemerintah kondisi baik	%	NA	60	50	50	100.00	83.33	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu DPUPR*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ : *Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, terlihat bahwa dari 12 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 11 target indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai dan dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan dalam 3 indikator, dengan capaian pada tabel bawah ini.

Tabel 2.82.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan									
1.	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni	%	NA	6,10	0.79	1.14	144.30	81.23	●
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan									
2.	Cakupan penanganan prasarana air bersih	%	90	100	95.5	90.43	94.69	90.43	●
3.	Cakupan penanganan prasarana sanitasi	%	80.25	100	91	87.48	96.13	87.48	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinperkim*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ : *Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terlihat bahwa dari 3 target indikator RPJMD 2016-2021, telah tercapai baik dalam upaya penurunan jumlah tidak layak huni sampai dengan penanganan prasarana air bersih dan sanitasi.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan dalam 10 indikator, dengan capaian pada tabel berikut:

Tabel 2.83.
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
OPD Pengampu BPBD									
Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam									
1.	Cakupan pelayanan korban bencana	%	100	100	100	35.15	35.15	67.58	●
2.	Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	desa	NA	5	3	3	100.00	60	●
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	NA	80	80	15.06	18.83	51.29	▶
4.	Tingkat waktu tanggap	%	NA	75	NA	100	NA	133.33	●
5.	Presentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	100	100	NA	100	NA	100.00	●
6.	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter pada WMK	%	NA	17	NA	14	NA	82.35	●
OPD Pengampu Kesbangpol									
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
7.	Jumlah kegiatan aksi massa bernuansa SARA	%	0	0	0	0	100	100	●
Program Pembinaan Kehidupan Beragama									
8.	Tingkat fasilitasi kegiatan keagamaan	kgt	130	215	215	175	81,40	50.72	▶
OPD Pengampu Pol PP									
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.									
9.	Persentase penanganan	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
	pelanggaran K3								
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba									
10.	Intensitas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	NA	NA	NA	10	10	100	100	●

Keterangan :
OPD Pengampu : BPBD, Kesbangpol, Satpol PP

- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terlihat bahwa dari 10 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 8 indikator targetnya telah tercapai serta 2 target indikator akan tercapai dan dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

F. Sosial

Kinerja Urusan Sosial ditunjukkan dalam 6 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.84.
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial									
1.	Cakupan PMKS yang terlayani	%	NA	100	100	100	100.00	50.00	▶
2.	Cakupan penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	%	NA	100	100	100	100.00	50.00	▶
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									
3.	Cakupan LKS yang dibina	%	NA	100	100	100	100.00	50.00	▶
4.	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan	%	NA	100	100	100	100.00	50.00	▶

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
	masalah sosial								
Program Fasilitasi, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana									
5.	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	%	NA	100	100	100	100.00	50.00	▶
6.	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	NA	100	100	100	100.00	50.00	▶

Keterangan :
- *OPD Pengampu DinsosdaldukKBP3A*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan sosial, terlihat bahwa dari 6 target indikator RPJMD 2016-2021, seluruh target indikatornya berstatus akan tercapai dan dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

2.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan urusan tenaga kerja ditunjukkan dalam 5 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2018 dan capaian target RPJMD sebesar 100% atau lebih) dan sebanyak 2 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras (capaian target 2018 kurang dari 100%). Gambaran pencapaian indikator urusan tenaga kerja sampai tahun 2018 sebagaimana dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.85.
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja									

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
1	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	%	48	75	62	47.15	76.05	45.46	▶
2	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	%	1.6	10	2	5.2	260.00	115.00	●
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial									
3	Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	%	85	90	90	100	111.11	63.04	●
4	Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial	%	70	90	80	81.07	101.34	59.12	▶
5	Rasio tenaga kerja terhadap upah sesuai UMK	%	79	95	90	94.88	105.42	99.87	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinaker*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼ *: Perlu perhatian/Upaya Keras*

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan dalam 5 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.86.
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1.	Jumlah pekerja dibawah umur	Orang	2079	127	173	0	NA	410.80	●
2.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	Orang	13	4	10	10	100.00	70.83	●
3.	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	4373	4600	4460	5054	113.32	52.26	▶
4.	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	31991	44592	38938	35521	91.22	43.92	▶
5.	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga politik	Orang	9	15	15	20	133.33	62.67	●

Keterangan :
- OPD Pengampu DinsosdaldukKBP3A

- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼: Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terlihat bahwa dari 5 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator kinerja tercapai pada target tahunan namun belum mencapai target RPJMD dan dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

C. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan dalam 18 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.87.
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB									
1.	Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (*unmet need* KB)	%	11.75	9	11	12.19	110.82	62.05	●
2.	Drop Out KB	%	25	15	21	10	47.62	50.17	▶
3.	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100.00	60.00	●
4.	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB		24	10	15	0	NA	400.00	●
5.	Jumlah peserta KB aktif pria	orang	5125	5250	5175	6120	118.26	116.57	●
Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja									
6.	Persentase kelompok PIK Remaja yg dibina	%	100	100	100	100	100,00	60.00	●
Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB									
7.	Rasio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB)	%	1:6	1:1	1:2	1:1	98.39	60.97	●

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
	dibanding jumlah desa/kelurahan								
8.	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) dibanding jumlah desa/ kelurahan	%	1:1	1:1	1:1	1:1	100	100	●
9.	Rasio Sub PPKBD dibanding jumlah desa/kelurahan	%	1:1	1:1	1:1	1:1	100	100	●
10.	Persentase kelompok Prio Utomo yg dibina	%	100	100	100	100	100	100	●
Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera									
11.	Jumlah NKKBS	%	4	3,6	3,6	4	111.11	59.61	▶
12.	Cakupan keluarga mengikuti UPPKS	%	8,01	13,61	13,61	5.17	37.98	41.89	▶
13.	Cakupan anggota UPPKS yang mengikuti KB	%	77,19	77,2	77,19	61.93	80.23	56.32	▶
14.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
15.	Bina Keluarga Balita	%	34,34	34,7	34,5	28.63	83.00	56.71	▶
16.	Bina Keluarga Remaja	%	24,6	25	24,7	20.30	82.19	56.86	▶
17.	Bina Keluarga Lansia	%	25,61	26	25,7	22.85	88.93	59.15	▶
18.	Cakupan anggota BKB ber-KB	%	86,7	86,95	86,80	67.34	77.58	55.75	▶

Keterangan :
- *OPD Pengampu DinsosdaldukKBP3A*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terlihat bahwa dari 18 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 10 target indikator berstatus telah tercapai, dan 8 target indikator akan tercapai dan dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD

.

D. Pangan

Kinerja pembangunan urusan pangan ditunjukkan dalam 7 indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai tahun 2018 dan diharapkan dapat tercapai diakhir RPJMD dan, sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai dan dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

Tabel2.88.
Capaian Kinerja Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan									
1.	Angka Konsumsi Energi	kg/cap /tahun	1997,10	2200	2200	2125	96.59	96.59	●
2.	Angka Konsumsi Protein	kg/cap /tahun	55,19	71,81	63.5	55	86.61	76.59	●
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	angka	84.33	99.51	91.92	85.6	93.12	86.02	●
4.	Persentase pangan aman yang beredar di masyarakat	%	87	99	93	87	93.55	87.88	●
5.	Persentase pangan segar bersertifikat prima 3	%	2	8	5	5	100.00	62.50	●
Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat									
6	Cakupan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	%	25,10	30.13	27.62	16	57.93	53.10	▶
7	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton SB	7,84	22,5	15	12	80.00	53.33	▶

Keterangan :
- OPD Pengampu DKPP
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

E. Pertanahan

Kinerja Urusan Pertanahan ditunjukkan dalam 3 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.89.
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan									
1.	Rasio tanah aset pemerintah daerah yang bersetifikat	%	50	100	70	63.48	90.69	63.48	●
2.	Cakupan penandaan tanah-tanah milik pemerintah daerah	%	50	100	80	66.28	82.85	66.28	●
3.	Cakupan penyelesaian proses pengadaan tanah pemerintah daerah	%	50	90	85	61.53	72.39	68.37	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinrumkim*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

-

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pertanahan, terlihat bahwa semua target indikator RPJMD 2016-2021 telah tercapai dan dapat diupayakan terus tercapai sampai dengan akhir tahun RPJMD.

F. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup ditunjukkan dalam 15 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.90.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Real-isasi	Capai-an (%)		
Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem									
1.	Jumlah mata air yang dilindungi	Lokasi	8	13	10	11	110.00	84.62	●
2.	Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Desa	2	8	5	11	220.00	137.50	●
Program pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup									
3.	Cakupan perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAl,UKL/UPL, SPPL)	Perusa-haan	NA	781	100	781	781.00	100.00	●

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Real-isasi	Capai-an (%)		
4.	Cakupan Perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis	Perusa-haan	20	32	26	32	123.08	100.00	●
5.	Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus	Perusa-haan	10	16	13	15	115.38	93.75	●
6.	Indek Kualitas Udara (minimal 84)	%	41.37	85	82	82.145	100.18	96.64	●
7.	Indek Kualitas Air (minimal 55)	%	64.29	56	53	80	150.94	142.86	●
8.	Indek Tutupan Lahan (minimal 62)	%	40.23	63	60	54.15	90.25	85.95	●
9.	Jumlah kelom[pok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelom-pok	16	21	18	50	277.78	191.11	●
10.	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	Perusa-haan	9	14	11	20	181.82	142.86	●
Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3									
11.	Cakupan pengelolaan air limbah rumah tangga	%	NA	90.2	85	87.48	102.92	96.98	●
12.	Cakupan industri yang memiliki TPS B3	%	NA	73.05	196	185	94.39	253.25	●
13.	Persentase pengurangan timbulan sampah melalui bank sampah	%	NA	2	2	1.25	62.50	62.50	●
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup									
14.	Cakupan aduan kasus lingkungan yang tertangani	%	80	100	100	100	100.00	57.45	▶
15.	Cakupan penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan	%	NA	180	50	5	10.00	5.00	▼

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinas Lingkungan Hidup

- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan lingkungan hidup, terlihat bahwa dari 15 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 13 target indikator sudah tercapai, 1 target indikator akan tercapai (capaian target tahun 2018 sudah tercapai namun belum tercapai di capaian RPJMD) dan 1 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2018 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

G. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dalam 4 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.91.
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukandan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Sta tus
					Target	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Penataan Administrasi Kependudukan									
1.	Cakupan kepemilikan KK	%	NA	100	309,974	98.54	0.03	98.54	●
2.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	%	NA	100	272,333	37.68	0.01	37.68	▼
3.	Tersedianya profil Kependudukan	%	NA	100	50	100	200.00	100	●
4	K T P	%	NA	100	709,447	99.65	0.01	99.65	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dindukcapil*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ : *Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, terlihat bahwa dari 4 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 3 target indikator berstatus telah dan 1 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2018 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD

.

H. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dalam 12 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa									
1.	Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu	%	100	100	100	100	100.00	60.00	●
2.	Cakupan desa/kelurahan yang menyusun profil desa secara tepat waktu	%	100	100	100	100	100.00	60.00	●
3.	Cakupan desa yang memiliki BUMDes yang sehat	desa	18	18	18	18	100.00	100.00	●
4.	Rasio lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif	RT	5081	5,081	5,081	5,069	99.76	99.76	●
5.	Jumlah pasar desa yang dibina	pasar	34	94	64	36	56.25	41.88	▶
6.	Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100.00	60.00	●
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa									
7.	Cakupan Posyandu aktif	Unit	1194	1,194	1,194	1,219	102.09	102.09	●
8.	Cakupan lumbung desa sehat	Unit	12	12	12	50	416.67	123.33	●
9.	Rasio Karang Taruna aktif	Desa dan kel	224 ds/15 kel	224 ds/15 kel	224 ds/15 kel	224 ds/15 kel	100.00	100.00	●
10.	Rasio PKK Desa/Kelurahan aktif	Desa dan kel	224 ds/15 kel	224 ds/15 kel	224 ds/15 kel	224 ds/15 kel	100.00	100.00	●
11.	Cakupan BP-SPAM aktif	Klp	10	10	10	20	200.00	200.00	●
12.	Cakupan KPP Sanitasi Lingkungan aktif	Klp	60	60	60	66	110.00	110.00	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinpermasdes*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, terlihat bahwa dari 12 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 11

target indikator berstatus telah tercapai serta 1 target indikator berstatus akan tercapai dan dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

I. Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan ditunjukkan dalam 11 indikator, dengan capaian sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.93.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas									
1.	Cakupan ruas jalan kolektor primer bermarka	M2	2025	3,195	1,665	6,635	398.50	123.96	●
	Cakupan ketersediaan fasilitas lalu lintas :								
2.	Trafic light	Unit	1	10	2	1	50.00	66.67	●
3.	Warning light	Unit	6	16	2	5	250.00	92.86	●
4.	Rambu penunjuk arah	Buah	6	26	4	13	325.00	122.73	●
5.	Rambu standar	Buah	100	600	100	44	44.00	58.80	▶
6.	Guardraill	M2	500	3000	500	200	40.00	33.60	▼
7.	Paku marka	Buah	0	1800	300	559	186.33	32.88	▼
8.	Trafic cone	Buah	0	500	100	100	100.00	62.25	▶
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan									
9.	Cakupan kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji KIR)	%	12,100	74,100	12,300	12,700	103.25	59.89	▶
10.	Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal	%	110,000	848,286	133000	136,376	102.54	54.15	▶
11.	Jumlah penumpang terlayani angkutan	%		100	1,216,433	93	0.01	0.01	▼

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinas Perhubungan*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼ *: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perhubungan, terlihat bahwa dari 11 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 4 target indikator berstatus

telah tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya, serta 3 indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2018 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

J. Komunikasi dan Informasi

Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi ditunjukkan dalam 12 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.94.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi									
1.	Persentase SKPD yang memiliki website	SKPD	28	43	34	34	100.00	79.07	●
2.	Intensitas updating informasi pada website Pemerintah Daerah	hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	100.00	100.00	●
3.	Cakupan sistem informasi manajemen (SIM) milik Pemerintahan Daerah yang berfungsi dan aktif	SKPD	28	43	34	34	100.00	79.07	●
4.	Jumlah pelayanan publik secara online	Web	2	15	6	6	100.00	40.00	▶
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik									
5.	Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi	kali	600	5100	800	800	100.00	76.13	●
6.	Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah	Strem-ing	18	18	35	18	51.43	100.00	●
7.	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	KIM	9	18	13	12	92.31	49.23	▶
8.	Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio	kali	12	72	12	12	100.00	58.33	▶
9.	Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal	kali	2	12	2	2	100.00	60.00	●
10	Cakupan komunikasi dan kerjasama dengan media massa (cetak dan	kali	18	168	30	30	100.00	57.97	▶

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
	online)								
11.	Cakupan kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media massa	media	20	20	20	23	115.00	66.00	●
12.	Cakupan penyusunan naskah kebijakan Pemda	Naskah	250	1500	250	250	100.00	60.00	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinkominfo*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan komunikasi dan informasi, terlihat bahwa dari 12 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 8 target indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai dan dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

K. Koperasi dan UKM

Kinerja urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditunjukkan dalam 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2018, sejumlah 5 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2018 dan target RPJMD sebesar 100% atau lebih), 1 indikator akan tercapai. Gambaran pencapaian indikator urusan Koperasi dan UMKM sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.95.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Target	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Penumbuhan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi									
1.	Jumlah Koperasi Sehat	unit	110	135	120	144	120.00	66.17	●
2.	Jumlah Anggota Koperasi	orang	52428	52928	52628	54871	104.26	60.74	●
Program Pengembangan, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk UMKM									
3.	Pertumbuhan jumlah UMKM	unit	NA	86,877	86877	86,877	100.00	50.00	▶
4.	Pertumbuhan UMKM berorientasi ekspor	unit	33	45	40	36	90.00	63.33	●
Program Kemitraan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM									

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Target	Reali-sasi	Capai-an (%)		
5.	Cakupan UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran	unit	125	250	175	278	158.86	65.33	●
6.	Cakupan UMKM yang difasilitasi melalui internet	unit	0	125	75	424	565.33	155.14	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinkop UKM*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

L. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Target kinerja pembangunan urusan penanaman modal dalam RPJMD 2016-2021 ditunjukkan dalam 8 indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2018 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), dan 4 indikator akan tercapai (capaian target 2018 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%). Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan penanaman modal dan perizinan terpadu sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.96.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi									
1	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN (baru)	unit	500	800	650	464	71.38	56.06	▶
2	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA (baru)	unit	2	12	2	1	50.00	40.00	▶
3	Pertumbuhan nilai investasi PMDN (baru/Rp.000)	Rp. (000)	250,000,000	2,950,000,000	450,000,000	497,675,366	110.59	51.62	▶
4	Pertumbuhan nilai investasi PMA (baru/Rp.000)	Rp. (000)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	120,194,949	600.97	299.62	●
5	Realisasi investasi total (baru/Rp.000)	Rp. (000)	270000000	3,090,000,000	470,000,000	617,870,315	131.46	59.10	▶
Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu									
6	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	%	81.35	82.25	81.7	81.9	100.24	99.57	●

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
7	Rata-rata jangka waktu proses perijinan	hari	5.6	4.2	5	5	100.00	119.05	●
8	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP (jenis)	jenis	14	24	18	27	150.00	112.50	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinkop DPMPTSP*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ditunjukkan dalam 6 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.97.
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Statu s
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda									
1.	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	Organi-sasi	NA	69	11	11	100.00	15.94	▼
2.	Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	Kelom-pok/Or ang	NA	132	21	2.662	12.68	20.62	▼
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga									
3.	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/Provinsi	piagam	NA	450	100	54	54.00	30.00	▼
4.	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional	piagam	NA	135	20	112	560.00	430.00	●
5.	Cakupan kelompok/organisasi olah raga yang difasilitasi	Organ-isasi	NA	6	1	30	3000.00	500.00	●
6.	Jumlah kegiatan olah raga yang difasilitasi	Kegi-atan	NA	195	30	48	160.00	123.33	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinas Pemuda dan Olah Raga*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemuda dan olah raga, terlihat bahwa dari 6 target indikator RPJMD 2016-2021, 3 indikator telah tercapai dan 3 indikator kinerja tidak tercapai targetnya sehingga perlu menjadi perhatian serius.

N. Statistik

Kinerja Urusan Statistik ditunjukkan dalam 1 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.98.
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah									
1.	Cakupan ketersediaan data dasar pembangunan	%	100	100	330	100	30.30	100.00	●

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinkominfo

- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Statistik terlihat bahwa target indikator RPJMD 2016-2021 berstatus telah tercapai.

O. Persandian

Kinerja Urusan Persandian ditunjukkan dalam 1 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.99.
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Program Indiktor Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengelolaan Persandian									
1.	Cakupan informasi pemerintah daerah melalui SANTEL yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	100	100	100	100%	●

Keterangan :
- OPD PengampuDinkominfo

- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Persandian terlihat bahwa target indikator RPJMD 2016-2021 berstatus telah tercapai.

P. Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan ditunjukkan dalam 11 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

abel 2.100.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah									
1.	Cakupan kajian seni	%	68	68	68	10	14.71	36.78	▼
2.	Cakupan fasilitasi seni	%	143	143	143	208	145.45	55.67	▶
3.	Cakupan gelar seni	%	100	100	100	77	77.00	74.83	●
4.	Cakupan misi kesenian	%	100	100	100	11	11.00	26.20	▼
5.	Cakupan sumber daya manusia kesenian	%	100	100	100	152	152.00	54.37	▶
6.	Cakupan tempat gelar seni	%	100	100	100	17	17.00	25.60	▼
7.	Cakupan organisasi kesenian yang aktif	%	307	307	307	333	108.47	47.15	▶
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya									
8.	Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya	%	40	70	NA	45	NA	64.29	●
9.	Jumlah kunjungan museum dan monumen	orang	200807	300,000	240,000	203,406	84.75	35.06	▼
10.	Jumlah cagar budaya	situs	298	360	NA	287	NA	79.72	●
11.	Cakupan cagar budaya yang dikonservasi	situs	1	1	1	1	100.00	100.00	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼ *: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kebudayaan, terlihat bahwa dari 11 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 4 target indikator berstatus

telah tercapai, 3 akan tercapai, dan 4 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2018 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

Q. Perpustakaan

Kinerja Urusan Perpustakaan ditunjukkan dalam 26 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.101.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Target	Realisasi	Capai-an (%)		
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									
Jumlah Perpustakaan									
1.	Umum	Bh	2	2	2	2	100.00	100.00	●
2.	Desa/kel	Bh	66	239	102	80	78.43	33.47	▼
3.	Sekolah/ Madrasah	Bh	811	811	811	811	100.00	100.00	●
4.	Pondok pesantren	Bh	3	18	9	8	88.89	44.44	▶
5.	Rumah Ibadah	Bh	4	50	12	8	66.67	16.00	▼
6.	Khusus	Bh	3	12	6	4	66.67	33.33	▼
7.	Rasio perpustakaan per jumlah penduduk	%	0.00111125	0.1415	0.0011775	0.00158113	134.28	1.12	▼
8.	Rasio pengunjung pepustakaan per jumlah penduduk	%	0.05	0.125	0.075	0.053556726	71.41	42.85	▶
Jumlah perpustakaan yang dibina :									
9.	Umum	Bh	27	108	54	54	100.00	54.00	▼
10.	Desa/kel	Bh	57	518	124	124	100.00	36.21	▼
11.	Sekolah/ Madrasah	Bh	3	8	5	5	100.00	48.00	▶
12.	Pondok pesantren	Bh	4	14	8	8	100.00	45.00	▶
13.	Rumah Ibadah	Bh	3	8	5	5	100.00	48.00	▶
14.	Khusus	Bh	94	656	196	196	100.00	38.52	▼
Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar :									

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Target	Realisasi	Capai-an (%)		
15.	Umum	Bh	1	1	1	1	100.00	100.00	●
16.	Desa/kel	Bh	60	90	72	76	105.56	84.44	●
17.	Sekolah/ Madrasah	Bh	442	622	514	606	117.90	97.43	●
18.	Pondok pesantren	Bh	3	18	9	9	100.00	50.00	▶
19.	Rumah Ibadah	Bh	4	14	8	8	100.00	57.14	▶
20.	Khusus	Bh	3	8	5	5	100.00	62.50	●
21.	Jumlah koleksi buku perpustakaan	Bh	53283	98,283	71,283	80,121	112.40	81.52	●
22.	Jumlah judul buku perpustakaan	Bh	28057	41,857	32,857	41,665	126.81	99.54	●
23.	Jumlah anggota perpustakaan berkartu	orang	15000	40000	25,000	2451	9.80	6.13	▼
24.	Jumlah layanan perpustakaan keliling	Bh	370	520	430	471	109.53	90.58	●
25.	Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek perpustakaan	orang	500	900	600	40	6.67	4.44	▼
26.	Jumlah pustakawan bersertifikat kompetensi perpustakaan	orang	2	7	4	0	0.00	0.00	▼

Keterangan :

- *OPD Pengampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perpustakaan, terlihat bahwa dari 26 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 9 target indikator berstatus telah tercapai, 7 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 10 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2018 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

R. Kearsipan

Kinerja Urusan Kearsipanditunjukkan dalam 3 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.102.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Target	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengelolaan Arsip									
1.	Cakupan SKPD/ormas/BUMD/ lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Unit	242	622	552	181	32.79	29.10	▼
2.	Jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik (berkas)	Berkas	8500	50,000	25,000	45,703	182.81	91.41	●
3.	Alih media Sistem Informasi Dokumen Masyarakat (SIDOMAS)	Kk	0	59,659	59,659	40,616	68.08	68.08	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kearsipan, terlihat bahwa dari 3 target indikator RPJMD 2016-2021, 2 indikator telah berstatus tercapai dan 1 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2018 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

2.2.3. Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan dalam 8 indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2018 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), 3 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 1 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan kelautan dan perikanan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.103.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Target	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengembangan Perikanan Budidaya									
1	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	4943	5,293	5,083	6,083	119.67	48.51	▶
2	Produksi Benih Ikan	ekor	125	137	130	228.352	175.66	81.18	●
3	Produksi Ikan Hias	ekor	739	980	839	3028	360.91	159.57	●
Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan									
4	Cakupan pelestarian ikan di perairan umum	%	NA	90	90	90	100.00	47.96	▶
5	Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/tahun	10.8	12	11.4	14.66	128.60	85.47	●
6	Produksi olahan hasil perikanan	ton	2850	3,200	2,950	1,897	64.31	38.51	▼
7	Nilai PDRB sub sektor perikanan	mil/rp	NA	360	308	331	107.47	47.89	▶
Program Pengembangan Perikanan Tangkap									
8	Produksi ikan sungai	Ton	240	230	235	230.56	98.11	61.06	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu DKPP*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

B. Pariwisata

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan urusan pariwisata ditunjukkan dalam 5 indikator, sebanyak 2 indikator sudah tercapai namun 3 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai.

Tabel2.104.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengembangan Destinasi Wisata									
1.	Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/dikembangkan	DTW	4	36	6	5	83.33	13.89	▼

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
2.	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa	NA	27	4	4	100.00	14.81	▼
Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata									
3.	Angka kunjungan wisatawan (orang)	orang	1579000	2,979,000	2,529,000	3,706,984	146.58	63.95	●
4.	Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti	event	NA	18	3	0	0.00	0.00	▼
Program Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Wisata									
5.	Jumlah Pokdarwis yang dibina	Kelompok	NA	24	1	22	2200.00	85.19	●

Keterangan :
- OPD Pengampu DKPP
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼: Perlu perhatian/Upaya Keras

C. Pertanian

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan urusan pertanian ditunjukkan dalam 51 indikator, sebanyak 24 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2018 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), dan 14 indikator akan tercapai (capaian target 2018 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%), dan 13 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan pertanian sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.105.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan									
1	Padi	Ton	252189	265,053	257,258	261,140	101.51	58.40	▶
2	Jagung	Ton	39732	41,759	40,531	39,674	97.89	64.91	●
3	Kedelai	Ton	223	235	228	10474	4593.86	951.05	●
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura									

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
4	Ubi Kayu	Ton	74901	78,721	76,406	17,141	22.43	40.92	▶
5	Kentang	Ton	3893	4,092	3,972	4,599	115.79	47.34	▶
6	Kobis	Ton	3255	3,421	3,321	4,315	129.93	61.12	●
7	Wortel	Ton	2010	2,113	2,051	9,847	480.11	141.36	●
8	Stroberi	Ton	462	486	472	128	27.12	29.74	▼
9	Cabai besar	Ton	726	764	741	2987.1	403.12	177.03	●
10	Cabai rawit	Ton	578	607	589	1125	191.00	125.14	●
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan									
11	Duku	Ton	7643	8,033	7,796	13,049	167.38	53.21	▶
12	Durian	Ton	3809	4,003	3,886	5,356	137.82	50.57	▶
13	Pisang	Ton	14189	14,912	14,474	10,489	72.47	51.31	▶
14	Nanas	Ton	412	433	420	123759.5	29466.55	7122.92	●
15	Pepaya	Ton	4825	5,071	4,922	2,552	51.85	43.06	▶
16	Manggis	Ton	723	760	738	586.6	79.49	37.82	▼
17	Kapulaga	Ton	12.28	13	12.53	2,281	18205.91	4731.93	●
18	Kopi	Ton	584	614	596	283.3	47.53	34.68	▼
19	Lada	Ton	177	186	180	288	160.00	68.64	●
20	Kelapa Dalam	Ton	12781	13,432	13,037	14,709	112.82	61.56	●
21	Kelapa Deres	Ton	53661	56,399	54,740	70,206	128.25	65.40	●
22	Cengkeh	Ton	57	59	58	31.3	53.97	41.79	▶
23	Glagah Arjuna	Ton	705	741	719	377	52.43	40.46	▶

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
24	Nilam	Ton	717	754	732	465.6	63.61	48.04	▶
25	Tebu	Ton	938	986	957	1674.41	174.96	85.72	●
26	Karet	Ton	127	134	130	157.18	120.91	64.13	●
Cakupan Fasilitasi Penanganan Pasca Panen Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
27	Power Thresher	Unit	1,000	1,050	1020	1010	99.02	40.42	▶
28	Pemipil Jagung	Unit	64	114	84	74	88.10	64.91	●
29	Rice Mill Unit	Unit	451	451	451	451	100.00	100.00	●
30	Penggunaan Pupuk Organik	Ton	3,235	3,572	3,366	351.8	10.45	173.08	●
Program Pengembangan Budidaya Peternakan									
31	Sapi	Ton	1,237.25	1,300.35	1262	1,276.60	101.16	57.23	▶
32	Kerbau	Ton	1.2	1.26	1.22	1.6	131.15	70.49	●
33	Kambing	Ton	280.11	294.4	258.74	761.1	294.16	125.97	●
34	Domba	Ton	81.94	86.12	83.59	149.4	178.73	87.06	●
35	Kelinci	Ton	0.78	0.82	0.79	1.8	227.85	101.51	●
36	Babi	Ton	0	0	0	0	0	100	●
37	Ayam Layer	Ton	47,240	49,694	48,188	52	0.11	19.65	▼
38	Ayam Broiler	Ton	4,659,376	4,897,006	4,752,949	10,889	0.23	19.69	▼
39	Ayam Buras	Ton	8,318,504	8,742,751	8,485,562	2,643	0.03	19.62	▼
40	Itik	Ton	19,028	19,998	19,410	54.2	0.28	19.71	▼
41	Burung Puyuh	Ton	9,654	10,146	9847	3.9	0.04	19.62	▼
42	Angsa	Ton	73	77	74	0.9	1.22	20.02	▼
43	Entog	Ton	5,141	5,403	5,244	30.8	0.59	19.84	▼

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
44	Merpati	Ton	1543	1.622	1,574	0.8	0.05	19.62	▼
45	Produksi Hasil Peternakan (Susu)	Liter	291,131	305,982	296,983	205,279	69.12	39.33	▼
46	Produksi Hasil Peternakan (Telur)	Ton	12,437	13,071	12,687	14970.9	118.00	63.52	●
Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian									
47	Produksi Olahan Daging	Ton	434	456	442	274.4	62.08	43.25	▶
48	Produksi Olahan Telur	Ton	92,209	97,963	95,282	105	0.11	19.47	▼
49	Produksi Olahan Susu	Liter	96,807	101,746	98,753	96,807	98.03	62.86	●
Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair									
50	Prevalensi Penyakit	%	30.29	17.89	24.54	26.8	109.21	107.26	●
51	Penyakit Zoonasis	%	7.7	4.54	4.24	4.7	110.85	41.82	▶

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinas Pertanian

- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*
-

D. Perdagangan

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan urusan perdagangan ditunjukkan dalam 11 indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2018 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), 3 indikator akan tercapai (capaian target 2018 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%), dan 4 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan perdagangan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel2.106.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja	Target Akhir	2018	Capaian RPJMD	Status

			Awal RPJMD (Tahun 2015)	RPJMD 2016-2021	Target	Reali-sasi	Capai-an (%)	s.d 2018	
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan									
1	Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar SNI	Pasar	NA	3	1	0	0.00	0.00	▼
2	Cakupan Pedagang Kaki Lima yang ditata dan diberdayakan	PKL	6	14	10	10	100.00	71.43	●
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan									
3	Persentase pemantauan terhadap distribusi barang penting dan strategis	Lokasi	NA	3	18	3	16.67	25.00	▼
Program Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan									
4	Persentase pengawasan terhadap komoditas barang yang peredarannya diawasi	Komodi ti	NA	3	24	24	100.00	52.94	▶
5	Persentase pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus	Lokasi	NA	44	8	8	100.00	86.67	●
6	Persentase jumlah sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	Kasus	3	25	10	6	60.00	30.19	▼
7	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	UTTP	24,066	32,000	26000	0	0.00	18.27	▼
8	Persentase pasar tertib ukur	Pasar	1	2	1	1	100.00	42.86	▶
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									
9	Jumlah eksportir	Perusa-haan	NA	29	34	37	108.82	127.59	●
10	Jumlah/jenis barang yang diekspor	Produk	40	75	55	42	76.36	56.00	▶
11	Nilai ekspor (Milyar)	Rp.	NA	3.800.000.000.000	0	7.203.988.699.390	-	190	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinperindag*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

E. Perindustrian

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan urusan perindustrian ditunjukkan dalam 3 indikator, dimana ketiga indikator tersebut telah. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan perindustrian sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel2.107.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Program	Satu-An	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s.d 2018	Status
					Target	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Rakyat									
1	Cakupan fasilitasi HKI	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
2	Cakupan penerapan standarisasi produk industri	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
3	Cakupan fasilitasi sertifikasi halal	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●

Keterangan :
- *OPD Pengampu Dinperindag*
- ● *: Telah Tercapai;* ▶ *: Akan Tercapai;* ▼*: Perlu perhatian/Upaya Keras*

2.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Target RPJMD 2016-2021 terhadap kinerja pembangunan fungsi penunjang urusan pemerintahan ditunjukkan dalam 37 indikator, sebanyak 19 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2018 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), 14 indikator akan tercapai (targer tahun 2018 sudah tercapai 100% bahkan lebih) dan 5 indikator perlu perhatian agar dapat dicapai pada akhir RPJMD. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan pemerintahan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel2.108.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an		
URUSAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN									
OPD Pengampu Bappelitbangda									
Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
1	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100	90	90.00	56.78	▶
2	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100	100	100.00	60.00	●

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an		
3	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	%	65	78	75	23	30.67	31.05	▼
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
4	Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan	%	100	100	100	94.7	94.70	57.88	▶
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi									
5	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	Lem-baga	7	7	7	11	157.14	157.14	●
6	Frekuensi diseminasi hasil litbang	Desi-mina-si	4	4	4	3	75.00	55.00	▶
URUSAN PENGAWASAN									
OPD Pengampu Inspektorat									
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah									
7	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	Unit	108	548	152	142	93.42	69.54	●
8	Persentase penanganan kasus/khusus	%	100	100	100	100	100.00	60.00	●
9	Persentase penyelesian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	85	100	85	82	96.47	57.41	▶
10	Level kapabilitas APIP	Ting-Kat	2	5	3	3	100.00	43.75	▶
URUSAN KEUANGAN									
OPD Pengampu Bakeuda									
Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah									
11	Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	%	100	100	100	100	100.00	60.00	●
12	Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan aset sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100.00	60.00	●
13	Ketepatan waktu pengiriman Laporan Keuangan sesuai ketentuan	%	92	100	94	100	106.38	61.60	●
14	Ketepatan waktu pengiriman Laporan Aset sesuai ketentuan	%	92	100	100	100	100.00	59.71	▶
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah									

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an		
15	Persentase PBB yang terbayar oleh wajib pajak	%	100	100	100	105.95	105.95	62.19	●
16	Capaian PAD	%	NA	100	50	109.37	218.74	86.95	●
URUSAN PEMERINTAHAN									
OPD Pengampu BKPPD									
Program Fasilitasi dan Pengembangan Kepegawaian Daerah									
17	Persentase ASN yang mengikuti Diklat sesuai standar	%	100	100	100	100	100.00	40.00	▶
18	Persentase penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi	%	100	100	100	100	100.00	40.00	▶
19	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100.00	40.00	▶
20	Persentase administrasi file kepegawaian yang terupdate	%	100	100	100	100	100.00	40.00	▶
OPD Pengampu Sekretariat DPRD									
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
21	Persentase usulan Raperda yang disetujui	%	100	100	100	86.86	86.86	52.54	▶
OPD Pengampu Sekretariat Daerah									
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah									
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Ang-ka	NA	80.05	79	79	100.62	99.30	●
Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan									
23	Jumlah SKPD Yang di evaluasi SOTK	OPD	6	6	6	0	0.00	20.00	▼
24	Nilai evaluasi SAKIP kabupaten	Ang-ka	52	65	58	57.75	99.57	88.85	●
25	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	%	80	100	90	587	652.22	587.00	●
26	Tingkat capaian bantuan hukum dan penyuluhan hukum	%	NA	100	31	32	103.23	32.00	▼
27	Tingkat capaian informasi peraturan perundang undangan	%	NA	100	235	242	102.98	72.77	●

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2018			Capaian RPJMD s/d 2018	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an		
28	Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	%	100	100	100	94.18	94.18	58.61	▶
29	Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	%	100	100	100	98.72	98.72	59.74	▶
30	Tingkat evaluasi pelaksanaan *e - procurement*	%	3	3	3	10.54	351.33	123.67	●
31	Tingkat capaian target laba perusda (ribu rupiah)	Rp. 000	28,073,848	45,213,213	33,969,356		0.00	16.38	▼
32	Tingkat capaian target deviden perusda (ribu rupiah)	Rp. 000	13,868,136	22,334,772	16,780,445	21,406,072	127.57	41.66	▶
33	Jumlah LKM berbadan hukum (unit)	Unit	7	224	28	9	32.14	4.02	▼
34	Tingkat kesesuaian perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	%	90	90	90	100	111.11	111.11	●
35	Tingkat Keberhasilan pelaksanaan pilkades	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
36	Persentase kecamatan yang menerapkan standar PATEN	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
37	Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	%	100	100	100	314	314.00	314.00	●

Keterangan :
- OPD Pengampu Bappelitbangda, Inspektorat, Bakeuda, BKD , Setda dan Setwan
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼: Perlu perhatian/Upaya Keras

Secara umum capaian kinerja program Semester 2 Tahun 2018 dari 389 indikator menunjukan kinerja yang baik dimana 60% dari total indikator telah tercapai. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya perlu perhatian/upaya keras yang tersebar dalam 16 urusan, dengan kondisi sebagai berikut :

1. Urusan pendidikan terdapat 11 indikator yang akan dan belum tercapai dari 27 indikator di urusan pendidikan;
2. Urusan kesehatan terdapat 12 indikator yang akan dan belum tercapai dari 62 indikator urusan kesehatan;
3. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat 1 indikator yang akan dan belum tercapai dari 12 indikator di urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat 1 indikator yang akan dan belum tercapai dari 12 indikator di urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Urusan sosial terdapat 6 indikator yang akan dan belum tercapai dari 6 indikator di urusan sosial;
6. Urusan tenaga kerja terdapat 2 indikator yang akan dan belum tercapai dari 5 indikator di urusan tenaga kerja;
7. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat 2 indikator yang akan dan belum tercapai dari 5 indikator di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdapat 8 indikator yang akan dan belum tercapai dari 18 indikator di urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Urusan pangan terdapat 2 indikator yang akan dan belum tercapai dari 7 indikator di urusan pangan;
10. Urusan lingkungan hidup terdapat 2 indikator yang akan dan belum tercapai dari 15 indikator di urusan lingkungan hidup;
11. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdapat 1 indikator yang akan dan belum tercapai dari 4 indikator di urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat 1 indikator yang akan dan belum tercapai dari 4 indikator di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Urusan perhubungan terdapat 7 indikator yang akan dan belum tercapai dari 11 indikator di urusan perhubungan;
14. Urusan komunikasi dan informasi terdapat 4 indikator yang akan dan belum tercapai dari 12 indikator di urusan komunikasi dan informasi;
15. Urusan koperasi dan UKM terdapat 1 indikator yang akan dan belum tercapai dari 6 indikator di urusan koperasi dan UKM;
16. Urusan penanaman modal dan perizinan terpadu terdapat 4 indikator yang akan dan belum tercapai dari 8 indikator di urusan penanaman modal dan perizinan terpadu;
17. Urusan kepemudaan dan olah raga terdapat 3 indikator yang akan dan belum tercapai dari 6 indikator di urusan kepemudaan dan olah raga;
18. Urusan kebudayaan terdapat 7 indikator yang akan dan belum tercapai dari 11 indikator di urusan kebudayaan;
19. Urusan perpustakaan terdapat 17 indikator yang akan dan belum tercapai dari 26 indikator di urusan perpustakaan;
20. Urusan kearsipan terdapat 1 indikator yang akan dan belum tercapai dari 3 indikator di urusan kearsipan;

21. Urusan kelautan dan perikanan terdapat 4 indikator yang akan dan belum tercapai dari 8 indikator di urusan kelautan dan perikanan;
22. Urusan pariwisata terdapat 3 indikator yang akan dan belum tercapai dari 5 indikator di urusan pariwisata;
23. Urusan pertanian terdapat 27 indikator yang akan dan belum tercapai dari 51 indikator di urusan pertanian;
24. Urusan perdagangan terdapat 7 indikator yang akan dan belum tercapai dari 11 indikator di urusan perdagangan;
25. Urusan perencanaan dan penelitian pengembangan terdapat 4 indikator yang akan dan belum tercapai dari 6 indikator di urusan perencanaan dan penelitian pengembangan;
26. Urusan pengawasan terdapat 2 indikator yang akan dan belum tercapai dari 4 indikator di urusan pengawasan;
27. Urusan keuangan terdapat 1 indikator yang akan dan belum tercapai dari 6 indikator di urusan keuangan;
28. Urusan pemerintahan terdapat 12 indikator yang akan dan belum tercapai dari 21 indikator di urusan pemerintahan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam pencapaian visi misi RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD dalam skala tahunan, tentunya tidak terlepas pada persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah adalah "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan melihat pada kondisi riil saat perencanaan dibuat. Umumnya permasalahan pembangunan daerah timbul dari kekuatan (*strength*) yang dimiliki di daerahnamun belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (*weakness*) yang tidak diatasi, peluang (*opportunity*) yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman (*threats*) yang tidak diantisipasi.

Hanya saja dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat menjadi prioritas dikarenakan tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan minimal bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan

guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisis gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2018, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. **Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat**
   a. Aparatur pemerintahan dengan jumlah yang masih kurang serta kompetensi yang perlu untuk ditingkatkan;
   b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
   c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih dibawah 80 persen diantaranya disebabkan oleh belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula.
   d. Belum optimalnya efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
   e. Masih banyak desa yang belum berstatus swasembada.
2. **Permasalahan Sosial Kemasyarakatan**
   a. Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum tertangani sehinggaberpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat;
   b. Kejadian bencana alam seperti longsor, banjir serta kekeringan yang kurang diantisipasi secara dini dan penanganan yang belum optimal;
   c. Terbatasnya pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan daerah;

d. Belum optimalnya perhatian terhadap penyandang disabilitas seperti fasilitas umum belum ramah difabel serta masih sulitnya kaum difabel mengakses pekerjaan.

3. Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Pokok

a. Masih rendahnya ketersediaan cadangan pangan yang dikelola lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) sehingga banyaknya warga masyarakat miskin yang tidak mampu memperoleh kecukupan pangan dan keterjangkauan harga pangan;

b. Sumber pangan lokal yang belum diusahakan secara optimal dengan sistem pertanian yang baik sehingga mampu tersedia sepanjang tahun dengan jumlah dan kualitas yang baik, di samping sumber pangan lokal yang ada belum diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan pangan bagi masyarakat;

c. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan skor penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang masih rendah (kisaran skor 80 – 90).Konsumsi masyarakat terhadap 9 komponen komoditas pangan yang dianjurkan belum seimbang baik kuantitas maupun kualitasnya. Di samping itu, konsumsi pangan hewani baru mencapai skor 13 dari 24 skor yang dipersyaratkan, sementara konsumsi ikan pada tahun 2018 hanya 5,5 kg/kapita/tahun;

d. Belum optimalnya upaya pemenuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar pola pangan harapan yaitu sebesar 87,90;

e. Pangan yang dikonsumsi masyarakat masih banyak yang mengandung cemaran bahan tambahan pangan berbahaya;

f. Masih tingginya kenaikan harga bahan pangan pada momen-momen tertentu seperti menjelang hari Raya Idul Fitri dan Natal yang berdampak pada menurunnya akses pangan masyarakat;

g. Cadangan pangan di masyarakat yang tersimpan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) belum memadai karena belum semua desa mempunyai lumbung yang representatif.

h. Kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni dan sehat masih cukup besar, utamanya bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;

i. *Backlog* rumah yang masih cukup besar.

j. Pemanfaatan lahan untuk perumahan belum sesuai dengan ketentuan.

4. Permasalahan Sumber Daya Manusia

a. Relatif rendahnya derajat pendidikan masyarakat dan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan dari PAUD, SD, SMP (dan SMA);

b. Relatif rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Lulus UKG 24,15 %; sertifikasi pendidik 82,52%, LKP dan PKBM terakreditasi sangat sedikit), rendahnya capaian SPM SD (90.89) dan SMP (84.91%);

c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik dari sisi kapasitas maupun kualitasnya serta masih rendahnya pemerataan akses layanan pendidikan khususnya bagi keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus.

d. Belum tercapainya *Universal Health Coverage*/UHC (cakupan 2018 : 84%; RPJMD : Pelayanan kesehatan gakin 100%) dan belum semua warga miskin terproteksi Jaminan Kesehatan;

e. Rendahnya kualitas / akses sanitasi masyarakat (112 ODF – 46,86 %; Akses sanitasi : 87,48%; desa STBM 231 – 96,65%);

f. Relatif rendahnya derajat kesehatan masyarakat, diantaranya ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan danAngka Kematian Bayi (AKB) serta masih rendahnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;

g. Semakin meningkatnya Prevalensi HIV - AIDS yang dikhawatirkan merupakan fenomena gunung es yang membutuhkan penanganan optimal.

h. Masih tingginya kasus *stunting* (kerdil) di Kabupaten Purbalingga, akibat pola konsumsi orang tua yang buruk dan pemberian asupan konsumsi pada masa awal kelahiran dan pertumbuhan;

i. Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ditandai dengan masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan trafficking;

j. Belum optimalnya cakupan program Kabupaten Layak Anak (KLA).

k. Tingginya *unmet need* KB antara lain disebabkan jumlah penyuluh KB (PLKB) yang relatif sedikit;

l. Masih rendahnya kepesertaan KB aktif (CPR) dan Kepesertaan KB Pria.

m. Tingginya persentase hamil usia muda (wanita pernah kawin 15 – 21 tahun rata-rata hamil pertama usia 13 tahun), dan tingginya persentase usia kawin muda (menikah pada usia di bawah 17 tahun ada 21,45 persen).

n. Kurang optimalnya pembinaan kepemudaan dan olah raga prestasi terutama pada cabor unggulan, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;

o. Semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya daerah serta memudarnya nilai adat ketimuran sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian dan dalam kehidupan sehari-hari.

p. Rendahnya minat baca – literasi masyarakat, masih rendahnya cakupan perpustakaan desa / kelurahan yang aktif, serta belum terpenuhunya standar perpustakaan daerah sesuai Standar Nasional Perpustakaan/SNP (SDM, koleksi, fumigasi, sarana – prasarana, penyiangan, dll).

q. Masih rendahnya sarana prasarana kearsipan dan kurangnya SDM kearsipan serta belum semua Perangkat Daerah menerapkan pengelolaan arsip secara baku;

5. Permasalahan Ekonomi

a. Masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 15,62% atau sebanyak 144,16 ribu orang;

b. Daya beli masyarakat masih rendah dikarenakan pendapatan per kapita masyarakat juga masih rendah;

c. Peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi belum optimal.

d. Angka pengangguran masih cukup tinggi dan jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, khususnya bagi laki-laki;

e. Masih terbatasnya sarana prasarana, SDM serta jejaring Balai Latihan Kerja (BLK);

f. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD kebawah.

g. Belum optimalnya upaya pemenuhan kesejahteraan pekerja terkait dengan pemenuhan standar kebutuhan hidup layak (KHL), jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja.
h. Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ketransmigrasian secara lintas sektor;
i. Belum optimalnya peran koperasi dan UMKM dalam menggerakan perekonomian daerah terutama dalam kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal serta kualitas produk;
j. Minimnya akses UMKM terhadap kesempatan pengembangan ketrampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
k. Belum optimalnya pelayanan perizinan melalui OSS (*online single submission*);
l. Belum optimalnya upaya peningkatan investasi terkait dengan masih terbatasnya informasi dan promosi bagi calon investor, dan beberapa realisasi investasi masih tertunda karena terkendala kesesuaian tata ruang wilayah dan keterbatasan lokasi peruntukan investasi;
m. Masih banyak bangunan rumah yang belum ber IMB di Purbalingga sehingga capaian retribusi IMB tidak optimal;
n. Sebagian besar pembudidaya perikanan masih berskala kecil dan sebagian besar bahan baku pakan ikan masih harus impor karena pabrik pakan skala rumah tangga dan local belum berkembang dengan baik;
o. Semakin rusaknya ekosistem sungai akibat kegiatan penambangan, pencemaran limbah serta aktivitas perikanan yang kurang memperhatikan kaidah konservasi mengakibatkan menurunnya keragaman haati dan populasi ikan;
p. Belum optimalnya pengembangan pariwisata,seperti kelembagaan, SDM pengelola dan sarana prasarana pendukung serta festival pariwisata;
q. Belum optimalnya produktivitas, kualitas produk pertanian, sarana prasarana pertanian dan kelembagaan SDM Pertanian;
r. Rendahnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan.
s. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi kebutuhan non pertanian yang tidak mungkin dihentikan;

t. Sebagian besar sarana prasarana pasar pemerintah dan pasar tradisional masih kurang layak;
u. Penataan kawasan dan pedagang kaki lima yang belum optimal;
v. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka melindungi konsumen dari kecurangan yang dilakukan oleh produsen belum banyak dirasakan oleh masyarakat.
w. Belum adanya industri manufaktur yang bisa menjadi role model pengembangan industri di Purbalingga;
x. Masih terbatasnya fasilitasi bagi pensertifikasian standarisasi produk industri (HKI, GMP, Halal, SNI, dsb).

6. Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan infrastrukstur khususnya jalan, jembatan, prasarana irigasi serta fasilitas umum;
b. Masih terdapat bangunan gedung milik pemerintah yang rusak dan tidak representatif (Kantor OPD, Kecamatan, Kelurahan);
c. Masih ada kawasan kumuh di wilayah perkotaan meskipun masih dalam kategori kumuh sedang dan ringan;
d. Masih ada beberapa wilayah grumbul belum berlistrik.
e. Belum optimalnya penataan dan pemanfaatan aset tanah Pemda dan akses ke tanah Pemda. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemda dapat menjadi penghambat dalam proses pembangunan.
f. Belum optimalnya pengelolaan terminal tipe C serta belum tertibnya pengelolaan parkir jalan raya;
g. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat guna meningkatkan kenyamanan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas;
h. Belum ada penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
i. Prasarana lalu lintas belum memadai seperti Traffic Light dan rambu-rambu jalan sudah banyak yang rusak;
j. Mobil operasional pemeliharaan LPJU tidak sebanding dengan jumlah LPJU yang dipelihara.

k. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publicserta*e-government* di Pemerintah Kabupaten.

l. Belum terintegrasinyadata statistic (*single data*).

m. Belum optimalnya upaya penanggulangan bencana dikarenakan peralatan kebencanaan belum lengkap, belum tersedianya gudang logistik kebencanaan dan *early warning system* kebencanaan belum optimal, serta data dan informasi kebencanaan belum disajikan dengan baik kepada masyarakat;

7. PermasalahanLingkungan Hidup

a. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk menurunnya kualitas sungai;

b. Masih adanya pencemaran akibat limbah industri (pabrik kayu, pabrik rambut, tapioka) dan belum adanya tempat penyimpanan sementara Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan limbah B3;

c. Meningkatnya luasan lahan kritis dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sertameningkatnya degradasi lahan akibat peningkatan jumlah penduduk;

d. Belum optimalnya pengelolaan sampah (TPA, TPS, Pengangkutan), masih terbatas jangkauan pelayanan persampahan serta belum ditatanya Eks TPA Banjaran;

e. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik belum memenuhi ketentuan minimal 20%;

2.3.2. Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga diidentifikasi dari berbagai sumber, meliputi : 1) Isu strategis dari dinamika internasional, nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga; 2) Isu strategis daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga; 3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan berupa RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, dan 4) Isu strategis dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, sarana prasarana dan pemerintahan umum pada masa kini serta melihat kemungkinan yang akan terjadi masa mendatang.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang menjadi Isu Strategis dan rekomendasinya dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 meliputi:

a. Pembangunan Perekonomian

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 21,466,861 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta.

Dalam struktur PDRB Kabupaten Purbalingga, Sektor Pertanian masih memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 27,27 persen disusul Sektor Industri Pengolahan (26,85 persen), serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (12,65 persen). Meskipun angka PDRB per kapita relatif kecil tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun cukup baik, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga yaitu 5,12 persen; Tahun 2013: 5,27 persen; Tahun 2014 : 4,85 persen; Tahun 2015 : 5,43 persen; dan Tahun 2016 : 4,75 persen.

Meskipun pertumbuhan ekonomi perlu untuk terus lebih didorong, tetapi jika tidak diiringi dengan peningkatan pemerataan pendapatan maka tidak banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, pariwisata, perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi.

Pada tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Purbalingga sebesar 6,06 persen, lebih tinggi dibanding TPT tahun 2017 yaitu sebesar 5,33 persen. Hal ini tentunya menjadi persoalan yang harus segera dicarikan solusinya, dengan lebih mengintensifkan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja, mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK), menggiatkan bursa kerja dalam rangka membuka peluang lapangan kerja sekaligus menempatkan calon-calon tenaga kerja yang sudah dilatih serta dengan mengadakan program-program magang tenaga kerja ke

industri ataupun memfasilitasi program magang ke luar negeri seperti Korea atau Jepang. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengembangan investasi harus diarahkan pada pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan.

Salah satu aktivitas ekonomi yang dipandang memberi efek *multiplier* yang luas dan dapat menjadi *prime mover* perekonomian daerah adalah pariwisata. Berkembangnya kepariwisataan akan dapat mengungkit pertumbuhan berbagai sektor ekonomi seperti sektor perhotelan dan restoran, sektor angkutan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya termasuk sektor-sektor informal. Besarnya potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah perlu untuk didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata.

b. Pembangunan Manusia

Pada hakekatnya tujuan utama pembangunan adalah membangun manusia melalui upaya peningkatan kualitas manusia baik dari aspek lahiriah maupun dalam dimensi yang lebih luas termasuk aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pembangunan fisik prasarana, ekonomi, sosial dan sebagainya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat.

Pembangunan manusia juga menjadi isu strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak dasar ini antara lain meliputi hak untuk mendapatkan identitas/ legalitas, akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan, pangan, perumahan sehat dan layak, serta fasilitas sanitasi dan akses terhadap air minum. Pembangunan manusia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.

Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya terkait pembangunan manusia di suatu daerah dengan menggunakan tolok ukur *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM

merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran Rill per Kapita. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sebesar 67,03 mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 67,48, tahun 2017 menjadi 67,72 dan tahun 2018 menjadi 68,41. Meskipun mengalami kenaikan sampai dengan 68,41 di tahun 2018, namun masih di bawah rata – rata capaian Provinsi Jawa Tengahsebesar 71,12.

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Variabel pertama adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan lama kehidupan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Oleh karena itu AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan lama hidup dan hidup sehat. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya peningkatan taraf kesehatan. Angka Harapan Hidup tinggi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan melalui pemeliharaan bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Capaian indikator IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2015 sampai 2018 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.109
Capaian Komponen IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018

Komponen IPM	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,81	72,86	72,91	72,98
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,78	11,93	11,94	11,95
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,85	6,86	6,87	7,00
Pengeluaran perkapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah PPP)	8.938	9.159	9.340	9.786

Sumber: BPS. 2016-2019

Indikator pembangunan pendidikan selanjutnya adalah Rata – rata Lama Sekolah (RLS). RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. Awal perhitungan RLS dilakukan dengan menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas, baru selanjutnya menghitung lamanya sekolah. Apabila dalam partisipasi sekolah seseorang tidak/belum pernah bersekolah, maka skor lama sekolahnya 0 (nol). Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka perhitungan lama sekolah disesuaikan dengan cara konversi ijazah ke dalam tahun lama sekolah.

Untuk yang tidak mempunyai ijazah, maka skor konversi tahun lama sekolahnya 0 tahun, SD sedrajat 6 tahun, SMP sederajat 9 tahun, SMA sederajat 12 tahun, D1/D2 sederajat 14 tahun, D3 sederajat 15 tahun, D4/S1 sederajat 16 tahun, dan S2/S3 sederajat 18 tahun. Adapun capaian RLS Kabupaten Purbalingga sebesar 6.85 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 7,00 pada tahun 2018. Capaian RLS ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2018 sudah mencapai 7,35.

Sementara itu, kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan

kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purcashing Power Parity-PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Capaian paritas daya beli Kabupaten Purbalingga sebesar 9,786juta pada tahun 2018 masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10,777juta.

Berbagai hal yang harus diprioritaskan dalam pembangunan pendidikan antara lain memperluas dan pemerataan akses pendidikan dalam rangka mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah terutama bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, proses pendidikan harus menjadi sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang melalui internalisasi dan pengintegrasian dalam pendidikan.

Dalam pembangunan kesehatan, hal yang perlu mendapatkan perhatian kesehatan ibu anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu, perlu untuk terus ditingkatkan upaya pemenuhan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan serta pemberian fasilitas layanan jaminan kesehatan untuk seluruh warga masyarakat terutama bagi warga miskin. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka memperkukuh karakter dan jatidiri warga masyarakat perlu adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menangkal penetrasi budaya global yang kurang konstruktif serta meningkatkan apresiasi terhadap bahasa nasional dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

c. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia

Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebanyak 144.160 ribu jiwa atau sebesar 15,62 persen dengan garis kemiskinan Rp. 324.735 per kapita/bulan, data ini turun dari tahun 2017 yang sebanyak 171,88 ribu jiwa atau sebesar 18,80 persen dengan garis kemiskinan Rp. 313.343 per kapita/bulan. Meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga masih menempati peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah. Relatif tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga menyebabkan relatif rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokokhidupnya.

Permasalahan utama penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga adalah pemenuhan kebutuhan pangan.Kondisi musim yang tidak menentu akan mempengaruhi produksi dan ketersediaan pangan, serta sering terjadinya fluktuasi harga bahan pangan pokok menjadi bagian dari penyebab rendahnya daya beli masyarakat kurang mampu. Disamping permasalahan pangan, persoalan yang perlu mendapatkan penanganan adalah masih banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh. Di samping itu,kedepan perlu ada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi menuju universal access 100-0-100.

d. Penciptaan Pemerintahan Yang Efektif dan Stabilitas Trantibum

Visi Pemerintah Daerah akan dapat dicapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip-prinsip *good governance* antara lain efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis (*strategic vision*). Luasnya cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipikul pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus menghasilkan output secara optimal agar seluruh elemen organisasi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dengan mendayagunakan sumberdaya secara efisien. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam

rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diharapkan pada masa yang akan datang kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat terus mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu sesuai hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD)yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tiga tahun berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar nasional, dengan mendapat skor dengan kategori sangat tinggi sehingga mendapatkan tropi Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha dari kementerian Dalam Negeri. Sedangkan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga baru berada pada kategori CC (cukup baik).

Aktivitas seluruh elemen pemerintah daerah harus mengarah kepada visi yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Elemen organisasi dan struktur jabatan yang bersifat koordinatif harus berperan optimal dalam mengarahkan dan menggerakkan lini organisasi dalam rumpun koordinasinya agar masing-masing dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi daerah. Untuk itu seluruh elemen pemerintah daerah harus memahami visi daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap elemen organisasi pemerintah daerah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga secara efektif akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan

tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan maka pada gilirannya akan dapat diwujudkan visi pemerintah daerah.

Agar setiap elemen pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan yang secara efektif mampu mendukung terwujudnnya visi dan misi pemerintah daerah, harus didukung dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional. Profesionalitas aparatur pemerintah daerah mensyaratkan adanya integritas, kapasitas dan kompetensi. Oleh karena itu sistem karir aparatur harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan *meryt system*. Organisasi perangkat daerah harus disusun dengan struktur yang ramping tetapi mampu melaksanakan seluruh fungsi secara optimal dengan sistem tata kelola yang efektif.

Sedangkan yang terkait dengan stabilitas ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi salah satu permasalahan penting pembangunan pada saat ini adalah adanya kecenderungan menurunnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Kebanggaan terhadap jatidiri bangsa semakin terkikis oleh nilai-nilai budaya asing yang dianggap lebih superior. Identitas nasional meluntur akibat cepatnya penyerapan budaya global, sementara nilai-nilai positif budaya bangsa yang lebih relevan bagi pembangunan karakter bangsa justru diabaikan. Berkembangnya budaya materialisme, konsumerisme dan hedonisme menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat patriotisme.

Berkembangnya semangat materialisme dan hedonisme juga menyebabkan berkembangnya mentalitas menerabas dan kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, inovasi, dan pencapaian prestasi yang pada tahap berikutnya berdampak terhadap meningkatnya tindak kekerasan, premanisme dan kriminalitas. Kesemarakan kehidupan beragama yang nampak pada saat ini ternyata belum sejalan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama terbukti dengan banyaknya perilaku asusila, pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, meningkatnya kriminalitas serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Disisi lain kecenderungan meningkatnya radikalisme dalam pemahaman agama juga menjadi ancaman tersendiri bagi tegaknya

integritas nasional. Sementara itu kecenderungan berkembangnya sektarianisme agama dan fanatisme golongan yang berlebihan menjadi ancaman tersendiri bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu pengembangan wawasan kebangsaan serta penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme perlu terus ditingkatkan pada saat ini dan yang akan datang. Demikian juga perlu dilakukan upaya pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral yang positif baik yang berpijak pada nilai agama maupun nilai budaya bangsa. Internalisasi nilai-nilai moral yang positif dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, non formal, informal maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan beragama perlu terus didorong guna meningkatkan pengamalan dan penghayatan nilai–nilai agama bersamaan dengan upaya mewujudkan kerukunan inter dan antar umat beragama.

Mengacu agenda politik Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020 akan diselenggarakan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat, maka perlu upaya pembinaan politik dan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kondusivitas wilayah Kabupaten Purbalingga.

e. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana irigasi, prasarana perkotaan, prasarana permukiman, serta prasarana pelayanan sosial dan ekonomi dengan kapasitas dan kualitas yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan untuk kelancaran distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan dan jembatan yang tidak memadai akan menyebabkan terhambatnya angkutan barang dan orang sehingga akan menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sampai dengan saat ini, meskipun seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga telah dapat diakses melalui angkutan kendaraan bermotor roda empat, tetapi masih perlu peningkatan kapasitas jalan untuk meningkatkan akses ke beberapa wilayah tertentu. Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi transportasi, juga perlu dilakukan pembangunan beberapa jalan dan

jembatan baru untuk menghubungkan beberapa wilayah tertentu agar diperoleh jarak tempuh yang lebih pendek. Untuk meningkatkan umur ekonomi jalan juga diperlukan pembuatan saluran drainase dan talud pengaman jalan pada titik-titik tertentu di seluruh wilayah.

Posisi geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang jauh dari dua jalur utama lalu lintas di Pulau Jawa baik jalur utara maupun jalur selatan dengan akses jalan yang relatif sempit dan naik-turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien. Pada era globalisasi di mana segala aktivitas ekonomi menuntut untuk diselenggarakan secara cepat dan tepat waktu, maka kendala akses wilayah menjadi hambatan bagi pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini menyebabkan wilayah kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan pada umumnya relatif tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan secara umum agar tidak tertinggal dibanding dengan wilayah lain, dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu transportasi udara. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Purbalingga akan terus berupaya dan berpartisipasi aktif untuk melakukan koordinasi dan memberikan dukungan bersama-sama dengan daerah lain di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, dan TNI Angkatan Udara untuk terwujudnya pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirmandi Wirasaba menjadi Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman.

Pembangunan serta peningkatan kapasitas dan kualitas bendung dan saluran irigasi juga masih perlu untuk dilaksanakan guna meningkatkan kelancaran penyediaan air bagi kepentingan budidaya pertanian dalam arti luas. Ketersediaan air sangat vital bagi budidaya pertanian sehingga produksi pertanian tidak mungkin dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan apabila tidak tersedia jaringan irigasi yang mampu mengalirkan air pada seluruh lahan pertanian.

Sementara itu, untuk meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keindahan serta meningkatkan kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat di perkotaan diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas

prasarana perkotaan serta penataan kawasan perkotaan. Dengan terwujudnya kawasan perkotaan yang tertib, indah, nyaman, dan aman, dengan sendirinya juga akan menciptakan daya tarik wilayah bagi kunjungan pariwisata maupun peningkatan daya tarik investasi.

Di samping itu, eksploitasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia seperti pencemaran air dan udara, meningkatnya angka kesakitan penyakit degenartif, meningkatnya kerusakan lahan, menurunnya populasi ikan di perairan umum, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna, terjadinya banjir dan tanah longsor, serta meningkatnya pemanasan global yang semakin terasa.

Peningkatan pemanasan global dipicu meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersumber dari kegiatan manusia dalam menggunakan energi fosil, pengelolaan lahan dan pertanian, serta pengelolaan limbah. Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada peningkatan intensitas hujan dan kemarau serta terjadi pergeseran musim. Dampak perubahan iklim berakibat terjadinya gagal panen pada sektor pertanian dan meningkatnya intensitas bencana seperti banjir, angin ribut, dan kemarau berkepanjangan. Diperlukan upaya mengurangi perubahan iklim tersebut melalui aksi-aksi mitigasi (pengurangan) emisi gas rumah kaca di sektor transportasi, peningkatan tutupan lahan, pertanian rendah emisi, dan pengelolaan limbah.

Sementara itu pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan menurunnya daya dukung lingkungan menyebabkan semakin cepatnya penurunan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan populasi manusia bersamaan dengan peningkatan aktivitasnya serta peningkatan pemanfaatan bahan-bahan hasil sintesa kimiawi mengakibatkan meningkatnya dengan pesat produksi bahan pencemar lingkungan hidup (polutan) seperti sampah plastik, asap kendaraan bermotor, limbah kimia dan sebagainya. Di sisi lain peningkatan populasi penduduk menyebabkan peningkatan desakan terhadap sumberdaya lahan yang ditandai dengan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian maupun lahan yang memiliki

fungsi lindung. Memburuknya kondisi hutan lindung dan kawasan lindung lainnya seperti kawasan tangkapan air, kawasan sekitar mata air, sempadan sungai, lahan dengan kelerengan tinggi telah mengakibatkan berbagai permasalahan dan ancaman bagi kehidupan manusia seperti mengeringnya beberapa mata air akibat menurunnya keseimbangan tata air, terjadinya tanah longsor, terjadinya banjir yang besar ketika musim penghujan dan kekeringan yang ekstrim ketika musim kemarau dan sebagainya.

Pengelolaan persampahan merupakan permasalahan penting yang selama ini belum mampu ditangani secara optimal. Saat ini pelayanan persampahan baru mencapai 10 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga. Jumlah potensi timbulan sampah jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk lebih dari 1.942,6 m3 per hari atau 58.278 m3 per bulan atau melebihi volume candi Borobudur (55.000 m3). Besarnya timbulan sampah yang tidak tertangani di samping akan mengganggu keindahan dan kenyamanan juga akan memberi dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran air, tanah, udara serta gangguan kesehatan dan estetika. Keterbatasan kapasitas penanganan sampah di samping karena keterbatasan kapasitas armada, tempat penampungan sementara dan jumlah tenaga kebersihan yang ada juga karena terbatasnya daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada pada saat ini.TPA Banjaran sudah tidak mampu menampung volume sampah yang ada sehingga harus ditutup. Pemindahan TPA ke lokasi yang baru di Desa Bedagas membutuhkan proses pengadaan tanah dan pembangunan sarana dan prasarana TPA baru, sehingga membutuhkan waktu dan juga anggaran yang besar. Belum siapnya lokasi baru TPA Kalipancur di Desa Bedagas menjadi permasalahan persampahan tersendiri.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang lebih cepat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan fungsi lingkungan hidup serta rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian daerah tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomiaan daerah saat ini serta pengaruh dari kondisi lingkungan ekonomi global, nasional maupun regional. Perekonomian global sejauh ini masih relatif terkendali, dimana dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Namun demikian berbagai lembaga keuangan dunia yang dirilis dalam *World Economic Outlook*, memperkirakan bahwa tahun 2019 dan 2020 akan terjadi perlambatan dan meningkatnya resiko. Melemahnya ekonomi dunia merupakan dampak dari aktivitas perdagangan dan manufaktur internasional yang melesu. Perlambatan ekonomi tersebut juga dipicu oleh melemahnya ekonomi Eropa dan China serta negara berkembang, perang dagang yang semakin tidak terkendali khususnya antara AS-China, serta kemungkinan perundingan *brexit* yang tidak ada kesepakatan atau *no deal*.

Berbagai faktor pemicu tersebut memaksa berbagai lembaga keuangan dunia merevisi atau menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 dan 2020. Bank dunia menaksir pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 menurun menjadi 2,9 persen atau lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi ekonomi negara-negara maju diperkirakan melemah dari 2,2 persen tahun 2018 menjadi hanya 2 persen, sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang stagnan di angka 4,2 persen karena melambatnya permintaan eksternal, meningkatnya biaya pinjaman serta ketidakpastian kebijakan yang terus menerus sehingga membebani prospek pertumbuhan. Resiko pertumbuhan ekonomi yang menurun tajam tersebut, mau tak mau harus diantisipasi oleh pembuat kebijakan di tingkat Nasional maupun daerah, karena bagaimanapun juga perekonomian nasional dan daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika perekonomian global.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendorong daya tahan perekonomin terhadap berbagai resiko. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2019 diperkirakan masih di atas 5 persen, namun melihat berbagai tantangan yang ada, perlu upaya keras agar tidak meleset dari target. Untuk menjaga pertumbuhan, maka pemerintah daerah harus mengarahkan kebijakan dengan memperkuat pada tiga aspek, yaitu mendorong

optimalisasi belanja pemerintah, menggenjot sektor investasi publik, serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, dalam upaya menciptakan pemerataan pembangunan daerah, maka pada tahun 2020 juga melakukan berbagai kebijakan yang antara lain diarahkan untuk :

(1) Meningkatkan upaya perlindungan terhadap masyarakat,
(2) Optimalisasi pemanfaatan potensi strategis dan unggulan daerah,
(3) Pengembangan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka sangat dibutuhkan sinergitas dalam upaya memadukan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah adanya sinergitas di internal pemerintah daerah maupun dengan stakeholders seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

Sementara itu, berkaitan dengan asumsi Makro pada tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan beberapa asumsi makro nasional antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Makro APBN Tahun 2019 dan 2020

INDIKATOR	APBN 2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,3 – 5,5
Inflasi (%)	2,5 – 4,5	2,0 – 4,0
Nilai Tukar (Rupiah/USD)	15.000	14.500 – 14.950
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)	70	65 – 75
Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hari)	775	695 – 840
Lifting Gas (Rb barel/hari)	1.250	1.191 – 1.300

Berdasarkan asumsi makro nasional tersebut di atas, maka arah kebijakan makro nasional tahun 2020 adalah:

a. Meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia melalui:

1) Transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan dengan focus pada revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan,dan transformasi sector jasa;

2) Penguatan Permintaan domestic dan peningkatan kinerja perdagangan internasional dengan mendorong investasi sebagai ujung tombak

pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal dan menjaga keberlangsungan fiscal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian.

b. Menjaga stabilitas makro ekonomi dengan menjaga stabilitas harga, eksternal dan sector keuangan.

c. Memastikan inklusivitas dan keberkanjutan pembangunan ekonomi dengan mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan dan mempertahankan keseimbangan lingkungan.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan sasaran makro Provinsi Jawa Tengah di atas, maka sasaran makro kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 diproyeksikan sebagai berikut:

a. Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu tumbuh antara 5- 6 persen. Kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga difokuskan pada upaya pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan membangun dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumberdaya lokal melalui peningkatan konektivitas dan infrastruktur kewilayahan; optimalisasi pemanfaatan Bandara Jenderal Besar Soedirman; perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil; pengembangan destinasi pariwisata potensial; pengembangan dan revitalisasi pasar; dan pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil.

b. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 12-14 persen,yang akan diupayakan melalui: 1) pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin; dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan sinergitas antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Prioritas dan fokus penanganannya pada kecamatan dan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, berdasarkan Basis Data Terpadu dan data sektoral yang komprehensif.

c. Tıngkat Pengangguran Terbuka diharapkan pada kisaran 5,0 – 5,5 persen. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah adanya bonus demografi yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM utamanya bagi penduduk usia produktif, serta belum optimalnya serapan tenaga kerja.

d. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan dapat mencapai lebih dari 69,29. Upaya pencapaiannya ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,pelayanan pendidikan dan peningktan pendapatan masyarakat.

Proyeksi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga tersebut, disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang berkembang, serta realisasi indikator makro tahun 2017 dan 2018 serta proyeksi tahun 2019 dan 2020 selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2017	2018	2019	2020
1	PDRB (harga berlaku)	Rp. Juta	21.466.860,72	23.762.142,73 *	24.971.979,47	27.094.597,72
2	PDRB (harga konstan)	Rp. Juta	15.564.264,43	16.373.606,18 *	16.353.071,40	17.203.431,11
3	PDRB per kapita (harga berlaku)	Rupiah	23.424.517	25.275.054 *	26.223.222	28.452.195
4	PDRB per kapita (harga konstan)	Rupiah	16.983.698	17.866.850 *	19.854.641	20.887.082
5	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku)	Persen	7,75	7,79 *	8,43	8,43
6	Pertumbuhan PDRB (Harga Konstan)	Persen	5,12	5,2 *	5,34	5,0 - 5,3
7	Tingkat Inflasi	Persen	3,72	3,01	3 ± 1	<3
8	Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,98	0,94 *	0,9	0,9
9	Penduduk Miskin	Persen	18,80	15,62	13-15	13,6 –14,6
10	Tingkat Pengangguran	Persen	5,33	6,06	5 - 6	5,0 – 5,5
11	IPM	Angka	67,72	68,41	68,73	>69

**angka sementara*

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah hal-hal yang terkait dengan pendapatan, belanja, pembiayaan dan tata kelolanya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. Untuk dapat menyusun kerangka pendanaan pembangunan ke depan sebelumnya harus diketahui gambaran kinerja keuangan daerah pada saat ini. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar dalam penyusunan proyeksi keuangan daerah tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga.

Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali (terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), serta peraturan perundangan lain yang terkait.

3.2.1 Gambaran Keuangan Daerah

A. Gambaran Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah secara umum berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer bersumber dari atas : 1) Dana Perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana Alokasi Umum dan Dana alokasi khusus; dan 2) transfer pemerintah pusat lainnya yang berupa dana penyesuaian. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari: 1) pendapatan hibah; 2) pendapatan dana darurat; dan 3) pendapatan lainnya.

Adapun kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga yang diterapkan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain:

a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak daerah, review terhadap tarif pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.

c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta.

e. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 dan Anggaran tahun 2019dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Berdasarkan realisasi tersebut, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 – 2018 sebesar12,34 persen, namun apabila tanpa disertakan pendapatan BOS yang merupakan transfer pemerintah provinsi yang dikaui pada obyek Lain-lain PAD yang sah pertumbuhannya hanya sebesar 8,95. Sumber utama PAD Kabupaten Purbalingga meliputi Lain-lain PAD yang Sah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan dana perimbangan sebesar 10,60 persen dan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami penurunan. Pertumbuhan pada dana perimbangan yang diikuti dengan penurunan lain-lain penerimaan daerah yang sah disebabkan adanya pergeseran akun pendapatan dari lain-lain penerimaan pendapatan dan dana perimbangan.

Tabel 3.3.
Realisasi PendapatanKabupaten Purbalingga Tahun 2014- 2018

NO	URAIAN	REALISASI (Rp. 000)					Rata2 Pertum-buhan	Anggaran 2019
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	**PENDAPATAN DAERAH**							
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**202.413.207**	**210.907.506**	**218.382.360**	**352.594.145**	**282.679.019**	**12,34%**	**266.840.260**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	37.837.517	40.707.801	36.293.914	56.458.638	57.568.782	13,57%	50.680.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.296.583	32.466.466	36.501.485	46.262.719	44.243.731	8,08%	12.883.473
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yg Dipisah	12.016.649	12.306.370	13.859.891	17.478.132	21.406.072	15,90%	21.239.141
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	119.262.457	125.426.869	131.727.070	232.394.656	159.460.431	13,81%	182.037.646
1.2	**Dana perimbangan**	**868.377.042**	**901.365.883**	**1.270.384.508**	**1.235.858.385**	**1.240.574.231**	**10,60%**	**1.305.695.219**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	33.120.213	23.891.824	31.249.867	31.434.685	25.434.251	-3,89%	25.714.709
1.2.2	Dana Alokasi Umum	777.989.499	805.222.229	897.337.823	881.574.843	881.574.483	3,30%	918.228.685
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	57.267.330	72.251.830	341.796.818	325.849.217	333.565.496	99,23%	361.751.825
1.3	**Lain-2 Pendapatan yg Sah**	**274.651.063**	**450.599.803**	**358.025.515**	**363.277.508**	**425.188.777**	**15,51%**	**484.699.268**
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.100.074	8.626.737	11.201.158	6.531.616	92.294.835	335,66%	90.652.400
1.3.3	DBH Pajak Provinsi dan Pemda lainnya	64.346.027	91.414.187	112.992.776	106.367.884	111.398.121	16,13%	112.992.776
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otsus	173.720.857	249.255.085	149.527.020	191.224.910	209.434.262	10,22%	281.054.092
1.3.5	Bantuan Keu Prov & Pemda	30.484.104	34.696.821	84.304.561	55.404.387	12.061.559	11,07%	-
1.2.6	Dana Penyes Tunjangan Pendidikan	-	-	-	-			-
1.2.7	Pendapatan Lainnya	-	66.606.973	-	3.748.710			
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**1.345.441.312**	**1.562.873.192**	**1.846.792.383**	**1.954.730.039**	**1.948.442.029**	**9,96%**	**2.057.234.747**

Pada realisasi tahun 2017 dan 2018 terjadi perubahan yang signifikan pada obyek pendapatan asli daerah dengan sub obyekLain-lain PAD yang sah dan obyek Pendapatan Hibah. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pengakuan pendapatan yang pada tahun 2016 pendapatan BOS tidak masuk APBD yakni transfer langsung dari Pemerintah Provinsi ke Sekolah, serta pada tahun 2017 dan 2018 pendapatan BOS masuk melalui APBD dengan pengakuan pada obyek Lain-lain PAD yang sah di tahun 2017 dan pada obyek hibah pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel 3.4.
Proporsi PendapatanKabupaten Purbalingga Tahun 2014- 2018

URAIAN	REALISASI (Rp. 000)					Anggaran
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PENDAPATAN DAERAH						
Pendapatan Asli Daerah	**15,04%**	**13,49%**	**11,82%**	**18,04%**	**14,51%**	**12,97%**
Hasil Pajak Daerah	18,69%	19,30%	16,62%	16,01%	20,37%	18,99%
Hasil Retribusi Daerah	16,45%	15,39%	16,71%	13,12%	15,65%	4,83%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yg Dipisah	5,94%	5,83%	6,35%	4,96%	7,57%	7,96%
Lain-lain PAD Yang Sah	58,92%	59,47%	60,32%	65,91%	56,41%	68,22%
Dana perimbangan	**64,54%**	**57,67%**	**68,79%**	**63,22%**	**63,67%**	**63,47%**
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	3,81%	2,65%	2,46%	2,54%	2,05%	1,97%
Dana Alokasi Umum	89,59%	89,33%	70,64%	71,33%	71,06%	70,32%
Dana Alokasi Khusus	6,59%	8,02%	26,90%	26,37%	26,89%	27,71%
Lain-2 Pendapatan yg Sah	**20,41%**	**28,83%**	**19,39%**	**18,58%**	**21,82%**	**23,56%**
Pendapatan Hibah	2,22%	1,91%	3,13%	1,80%	21,71%	18,70%
DBH Pajak Provinsi dan Pemda lainnya	23,43%	20,29%	31,56%	29,28%	26,20%	23,31%
Dana Penyesuaian dan Otsus	63,25%	55,32%	41,76%	52,64%	49,26%	57,99%
Bantuan Keu Prov & Pemda	11,10%	7,70%	23,55%	15,25%	2,84%	-
Dana Penyes Tunjangan Pendidikan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	14,78%	-	1,03%	-	-

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun (2014 – 2018) relatif rendah yaitu pada kisaran 14,31 persen. Dana Perimbangan dari pemerintah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pendapatan daerah sekitar 63,56 persen dan sisanya berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah.

B. Gambaran Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan pembelanjaan pada periode Tahun 2015 – 2018 dilakukan melalui analisis belanja daerah.

Adapun Gambaran Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari belanja langsung dengan gambaran sebagai berikut :

a) **Belanja Tidak Langsung,** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :
   - Belanja Pegawai,digunakan untuk belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang undangan. Arah kebijakan belanja pegawai adalah peningkatan kesejahteraan pegawai berbasis kinerja.
   - Belanja Bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
   - Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
   - Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
   - Belanja Bantuan Sosial,ditujukan untuk bantuan sosial kepada perorangan atau kelompok masyarakat yang mengalami risiko sosial;

- Belanja Bagi Hasil,ditujukan untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Bantuan Keuangan,baik yang bersifat umum maupun khusus kepada kabupaten/kota, desa dan partai politik;
- Belanja Tak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b) **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :
- Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium dan uang lembur;
- Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan ASN, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas, dan sebagainya;
- Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan sebagainya.

Gambaran tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2015 – 2018 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015 – 2018

NO	URAIAN	REALISASI (Rp. 000)				ANGGARAN (Rp. 000)
		2015	2016	2017	2018	2019
1	**BELANJA TDK LANGSUNG**	**962.432.093**	**1.218.546.595**	**1.133.116.238**	**1.126.714.097**	**1.222.925.032**
1.1	Belanja Pegawai	759.987.567	913.478.457	777.185.506	747.245.718	820.084.497
1.2	Belanja Bunga	9.504.569	24.688	-	-	-
1.3	Belanja Hibah	20.284.067	16.343.659	19.350.662	26.442.317	21.912.500
1.4	Belanja Bantuan Sosial	4.167.099	26.961.000	25.740.800	23.903.300	24.698.500
1.5	Belanja Bagi Hasil	4.467.762	6.804.501	5.359.677	6.645.949	6.645.949
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	163.521.029	252.284.290	301.879.593	321.751.357	347.083.586
1.7	Belanja TT	-	2.000.000	3.100.000	225.455	2.000.000
1.8	Belanja Subsidi	500.000	650.000	500.000	500.000	500.000
2	**BELANJA LANGSUNG**	**508.496.141**	**868.813.785**	**998.939.463**	**798.194.334**	**878.356.858**
JUMLAH		**1.470.928.234**	**2.087.360.380**	**2.132.055.701**	**1.924.908.432**	**2.101.281.890**

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung, dengan komposisi terbesar dari Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Keuangan.

C. Gambaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Gambaran pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang sumber dan pemanfaatanya antara lain :

a. Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya.

b. Penyertaan modal perusahaan milik daerah.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2015 – 2018 secara lengkap dapat dilihat pada berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015 – 2018

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN (Rp.000)				ANGGAR-AN 2019
		2015	2016	2017	2018	
1	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**198.133.253**	**279.427.219**	**191.043.611**	**114.447.753**	**52.133.143**
1	Penggunaan SILPA	169.283.610	264.427.219	160.243.611	114.438.867	52.133.143
2	Pencairan Dana Cadangan	28.694.671	15.000.000	30.800.000	-	-
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	154.972	-	-	8.886	-
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**35.150.546**	**38.859.222**	**21.126.145**	**12.878.251**	**8.086.000**
1	Pembentukan Dana Cadangan	16.146.826	15.000.000	-	-	-
2	Pernyataan Modal/Investasi Pemda	18.940.000	23.795.500	21.126.145	12.878.251	8.086.000
3	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	63.720	63.722	-	-	-
Pembiayaan Netto		**162.982.707**	**318.286.441**	**169.917.466**	**101.569.502**	**44.047.143**

3.2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka dilakukan kebijakan yang tepat.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2015 – 2018, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi sehingga kinerja penyelenggaraan pembangunan dapat lebih ditingkatkan. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

a. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

b. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;

c. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;

d. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah;

e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;

f. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di Purbalingga sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment

g. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat

h. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah

i. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun dengan asumsi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan mendasarkan realisasi potensi pendapatan daerah Tahun 2019 dan potensi tahun 2020;

b. Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak dihitung dengan memperhatikan kebijakan nasional terkait dana perimbangan;

c. Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Penyesuaian yang pengalokasiannya berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan penerimaan tahun lalu.

Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020 - 2021

NO	URAIAN	Anggaran 2019 (Rp. 000)	PROYEKSI (Rp. 000)	
			2020	Prakiraan Maju 2021
1	**PENDAPATAN DAERAH**			
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**266.840.260**	**280.735.540**	**285.735.540**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	50.680.000	57.762.000	62.762.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.883.473	12.883.473	12.883.473
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	21.239.141	21.239.141	21.239.141
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	182.037.646	188.850.926	188.850.926
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.305.695.219**	**1.292.894.044**	**1.292.894.044**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	25.714.709	25.714.709	25.714.709
1.2.2	Dana Alokasi Umum	918.228.685	918.228.685	918.228.685
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	361.751.825	348.950.650	348.950.650
1.3	**Lain-lain Pendapatan yg Sah**	**484.699.268**	**461.866.781**	**461.866.781**
1.3.1	Pendapatan Hibah	90.652.400	90.652.400	90.652.400
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda lainnya	112.992.776	112.992.776	112.992.776
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otsus	281.054.092	258.221.605	258.221.605

NO	URAIAN	Anggaran 2019 (Rp. 000)	PROYEKSI (Rp. 000)	
			2020	Prakiraan Maju 2021
1.3.5	Bantuan Keuangan Prov & Pemda	-	-	-
1.2.6	Penyesuaian Tunj Pendidikan	-	-	-
1.2.7	Pendapatan Lainnya	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**2.057.234.747**	**2.035.496.365**	**2.040.496.365**

Dari Tabeldi atas dapat dilihat proyeksi pendapatan daerah tahun 2020 turun dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini diasumsikan adanya penurunan transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian,dari PAD mengalami peningkatan dengan mengupayakan perbaikan data base pajak daerah dan peningkatan kinerja BUMD, serta lain-lain PAD sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

b. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas serta peningatan kinerja;

c. Belanja diprioritaskan untuk mengoptimlkan pendayagunaan sumberdaya lokal untuk pertumbuhan berkualitas dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, dengan fokus pada :

a) Pengembangan pariwisata sebagai *prime mover* perekonomian daerah, melalui peningkatan jumlah dan kualitas : destinasi, atraksi, amenitas dan akses, serta Industri kreatif berbasi komunitas;

b) Mendorong berkembangnya industri pengolahan berbahan baku lokal;

c) Pengembangan komoditas bernilai tambah dan daya saing tinggi seperti kopi, durian, gula kelapa & nanas dari sisi *on* dan *off farm*

d) Fasilitsi UMKM melalui program bela beli;kredit mawar & subsidi bunga; pelatihan *entrepreneurship*, teknis, dan manajemen; bantuan peralatan; fasilitasi legalitas dan standarisasi produk; penguatan jejaring pemasaran; pengembangan koperasi produksi; serta penyediaan pusat oleh-oleh;

e) Peningkatan investasi dan kegiatan perekonomianmelalui peningkatan daya tarik investasi;

f) Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, pensertifikatan dan penyaluran tenaga kerja;

g) Optimalisasi pemanfaatan LIK Logam sehingga mampu memberikan fasilitasi kepada para pelaku industi logam dan industry lainnya di Purbalingga;

h) Pengembangan PKL centre dalam rangka pemberian fasilitas yang layak bagi PKL dan penataan Kawasan perkotaan;

i) Revitalisasi pasar kabupaten dan pasar desa;

j) Menjaga stabilitas harga barang dan pola konsumsi masyarakat guna pengendalian inflasi;

2. Pembangunan Manusia, dengan fokus pada :

a) Peningkatan Kualitas dan PemerataanAkses Pendidikan, melalui :
   - Pemerataan serta Peningkatan Kualitas Guru ;
   - Pemerataan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan ;
   - Mendorong Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan ;
   - Penanganan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah untuk kembali sekolah melalui jalur pendidikan formal dan non formal ;
   - Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Bantuan Biaya Operasional Pendidikan.

b) Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Kesehatan, melalui :

- Pengarusutamaan upaya *Promotive* dan *Preventive* melalui Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat menuju Paradigma Sehat ;
- Mewujudkan *Universal Health Coverage* / UHC Jaminan Kesehatan ;
- Akreditasi, Peningkatan Kelas atau Pembangunan Rumah Sakit/ Puskesmas Baru ;
- Peningkatan akses sanitasi masyarakat diantaranya melalui kegiatan jambanisasi;
- Penyediaan Tenaga Kesehatan yang Memadai;

c) Peningkatan Pelayanan Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB, melalui :

- Peningkatan cakupan pelayanan KB dan Optimalisasi KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)
- Penanganan PMKS dan Optimalisasi Rumah Singgah;
- Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Pemberian bantuan kepada PMKS, penyandang disabilitas, Lanjut Usia, Panti Asuhan, dan Pondok Pesantren;
- Failitasi Pelaksanaan Program PPMF di Purbalingga, seperti PKH, BPNT, KIP, dan KIS;

3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok, dengan focus pada:

a) Pemenuhan kebutuhan pangan khususnya bagi keluarga miskin, melalui:

- Pemberian bantuan makanan bagi keluarga miskin melalui Program Rantang Barokah, Rasbangga serta bantuan daging dan ikan;
- Mensinergikan gerakan sodakoh makanan yang sudah tumbuh dalam masyarakat, dengan sasaran program Pemkab;
- Penyelenggaraan pasar murah dengan menyediakan bahan makanan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau;

- Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, balita dan bayi gizi buruk / kurang;
- Penguatan cadangan pangan masyarakat (lumbung pangan), penganekaragaman dan perbaikan pola konsumsi masyarakat;

b) Penyediaan rumah layak huni khususnya bagi keluarga miskin, melalui:

- Melanjutkan kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni menggunakan anggaran pemerintah kabupaten, pusat provinsi dan pemerintah pusat, serta pemereintah desa.;
- Mendorong gerakan Rehab RLTH oleh masyarakat, organisasi profesi, organisasi social dan perusahaan swasta;
- Penanganan dan Penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan dan perdesaan;
- Fasilitasi pengembangan Perumahan Formal;
- Pengoperasian dan Pengembangan Rusunawa;

4. Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan focus pada:

a) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui:

- Perwujudan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, dengan mengembangkan *e-Planning*, *e-Budgeting*, dan *e-Performance* secara bertahap.
- Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi;
- Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan Sistem Inovasi Daerah untuk merangsang Pemerintah dan Masyarakat mengembangkan inovasi untuk kesejahteraan.
- Membangun kerjasama dengan *stakeholders* secara luas (LIPI, Perguruan Tinggi, Pemda Lain, Perusahan, Komunitas, dll)

b) Penciptaan Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum, melalui :

- Peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan kehidupan beragama melalui penguatan ketahanan ideologi Pancasila;

- Terselenggaranya PILKADA yang jujur, adil dan kondusif di Kabupaten Purbalingga;
- Optimalisasi Penanganan Narkoba, Konflik Sosial dan konflik Horisontal;
- Peningkatan dan optimalisasi peran Ormas, LSM, dan organisasi nirlaba lainnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
- Penanganan bencana kebakaran secara optimal;
- Penguatan mitigasi bencana;

5. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan fokus pada:

   a) Peningkatan infrastruktur pengembangan wilayah melalui:

      - Peningkatan akses ke wilayah potensial, wilayah terbatas dan wilayah rawan bencana;
      - Pengembangan infrastruktur penunjang Bandara JB Soedirman;
      - Peningkatan infrastruktur ketahanan pangan;
      - Peningkatan akses pelayanan air minum dan sanitasi;
      - Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana Perkotaan dan Perdesaan;
      - Peningkatan akses air minum, sanitasi & listrik;
      - Mewujudkan penataan ruang yang produktif dan efektif;
      - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan;
      - Penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum;

   b) Peningkatan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, melalui :.

      - Peningkatan pelayanan persampahan melalui pembangunan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dan TPA, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
      - Konservasi sumber daya alam guna mendukung ketersediaan air baku irigasai dan air minum, khusunya pada musim kemarau;

- Pengendalian pencemaran tanah, air dan udara;
- Pengelolaan limbah Rumah Tangga secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat (sanitasi komunal);
- Pemeliharaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau / RTH;

d. Belanja Hibah diarahkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan PILKADA), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai denganurgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugastugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat

e. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.

g. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan desa. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan

kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

i. Penentuan program/kegiatan dan pengalokasian anggaran indikatif berbasiskan *money follow programmepriority*dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif,*dan *Spasial*

j. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Secara lengkap proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2021tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020-2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	PROYEKSI (Rp. 000)	
		2019 (Rp. 000)	2020	Prakiraan Maju 2021
1	**Belanja Tdk Langsung**	**1.222.925.032**	**1.269.910.630**	**1.216.910.630**
1.1	Belanja Pegawai	820.084.497	813.561.595	813.561.595
1.2	Belanja Bunga	-	-	-
1.3	Belanja Hibah	21.912.500	76.792.500	23.792.500
1.4	Belanja Bantuan Sosial	24.698.500	24.698.500	24.698.500
1.5	Belanja Bagi Hasil	6.645.949	6.645.949	6.645.949
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	347.083.586	345.712.086	345.712.086
1.7	Belanja Tidak Terduga	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.8	Belanja Subsidi	500.000	500.000	500.000
2	**Belanja Langsung**	**878.356.858**	**803.134.735**	**857.499.735**
JUMLAH		**2.101.281.890**	**2.074.410.365**	**2.074.410.365**

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2020 diarahkan dalam rangka memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran yang direncanakan. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran belanja daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila sebaliknya, yaitu anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah.Dalam hal terjadi defisit anggaran, jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Sumber utama pada penerimaan pembiayaan Kabupaten Purbalingga adalah SiLPA. SiLPA tersebut dengan kontribusi utama adalah sisa belanja, baik karena efisiensi ataupun penyebab lain. Pada proyeksi tahun 2020 dan 2021 kedepan SiLPA diproyeksikan sama. Namun demikian, diharapkan dalam realisasinya SiLPA dapat turun dengan asumsi dari acres gaji yang tidak dipakai dan sisa belanja yang turun dari tahun ke tahun.

Dalam hal keuangan daerah diperkirakan surplus diutamakan untuk penyertaan modal dan investasi daerah lainnya yang mendukung pelayanan publik dan penerimaan pendapatan. Sebaliknya, apabila APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan Pembiayaan harus terkait pula dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pemanfaatan potensi-potensi daerah melalui pos pembiayaan diantaranya adalah melalui Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pembiayaan ini dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai *profit center* yang dimiliki pemerintah daerah. Alokasi pembiayaan untuk penyertaan modal diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020-2021

NO	URAIAN	Anggaran 2019	PROYEKSI	
			2020	Prakiraan Maju 2021
1	**PEMBIAYAANDAERAH**			
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**52.133.143**	**47.000.000**	**42.000.000**
1	Penggunaan SILPA	52.133.143	47.000.000	42.000.000
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Penerimaan Kembali In-vestasi Non Permanen			
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**8.086.000**	**8.086.000**	**8.086.000**
1	Pembentukan Dana Cadangan			
2	Pernyataan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	8.086.000	8.086.000	8.086.000
3	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam negeri			
Pembiayaan Netto		**44.047.143**	**38.914.000**	**33.914.000**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dilakukan dengan mendasarkan pada:a)hasil evaluasi capaiankinerja RKPD Tahun 2018 disandingkan dengan target kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga periode Tahun 2018; b)identifikasi permasalahan pembangunan daerah; c) rancangan kerangka ekonomi daerahdan kerangka keuangan daerah tahun 2020, termasuk juga memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang; serta d) mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Adapun Visi Kabupaten Purbalingga adalah "**PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA**".

Makna yang termuat dalam Visi Kabupaten Purbalingga tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan.

   Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

b. Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

c. Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

d. Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yang ingin dicapai adalah:

a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;

b. Mendorong kehidupan masyarakatreligius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;

c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja;
f. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai;
g. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketujuh Misi Kabupaten Purbalingga beserta Tujuan dan Sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan sebagaimana dalam RPJMD 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

a. Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.

Untuk mampu mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan prilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah: Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
3. Menurunnya resiko bencana.
4. Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat

c. Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia khususnya pangan dan papan bagi

seluruh masyarakat. Tercukupinya pangan dan papan secara layak juga merupakan landasan yang harus di bangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata. Pemerintah daerah memiliki kewajiban yang besar dalam upaya menurunkan kasus kerawanan pangan dan gizi buruk serta pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah:

1) Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
2) Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

d. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan sasaran :

1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
4) Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
5) Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
6) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7) Meningkatnya budaya gemar membaca.

8) Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni.
9) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.

e. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah dari Misi ke - 5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran :meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, berkurangnya angka pengangguran, serta terkendalinya angka inflasi

f. Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan,

pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah :

1) Mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan penyelanggaraan penataan ruang yang aman, produktif dan berkelanjutan, dengan sasaran :
   a) Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas wilayah
   b) Ketersediaannya air permukaan untuk pertanian pada jaringan irigasi primer dan sekunder
   c) Meningkatnya akses air limbah domestik / RT
   d) Meningkatnya akses pelayanan persampahan
   e) Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
   f) Meningkatnya akses air bersih
   g) Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah
   h) Meningkatnya kapasitas dan kualitas angkutan serta fasilitas perlengkapan jalan
   i) Meningkatnya implementasi *e-government* dan keterbukaaninformasi publik.
2) Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman, dengan Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
3) Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa, dengan sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

g. Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Eksploitasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas dibutuhkan kebijakan besar yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 adalah terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dengan sasaran terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN	
				2017	2018	2020	2021
1	2	3	4	5		7	8
	Misi 1:Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.						
	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat						
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	78,51	79,49	80	80,5
		Opini Audit Keuangan BPK	Opini	WTP	NA	WTP	WTP
		Kategori Akuntabilitas Kinerja	Poin	57,75	58,79	65	NA
		Hasil Penilaian LPPD	Poin	3,2954	NA	3,33	3,5
	Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan						
	Tujuan : Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Dan Rasa Aman Dalam Masyarakat						
1.	Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat .	Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	2,46	1,73	NA	NA
2.	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Perda dan Perbup	Persentase Pelanggaran Perda Ditangani	Persen	100	100	100	100
3.	Menurunnya Indeks Resiko Bencana	Cakupan Korban Bencana Terlayani	Persen	63	100	100	100
4.	Meningkatnya Paham dan Wawasan Kebangsaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	Persen	NA	68,80 *)	87	NA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN	
				2017	2018	2020	2021
1	2	3	4	5		7	8
	Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak						
	Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Pangan						
1.	Meningkatnya Status Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85,20	85,60	90	91
	Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan Dan Kepemilikan Rumah Layak Huni						
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	91,93	93,29	93	93,8
		Cakupan Kepemilikan Rumah	Persen	81,96	81,98	87,62	89,12
	Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat						
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Manusia						
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan lama sekolah	Angka	11,94	11,95	12,3	12,9
		Rata2 lama sekolah	Tahun	6,87	7,00	7,76	7,92
		Angka Kelulusan SD	Persen	100	100	100	100
		Angka Kelulusan SMP	Persen	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,86	72,98	73,3	73,4
3.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata angka kelahiran total/ TFR	Angka	2,47	1,99	2,15	<1
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	78,01	80,30	80	81
5.	Meningkatnya Pelayanan PMKS dan Kelompok Rentan Lain	Persentase PMKS yang terlayani	Persen	68,56	85,58	80	80

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN	
				2017	2018	2020	2021
1	2	3	4	5		7	8
6.	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,31	92,32	> 92	>92
		Cakupan Kekerasan Anak Tertangani	Persen	100	100	100	100
7.	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Rasio Perpustakaan per jumlah penduduk	Rasio	0,001581	0,0092	0,001214	0,001276
8.	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian benda cagar budaya serta prestasi seni	Jumlah gedung/ tempat gelar seni	Unit	11	17	12	12
		Intensitas pementasan seni budaya daerah	Kali	69	77	74	76
9.	Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat capaian cabang olahraga prestasi Nasional	Buah	60	23	30	35
	Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja						
	Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat						
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, berkurangnya angka pengangguran, serta terkendalinya angka inflasi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,33	6,06	<5	<4
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,12	5,2*	5,0 – 5,3	5 - 6
		Laju Inflasi	Persen	3,52	3,01	< 3	< 5
		Angka Kemiskinan	Persen	18,8	15,62	13,6 – 14,6	13-15
	Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai						

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN	
				2017	2018	2020	2021
1	2	3	4	5		7	8
	Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelanggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan						
1.	Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah	Panjang jalan kondisi mantap	Persen	78,95	85,66	90,49	95,32
2.	Ketersediaannya air permukaan untuk pertanian pada jaringan irigasi primer dan sekunder	Cakupan air irigasi	Persen	87,5	89,60	90,5	91
3.	Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	Cakupan RT Mengakses Air Bersih	Persen	87,60	90,43	100	100
4.	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / RT	Cakupan RT Terlayani Sistem Air Limbah	Persen	84,35	87,48	100	100
5.	Meningkatnya Akses Pelayanan Persampahan	Cakupan Timbulan Sampah Terlayani	Persen	55,5	66,75	60	61
6.	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yg Efektif	Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan	Persen	80	82	86	88
7.	Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Angkutan Serta Fasilitas Perlengkapan Jalan	Angka kecelakaan lalu lintas	per 10.000 penduduk	6,03 (556 kejadian)	5,76 (430 kejadian)	5,52	5
8.	Meningkatnya Implementasi *e-gov* dan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat keterbukaan informasi publik	Poin	60	65	70	75
9	Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah pemerintah daerah bersertifikat	Persen	63,07	63,81	95	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN	
				2017	2018	2020	2021
1	2	3	4	5		7	8
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman						
1.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Luasan kawasan kumuh perkotaan	Persen	13,88	0	0	0
	Tujuan : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa						
1.	Meningkatnya kualitas desa	Indek Desa Membangun (IDM)	Poin	0,6394	0,65422	0,67	NA
	Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup						
	Tujuan : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati						
1.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	43,6	54,15	66,5	67

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Mengingat tahun 2020 merupakan tahun keempat pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purbalingga tahun 2016–2021, maka rencana pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 juga diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga dimaksud. Berdasarkan hal tersebut arah kebijakan pembangunan daerah dan menjadi tema RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah ***"Optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Lokal untuk Pertumbuhan Berkualitas"*** dengan disusun 5 prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
2. Peningkatan Pembangunan Manusia
3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok
4. Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Adapun fokus program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, dengan fokus pada :

   a) Pengembangan pariwisata sebagai *prime mover* perekonomian daerah, melalui peningkatan jumlah dan kualitas : destinasi, atraksi, amenitas dan akses, serta Industri kreatif berbasi komunitas;

   b) Mendorong berkembangnya industri pengolahan berbahan baku lokal;

   c) Pengembangan komoditas bernilai tambah dan daya saing tinggi seperti kopi, durian, gula kelapa & nanas dari sisi *on* dan *off farm*

   d) Fasilitsi UMKM melalui program bela beli; kredit mawar & subsidi bunga; pelatihan *entrepreneurship*, teknis, dan manajemen; bantuan peralatan; fasilitasi legalitas dan standarisasi produk; penguatan jejaring pemasaran; pengembangan koperasi produksi; serta penyediaan pusat oleh-oleh;

   e) Peningkatan investasi dan kegiatan perekonomian melalui peningkatan daya tarik investasi;

   f) Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, pensertifikatan dan penyaluran tenaga kerja;

g) Optimalisasi pemanfaatan LIK Logam sehingga mampu memberikan fasilitasi kepada para pelaku industi logam dan industry lainnya di Purbalingga;

h) Pengembangan PKL centre dalam rangka pemberian fasilitas yang layak bagi PKL dan penataan Kawasan perkotaan;

i) Revitalisasi pasar kabupaten dan pasar desa;

j) Menjaga stabilitas harga barang dan pola konsumsi masyarakat guna pengendalian inflasi;

2. Pembangunan Manusia, dengan fokus pada :

a) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan, melalui :
   - Pemerataan serta Peningkatan Kualitas Guru ;
   - Pemerataan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan ;
   - Mendorong Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan ;
   - Penanganan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah untuk kembali sekolah melalui jalur pendidikan formal dan non formal ;
   - Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Bantuan Biaya Operasional Pendidikan.

b) Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Kesehatan, melalui :
   - Pengarusutamaan upaya *Promotive* dan *Preventive* melalui Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat menuju Paradigma Sehat ;
   - Mewujudkan *Universal Health Coverage* / UHC Jaminan Kesehatan ;
   - Akreditasi, Peningkatan Kelas atau Pembangunan Rumah Sakit/ Puskesmas Baru ;
   - Peningkatan akses sanitasi masyarakat diantaranya melalui kegiatan jambanisasi;
   - Penyediaan Tenaga Kesehatan yang Memadai;

c) Peningkatan Pelayanan Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB, melalui:
   - Peningkatan cakupan pelayanan KB dan Optimalisasi KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)
   - Penanganan PMKS dan Optimalisasi Rumah Singgah;
   - Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;

- Pemberian bantuan kepada PMKS, penyandang disabilitas, Lanjut Usia, Panti Asuhan, dan Pondok Pesantren;
- Failitasi Pelaksanaan Program PPMF di Purbalingga, seperti PKH, BPNT, KIP, dan KIS;

3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok, dengan focus pada:

   a) Pemenuhan kebutuhan pangan khususnya bagi keluarga miskin, melalui:

      - Pemberian bantuan makanan bagi keluarga miskin melalui Program Rantang Barokah, Rasbangga serta bantuan daging dan ikan;
      - Mensinergikan gerakan sodakoh makanan yang sudah tumbuh dalam masyarakat, dengan sasaran program Pemkab;
      - Penyelenggaraan pasar murah dengan menyediakan bahan makanan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau;
      - Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, balita dan bayi gizi buruk / kurang;
      - Penguatan cadangan pangan masyarakat (lumbung pangan), penganekaragaman dan perbaikan pola konsumsi masyarakat;

   b) Penyediaan rumah layak huni khususnya bagi keluarga miskin, melalui:

      - Melanjutkan kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni menggunakan anggaran pemerintah kabupaten, pusat provinsi dan pemerintah pusat, serta pemereintah desa.;
      - Mendorong gerakan Rehab RLTH oleh masyarakat, organisasi profesi, organisasi social dan perusahaan swasta;
      - Penanganan dan Penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan dan perdesaan;
      - Fasilitasi pengembangan Perumahan Formal;
      - Pengoperasian dan Pengembangan Rusunawa;

4. Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan focus pada:

a) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui:

- Perwujudan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, dengan mengembangkan *e-Planning*, *e-Budgeting*, dan *e-Performance* secara bertahap.
- Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi;
- Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan Sistem Inovasi Daerah untuk merangsang Pemerintah dan Masyarakat mengembangkan inovasi untuk kesejahteraan.
- Membangun kerjasama dengan *stakeholders* secara luas (LIPI, Perguruan Tinggi, Pemda Lain, Perusahan, Komunitas, dll)

b) Penciptaan Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum, melalui :

- Peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan kehidupan beragama melalui penguatan ketahanan ideologi Pancasila;
- Terselenggaranya PILKADA yang jujur, adil dan kondusif di Kabupaten Purbalingga;
- Optimalisasi Penanganan Narkoba, Konflik Sosial dan konflik Horisontal;
- Peningkatan dan optimalisasi peran Ormas, LSM, dan organisasi nirlaba lainnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
- Penanganan bencana kebakaran secara optimal;
- Penguatan mitigasi bencana;

5. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan fokus pada:

a) Peningkatan infrastruktur pengembangan wilayah melalui:

- Peningkatan akses ke wilayah potensial, wilayah terbatas dan wilayah rawan bencana;
- Pengembangan infrastruktur penunjang Bandara JB Soedirman;
- Peningkatan infrastruktur ketahanan pangan;
- Peningkatan akses pelayanan air minum dan sanitasi;

- Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana Perkotaan dan Perdesaan;
- Peningkatan akses air minum, sanitasi & listrik;
- Mewujudkan penataan ruang yang produktif dan efektif;
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan;
- Penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum;

b) Peningkatan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, melalui :.

- Peningkatan pelayanan persampahan melalui pembangunan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dan TPA, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- Konservasi sumber daya alam guna mendukung ketersediaan air baku irigasai dan air minum, khusunya pada musim kemarau;
- Pengendalian pencemaran tanah, air dan udara;
- Pengelolaan limbah Rumah Tangga secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat (sanitasi komunal);
- Pemeliharaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau / RTH;

4.3. Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Purbalingga juga disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2020 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, sebagai bentuk keselarasan antara kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan

daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yaitu "***Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas***", maka target makro ekonomi nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, antara lain:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,5;
- Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 persen;
- Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3 – 5,6 persen;
- Indeks Gini Rasio sebesar 0,375 – 0,380;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,8 – 5,1 persen;

Target dan sasaran ekonomi makro tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut:

a. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

b. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;

c. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;

d. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;

e. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Selanjutnya, pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang diarahkan untuk ***"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia"***, dengan prioritas:

1. **Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran,** dengan fokus pada :

   a. Pengurangan Kemiskinan:

      1) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainya antara lain melalui akses pendidikan (Beasiswa Siswa Miskin, penyelenggaraan SMK Negeri *Boarding School*, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK vokasi bidik miskin); cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat

miskin; Kartu Jateng Sejahtera; stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik; pemenuhan kebutuhan dasar PMKS; kemudahan akses memperoleh dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin.

2) Penguatan *sustainable livelihood* melalui: fasilitasi akses terhadap modal, manajemen dan pasar; Pengembangan start up wirausaha baru; Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya dengan peningkatan peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/ Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes); peningkatan perandan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).

3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/ TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui Program "Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan" dengan gotong-royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan.

b. Menurunkan angka pengangguran:

1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program *linkandmatch.*

2) perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan friendly bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum.

3) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerjadiantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

2. **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah,** fokus pada:

a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui: peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis *skill knowledge/ attitude* dan *learning culture*, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi masyarakat; pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat diantaranya dengan pemanfaatan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk kegiatan kebudayaan masyarakat.

b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui: Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan stunting, penuntasan ODF, peran Posyandu); Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan; Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan; Pembudayaan/ pemassalan olah raga kepada masyarakat didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana olah raga.

c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; peyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah.

3. **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan,** fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan upaya diantaranya:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian, melalui: Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; Penguatan kelembagaan dan dukungan

jaminan usaha/asuransi petani; Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep *agriculture estate'* (integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai potensi lokal kawasan); Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya serta upaya menjaga ketersediaan airnya.

b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: Peningkatan kapasitas, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan/ asuransi nelayan termasuk di dalamnya akses teknologi dan permodalan; Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap; Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; Perbaikan tata niaga perikanan.

c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m3 dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah untuk menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok dengan cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar.

e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui: pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri (standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri kecil dan menengah (modal, pemasaran dan standarisasi produk); pengembangan bahan baku industri substitusi imper; penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi; integrasi antar sektor pendukung.

f. Peningkatan *ecosociotourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukungkoridor pariwisata Jawa Tengah. Implementasinya dilakukan dengan: Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi; Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.

g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui: Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka; Pengembangan digital investment promotion; Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usaha.

h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, melalui: peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan danterminal; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antardaerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb, Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.

i. Peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan melalui: pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan

(pendidikan lingkungan mulai usia dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air); konservasi lingkungan (rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir, konservasi energy, pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan serta audit energi); pemulihan kembali lingkungan (penanganan limbah, perijinan pemanfaatan lingkungan, penegakan hukum).

j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana melalui pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis masyarakat, pengembangan kurikulum pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana, dan inventarisasi daerah terdampak bencana.

4. **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah,** fokus pada:

a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat *(direct services)* melalui : kunjungan lapangan *(road show)* dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka *"open government"* (dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapana spirasi publik).

b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalambirokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan).

c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah, perkuatan kapabilitas

APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner*, serta pengendalian dan penegakan produk hukum.

d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui: Manejemen pengelolaan ASN berdasarkan merit system secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan, promosi terbuka/*talent scouting*, analisis jabatan, penegakan disiplin, pengembangan jabatan fungsional tertentu); perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.

e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA.

f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Secara lengkap sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional sebagaimana terdapat pada tabel berkut:

Tabel 4.2.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

Prioritas Kabupaten Purbalingga	Selaras Dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Selaras Dengan Prioritas Nasional
1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Prioritas 3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan	Prioritas 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
2. Peningkatan Pembangunan Manusia	Prioritas 2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah,	Prioritas 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok	Prioritas 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Prioritas 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;
4. Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prioritas 4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah	Prioritas 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Prioritas Kabupaten Purbalingga	Selaras Dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Selaras Dengan Prioritas Nasional
5. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Prioritas 3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan	Prioritas 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; Prioritas 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, maupun perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana diformulasikan dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk tahun 2020 disusun rencana kerja dan pendanaan daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. Rencana kerja dan pendanaan daerah yang tercakup dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini pada dasarnya merupakan *baseline* sebagai arah bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran.

Program Prioritas dan Indikator Kinerja dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 5 (lima) penunjang urusan pemerintahan serta urusan pemerintahan umum tersaji sebagaimana dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
010101	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				**166.019.857.070,0**	**177.473.229.000,0**		
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**160.976.228.470,0**	**177.473.229.000,0**		
0101	**PENDIDIKAN**				**160.976.228.470,0**	**177.473.229.000,0**		
0101.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**6.999.889.000,00**	**6.842.525.000,00**		
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tersedianya Kebutuhan Bahan dan Jasa Perkantoran perkantoran terfasilitasinya bahan dan jasa perkantoran	1 Tahun 104 orang	1.147.905.000,00	866.081.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	67 ok dinas luar 38 ok dinas dalam	160.000.000,00	157.798.000,00		P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah sarpras kantor yang dipelihara	56 unit	297.358.000,00	297.358.000,00		P1
0101.010101.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kegiatan diklat / pelatihan pegawai	3 jenis/paket	27.700.000,00	27.700.000,00		P1
0101.010101.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen yang disusun	3 Jenis	12.156.000,00	12.156.000,00		P1
0101.010101.01.008	Pendataan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kegiatan pendidikan Jumlah buku pendataan pendidikan	7 kegiatan 1 buku	157.170.000,00	157.170.000,00		P1
0101.010101.01.009	Operasional Korwilcam Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan		Tersedianya Kebutuhan Operasional Korwilcam	5 kecamatan	1.137.600.000,00	1.137.600.000,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA	Tersedianya bahan dan jasa perkantoran	1 tahun	37.325.000,00	37.325.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 tahun	1.550.000,00	32.675.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	TK Negeri Pembina Purbalingga			31.125.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	TK Negeri Pembina Bobotsari	Tersedianya bahan dan jasa perkantoran yang dibutuhkan	1 Tahun	13.560.000,00	25.252.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	TK Negeri Pembina Bobotsari			56.440.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Tk Negeri Pembina Bojongsari	tersedianya barang dan jasa perkantoran yang dibutuhkan	1 tahun	22.750.000,00	36.360.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	tk pembina bojongsari	terlaksananya kegiatan perjalanan dinas	112 kegiatan	4.000.000,00	5.600.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	tk negeri pembina bojongsari			43.250.000,00	0,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran Yang dibutuhkan	1 Tahun	22.440.000,00	21.000.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA	Keikutsertaan dalam rapat rapat dan konsultasi	20 orang	720.000,00	5.500.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	TK Negeri Pembina Bukateja	Tercukupinya Sarana dan Prasara Perkantoran	0 Paket	46.840.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP N 1 Purbalingga	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	26.111.000,00	26.111.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP N 1 Purbalingga	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	2 Paket	43.889.000,00	43.889.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 3 Purbalingga	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 3 Purbalingga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 3 Purbalingga	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 4 Purbalingga	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	19.080.000,00	19.080.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 4 Purbalingga	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	47 Orang	1.880.000,00	1.880.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 4 Purbalingga	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 Kegiatan	16.840.000,00	16.840.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 4 Purbalingga	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	2 Paket	32.200.000,00	32.200.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 5 Purbalingga	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 5 Purbalingga	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Kalimanah	Tercukupinya Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	57.550.000,00	57.550.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Kalimanah	Terlaksananya Perjalanan Dinas	1 Orang	2.450.000,00	2.450.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 kalimanah	Tercukupinya Biaya Pemeliharaan Sarpras kantor	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Kalimanah	Tercukupinya Sarpras Kantor	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	Tercukupinya bahan dan jasa perkantoran	1 Tahun	32.571.000,00	32.571.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	3.750.000,00	3.750.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	1 Tahun	33.679.000,00	33.679.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP N 3 KALIMANAH	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 kegiatan	65.110.000,00	65.110.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP N 3 KALIMANAH	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 kali	2.475.000,00	2.475.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMPN 3 KALIMANAH	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	1 paket	2.415.000,00	2.415.000,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Padamara	Tersedianya barang dan jasa perkantoran	1 1 tahun	27.200.000,00	27.200.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Padamara	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	50 kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Padamara	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 paket	38.000.000,00	38.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 2 Padamara	Tercapainya Bahan dan Jasa Kantor	1 Tahun	47.840.000,00	47.840.000,00		P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 2 Padamara	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilakdanakan	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00		P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Padamara	Jumlah pemeliharaan sarpras kantor	1 Tahun	3.160.000,00	3.160.000,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Padamara	Unit Komputer	3 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMPN 1 KUTASARI	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 tahun	53.000.000,00	53.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMPN 1 KUTASARI	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	3.600.000,00	3.600.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMPN 1 KUTASARI	Tersedianya Pengadaan SArana dan Prasarana Kantor	1 tahun	13.400.000,00	13.400.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMPN 2 KUTASARI	Terpenuhinya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	7.500.000,00	7.500.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMPN 2 KUTASARI	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	52 org	10.000.000,00	10.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMPN 2 KUTASARI	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	27.500.000,00	27.500.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMPN 2 KUTASARI	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 3 Kutasari	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 tahun	39.700.000,00	39.700.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 3 Kutasari	Terlaksanakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	26 orang	1.300.000,00	1.300.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 3 Kutasari	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 3 Kutasari	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	3 paket	27.000.000,00	27.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP N 4 Kutasari	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP N 4 Kutasari	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Karangreja	Tersedianya Perlengkapan Bahan Dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	36.718.000,00	36.718.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Karangreja	Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi	52 kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Karangreja	Tercukupinya Biaya Pemeliharaan Sarpras Kantor	1 kegiatan	2.682.000,00	2.682.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Karangreja	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	2 Paket	25.500.000,00	25.500.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP N 2 Karangreja	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	40.900.000,00	40.900.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP N 2 Karangreja	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100 Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP N 2 Karangreja	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	9.300.000,00	9.300.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP N 2 Karangreja	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	1 Paket	12.800.000,00	12.800.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 3 Karangreja	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	32.466.000,00	32.466.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 3 Karangreja	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	125 Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 3 Karangreja	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	2 Paket	29.034.000,00	29.034.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Karangjambu	Tercukupinya Penyediaan Barang dan Jasa	1 Tahun	45.000.000,00	45.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Karangjambu	Terlaksananya Perjalanan Dinas	50 org/hari	4.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Karangjambu	Tercukupinya Biaya Pemeliharaan Sarpras Kantor	1 Tahun	9.000.000,00	0,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Karangjambu	Tercukupinya Sarpras Kantor	2 Unit	12.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 2 Karangjambu			37.961.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 2 Karangjambu			5.100.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Karangjambu			13.539.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Karangjambu			13.400.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Kemangkon	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 tahun	40.000.000,00	40.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Kemangkon	Terselenggaranya Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Kemangkon	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP NEGERI 2 KEMANGKON	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 1	28.800.000,00	28.800.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP NEGERI 2 KEMANGKON	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	1 kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP NEGERI 2 KEMANGKON	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	1 paket	36.200.000,00	36.200.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP N 3 KEMANGKON	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	48.320.000,00	48.320.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP N 3 KEMANGKON	Terlaksananya Rapat-RAapat Koordinasi dan Konsultasi	167 Orang	6.680.000,00	6.680.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP N 3 KEMANGKON	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 4 Kemangkon	Penyediaan Bahan dan Jasa	1 Tahun	27.500.000,00	27.600.000,00		P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 4 Kemangkon	Terlaksananya Kegiatan Rapat	1 Kegiatan	2.500.000,00	2.400.000,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 4 Kemangkon	Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Bukateja	Terpenuhinya bahan dan jasa perkantoran	1 tahun	36.000.000,00	36.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Bukateja	Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	60 kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Bukateja	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	1 paket	31.000.000,00	31.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 2 Bukateja	Tercukupinya persediaan barang dan jasa	1 kegiatan	52.500.000,00	52.500.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	1 orang	5.000.000,00	5.000.000,00		P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Bukateja	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	1 paket	2.500.000,00	2.500.000,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Bukateja	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	1 paket	10.000.000,00	10.000.000,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 3 Bukateja	Terpenuhinya bahan dan jasa perkantoran	1 tahun	38.000.000,00	38.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 3 Bukateja	Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	140 kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 3 Bukateja	Terpenuhinya pemeliharaaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	18.000.000,00	18.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP N 3 Bukateja	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	1 paket	7.000.000,00	7.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Kejobong	Terpenuhinya Penyediaan bahan dan jasa perkantoran	1 Tahun	56.330.000,00	563.300.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Kejobong	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	80 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Kejobong	Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	7.670.000,00	7.670.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 2 Kejobong	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	54.500.000,00	54.500.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 2 Kejobong	Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi	110 Orang	5.500.000,00	5.500.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP N 2 Kejobong	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Kaligondang	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00		P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Kaligondang	Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan	100 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Kaligondang	Personal Komputer	5 paket	30.000.000,00	30.000.000,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 2 Kaligondang	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa perkantoran	1 1	35.400.000,00	35.400.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 2 Kaligondang	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100 1	4.000.000,00	4.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Kaligondang	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	3 paket	6.600.000,00	6.600.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Kaligonang	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	5 paket	24.000.000,00	24.000.000,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Pengadegan	Tersediaanya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	37.000.000,00	37.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Pengadegan	Terlaksananya Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi	120 Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 pengadegan	Terlaksanannya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	681 Siswa	5.000.000,00	5.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Pengadegan	Terlaksanannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	UPT SMP Negeri 2 Pengadegan	Tercukupinya Pengadaan Barang dan jasa	1 tahun	42.000.000,00	42.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	UPT SMP Negeri 2 Pengadegan	Terlaksananya Rapat - rapat dan koordinasi	120 kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	UPT SMP Negeri 2 Pengadegan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana kantor	8 unit	2.000.000,00	2.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	UPT SMP Negeri 2 Pengadegan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	5 paket	20.000.000,00	20.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP NEGERI 3 PENGADEGAN	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	39.800.000,00	39.800.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP NEGERI 3 PENGADEGAN	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP NEGERI 3 PENGADEGAN	Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	24.200.000,00	24.200.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP N 1 REMBANG	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	39.430.000,00	39.430.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP N 1 Rembang	Terlaksananya Rapat-Rapat dan Konsultasi	86 Orang	6.020.000,00	6.020.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP N 1 Rembang	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	14.700.000,00	14.700.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Rembang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	2 Paket	9.850.000,00	9.850.000,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 2 Rembang	Tersedianya bahan jasa perkantoran	1 tahun	48.790.000,00	48.790.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 2 Rembang	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi	72 orang	5.760.000,00	5.760.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Rembang	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	1 tahun	15.450.000,00	15.450.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				34.975.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				6.300.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				11.625.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				17.100.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMPN 1 Karangmoncol	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	32.720.000,00	32.700.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMPN 1 Karangmoncol	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMPN 1 Karangmoncol	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	1 Tahun	22.480.000,00	22.480.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Tersedianya Sarana dan Prasara kantor	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 2 Karangmoncol	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	42.420.000,00	42.420.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 2 Karangmoncol	Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	94 Orang	6.580.000,00	6.580.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Karangmoncol	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	45.500.000,00	45.500.000,00		P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP NEGERI 3KARANGMONCOL	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00		P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 paket	8.000.000,00	8.000.000,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 paket	12.500.000,00	12.500.000,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Karanganyar	Tersedianya bahan dan jasa perkantoran	1 Tahun	45.000.000,00	45.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Karanganyar	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Karanganyar	Terpeliharanya sarana dan prasana kantor	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Karanganyar	Tersedianya sarana dan prasana kantor	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 tahun	35.000.000,00	35.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	Pemeliharaan Ruang Kelas dan Pemeiliharaan Peralatan Kantor	2 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	3 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 2 Kertanegara	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	30.445.000,00	30.445.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 2 Kertanegara	terlaksananya rapat-rapat dankonsultasi	1 Tahun	6.660.000,00	6.660.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Kertanegara	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1.980.000,00	1.980.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Kertanegara	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	30.915.000,00	30.915.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	smp negeri 1 bojongsari	tersedianya bahan dan jasa perkantoran	1 tahun	44.199.000,00	44.199.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	smp negeri 1 bojongsari	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 orang	3.000.000,00	3.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	smp negeri 1 bojongsari	terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	1 paket	6.801.000,00	6.801.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	smp negeri 1 bojongsari	terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	16.000.000,00	16.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 2 Bojongsari	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 2 Bojongsari	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Bojongsari	Tersediannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Mrebet			25.895.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Mrebet			2.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Mrebet			19.905.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Mrebet			22.200.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 2 Mrebet	Tersedianya Bahan dna Jasa Perkantoran	1 Tahun	35.300.000,00	35.300.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 2 Mrebet	Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	120 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Mrebet	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1.700.000,00	1.700.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Mrebet	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	27.000.000,00	27.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 3 Mrebet	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 3 Mrebet	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00		P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 3 Mrebet	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 3 Mrebet	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	3 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 4 Mrebet	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 tahun	39.000.000,00	39.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 4 Mrebet	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	180 kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 4 Mrebet	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	2 paket	8.000.000,00	8.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 4 Mrebet	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	2 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP N 5 Mrebet	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 tahun	61.000.000,00	61.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP N 5 Mrebet	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	34 kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP N 5 Mrebet	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 unit	7.000.000,00	7.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 1 Bobotsari	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 1 Bobotsari	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	24 kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 1 Bobotsari	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	2 Paket	32.000.000,00	32.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 2 Bobotsari	Terpenuhinya bahan dan jasa perkantoran	1 tahun	36.105.000,00	36.105.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 2 Bobotsasri	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	96 kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 2 Bobotsari	Tercapainya pengadaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	29.095.000,00	29.095.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 3 Bobotsari			41.000.000,00	41.000.000,00		P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 3 Bobotsari			7.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 3 Bobotsari			8.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 3 Bobotsari			14.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP Negeri 4 Bobotsari	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	34.740.000,00	34.740.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP Negeri 4 Bobotsari	Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00		P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 4 Bobotsari	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	10.830.000,00	10.830.000,00		P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP Negeri 4 Bobotsari	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	10 Paket	21.430.000,00	21.430.000,00		P1
0101.010101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	1 Tahun	30.325.000,00	30.325.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	Terlaksananya Kegaiatan Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi	92 Kegiatan	9.850.000,00	9.850.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	1 Kegiatan	22.825.000,00	22.825.000,00	KSB	P1
0101.010101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	7.000.000,00	7.000.000,00	KSB	P1
0101.02	**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**				**889.428.000,00**	**913.593.000,00**		
0101.010101.02.009	Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kegiatan fasilitasi PAUDi Jumlah siswa PAUD difasilitasi	4 kegiatan 350 anak	343.372.000,00	343.372.000,00		P1
0101.010101.02.011	Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terfasilitasinya kebutuhan operasional PAUD	1 TK Negeri	27.000.000,00	27.000.000,00		P1
0101.010101.02.015	Bantuan Operasional PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terfasilitasinya kebutuhan operasional PAUD	1 TK Negeri	60.000.000,00	60.000.000,00		P1
0101.010101.02.016	Pengembangan Prasarana dan Sarana PAUD (DAK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah penerima pengembangan sarpras PAUD	3 TK Negeri	212.456.000,00	251.621.000,00		P1
0101.010101.02.011	Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik)	TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	1 tahun	85.200.000,00	74.400.000,00	KSB	P1
0101.010101.02.011	Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik)	TK Negeri Pembina Bobotsari	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional KBM dan Sarpras PAUD Lembaga	1 Tahun	54.000.000,00	49.800.000,00	KSB	P1
0101.010101.02.011	Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik)	tk negeri pembina bojongsari	tersedianya sarana dan prasarana PAUD	94 orang	56.400.000,00	56.400.000,00	KSB	P1
0101.010101.02.011	Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik)	TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana untuk belajar	76 orang	51.000.000,00	51.000.000,00	KSB	P1
0101.03	**PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN**		APK SD/sederajat APM SD/sederajat APK SMP/sederajat APM SMP/sederajat	109.59 persen 91.35 persen 100.26 persen 69.99 persen	**119.849.420.550,0**	**139.781.957.000,0**		
0101.010101.03.002	Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Lomba / binpres	25 Lomba	388.861.000,00	184.861.000,00		P1
0101.010101.03.003	Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi SMP/MTs/SMPLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Lomba Siswa SMP/MTs/SMPLB Jumlah Pembinaan Potensi siswa SMP Jumlah Pekan Seni SMP, dan Lomba Geguritan Jumlah Seleksi Gala Sepakbola siswa	28 Lomba 77 SMP 13 Lomba 1 Kegiatan	521.250.000,00	423.250.000,00		P1
0101.010101.03.039	Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum dan Standar Pendidikan Tingkat SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Evaluasi Implementasi Capaian SPM pada Tingkat Satuan Pendidikan Jumlah Penerapan Kurikulum 13 Bidang SD	762 Satuan Pendidikan 186 Sekolah	62.211.000,00	62.211.000,00		P1
0101.010101.03.040	Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Tingkat SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Pendampingan Program Indonesia Pintar (PIP) SD Jumlah Pendampingan BOS SD/SMP Jumlah Fasilitasi Satu Atap Jumlah kegiatan fasilitasi(Simda BOS, OSN SD, FLS2N, Pembinaan potensi siswa SD	46000 anak 100 Sekolah 6 Sekolah 4 Kegiatan	1.169.870.000,00	845.260.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0101.010101.03.041	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan Tingkat SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Penerima RKB/rehab Jumlah pengadaan mebelair sekolah	2 Sekolah 20 paket	2.000.000.000,00	600.000.000,00		P1
0101.010101.03.042	Pemenuhan Sarana – Prasarana SD (DAK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana DAK	81 sekolah	18.830.900.000,00	33.964.937.000,00		P1
0101.010101.03.044	Penanganan dan Evaluasi AUS - TS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah AUS - TS yang ditangani	1993 anak	181.605.000,00	181.605.000,00		P1
0101.010101.03.045	Beasiswa Prestasi SMP		Jumlah Siswa SMP Mendapatkan Beasiswa	371 siswa	0,00	170.200.000,00		P1
0101.010101.03.047	Penyelenggaraan Ujian SMP / MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Bantuan Ujian SMP/MTs	14900 siswa	373.110.000,00	338.679.000,00		P1
0101.010101.03.050	Beasiswa Prestasi SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Beasiswa Prestasi Tingkat SD	201 siswa	0,00	170.000.000,00		P1
0101.010101.03.055	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan Tingkat SMP		Sekolah penerima peningkatan sarpras	1 sekolah	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00		P1
0101.010101.03.058	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Bantuan Ujian SD/MI	16113 siswa	136.854.000,00	136.854.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah		Jumlah Bantuan Operasional Sekolah	543 Sekolah	55.395.400.000,00	57.343.400.000,00		P1
0101.010101.03.064	Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum dan Standar Pendidikan Tingkat SMP		Jumlah Penerapan Kurikulum 13 Bidang SMP Jumlah workshop kurikulum 2013 bagi guru sasaran jenjang SMP	76 sekolah 1520 guru mapel	296.511.550,00	19.500.000,00		P1
0101.010101.03.065	Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Tingkat SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Pendampingan BOS SMP Jumlah Pendampingan program Indonesia Pintar (PIP) SMP Jumlah Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi Edukasi terfasilitasinya SIMDA BOS	6 sekolah 18679 siswa 50 siswa SMP 1 Kegiatan	370.000.000,00	370.000.000,00		P1
0101.010101.03.067	Pemenuhan Sarana – Prasarana SMP (DAK)		Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana DAK INF	23 sekolah	6.987.848.000,00	15.560.200.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP N 1 Purbalingga	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	847 Siswa	838.000.000,00	878.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	753 Siswa	760.000.000,00	760.000.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 3 Purbalingga	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah.	831 Siswa	765.000.000,00	831.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 4 Purbalingga	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	742 Siswa	640.000.000,00	742.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 5 Purbalingga	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	740 Siswa	729.000.000,00	740.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Kalimanah	Terlayaninya Belanja Operasional Siswa	1 Siswa	854.000.000,00	852.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	Terpenuhinya Operasional Sekolah	1 Tahun	758.000.000,00	834.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah		Terlayaninya Bantuan Operasional sekolah	394 siswa	360.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Padamara	Terlayaninya bantuan operasional sekolah	795 siswa	749.000.000,00	795.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 2 Padamara			532.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMPN 1 KUTASARI	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah	1 tahun	756.000.000,00	787.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMPN 2 KUTASARI	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	654 Siswa	613.000.000,00	628.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 3 Kutasari	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	306 siswa	314.000.000,00	306.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP N 4 Kutasari	Terlayaninya Bantuan Operasi Sekolah	1 Tahun	503.000.000,00	470.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Karangreja	Terpenuhinya Kebutuhan Siswa	608 Siswa	591.000.000,00	601.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP N 2 Karangreja	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	496 Siswa	479.000.000,00	496.000.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 3 Karangreja	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	378 Siswa	414.000.000,00	378.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Karangjambu	Lancarnya proses Belajar Mengajar	1 Tahun	382.000.000,00	0,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 2 Karangjambu			119.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Kemangkon	Terlayaninya Operasional Sekolah	768 siswa	764.000.000,00	768.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP NEGERI 2 KEMANGKON	Terlayaninya Bantuan Operasional Siswa	284 siswa	281.000.000,00	284.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP N 3 KEMANGKON	Terlayaninya Bantuan Oprasional Sekolah	261 Siswa	249.000.000,00	261.000.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 4 Kemangkon	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	251 Siswa	265.000.000,00	251.000.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Bukateja	Tersalurkannya bantuan operasional sekolah	776 siswa	800.000.000,00	776.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah		Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	702 siswa	704.000.000,00	702.000.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 3 Bukateja	Tersalurkannua bantuan operasional sekolah	610 siswa	635.000.000,00	610.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Kejobong	Terpenuhinya Bantuan Operasional Sekolah	1 Tahun	716.000.000,00	709.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 2 Kejobong	Tercukupinya Bantuan Operasional Sekolah	1 Tahun	291.000.000,00	284.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Kaligondang	Tersedianya Operasional Sekolah	859 Siswa	844.000.000,00	859.000.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 2 Kaligondang	Tercukupinya bantuan operasional sekolah	1 tahun	464.000.000,00	485.000.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Pengadegan	Terlaksanannya Bantuan Operasional Sekolah	681 Siswa	659.000.000,00	681.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	UPT SMP Negeri 2 Pengadegan	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	366 siswa	363.000.000,00	366.000.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP NEGERI 3 PENGADEGAN	Terlayaninya Bantuan Oprasional Sekolah	261 Siswa	255.000.000,00	261.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP N 1 Rembang	Terlayaninya Bantuan Oprasional Sekolah	801 Siswa	776.000.000,00	801.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 2 Rembang	Terlayaninya bantuan operasional sekolah	617 siswa	601.000.000,00	617.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah				189.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP N 1 Karangmoncol	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	753 Siswa	740.000.000,00	753.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 2 Karangmoncol	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	245 Siswa	228.000.000,00	245.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	141 siswa	141.000.000,00	141.000.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Karanganyar	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	834 Siswa	789.000.000,00	834.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	500 siswa	503.000.000,00	500.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 2 Kertanegara	Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah	1 Tahun	414.000.000,00	420.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	smp negeri 1 bojongsari	terlayaninya bantuan operasional sekolah	1 siswa	881.000.000,00	946.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 2 Bojongsari	Terlanyanianya Bantuan Operasional Sekolah	1 Siswa	602.000.000,00	577.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Mrebet			753.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 2 Mrebet	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	573 Siswa	562.000.000,00	573.000.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 3 Mrebet	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	343 Siswa	337.000.000,00	343.000.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 4 Mrebet	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	294 siswa	320.000.000,00	294.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP N 5 Mrebet	Terlayaninya Bantuan Operasional Sekolah	385 siswa	387.000.000,00	385.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 1 Bobotsari	Terpenuhinya kebutuhan siswa	786 siswa	801.000.000,00	828.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 2 Bobotsari	Terpenuhinya bantuan operasional sekolah	705 siswa	671.000.000,00	705.000.000,00	KSB	P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 3 Bobotsari			461.000.000,00	0,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP Negeri 4 Bobotsari	Tersedianya Operasional Sekolah dan Kegiatan Belajar Mengajar	293 Siswa	277.000.000,00	293.000.000,00		P1
0101.010101.03.063	Bantuan Operasional Sekolah	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah	261 Siswa	256.000.000,00	261.000.000,00	KSB	P1
0101.04	**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL**				**834.767.000,00**	**2.122.139.000,00**		
0101.010101.04.008	Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B dan C dan UNPK (DAK Non Fisik)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Pendidikan Paket A,B, dan C Terlaksananya penyelanggaraan pameran HAI	1497 warga belajar 1 kegiata	720.529.000,00	2.020.229.000,00		P1
0101.010101.04.009	Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Hari Aksara Internasional Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Kursus Jumlah Penyelenggaraan Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi	1 Kegiatan 28 Lembaga 13 Lembaga	114.238.000,00	101.910.000,00		P1
0101.05	**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**				**30.877.612.920,00**	**25.762.602.000,00**		
0101.010101.05.002	Bantuan Kesra TTT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah GTT dan PTT	1887 orang	29.301.540.920,00	24.339.100.000,00		P1
0101.010101.05.014	Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Diklat fungsional calon Pendidikan Non Formal Jumlah Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Asesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Jumlah Diklat Penilaian Angka Kredit Jumlah Diklat Kepala Sekolah Diklat PPG	20 orang 300 orang 40 orang 20 orang 120 orang 25 orang	621.600.000,00	720.930.000,00		P1
0101.010101.05.015	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Jumlah Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) Jumlah Pemilihan Guru, Kepsek, Pengawas, dan Petugas Perpustakaan dan KTU Berprestasi	3892 orang 310 orang 120 orang	269.872.000,00	269.872.000,00		P1
0101.010101.05.016	Evaluasi Kinerja Kependidikan dan Seleksi Kegiatan Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Kepala TK/SD/SMP Jumlah Seleksi calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Satuan Pendidikan dan Diklat Kepala Sekolah	122 Kepala sekolah 120 orang	684.600.000,00	432.700.000,00		P1
0101.06	**PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KEPENDIDIKAN**				**1.025.413.000,00**	**1.025.413.000,00**		
0101.010101.06.008	Penyelenggaraan UN dan UNPK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan UN dan UPNK	20000 siswa	528.962.000,00	528.962.000,00		P1
0101.010101.06.032	Pengelolaan Penilaian Angka Kredit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Penggelolaan Penilaian Angka Kredit TK s/d SMP	5000 berkas	158.240.000,00	158.240.000,00		P1
0101.010101.06.033	Akreditasi dan Pembinaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Pengelolaan Akreditasi Sekolah/Madrasah	250 sekolah	23.911.000,00	23.911.000,00		P1
0101.010101.06.034	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kegiatan peningkatan manajemen pendidikan	4 kegiatan	314.300.000,00	314.300.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0101.07	**PROGRAM FASILITASI AKSES PENDIDIKAN LUAR BIASA, PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI**				**499.698.000,00**	**1.025.000.000,00**		
0101.010101.07.002	Beasiswa Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Beasiswa Kedokteran	36 siswa	499.698.000,00	1.025.000.000,00		P1
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**5.043.628.600,00**			
0216	**KEBUDAYAAN;**				**5.043.628.600,00**			
0216.01	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAERAH**		Cakupan kajian seni Cakupan fasilitas seni Cakupan gelar seni Cakupan misi kesenian Cakupan sumber daya manusia kesenian Cakupan tempat gelar seni Cakupan organisasi kesenian yang aktif	68 % 143 kegiatan 100 % 100 % 100 % 100 % 307 kelompok	**3.787.213.500,00**			
0216.010101.01.004	Festival Seni dan Budaya				1.149.540.000,00			P1
0216.010101.01.005	Pengiriman Tim Kesenian				505.407.000,00			P1
0216.010101.01.028	Pembinaan dan Pelatihan Seni Budaya				1.057.276.500,00			P1
0216.010101.01.030	Gelar Seni, Pekan Budaya dan Pariwisata				656.250.000,00			P1
0216.010101.01.032	Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Seni Budaya				418.740.000,00			P1
0216.02	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya Jumlah kunjungan museum dan monumen Jumlah kunjungan museum dan monumen Jumlah cagar budaya Jumlah cagar budaya Cakupan cagar budaya yang dikonservasi Cakupan cagar budaya yang dikonservasi	0 Jupel 40 jupel 260000 orang 260000 orang 0 buah 298 bh 1 situs 1 situs	**1.256.415.100,00**			
0216.010101.02.008	Pemeliharaan dan Pelestarian Cagar Budaya				390.111.750,00			P1
0216.010101.02.009	Fasilitasi dan Pembinaan Kesejarahan				44.479.600,00			P1
0216.010101.02.010	Pengiriman Tim Kesejarahan dan Cagar Budaya				85.837.500,00			P1
0216.010101.02.011	Peningkatan dan Pengembangan Museum, Monumen dan Panggung Kesenian				120.986.250,00			P1
0216.010101.02.013	Peningkatan dan Pengembangan Museum, Monumen dan Panggung Kesenian (DAK Non Fisik)				615.000.000,00			P1
010201	**DINAS KESEHATAN**				**123.879.028.000,0**	**87.105.659.000,00**		
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**123.879.028.000,0**	**87.105.659.000,00**		
0102	**KESEHATAN**				**123.879.028.000,0**	**87.105.659.000,00**		
0102.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**1.255.119.000,00**	**1.389.119.000,00**		
0102.010201.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinkes Kab. purbalingga	tersedianya bahan rumah tangga, listrik, telp, belanja internet, dll.	1 Tahun/paket	435.475.000,00	435.475.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0102.010201.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	1 paket	188.644.000,00	188.644.000,00	KSB	P1
			Terlaksananya kunjungan lapangan/survey	540 orang/hari				
			Terlaksananya koordinasi/kunjunan/ undangan tingkat regional	41 orang/hari				
			Terlaksananya koordinasi/kunjunan/ undangan tingkat regional	137 orang/hari				
			Terlaksannnya Koordinasi/ kunjungan/konsultasi/ undangan Jateng/DIY	44 orang/hari				
			Terlaksananya Undangan di luar Jawa	5 orang/hari				
0102.010201.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaann gedung dan bangunan, servise kendaraan dll	1 paket	350.000.000,00	350.000.000,00	KSB	P1
			Terlaksanya Penggantian Suku Cadang	135 unit				
			Terlaksananya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24450 liter				
			Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor	40 unit				
0102.010201.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	dinas kesehatan	Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat pendingin, PC, Alat Studio, Lat Komunikas, Tambah daya listrik dll	1 paket	25.000.000,00	255.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dinas Kesehatan	Terselenggaranya kursus-kursus singkat dan pelatihan	1 paket	35.000.000,00	35.000.000,00	KSB	P1
			Terlaksananya Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	1 tahun				
			Terlaksananya Bimbingan Teknis	1 tahun				
0102.010201.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Dinas Kesehatan	Tersusunnya buku perencanaan dan laporan kinerja yang disusun	1 paket	221.000.000,00	125.000.000,00	KSB	P1
			Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 dokumen				
			LKPJ	1 dokumen				
			RKA,DPA	1 dokumen				
			LKD OPD	1 dokumen				
			Laporan bulanan realisasi kinerja	1 dokumen				
			Profil Kesehatan, Lakip, Sakip, PK	3 dokumen				
0102.02	**PROGRAM PELAYANAN KIA, REMAJA, DAN USILA.**				**2.548.411.000,00**	**3.123.491.000,00**		
0102.010201.02.001	Fasilitasi Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Jumlah Pertemuan Koordinasi (AMP, AMC, KB dan Kespro)	10 kali	99.222.000,00	99.222.000,00	KSB	P1
			jumlah Peserta pertemuan (AMP, AMC, KB dan Kespro)	310 orang				
0102.010201.02.002	Peningkatan Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjut	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Terlaksananya Orientasi Pelaksanaan Kunjungan Neonatal dan Kunjungan Nifas dan PKPR bagi Petugas Remaja Puskesmas	2 kali	39.735.000,00	39.735.000,00	KSB	P1
			jumlah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Santun Lansia dan Kader Posyandu Lansia	4 kali				
0102.010201.02.003	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	jumlah Terlaksananya upaya preventif dan promotif	1 paket	2.409.454.000,00	2.984.534.000,00	KB	P1
0102.03	**PROGRAM PENGELOLAAN FARMASI PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN**				**3.824.573.000,00**	**6.912.325.000,00**		
0102.010201.03.001	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	1 paket	1.392.723.000,00	3.942.475.000,00	KSB	P1
0102.010201.03.005	Pengadaan Obat, Perbekalan dan Peralatan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Tersedianya obat, perbekes dan peralatan kesehatan	1 paket	1.969.850.000,00	1.969.850.000,00	KSB	P1
0102.010201.03.006	Pengadaan Obat, Perbekalan dan Peralatan Kesehatan (DBH-CHT)	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Tersedianya obat, perbekes dan peralatan kesehatan	1 paket	462.000.000,00	1.000.000.000,00	KB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0102.04	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN**				**11.544.006.000,00**	**15.772.395.000,00**		
0102.010201.04.002	Pembangunan Unit Transfusi Darah				0,00	0,00		P1
0102.010201.04.005	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana / Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Terlaksananya puskesmas yang dibangun/direhabilitasi di kalikajar	1 paket	4.884.610.000,00	5.024.999.000,00	KSB	P1
0102.010201.04.007	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Terlaksananya puskesmas yang dibangun/direhabilitasi rembang tahap 1	1 paket	6.659.396.000,00	10.747.396.000,00	KSB	P1
0102.05	**PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**				**1.673.854.000,00**	**3.276.916.000,00**		
0102.010201.05.002	Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI)	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Tersedianya PMT bagi anak KEP SD/MI dan Pesantren Tersedianya Vitamin A dosis 200 UI dan 100 UI Terlaksananya Pertemuan Konsolidasi Keg UPGI, Guru UKS dan Lintas sektor penanggulangan Anemia	210 anak 2 paket 22 kali	43.254.000,00	303.594.000,00	KSB	P1
0102.010201.05.005	Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Tercukupinya pembelian Tablet Tambah Darah (Fe) dan Zeng syrup Tercukupinya pembelian Bahan PMT untuk Balita dan Bayi KEP	2 paket 578 anak	750.601.000,00	1.003.323.000,00	KSB	P1
0102.010201.05.006	Penurunan Stunting (DAK)	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Telaksananya pembelian Anthropometri kit Terlaksananya pembelian Sanitarian Kit	110 paket 5 paket	0,00	1.969.999.000,00	KB	P1
0102.010201.05.007	Penguatan Intervensi Stunting (DAK)				879.999.000,00			P1
0102.06	**PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG KESEHATAN SERTA PENYEHATAN LINGKUNGAN**				**3.263.667.000,00**	**3.333.467.000,00**		
0102.010201.06.004	Pembinaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Jumlah Pertemuan UKBM Jumlah UKBM dibina	22 kali 7 ukbm	809.060.000,00	378.860.000,00	KSB	P1
0102.010201.06.005	Pembinaan UKK (Upaya Kesehatan Kerja) dan Olah Raga	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Jumlah pembinaaan UKK sektor formal dan Informal, Surveilance Kesehatan Kerja serta Kesehatan Pengemudi dan Olah raga Terlaksananya pemantauan Kesehatan Haji dan anak sekolah	6 kali 6 kali	74.667.000,00	74.667.000,00	KSB	P1
0102.010201.06.011	Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Terlaksananya Jasa Publikasi Gebyar Germas, siaran radio dan tersedianya poster/ banner	1070 poster/baner	150.000.000,00	150.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.06.014	Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Terlaksananya kegiatan jambanisasi desa	60 desa	2.229.940.000,00	2.729.940.000,00	KSB	P1
0102.07	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT SERTA KESEHATAN MATRA**				**3.637.102.000,00**	**3.605.819.000,00**		
0102.010201.07.023	Pengadaan peralatan pendukung imunisasi (DAK)		Tersedianya peralatan pendukung pelaksanaan imunisasi	0 paket	0,00	0,00	KB	P1
0102.010201.07.018	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Terlaksananya Pertemuan RAD TB Terlaksananya Pertemuan Pokjanal dan P2 ML	9 kali 6 kali	756.299.000,00	756.299.000,00	KSB	P1
0102.010201.07.019	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Terlaksananya pertemuan monev PTM, Monev IVA, Yankeswa Terlaksananya screening kesehatan anak sekolah, screening IVA dan pelayanan kesehatan jiwa	3 kali 10 kali	80.000.000,00	80.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.07.020	Pelayanan Kesehatan Matra, Fasilitasi Imunisasi, dan Surveilans Epidemiologi	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Terlaksananya pertemuan evaluasi program BIAS, Imunisasi dan Calon Jemaah Haji,	14 kali	297.381.000,00	297.381.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0102.010201.07.022	Pengendalian Penyakit (DAK)	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Tersedianya Bahan Pelayanan Kesehatan HIV dan Posbindu Jumlah Alat Kedokteran Umum	2900 box 354 unit	2.503.422.000,00	2.472.139.000,00	KB	P1
0102.08	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**524.250.000,00**	**524.250.000,00**		
0102.010201.08.001	Penilaian jabatan fungsional nakes	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian jabatan fungsional dan uji kompetensi	100 orang	38.000.000,00	38.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.08.002	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Jumlah Tenaga Kesehatan yang meningkat Kompetensinya	60 orang	456.250.000,00	456.250.000,00	KSB	P1
0102.010201.08.009	Pelayanan Perijinan Dan Registrasi Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Jumlah perijinan tenaga kesehatan dan sarana yankes,	300 surat	30.000.000,00	30.000.000,00	KSB	P1
0102.09	**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**				**19.506.584.000,00**	**18.420.629.000,00**		
0102.010201.09.004	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan dan Rumah Tunggu kelahiran	22 Puskesmas	2.490.584.000,00	4.850.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.010	Pembinaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Jumlah masyarakat miskin yang dilayani	3093 orang	16.416.000.000,00	13.234.811.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	PUSKESMAS PURBALINGGA	Jumlah Orang Penerima manfaat Terpenuhunya kebutuhan kesehatan masyarakat miskin	0 Orang 31303 pasien	24.892.000,00	24.892.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Bojong	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu	9760 orang	9.760.000,00	9.760.000,00		P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Kutasari			14.882.000,00	14.882.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Bojongsari	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu	2500 orang	22.242.000,00	22.242.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu		Terpenuhinya kebutuhan pasien miskin	6500 pasien	39.324.000,00	0,00		P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Padamara	Terpenuhinya Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	4000 Orang	39.246.000,00	39.246.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu		Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin	1 tahun	22.396.000,00	0,00		P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Kaligondang	Terpenuhinya Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	0 orang	17.196.000,00	17.196.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Kalikajar	Tersedianya Bahan Jasa Pelayanan Kesehatan	1500 Pasien	10.800.000,00	10.800.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu		Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu	23696 orang	23.696.000,00	0,00		P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Pengadegan	Terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu	4500 orang	33.628.000,00	35.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	UPTD Puskesmas Bukateja	tersedianya barang dan jasa kesehatan	27237 orang	11.114.000,00	11.114.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	UPTD Puskesmas Kutawis	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak mampu	2400 orang	20.810.000,00	20.810.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Rembang	Terlaksanya pemenuhan kegiatan barang dan jasa masyarakat Tidak mampu	3 kegiatan	98.592.000,00	0,00		P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Karanganyar	Tercukupinya kebutuhan jasmed,obatan-obatan dan bahan yankes	1 Paket	29.496.000,00	0,00	KB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu				24.790.000,00	0,00		P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Karangtengah	Tersedianya bahan dan jasa untuk pelayanan keseahatan masyarakat tidak mampu	3180 orang	15.378.000,00	15.378.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas bobotsari	Jaminan Masyarakat tidak mampu	1 th	24.790.000,00	24.790.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	puskesmas mrebet	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu	1600 orang	11.346.000,00	11.346.000,00		P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Serayu Larangan	Jumlah orang penerima manfaat	8003 orang	39.766.000,00	39.766.000,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas karangreja	Tersedianya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	56 Pegawai	27.260.000,00	0,00	KSB	P1
0102.010201.09.003	Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Puskesmas Karangjambu	Tersedianya bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan masyarakat Tidak Mampu	2451 Orang	38.596.000,00	38.596.000,00	KSB	P1
0102.10	**PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**				**247.615.000,00**	**34.836.000,00**		
0102.010201.10.001	Pengawasan dan Pemeriksaan Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Jumlah Pemeriksaan Makanan dan Minuman Jumlah Pemeriksaan Sarana Distrusi Obat dan kosmestik	8 pasar/toko 35 sarana distribusi	0,00	34.836.000,00	KSB	P1
0102.010201.10.005	Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik)				247.615.000,00			P1
0102.11	**PROGRAM PEMANTAPAN FUNGSI MANAJEMEN KESEHATAN**				**15.895.077.000,00**	**8.911.890.000,00**		
0102.010201.11.005	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Terfasilitasinya puskesmas yang diakreditasi	15 Puskesmas	1.221.440.000,00	1.809.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.11.009	Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Jumlah Pelayanan Kesehatan di Fasyankes dan Kestrad	10 sasaran	50.000.000,00	50.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.11.010	Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Terlaksananya Publik Safety Center (PSC) 119	10 kali	162.637.000,00	162.637.000,00	KSB	P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Purbalingga	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif	10 kegiatan	619.256.000,00	619.256.000,00		P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskemas Bojong	Terlaksananya program yang telah direncanakan	1 tahun	506.844.000,00	506.844.000,00		P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)				806.220.000,00	0,00		P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Bojongsari	Terlaksanaya kegiatan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PISPK) Terlaksananya kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan Terlaksananya kegiatan fungsi manajemen puskesmas	4 Kegiatan 11 Kegiatan 3 Kegiatan	758.112.000,00	758.112.000,00	KSB	P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)		Terlaksananya kegiatan promotif dan preventiv	10 kegiatan	738.570.000,00	0,00		P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Padamara	Terlaksananya Kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Dan Pengembangan Terlaksananya Kegiatan Fungsi Manajemen Puskesmas	4 Kegiatan 10 Kegiatan 4 Kegiatan	716.697.000,00	716.697.000,00	KSB	P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)		Terlayaninya jumlah pegawai dan masyarakat	300000 orang	844.282.000,00	0,00		P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)		Terlaksananya Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga Terlaksananya Kegiatan Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan Terlaksananya Kegiatan Fungsi Manajemen Puskesmas	0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan	606.049.000,00	0,00		P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas kalikajar	Petugas/Pegawai dan Pasien harus Dilayani	35 Pegawai	499.165.000,00	499.165.000,00	KSB	P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)		Terlaksananya program yang telah direncanakan	1 tahun	712.044.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Pengadegan	Terlaksananya kegiatan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	4 kegiatan	616.297.000,00	700.000.000,00	KSB	P1
			Terlaksananya kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan	11 kegiatan				
			Terlaksananya kegiatan fungsi manajemen puskesmas	3 kegiatan				
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)		tersedianya anggaran program kegiatan BOK/DAK Non Fisik	4 kegiatan	578.258.000,00	0,00		P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	UPTD Puskesmas Kutawis	Terlaksananya Belanja Cetak dan Penggandaan	1 paket	484.164.000,00	484.164.000,00	KSB	P1
			Terlaksananya Belanja Bahan Pakai Habis	1 paket				
			Terlaksananya Belanja Bahan dan Material	81 orang				
			Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5425 orang				
			Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5400 orang				
			Terlaksananya Belanja Jasa Kantor	4 orang				
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Rembang	Terlaksananya kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga (PISPK)	4 Kegiatan	786.498.000,00	0,00		P1
			Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembanan	50 kegiatan				
			Terlaksananya kegiatan fungsi managemen puskesmas	4 kegiatan				
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar	Terlaksananya penyuluhan pada masyarakat	1 Paket	704.057.000,00	704.057.000,00	KSB	P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)				696.168.000,00	0,00		P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Karangtengah	Terlaksananya Upaya Kesehatan promotif prefentif dam fumgsi Manajemen Puskesmas	3180 orang	615.311.000,00	615.311.000,00	KSB	P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)		Jaminan masyarakat tidak mampu	100 th	746.458.000,00	0,00		P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Mrebet	Terlaksananya belanja cetak dan pengadaan	1 paket	632.282.000,00	632.282.000,00		P1
			Terlaksananya Belanja Jasa Kantor	12 orang				
			Terlaksananya belanja perjalanan dinas	756 orang				
			Terlaksanakannya Belanja bahan habis pakai	1 paket				
			Terlaksananya kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga (PISPK)	4 kegiatan				
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Serayu Larangan	Terlaksananya belanja alat tulis kantor	1 paket	654.365.000,00	654.365.000,00	KSB	P1
			Terlaksananya belanja bahan percontohan	2 paket				
			Terlaksananya belanja bahan pangan	177 orang				
			Terlaksananya belanja premi BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak	36 orang				
			Terlaksananya belanja leaflet	12 rim				
			Terlaksananya pembayaran jasa tenaga kesehatan	2 orang				
			Terlaksananya pembayaran jasa operator	1 orang				
			Terlaksananya belanja cetak	597 lembar				
			Terlaksananya belanja penggandaan	10900 lembar				
			Terlaksananya belanja makanan dan minuman	2760 orang				
			Terlaksananya belanja perjalanan dinas	2107 orang				
			Terlaksananya belanja publikasi banner	22 buah				
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Karangreja	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	1 Paket	612.353.000,00	0,00	KSB	P1
0102.010201.11.004	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas Karangjambu	Terlaksana Upaya Pelayanan Kesehatan	15 Kegiatan	527.550.000,00	0,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0102.14	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN**				**59.958.770.000,00**	**21.800.522.000,00**		
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD		Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat dengan BPJS, Umum Terpenuhunya Kesejahteraan pegawai BLUD	17500 orang 43 orang	1.548.150.000,00	0,00		P1
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata		Terpenuhinya Kebutuhan Barang dan jasa untuk peningkatan pelayanan kesehatan	100 paket	200.000.000,00	0,00		P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Bojong	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan	11500 orang	926.800.000,00	926.800.000,00		P1
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata	Puskesmas Bojong	Terpenuhinya operasional upaya peningkatan pelayanan kesehatan	1 tahun	400.000.000,00	400.000.000,00		P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Kutasari	Terpenuhinya operasional upayapeningkatan pelayanan kesehatan	1 Tahun	3.779.537.000,00	0,00	KSB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Bojongsari	Terlaksananya kegiatan penyediaaan bhn dan jasa kantor, rapat koordinasi & konsultasi, pemeliharaan sarpras kantor, pengadaan sarpras pel. kesehatan, penyediaan bhn & jasa yankes, upaya Pel.Kes dan upaya kes promotif, preventif, kuratif & rehabilitatif	7 paket kegiatan	3.611.000.000,00	3.611.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD		Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS dan Pasien Umum, Pegawai	37508 pasien	2.436.280.000,00	0,00		P1
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata		Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Dan pasien umum, Pegawai	35000 pasien	300.000.000,00	0,00		P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD		Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	27500 Orang	2.520.637.000,00	2.520.637.000,00	KSB	P1
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata	Puskesmas Padamara	Terpenuhinya bahan dan jasa pelayanan kesehatan	71 Orang	200.000.000,00	0,00	KB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD		Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas	100 %	3.657.600.000,00	0,00		P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Kaligondang	Terlaksananya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	0 orang	2.257.200.000,00	2.257.200.000,00	KSB	P1
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata	Puskesmas Kaligondang	Terpenuhinya Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	0 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Kalikajar	Tersedianya Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	11000 Pasien	1.017.860.000,00	1.017.860.000,00	KSB	P1
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata	Puskesmas Kalikajar	Tersedianya Bahan Jasa Pelayanan Kesehatan	35 Pegawai	400.000.000,00	200.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD		Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan	38000 orang	3.539.924.000,00	0,00		P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Pengadegan	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	29000 orang	2.212.092.000,00	2.300.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata	Puskesmas Pengadegan	Terpenuhinya Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	33 Orang	100.000.000,00	0,00	KSB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD		meningkatnya pelayanan dan dukungan pelayanan BLUD	1 paket	3.000.630.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	UPTD Puskesmas Kutawis	Terlaksananya Belanja Jasa Kantor	10 kegiatan	1.932.225.000,00	1.932.225.000,00	KB	P1
			Terlaksananya Belanja Cetak dan Penggandaan	2 paket				
			Terlaksananya Belanja Kursus dan pelatihan ,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6 orang				
			Terlaksananya Pengadaan Pakain Dinas Harian Pegawai	39 orang				
			Terlaksananya Pengadaan Bahan dan Material untuk mendukung pelayanan BLUD	2 kegiatan				
			Terlaksananya Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10 paket				
			Terlaksananya Belanja Pegawai BLUD	1 paket				
			Terlaksananya Belanja Bahan Pakai Habis BLUD	1 paket				
			Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	1 paket				
			Terlaksananya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4 paket				
			Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.	10 kegiatan				
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata	UPTD Puskesmas Kutawis	Terlaksananya Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	1 paket	100.000.000,00	100.000.000,00	KB	P1
			Terlaksanaya Belanja Bahan dan Meterial	1 paket				
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Rembang	Terlaksananya program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	3 kegiatan	3.143.200.000,00	0,00		P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Karanganyar	Tersedianya Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan	1 Paket	2.791.689.000,00	0,00	KB	P1
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata	Puskesmas Karanganyar	Tersedianya Bahan dan Jasa Pendukung Pelayanan Kesehatan	1 Paket	50.000.000,00	0,00	KB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD				3.389.800.000,00	0,00		P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Karangtengah	Meningkatnya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di Puskesmas Karangtengah	3180 orang	2.144.778.000,00	0,00	KSB	P1
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata	Puskesmas Karangtengah	Tersedianya Bahan dan Jasa Untuk Pelayanan Keseahatan	3180 orang	70.000.000,00	70.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Bobotsari	Terpenuhinya operasional upayapeningkatan pelayanan kesehatan	1 Tahun	3.880.568.000,00	0,00	KSB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Mrebet	Belanja pegawai	1 Tahun	2.049.500.000,00	2.049.500.000,00		P1
			Belanja Barang dan Jasa	1 Tahun				
			Belanja Modal	1 Paket				
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata	Puskesmas Mrebet	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor, terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatnya pelayanan masyarakat peserta BPJS	1 Paket	100.000.000,00	0,00		P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Serayu Larangan	Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan	59 orang	2.299.500.000,00	2.299.500.000,00	KSB	P1
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata	Puskesmas Serayu Larangan	Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan	59 orang	200.000.000,00	200.000.000,00	KSB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Karangreja	Tersedianya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	56 Pegawai	3.056.000.000,00	0,00	KSB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Puskesmas Karangjambu	Jumlah Barang Dan Jasa	3 paket	1.495.800.000,00	1.495.800.000,00	KSB	P1
0102.010201.14.003	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehata	Puskesmas Karangjambu	Tersedianya Bahan Pelayanan Kesehatan	3 Kegiatan	270.000.000,00	270.000.000,00	KB	P1
0102.010201.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD		Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Sarana serta Prasarana Kantor	100 %	728.000.000,00	0,00		P1
010202	**RSUD GOETENG TAROENADIBRATA**				**106.765.474.000,0**	**109.630.199.000,0**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**106.765.474.000,0**	**109.630.199.000,0**		
0102	**KESEHATAN**				**106.765.474.000,0**	**109.630.199.000,0**		
0102.04	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN**				**0,00**			
0102.010202.04.009	Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK)				0,00			P1
0102.09	**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**				**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**		
0102.010202.09.011	Subsidi Pembelian Obat-Obatan RSUD Sebagai Pengganti Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Miskin	RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata	tersedia pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	2 kegiatan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	KSB	P1
0102.12	**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**				**0,00**			
0102.010202.12.001	Subsidi Pembelian Obat-Obatan RSUD Sebagai Pengganti Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Miskin				0,00			P1
0102.13	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN**				**11.265.474.000,00**	**17.130.199.000,00**		
0102.010202.13.003	Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK)	RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata	terbangunnya gedung IBS	2 kegiatan	11.265.474.000,00	17.130.199.000,00	KSB	P1
0102.14	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN**				**93.000.000.000,00**	**90.000.000.000,00**		
0102.010202.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	RSUD dr R Goeteng taroenadibrata	tersedianya pendukung layanan BLUD	10 kegiatan	93.000.000.000,00	90.000.000.000,00	KSB	P1
0102.010202.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD				0,00			P1
010203	**RSKBD PANTI NUGROHO**				**33.865.840.000,00**	**28.593.640.000,00**		
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**33.865.840.000,00**	**28.593.640.000,00**		
0102	**KESEHATAN**				**33.865.840.000,00**	**28.593.640.000,00**		
0102.04	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN**				**8.334.800.000,00**	**3.500.000.000,00**		
0102.010203.04.009	Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK)	RSKBD Panti Nugroho	terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	47 unit	8.334.800.000,00	3.500.000.000,00	KSB	P1
0102.12	**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**				**500.000.000,00**	**500.000.000,00**		
0102.010203.12.002	Subsidi Pembelian Obat-Obatan RSKBD Sebagai Pengganti Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Miskin	RSKBD Panti Nugroho	Terpenuhinya subsidi pembelian obat-obatan untuk pelayanan masyarakat miskin	160 orang	500.000.000,00	500.000.000,00	KSB	P1
0102.14	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN**				**25.031.040.000,00**	**24.593.640.000,00**		
0102.010203.14.002	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	RSKBD Panti Nugroho	Terwujudnya RSKBD Panti Nugroho menjadi Badan Layanan Umum Daerah	3 kegiatan/paket	25.031.040.000,00	24.593.640.000,00	KB	P1
010301	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**123.815.191.000,0**	**124.377.130.000,0**		
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**123.815.191.000,0**	**124.377.130.000,0**		
0103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**123.815.191.000,0**	**124.377.130.000,0**		
0103.01	**PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**				**95.757.511.000,00**	**83.026.868.000,00**		
0103.010301.01.001	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten Purbalingga	Terpelihara Panjang Jalan Kabupaten	3062 Km	6.864.791.000,00	7.655.866.000,00	KSB	P1
0103.010301.01.002	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Jembatan yang terpelihara	5 unit	3.250.000.000,00	2.000.000.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0103.010301.01.120	Pembangunan Jalan Baru	Pembangunan Jalan Tlahab Lor - Siwarak (lanjutan)	Terbangunnya jalan baru	1 paket	0,00	2.500.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.01.121	Peningkatan Kapasitas Jalan	Kabupaten Purbalingga	Panjang Jalan Yang ditingkatkan kapasitasnya	4074 meter	0,00	7.540.675.000,00	KSB	P1
0103.010301.01.123	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jl. Pakuncen-tlagayasa, Jl.Banjar-Galuh-wirsana, Jl.Blater-Mndraga, Jl.-Sirandu -Purbasari-Krjambu, Jl.Gondang-tlhbkidul, Jl.Lambur-Srykranyar, Jl.Tirtayuda-Asmareja, Jl. Bantarbrng-Klapa	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala	3650 panjang	34.162.500.000,00	3.612.500.000,00		P1
0103.010301.01.125	Perencanaan Teknis Kebinamargaan	Kab. Purbalingga	Tersusunnya perencanaan teknis bidang Bina Marga	10 paket	0,00	900.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.01.126	Pembangunan Jembatan Baru	Jembatan Kali Kuning dan Kali Pengurut, Jembatan pada ruas Sangkanayu - Kutabawa, Jembatan Wirasana - Kalikajar, Jembatan Sungai Muli danPembangunan Talud Jalan dan Pelebaran Jembatan Kali Kirik	Terbangun Jebatan baru	7 buah/jembatan	17.500.000.000,00	25.550.000.000,00		P1
0103.010301.01.128	Fasilitasi Kegiatan Kebinamargaan	Kab Purbalingga	Perjalan Dinas Luar Daerah Kegiatan DAK, Bangub	10 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.01.132	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	Pemeliharaan Rutin Trotoar dan Median Kab Purbalingga, Rehabilitasi Trotoar Jalan Pujowiyoto, Jalan Kapten Sarengat (lanjutan), Jalan Jenderal Sudirman Timur	Terpelihara Trotoar dan median	4 lokasi	2.550.000.000,00	1.988.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.01.133	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	Kab. Purbalingga	Terbangunan Talud dan drainase	2 titik ruas jalan	2.850.000.000,00	7.162.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.01.135	Peningkatan Kapasitas dan Struktur Jalan	Kabupaten Purbalingga	Panjang Jalan Yang ditingkatkan kapasitas dan strukturnya	11 titik ruas jalan	10.790.675.000,00	24.017.827.000,00		P1
0103.010301.01.137	Peningkatan Kapasitas dan Struktur Jalan (DAK)				16.889.545.000,00			P1
0103.010301.01.138	Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan UPJ2I Wilayah Purbalingga				200.000.000,00			P1
0103.010301.01.139	Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan UPJ2I Wilayah Bukateja				200.000.000,00			P1
0103.010301.01.140	Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan UPJ2I Wilayah Rembang				200.000.000,00			P1
0103.010301.01.141	Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan UPJ2I Wilayah Bobotsari				200.000.000,00			P1
0103.02	**PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA IRIGASI DAN SUMBERDAYA AIR**				**9.800.758.000,00**	**11.391.340.000,00**		
0103.010301.02.001	Komisi Irigasi	Kab Purbalingga	Perbup SK Pola Tata Tanam	15 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.02.024	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif (PPSIP)	Kab Purbalingga	Jumlah saluran terehab secara partisipatif	1 paket	400.000.000,00	400.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.02.034	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi.	Kab Purbalingga	Terpeliharnya Saluran Irigasi	3 paket	2.471.075.000,00	3.000.000.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0103.010301.02.035	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa D.I. Winong (DAK), D.I. Bringkeng (DAK), D.I. Sigupit (DAK), D.I. Tuk Arus I (DAK), D.I. Trowinangun (DAK) dan D.I. Sijati (DAK)	Panjang saluran yang terehab	6 lokasi	0,00	4.421.340.000,00	KSB	P1
0103.010301.02.038	Pendataan Air Baku Irigasi	Kab Purbalingga	Tersedianya Data Jaringan Irigasi dan Debit Bendung	2 dokumen	0,00	100.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.02.040	Perencanaan Teknis Bidang Sumber Daya Air	Kab Purbalingga	Perencanaan kegiatan yang teranggarkan	9 kegiatan	0,00	250.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.02.041	Pemeliharaan Bendung	Rehabilitasi Bendung SURO, Rehabilitasi Bendung Cangkring II, Rehabilitasi Bendung Kecepit, Rehabilitasi Bendung Nambo I	Bangunan bendung yang terehabilitasi	4 unit	1.050.000.000,00	2.900.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.02.042	Fasilitasi Kegiatan SDA	Kab Purbalingga	Jumlah kegiatan SDA terfasilitasi	9 kegiatan	100.000.000,00	120.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.02.043	Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi				0,00			
0103.010301.02.044	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)				5.059.683.000,00			P1
0103.010301.02.045	Pemeliharaan rutin irigasi UPJ2I Wilayah Purbalingga				130.000.000,00			P1
0103.010301.02.046	Pemeliharaan rutin irigasi UPJ2I Wilayah Bukateja				130.000.000,00			P1
0103.010301.02.047	Pemeliharaan rutin irigasi UPJ2I Wilayah Rembang				130.000.000,00			P1
0103.010301.02.048	Pemeliharaan rutin irigasi UPJ2I Wilayah Bobotsari				130.000.000,00			P1
0103.03	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**				**15.500.000.000,00**	**24.950.000.000,00**		
0103.010301.03.008	Pendataan Bangunan Gedung	Kab Purbalingga	tersusunnya dokumen bangunan gedung pemerintah	1 dokumen	100.000.000,00	300.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.03.011	Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan	Kab Purbalingga	Jumlah kegiatan Keciptakarnyaan terfasilitasi	12 bulan	100.000.000,00	150.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.03.012	Perencanaan Teknis Bidang Keciptakaryaan				0,00	0,00		P1
0103.010301.03.013	Pembangunan Gedung Pemerintahan	Pembangunan Gedung DPRD (lanjutan), Pembangunan Islamic Center (lanjutan), Pembangunan Pagar Tematik Kantor Pemerintah Daerah (Dukcapil dan Dinnaker), Pembangunan Alun - alun MTL Soedirman dan lingk	Jumlah bangunan Gedung yang dibangun	4 unit	15.300.000.000,00	20.000.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.03.014	Pemeliharaan Gedung Pemerintahan	Rehabilitasi kantor kelurahan Bancar, kelurahan Purbalingga Wetan, Pendopo Kec Kertanegara, dan Kantor Eks kecamatan kota untuk DLH	jumlah gedung yang direhabilitasi	3 unit	0,00	4.500.000.000,00	KSB	P1
0103.05	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**				**1.976.922.000,00**	**3.018.922.000,00**		
0103.010301.05.001	Pengelolaan UPTD Wilayah	4 UPJ2I	Jumlah UPTD yang dikelola	4 UPTD	0,00	400.000.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0103.010301.05.002	Operasional dan Mobilisasi Alat Berat	Kab Purbalingga	Jumlah operasional dan mobilisasi buldozer, mesin gilas, loader, tronton	4 paket	150.000.000,00	450.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.05.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kab Purbalingga	terpeliharanya sapras kantor DUPR	1 paket	682.322.000,00	753.922.000,00	KSB	P1
0103.010301.05.004	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab Purbalingga	Jumlah orang yang ikut diklat	5 orang	30.000.000,00	30.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.05.005	Pengadaan Alat Berat				0,00			
0103.010301.05.006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kab Purbalingga	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	0,00	200.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.05.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kab Purbalingga	Tersedinya bahan dan jasa perkantoran	12 bulan	709.600.000,00	750.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.05.008	Penyusunan Buku Statistik DPUPR	Kab Purbalingga	Tersusunnya data statistik DPUPR	20 buku	0,00	20.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.05.009	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Kab Purbalingga	tersusunnya dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, Renja, Evaluasi Renja	7 dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.05.010	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab Purbalingga	Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsurtasi serta Perjalanan dinas luar dan dalam daerah	250 kegiatan	190.000.000,00	250.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.05.014	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Kab Purbalingga	Pelaksanaan peningkatan kapasitas ASN	1 paket	0,00	150.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.05.015	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPJ2I Wilayah Purbalingga				50.000.000,00			P1
0103.010301.05.016	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPJ2I Wilayah Bukateja				50.000.000,00			P1
0103.010301.05.017	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPJ2I Wilayah Rembang				50.000.000,00			P1
0103.010301.05.018	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPJ2I Wilayah Bobotsari				50.000.000,00			P1
0103.06	**PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PEMERINTAHAN**				**680.000.000,00**	**1.170.000.000,00**		
0103.010301.06.033	Penyusunan DED dan Masterplan ke PU-an	Kab Purbalingga	Tersusunnya dokumen DED dan masterplan ke PU an	1 paket	0,00	400.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.06.034	Perencanaan Strategis Ke PU an	Kab Purbalingga	Tersusunnya perencanaan strategis ke PU an	1 dokumen	500.000.000,00	400.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.06.035	Pembinaan Jasa Konstruksi	Kab Purbalingga	Terfailitasi penerapan standarisasi konstruksi dan konsultasi Terusunnya standarisasi harga material	90 penyedia 1 paket	100.000.000,00	120.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.06.036	Monitoring dan Evaluasi Ke PU an	Kab Purbalingga	Termonitoring kegiatan fisik ke PU an	12 paket	0,00	100.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.06.037	Pelayanan Rekomendasi Jasa Konstruksi	Kab Purbalingga	Jumlah rekomendasi jasa kontruksi	80 penyedia	80.000.000,00	150.000.000,00	KSB	P1
0103.07	**PROGRAM PENATAAN RUANG DAERAH**				**100.000.000,00**	**820.000.000,00**		
0103.010301.07.001	Perencanaan Tata Ruang	Kab Purbalinggga	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	1 paket	0,00	550.000.000,00	KSB	P1
0103.010301.07.004	Fasilitasi Penyelenggaraan Pentaan Ruang Daerah	Kab Purbalingga	terfasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	1 paket	100.000.000,00	270.000.000,00	KSB	P1
010401	**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**				**15.925.115.000,00**	**9.527.750.000,00**		
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**14.344.615.000,00**	**9.527.750.000,00**		
0104	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**14.344.615.000,00**	**9.527.750.000,00**		
0104.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**				**732.000.000,00**	**717.000.000,00**		
0104.010401.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga	Tersediannya bahan dan jasa perkantoran	12 bulan	277.000.000,00	262.000.000,00	KSB	P1
0104.010401.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinrumkim Kab. Purbalingga	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	160.000.000,00	160.000.000,00	KSB	P1
0104.010401.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	OPD Dinrumkim	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	265.000.000,00	265.000.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0104.010401.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	OPD Dinrumkim	Ketecukupan akan Sarana dan Prasarana Kantor yang representatif	1 Paket	0,00	0,00	KSB	P1
0104.010401.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	OPD Dinrumkim	tersediannya pendidikan dan pelatihan	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	KSB	P1
0104.010401.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	OPD Dinrumkim	tersusunnya dokumen perencanaan	12 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	KSB	P1
0104.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN**				**3.916.875.000,00**	**4.685.750.000,00**		
0104.010401.02.002	Fasilitasi Penyediaan perumahan formal	Kab. Purbalingga	Terbangunnya PSU perumahan formal.	4 PSU perum /formal	400.000.000,00	800.000.000,00	KSB	P1
0104.010401.02.003	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Swadaya	Kab. Purbalingga	jumlah rumah yg tersambung SR listrik Fasilitasi rumah swadaya BSPS	200 SR Listrik, 138 RTLH	1.200.000.000,00	600.000.000,00	KSB	P1
0104.010401.02.005	Pemugaran rumah tidak layak huni	Kabupaten Purbalingga	Terfasilitasinya pemugaran RTLH APBD dan RTLH Bangub	2172 Unit RTLH	0,00	750.000.000,00	KSB	P1
0104.010401.02.006	Penyediaan Perumahan Swadaya (DAK)	Kab. Purbalingga	terpugarnya Ruma swadaya BSPS	138 Unit Rumah	2.316.875.000,00	2.535.750.000,00	KSB	P1
0104.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA PERMUKIMAN**				**9.695.740.000,00**	**4.125.000.000,00**		
0104.010401.03.001	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman	Kab. Purbalingga	Terbangunnya prasarana sarana utilitas permukiman	6 lokasi	1.000.000.000,00	800.000.000,00	KSB	P1
0104.010401.03.002	Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman	Kab. Purbalingga	Terbangunnya sarana dan prasarana utilitas permukiman	7 lokasi	1.225.000.000,00	1.225.000.000,00	KSB	P1
0104.010401.03.003	Penanganan kawasan permukiman kumuh	Kab. Purbalingga	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	0 Hektar	200.000.000,00	100.000.000,00	KSB	P1
0104.010401.03.004	Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Kab. Purbalingga	terbangunan AB 8 desa, jumlah rmh yg tersambung AB	5 desa	0,00	2.000.000.000,00	KSB	P1
0104.010401.03.007	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum				400.000.000,00			P1
0104.010401.03.008	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan)				6.205.740.000,00			P1
0104.010401.03.009	Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik Setempat (DAK)				665.000.000,00			P1
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**1.580.500.000,00**	**0,00**		
0204	**PERTANAHAN**				**1.580.500.000,00**	**0,00**		
0204.01	**PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN (TERTIB CATUR PERTANAHAN)**				**1.580.500.000,00**	**0,00**		
0204.010401.01.002	Persertifikatan tanah pemda dan masyarakat				365.500.000,00	0,00		P1
0204.010401.01.005	Pengadaan tanah untuk pembangunan				800.000.000,00	0,00		P1
0204.010401.01.006	Penataan dan pemanfaatan tanah PEMDA				390.000.000,00	0,00		P1
0204.010401.01.007	Penertiban permasalah pertanahan				25.000.000,00	0,00		P1
010501	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				**4.567.531.000,00**	**3.739.691.000,00**		
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**4.567.531.000,00**	**3.739.691.000,00**		
0105	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**4.567.531.000,00**	**3.739.691.000,00**		
0105.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**				**1.655.746.000,00**	**1.494.291.000,00**		
0105.010501.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Jumlah Bahan dan Jasa Perkantoran yang tersedia	25 Jenis/unit	320.000.000,00	313.105.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0105.010501.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dapat diselenggarakan/diikuti	1500 kegiatan	209.000.000,00	209.000.000,00	KSB	P1
0105.010501.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara	25 Jenis/unit	502.296.000,00	502.296.000,00	KSB	P1
0105.010501.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Jumlah arana dan Parsarana Kantor yang dapat disediakan	30 jenis/Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	KSB	P1
0105.010501.01.005	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	494 Unit	278.740.000,00	278.740.000,00	KSB	P1
0105.010501.01.006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Personil/ASN yang memeproleh Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	90.000.000,00	42.880.000,00	KSB	P1
0105.010501.01.007	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen yang tersusun	11 Dokumen	26.350.000,00	26.350.000,00	KSB	P1
0105.010501.01.008	Pembinaan Korps Musik Pemda	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Jumlah kegiatan yang dapat dilaksnakan oleh Korps Musik Pemkab Purbalingga	60 kegiatan	209.360.000,00	101.920.000,00	KSB	P1
0105.05	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**2.158.225.000,00**	**1.666.140.000,00**		
0105.010501.05.017	Pengawasan dan Pemberantasan Barang Kena Cuai Ilegal (DBHCHT)	Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Purbalingga	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Regulasi Barang Kena Cukai dan Penegakan Regulasi Barang Kena Cukai	34 kegiatan	44.300.000,00	44.300.000,00	KSB	P1
0105.010501.05.022	Pembinaan dan Pengerahan Pasukan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	15 kegiatan	148.200.000,00	148.200.000,00		P1
0105.010501.05.030	Kegiatan Keamanan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pengamanan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	180 kegiatan	1.653.000.000,00	1.055.915.000,00	KSB	P1
0105.010501.05.032	Peningkatan kemampuan Kapasitas bagi anggota Satlinmas dan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	60 kegiatan	95.000.000,00	145.000.000,00	KSB	P1
0105.010501.05.033	Pembuatan Peta Tibumtranmas Berbasis SIG	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 dokumen 15 kegiatan	0,00	55.000.000,00	KSB	P1
0105.010501.05.035	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Jumlah Kegiatan	57 kegiatan	217.725.000,00	217.725.000,00	KSB	P1
0105.08	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN**				**753.560.000,00**	**579.260.000,00**		
0105.010501.08.006	Operasional Pemadam Kebakaran	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Kendaraandan Peralatan Pemadam Kebakaran	6 Unit	372.860.000,00	372.860.000,00		P1
0105.010501.08.008	Pengadaan Alat Kerja DAMKAR	Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Jumlah alat kerja Damkar yang tersedia	8 Unit	194.300.000,00	20.000.000,00		P1
0105.010501.08.014	Sosialisasi dan Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bagi Masyarakat		Pemantauan APAR dan Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, meliputi :Rumah Sakit, Perusahaan, UPT Kesehatan, Gedung Pemerintah, BUMN/BUMD, Ruko dan SPBU dll. Pelatihan Pemadam Kebakaran Bagi Karyawan Perusahaan dan Rumah Sakit Kader Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bagi Pemuda dan Ormas Pembentukan Saka Yudha Brama Jaya	770 Bulan 12 Orang 85 Orang 31 Orang	186.400.000,00	186.400.000,00		P1
010502	**PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**1.797.218.000,00**	**1.657.218.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**1.797.218.000,00**	**1.657.218.000,00**		
0105	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**1.797.218.000,00**	**1.657.218.000,00**		
0105.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**				**687.000.000,00**	**652.000.000,00**		
0105.010502.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kabupaten Purbalingga	Teredianya bahan dan jasa perkantoran	12 bln	267.000.000,00	232.000.000,00	KSB	P1
0105.010502.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Purbalingga	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	150.000.000,00	150.000.000,00		P1
0105.010502.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	BPBD Kabupaten Purbalingga	Terlaksananya pemeliharaan sarpras	12 bln	250.000.000,00	250.000.000,00		P1
0105.010502.01.006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	BPBD Kabupaten Purbalingga	Terdidik dan terlatihnya pegawai	10 orang	10.000.000,00	10.000.000,00		P1
0105.010502.01.007	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	BPBD Kabupaten Purbalingga	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	12 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00		P1
0105.07	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**				**1.110.218.000,00**	**1.005.218.000,00**		
0105.010502.07.007	Pengadaan Stok Logistik Menghadapi Darurat Bencana	Kabupaten Purbalingga	Tertanganinya darurat bencana tertanganinya darurat bencana Tertanganinya darurat bencana	500 buah sarimi 800 buah 1500 kg/beras	0,00	437.225.000,00		P1
0105.010502.07.008	Fasilitasi Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	Kabupaten Purbalingga	tertanganinya jumlah kerusakan akibat bencana	120 kali/kerusakan	467.993.000,00	461.493.000,00		P1
0105.010502.07.010	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				25.000.000,00			P1
0105.010502.07.014	Pengadaan sarpras kebencanaan	BPBD Kabupaten Purbalingga	terlaksananya sewa lahan antena repeater	1 th	0,00	6.500.000,00		P1
0105.010502.07.016	Pelatihan dan simulasi penanganan bencana	Kabupaten Purbalingga	Terlatih dan meningkatnya kesadaran penanganan bencana	10 desa	0,00	100.000.000,00		P1
0105.010502.07.019	Mitigasi Bencana				180.000.000,00			P1
0105.010502.07.020	Penanganan Darurat Bencana				437.225.000,00			P1
010601	**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN A**				**12.737.727.000,00**	**12.309.537.000,00**		
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**4.860.225.000,00**	**4.430.388.000,00**		
0106	**SOSIAL**				**4.860.225.000,00**	**4.430.388.000,00**		
0106.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**				**1.490.204.000,00**	**1.235.704.000,00**		
0106.010601.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	DINSOSDALDUKKBP3A	Keluaran : Tersedianya daya listrik Keluaran : Tesedianya Air PAM Keluaran : Tersedianya jasa telpon Keluaran : Tersedianya bahan jasa perkantoran	120 120 Pegawai	584.000.000,00	584.000.000,00	KSB	P1
0106.010601.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	DINSOSDALDUKKBP3A	Perjalanan dinas bagi ASN baik dalam maupun luar daerah	300 perjalanan	240.079.000,00	240.079.000,00	KSB	P1
0106.010601.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	DINSOSDALDUKKBP3A	Pemeliharaan gedung, pemeliharaan mobil, pemeliharaan motor dan pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	569.250.000,00	319.250.000,00	KSB	P1
0106.010601.01.004	Pemeliharaan TMP	TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terjaganya dan terpliharanya lingkungan taman	2 TMP	56.875.000,00	52.375.000,00	KSB	P1
0106.010601.01.006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	DINSOSDALDUKKBP3A	Mengirimkan ASN dan PKB untuk mengikuti DIKLAT	78 orang	30.000.000,00	30.000.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0106.010601.01.007	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	DINSOSDALDUKKBP3A	Penyusunan Dokumen perencanaan OPD : Renstra, Renja, LKjIP, LKPJ, LKD	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	KSB	P1
0106.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**				**802.712.000,00**	**341.913.000,00**		
0106.010601.02.005	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah karang taruna yang dibina Jumlah Penanganan Kasus PMKS	239 orang 2500 Orang	312.262.000,00	62.262.000,00	KB	P1
0106.010601.02.006	Pendataan, Verifikasi, Validasi Data kemiskinan	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah Data kemisikinan pada PMKS dan Data BDT Yang menjadi sumber dalam penentuan bantuan.	533339 orang	490.450.000,00	279.651.000,00	KB	P1
0106.03	**PROGRAM FASILITASI, PENANGANAN DAN REHABILITASI KORBAN BENCANA**				**74.830.000,00**	**44.000.000,00**		
0106.010601.03.001	Penyaluran Bantuan Bencana Alam dan Bencana sosial	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial	18 kecamatan	74.830.000,00	44.000.000,00	KSB	P1
0106.04	**PROGRAM PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**				**2.492.479.000,00**	**2.808.771.000,00**		
0106.010601.04.016	Fasilitasi Program Perlindungan sosial	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah peserta PKH yang di fasilitasi Jumlah RTLH dan Program KUBe yang difasilitasi Jumlah lanjut usia yang difasilitasi	54542 orang 50 orang 30 orang	692.041.000,00	554.037.000,00		P1
0106.010601.04.017	Pembinaan dan Rehabilitasi PMKS	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah penyandang disabilitas yang di layani dan di rehabilitasi. Jumlah PMKS yang terjaring dan ditangani. Jumlah PMKS yang di beri penyuluhan/ bimbingan sosial/ ketrampilan praktis. Jumlah Penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan porseni	490 orang 240 orang 70 orang 30 orang	448.644.000,00	748.644.000,00	KB	P1
0106.010601.04.018	Pembinaan dan Fasilitasi SDM dan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah panti sosial dan panti rehabilitasi yang di bina. Jumlah PMKS yang di data. Jumlah PMKS yang di bina dan di beri bantuan. Jumlah Petugas sosial masyarakat yang bina	30 orang 108014 orang 2300 orang 18 orang	994.218.000,00	967.768.000,00	KB	P1
0106.010601.04.019	Operasional Rumah Singgah	KECAMATAN PURBALINGGA DESA BOJONG	Terfasilitasinya PMKS dan PSKS	40 orang	250.000.000,00	538.322.000,00	KB	P1
0106.010601.04.020	Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Lanjut Usia (DAK)				8.950.000,00			P1
0106.010601.04.021	Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Sosial (DAK)				98.626.000,00			P1
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**7.877.502.000,00**	**7.879.149.000,00**		
0202	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**474.719.000,00**	**434.719.000,00**		
0202.01	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**474.719.000,00**	**434.719.000,00**		
0202.010601.01.014	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah unit pelayanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terfasilitasi Jumlah penangan tindak pidana perdagangan orang	50 lembaga 0 lembaga	145.656.000,00	145.656.000,00	KB	P1
0202.010601.01.015	Pembinaan, Fasilitasi, dan Evaluasi PUG dan PPRG	KABUPATEN PURBALINGGA	Keluaran : Terfasilitasinya jumlah PPRG dan PUG Keluaran : jumlah peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini	1 lembaga 2 kali	136.790.000,00	96.790.000,00	KB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0202.010601.01.016	Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi PUHA	ds.longgar,ds sirau ds.bantarbarang,ds.tlahabkidul,ds.kasih, ds.pasunggingan ds.pekalongan,ds.toyareja,ds. toyareja, ds.kr.gedang,ds.semporlor,ds .kalitinggarkidul ds.brakas,ds.kr,cegak, ds.kr.nangka ds	jumlah Terbentuknya Lembaga Kota Layak Anak Jumlah raperda perlindungan anak Jumlah peringatan hari anak nasional	1 lembaga 1 perda 1 kali	192.273.000,00	192.273.000,00	KB	P1
0208	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**				**7.402.783.000,00**	**7.444.430.000,00**		
0208.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA**				**2.020.000.000,00**	**2.020.000.000,00**		
0208.010601.01.011	Pembinaan, Pengembangan, dan Fasilitasi Keluarga Sejahtera	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah kader kelompok BKS yang dibina. Jumlah kader UPPKS yang dibina	2 kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	KB	P1
0208.010601.01.012	Pembinaan Ketahana Keluarga dan Kesehatan Reproduksi Remaja	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah kegiatan PIK-R Jumlah kegiatan BKB	2 kegiatan	71.000.000,00	71.000.000,00	KB	P1
0208.010601.01.013	Penggerakan KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik)	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah Kader Kelompok BKS dan UPPKS dikampung KB yang dibina	36 desa kampung KB	1.824.000.000,00	1.824.000.000,00	KB	P1
0208.02	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN INSTITUSI KB**				**524.181.000,00**	**483.806.000,00**		
0208.010601.02.004	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok KB	3 perusahaan di KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah kelompok KB yang dibina	18 kelompok	53.500.000,00	53.500.000,00	KB	P1
0208.010601.02.005	Pembinaan dan Fasilitasi Jaringan Institusi KB	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah peserta KB yang difasilitasi jaringan institusi KB	1 kegiatan	113.021.000,00	113.021.000,00	KB	P1
0208.010601.02.006	Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi KKBPK	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah fasilitasi fabsedu. Jumlah kegiatan fasilitasi kualisi kependudukan. Jumlah laporan bulanan umpan balik. 4. Jumlah laporan semesteran dan laporan tahunan.	2 rakor FAPSEDU	74.790.000,00	74.790.000,00	KB	P1
0208.010601.02.007	Advokasi dan KIE	36 Desa di 18 Kecamatan se KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah lini lapangan yang dibina. Jumlah KIE dan Advokasi melalui melalui media masa.	18 kecamatan 5 jenis	116.733.000,00	116.733.000,00	KB	P1
0208.010601.02.008	Profil dan Analisis Data Kependudukan	18 Kecamatan se KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah profil kependudukan. Jumlah data keluarga. Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan kependudukan.	1 kegiatan	125.762.000,00	125.762.000,00	KB	P1
0208.010601.02.009	Penurunan Stunting (DAK)				40.375.000,00			P1
0208.03	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KEPESERTAAN KB**				**4.858.602.000,00**	**4.940.624.000,00**		
0208.010601.03.001	Penyediaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)	18 kecamatan se KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan KB	1 paket	1.331.753.000,00	1.410.720.000,00	KSB	P1
0208.010601.03.006	Peningkatan pelayanan dan pembinaan peserta KB aktif dan KB baru serta perlindungan efek samping KB	18 kecamatan se KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah pembinaan peserta KB akrif dan KB baru. jumlah pelayanan ayoman medis bagi peserta KB	152368 orang 19054 0rang	60.509.000,00	60.509.000,00	KSB	P1
0208.010601.03.009	Pembinaan Program KB Berbasis Masyarakat (DAK Non Fisik)	18 Kecamatan se KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina	239 kader	1.128.153.000,00	1.128.153.000,00	KSB	P1
0208.010601.03.010	Pengadaan Media KIE dan Management (DAK Non Fisik)	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah Peserta KB aktif	1 kegiatan	838.242.000,00	838.242.000,00	KSB	P1
0208.010601.03.013	Operasional Balai Penyuluh (DAK Non Fisik)	18 BALAI PENYULUH KB KECAMATAN SE KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah penyuluh yang diberi bantuan oprasional DAK Non Fisik	100 persen	1.447.925.000,00	1.450.980.000,00	KB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0208.010601.03.014	Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik)	KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah Distribusi Alokon ke faskes se Kabupaten Purbalingga	100 persen	52.020.000,00	52.020.000,00	KB	P1
020101	**DINAS TENAGA KERJA**				**2.290.818.000,00**	**2.032.018.000,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**2.190.818.000,00**	**1.832.018.000,00**		
0201	**TENAGA KERJA**				**2.190.818.000,00**	**1.832.018.000,00**		
0201.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**				**879.918.000,00**	**713.118.000,00**		
0201.020101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinas Tenaga Kerja	Tersedianya bahan dan jasa perkantoran	12 bulan	381.179.000,00	367.479.000,00		P1
0201.020101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	dalam Purbalingga dan luar Purbalingga	Terselenggaranya perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	159 Ok	104.000.000,00	104.000.000,00		P1
0201.020101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	246.239.000,00	219.639.000,00		P1
0201.020101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Terlaksanaya pengadaan sarana dan prasarana kantor	12 bulan	126.500.000,00	0,00		P1
0201.020101.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dalam Purbalingga dan luar Purbalingga	Terlaksananya diklat ASN	15 ASN	12.000.000,00	12.000.000,00		P1
0201.020101.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Dinas Tenaga Kerja	Tersusunnya dokumen RKJIP, LPPD, LKPJ, RENJA, Evaluasi Kinerja	5 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00		P1
0201.02	**PROGRAM PEMBINAAN, PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**				**1.065.900.000,00**	**891.900.000,00**		
0201.020101.02.001	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kab. Purbalingga	Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih	112 orang	0,00	182.000.000,00		P1
0201.020101.02.002	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah AK 1 yang diterbitkan	16000 AK 1	115.000.000,00	115.000.000,00		P1
0201.020101.02.003	Fasilitasi Kelembagaan Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Purbalingga	Jumlah LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) yang difasilitasi perijinan	15 LPKS	30.000.000,00	30.000.000,00		P1
0201.020101.02.004	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja (DBH-CHT)	Kabupaten Purbalingga	Jumlah tenaga kerja yang dilatih produktivitas	80 orang	193.900.000,00	193.900.000,00		P1
0201.020101.02.005	Pengelolaan dan Pemeliharaan BLK	UPTD BLK Dinnaker Kab. Purbalingga	Terpeliharanya BLK	12 bulan	371.000.000,00	371.000.000,00		P1
0201.020101.02.006	Penyediaan sarana dan prasarana BLK	BLK Kab. Purbalingga	Tersedianya sarpras BLK	12 bulan	174.000.000,00	0,00		P1
0201.020101.02.007	Pelatihan Berbasis Kompetensi Institusional dan Non Institusional				182.000.000,00			P1
0201.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**				**245.000.000,00**	**227.000.000,00**		
0201.020101.03.001	Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial	Kab. Purbalingga	Jumlah pembinaan kelembagaan Hubungan Industrial	30 kegiatan	135.000.000,00	130.000.000,00	KB	P1
0201.020101.03.002	Pembinaan Pengupahan dan Kesejahteraan pekerja di perusahaan	Kab. Purbalingga	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan	80 perusahaan	110.000.000,00	97.000.000,00		P1
03	**URUSAN PILIHAN**				**100.000.000,00**	**200.000.000,00**		
0306	**TRANSMIGRASI**				**100.000.000,00**	**200.000.000,00**		
0306.01	**PROGRAM KETRANSMIGRASIAN**		Jumlah calon transmigran yang difasilitasi	15 Orang	**100.000.000,00**	**200.000.000,00**		
0306.020101.01.001	Sosialisasi dan Fasilitasi Ketransmigrasian	Kabupaten Purbalingga	Jumlah calon transmigran yang disosialisasi dan transmigran yang difasilitasi	5 KK	100.000.000,00	200.000.000,00		P1
020301	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**				**10.064.306.000,00**	**8.389.045.000,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**8.147.162.000,00**	**6.747.125.000,00**		
0203	**PANGAN**				**8.147.162.000,00**	**6.747.125.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0203.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**				**1.009.000.000,00**	**1.007.000.000,00**		
0203.020301.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tersedianya kebutuhan bahan dan jasa perkantoran	12 bulan	564.600.000,00	555.600.000,00		P1
0203.020301.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Terselenggaranya perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah terselenggaranya rapat2 dan konsultasi perjalnan dinas luar daerah	250 Ok 120 ok	150.000.000,00	132.000.000,00		P1
0203.020301.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	195.000.000,00	195.000.000,00		P1
0203.020301.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	DKPP	Jumlah CCTV, running tex, AC baru	4 Unit	16.000.000,00	40.000.000,00		P1
0203.020301.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	jumlah Diklat ASN	20 ASN	38.400.000,00	44.400.000,00		P1
0203.020301.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	5 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00		P1
0203.020301.01.007	Statistik Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	terlaksananya pendataan statistik perikanan dan ketahanan pangan	5 dokumen	35.000.000,00	30.000.000,00		P1
0203.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN**		Angka konsumsi energi (kkal/cap/th) Angka konsumsi protein (kkal/cap/th) cakupan kecamatan rawan pangan yang tertangani Cakupan desa rawan pangan yang tertangani Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase pangan aman yang beredar di masyarakat Persentase pangan segar bersertifikat Prima 3	2200 kkal/cap/th 66.27 kkal/cap/th 0 persen 0 persen 94.45 persen 95 persen 6 persen	**6.793.162.000,00**	**4.835.125.000,00**		
0203.020301.02.001	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kab. Purbalingga	'Jumlah kelompok yang terfasilitasi pelatihan pengolahan bahan pangan Jumlah sekolah yang difasilitasi bantuan pangan B2SA Jumlah promosi produk pangan	20 kelompok 2 sekolah 5 kali	302.000.000,00	250.000.000,00		P1
0203.020301.02.003	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Kab. Purbalingga	Jumlah KWT yang terfasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan	20 kwt	115.000.000,00	115.000.000,00		P1
0203.020301.02.005	Pembinaan Keamanan Pangan	Kab. Purbalingga	Jumlah sample pangan segar yang diuji	20 sampel	100.000.000,00	100.000.000,00		P1
0203.020301.02.013	Peningkatan Akses Pangan Masyarakat	Kab. Purbalingga	'Jumlah bantuan paket bahan pangan Jumlah sample pangan segar yang diuji JJumlah pangan segar bersertifikat prima 3	134000 paket 100 sampel 3 komoditas	6.276.162.000,00	4.370.125.000,00		P1
0203.03	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PANGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**				**345.000.000,00**	**905.000.000,00**		
0203.020301.03.001	Fasilitasi Lembaga Cadangan Pangan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah bantuan gabah ke masyarakat Jumlah kelompok lumbung yang terfasilitasi Jumlah pengadaan cadangan pangan pemkab	8 ton 9 lumbung 10 ton	140.000.000,00	140.000.000,00		P1
0203.020301.03.003	Fasilitasi Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Monitoring Harga dan Pasokan Pangan	Kabupaten Purbalingga	Tersedianya informasi harga dan rantai pasok pangan tersusunnya buku rantai pasok bahan pangan	1 buku rantai pasok 10 buku	47.000.000,00	70.000.000,00		P1
0203.020301.03.004	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (DAK)	Kabupaten Purbalingga	Jumlah kelompok lumbung yang terfasilitasi	1 lumbung	0,00	520.000.000,00		P1
0203.020301.03.005	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Kabupaten Purbalingga	'Jumlah rakor DKP Jumlah rekomendasi mengenai ketahanan pangan	2 kali 3 rekomendasi	58.000.000,00	75.000.000,00		P1
0203.020301.03.006	Fasilitasi Desa Mandiri Pangan	Kabupaten Purbalingga	Terfasilitasinya desa mandiri pangan	1 kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00		P1
03	**URUSAN PILIHAN**				**1.917.144.000,00**	**1.641.920.000,00**		
0301	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**1.917.144.000,00**	**1.641.920.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0301.01	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA**		Produksi ikan konsumsi Produksi benih ikan Produksi ikan hias	5153 Ton 132.5 Ribu Ekor 889 Ribu Ekor	**1.435.144.000,00**	**1.151.920.000,00**		
0301.020301.01.001	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Kawasan Perikanan Budidaya (DAK)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Purbalingga	'Jumlah paket sarana budidaya ikan	14 paket	1.061.144.000,00	801.920.000,00		P1
0301.020301.01.004	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Perikanan Budidaya (DBH-CHT)	Kabupaten Purbalingga	'Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi pelatihan	10 kelompok	106.000.000,00	150.000.000,00		P1
0301.020301.01.008	Pengelolaan UPTD BIAT	UPTD BIAT Purbalingga	produksi benih ikan	1000000 ekor	70.000.000,00	100.000.000,00		P1
0301.020301.01.009	Pengembangan Perikanan Budidaya	Kabupaten Purbalingga	'Jumlah paket percontohan budidaya ikan	4 paket	198.000.000,00	100.000.000,00		P1
0301.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	3000 Ton 11.7 kg/kap/tahun	**280.000.000,00**	**300.000.000,00**		
0301.020301.02.001	Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengolah Hasil Perikanan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah POKLAHSAR yang terfasilitasi pelatihan	10 Poklahsar	100.000.000,00	100.000.000,00		P1
0301.020301.02.002	Promosi dan Gerakan Gemar makan Ikan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah sosialisasi/ promosi gemarikan	10 kali	180.000.000,00	200.000.000,00		P1
0301.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**		Produksi ikan sungai	235 Ton	**202.000.000,00**	**190.000.000,00**		
0301.020301.03.001	Pengendalian dan Pemeliharaan Sumber Hayati Perikanan (SHP) Perairan Umum	Kabupaten Purbalingga	'Jumlah ikan yang ditebar	500000 ekor	187.000.000,00	175.000.000,00		P1
0301.020301.03.003	Fasilitasi Tanda Pencatatan Usaha Perikanan	Kabupaten Purbalingga	'Jumlah pelaku usaha perikanan yang tercatat	1000 RTP	15.000.000,00	15.000.000,00		P1
020501	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				**11.867.750.000,00**	**20.041.567.000,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**11.867.750.000,00**	**20.041.567.000,00**		
0205	**LINGKUNGAN HIDUP**				**11.867.750.000,00**	**20.041.567.000,00**		
0205.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**				**907.750.000,00**	**907.750.000,00**		
0205.020501.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Teredianya bahan dan jasa perkantoran	12 bulan	257.750.000,00	242.750.000,00	KSB	P1
0205.020501.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Terlaksananya rapat - rapat kordinasi dan konsultasi	12 bulan	175.000.000,00	180.000.000,00	KSB	P1
0205.020501.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	445.000.000,00	455.000.000,00	KSB	P1
0205.020501.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup	12 bulan	0,00	0,00		P1
0205.020501.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Prosentse ASN yang terlatih	10 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	KSB	P1
0205.020501.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	KSB	P1
0205.02	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**				**2.422.000.000,00**	**6.422.000.000,00**		
0205.020501.02.001	Konservasi SDA dan Ekosistem	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah kawasan tertangani	10 lokasi	274.500.000,00	274.500.000,00	KB	P1
0205.020501.02.004	Pembangunan RTH	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Prosentase RTH yang terbangun	3 lokasi	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	KB	P1
0205.020501.02.005	Kampung Proklim	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Prosentase kampung proklim	10 desa	47.500.000,00	47.500.000,00	KB	P1
0205.020501.02.006	Operasional dan Pemeliharaan RTH	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Terpeliharannya RTH di wilayah perkotaan	4 lokasi	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	KSB	P1
0205.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**175.000.000,00**	**200.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0205.020501.03.001	Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Kebisingan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Terpantaunnya kualitas Air, Udara, tanah dan kebisingan	1 kabupaten	150.000.000,00	150.000.000,00	KSB	P1
0205.020501.03.003	Pengadaan Sarpras Laboratorium				0,00	0,00		P1
0205.020501.03.004	Operasional Sarpras Laboratorium	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Prosentase data yang dihasilkan	10 data	25.000.000,00	50.000.000,00	KB	P1
0205.020501.03.005	Inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca)				0,00	0,00		P1
0205.04	**PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**				**303.250.000,00**	**303.250.000,00**		
0205.020501.04.002	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen IKLH dan IKPLHD yang disusun	10 dokumen	152.500.000,00	152.500.000,00	KB	P1
0205.020501.04.006	Fasilitasi Penerbitan Perijinan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah perijinan LH yang terfasilitasi	5 dokumen	50.750.000,00	50.750.000,00	KSB	P1
0205.020501.04.017	Fasilitasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah desa yang punya perdes LH	10 desa	100.000.000,00	100.000.000,00	KSB	P1
0205.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, LIMBAH B3 DAN PKLH**				**8.059.750.000,00**	**12.208.567.000,00**		
0205.020501.05.001	Pembinaan Pegiat Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah kelompok yang sadar lingkungan	3 kelompok	47.500.000,00	47.500.000,00	KSB	P1
0205.020501.05.002	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah sampah yang terangkut	12 bulan	5.937.500.000,00	5.937.500.000,00	KB	P1
0205.020501.05.006	Fasilitasi Program Adiwiyata	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah sekolah sehat	1 sekolah	59.750.000,00	59.750.000,00	KSB	P1
0205.020501.05.007	Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah desa/kel yang mengelola sampah	3 kelurahan/desa	570.000.000,00	70.000.000,00	KSB	P1
0205.020501.05.013	Pembangunan TPA Baru	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah sampah yang diolah	4 unit/bangunan	1.400.000.000,00	5.200.000.000,00	KB	P1
0205.020501.05.022	Pembinaan, Pengawasan dan monitoring Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah perusahaan yang sadar B3	20 perusahaan	45.000.000,00	45.000.000,00	KB	P1
0205.020501.05.025	Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Jumlah sampah yang terangkut	12 bulan	0,00	848.817.000,00	KB	P1
020601	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**5.418.016.000,00**	**4.056.507.000,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**5.418.016.000,00**	**4.056.507.000,00**		
0206	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL**				**5.418.016.000,00**	**4.056.507.000,00**		
0206.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**				**860.662.000,00**	**571.138.000,00**		
0206.020601.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinpenduk dan Capil Kab. Purbalingga	Jumlah Bahan dan Jasa Perkantoran yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dindukcapil	3 jenis	334.207.000,00	304.207.000,00	KB	P1
0206.020601.01.002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinpenduk dan Capil Kab. Purbalingga	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dapat dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dindukcapil	460 kegiatan	97.990.000,00	84.000.000,00	KB	P1
0206.020601.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinpenduk dan Capil Kab. Purbalingga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dindukcapil	49 unit	262.416.000,00	177.931.000,00	KB	P1
0206.020601.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				161.049.000,00	0,00		P1
0206.020601.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dinpenduk dan Capil Kab. Purbalingga	Jumlah ASN yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan	15 ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	KB	P1
0206.02	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**4.557.354.000,00**	**3.485.369.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0206.020601.02.001	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Purbalingga	Jumlah akte kelahiran yang tercetak/diterbitkan	30000 dokumen	485.213.000,00	440.000.000,00	KB	P1
			Jumlah akte kematian yang tercetak/diterbitkan	1000 dokumen				
			Jumlah akta perkawinan yang tercetak/diterbitkan	50 dokumen				
			JUmlah akta pengangkatan anak yang tercetak/diterbitkan	5 dokumen				
			Jumlah akta pengesahan anak yang tercetak/diterbitkan	10 dokumen				
			Jumlah akat perceraian yang tercetak/diterbitkan	5 dokumen				
			Jumlah data akta kelahiran yang ter entry dalam SIM data akta kelahiran	40000 data				
0206.020601.02.010	Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah KTP eL yang tercetak	45000 dokumen	563.610.000,00	681.000.000,00	KB	P1
			Jumlah KK yang tercetak	20000 dokumen				
			Jumlah KIA yang tercetak	30000 dokumen				
0206.020601.02.012	Sistim Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK non fisik	Kabupaten Purbalingga	Cetak blanko KK, Akte, permohonan dokumen adminduk	150000 lembar	3.256.951.000,00	2.194.069.000,00	KB	P1
			Ribon e - KTP dan KTP eL	150 buah/unit				
			Film Printer E-KTP dan KTP-eL	450 buah/unit				
			Cleaning kid	25 buah/unit				
			Jumlah perjalanan dinas keliling	7800 kegiatan				
			Perjalanan dinas bintek dan rakernas khusus adminduk	27 kegiatan				
			Pemeliharaan SIAK	50 kegiatan				
			Publikasi baner-leaflet	2500 buah/leaflet				
0206.020601.02.014	Pemeliharaan Jaringan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data Kependudukan	Dinpendukcapil Kab. Purbalingga	Jumlah jaringan yang terpelihara	20 unit	201.580.000,00	120.300.000,00	KB	P1
			Jumlah menu aplikasi yang diperbaharui/ditambahkan/disempurnakan	15 jenis				
0206.020601.02.015	Pemanfaatan dan Penyebarluasan Informasi Data Kependudukan	Dinpenduk dan Capil Kab. Purbalingga	Jumlah pelayanan melalui SMS Gateway, dan Aplikasi Front Office	150000 pelayanan	50.000.000,00	50.000.000,00	KB	P1
020701	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**3.379.082.000,00**	**1.993.105.000,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**3.379.082.000,00**	**1.993.105.000,00**		
0207	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**				**3.379.082.000,00**	**1.993.105.000,00**		
0207.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**766.452.000,00**	**637.183.000,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0207.020701.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinpermasdes	Jumlah Bahan dan Jasa Perkantoran yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinpermasdes	3 Jenis/unit	218.452.000,00	218.452.000,00		P1
0207.020701.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinpermasdes	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dapat dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinpermasdes	460 Ok	120.000.000,00	120.000.000,00		P1
0207.020701.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinpermasdes	Perawatan Kendaraan Bermotor	15 unit/kali	403.000.000,00	203.000.000,00		P1
			Pemeliharaan Gedung	1 unit/kali				
			Pemeliharaan Listrik, tilp dan air	1 paket/ kali				
			Pemeliharaan Peralatan Kantor	15 unit/kali				
			Pemeliharaan Mebeler	15 unit/kali				
			Pemeliharaan Jaringan	1 unit/kali				
			Pemeliharaan Tanaman	1 paket/ kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0207.020701.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinpermasdes	Pengadaan sarpras kantor	0 unit/buah	0,00	70.731.000,00		P1
0207.020701.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dinpermasdes	Jumlah ASN yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	15.000.000,00	15.000.000,00		P1
0207.020701.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Dinpermasdes	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang tersedia/tersusun.	11 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00		P1
0207.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DESA**		Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu	100 %	**1.144.300.000,00**	**753.422.000,00**		
			Cakupan desa/kelurahan yang menyusun profil desa secara tepat waktu	100 %				
			Cakupan desa yang memiliki BUMDes yang sehat	18 desa				
			Rasio lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif	5081 RT				
			Jumlah pasar desa yang dibina	74 unit				
			Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tepat waktu	100 %				
0207.020701.02.001	Fasilitasi ADD dan DD	Dinpermasdes	Jumlah Desa yang memperoleh Fasilitasi Penyelenggaraan ADD dan DD	224 desa	528.800.000,00	242.000.000,00		P1
0207.020701.02.002	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinpermasdes	Jumlah Desa yang memperoleh Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	224 desa	67.000.000,00	48.800.000,00		P1
0207.020701.02.003	Laboratorium Lapang Desa (Labsite)	Dinpermasdes	Jumlah Kelembagaan Desa Labsite yang terbentuk	2 desa	15.000.000,00	15.000.000,00		P1
0207.020701.02.004	Penyusunan Profil Desa Se-Kabupaten Purbalingga	Dinpermasdes	Jumlah Profil Desa yang tersusun	224 desa	20.000.000,00	20.000.000,00		P1
			Jumlah profil kelurahan yang tersusun	15 kelurahan				
0207.020701.02.005	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinpermasdes	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	224 orang	31.000.000,00	50.122.000,00		P1
0207.020701.02.006	Sistem Informasi Desa (SID)	Dinpermasdes	Jumlah Desa yang mengimplementasikan Sisten Informasi Desa (SID)	100 desa	0,00	75.000.000,00		P1
0207.020701.02.007	Pelatihan Sistem Keuangan Desa	Dinpermasdes	Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes Online	224 desa	0,00	46.000.000,00		P1
0207.020701.02.008	Penyusunan Perbup Tindak Lanjut Implementasi UU Desa	Dinpermasdes	Jumlah PERDA/Perkada yang tersusun	3 dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00		P1
0207.020701.02.009	Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Dinpermasdes	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Musrenbang Desa.	224 desa	34.000.000,00	34.000.000,00		P1
			Jumlah dokumen RKPD desa yang tersusun	224 dokumen				
0207.020701.02.010	Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Antar Desa				15.500.000,00	15.500.000,00		P1
0207.020701.02.011	Bupati Tilik Desa	Dinpermasdes	Jumlah kegiatan Bupati tilik desa	8 kali	150.000.000,00	26.000.000,00		P1
			Jumlah desa lokasi tilik desa	4 desa				
0207.020701.02.012	Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa	Dinpermasdes	Jumlah Desa yang memperoleh Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Desa .	224 desa	30.000.000,00	20.000.000,00		P1
			Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan Desa dengan Akuntable	224 desa				
0207.020701.02.013	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Dinpermasdes	Jumlah apartur pemerintahan desa	224 desa	245.000.000,00	153.000.000,00		P1
			jumlah kepala desa	224 orang				
			Jumlah anggota BPD	224 orang				
0207.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**		Cakupan posyandu aktif	1194 Unit	**1.468.330.000,00**	**602.500.000,00**		
			Cakupan lumbung desa sehat	12 Unit				
			Rasio Karang Taruna aktif	239 desa/kelurahan				
			Rasio PKK Desa/Kelurahan aktif	239 desa/kelurahan				
			Cakupan BP-SPAM aktif	10 kelompok				
			Cakupan KPP Sanitasi Lingkungan aktif	60 kelompok				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0207.020701.03.001	Fasilitasi Penyediaan Sarpras Permukiman	Dinpermasdes	Jumlah Kelembagaan BP-SPAM yang memperoleh pembinaan dan peningkatan kapasitas. Jumlah Kelembagan UED-SP yang memperoleh pembinaan dan peningkatan kapasitas. Jumlah Dokumen Data/Informasi Kelembagaan dan Kelompok BP-SPAM dan UED-SP	140 kelompok 140 kelompok 140 kelompok	0,00	91.500.000,00		P1
0207.020701.03.002	Peningkatan Nilai Gotong Royong Masyarakat	Dinpermasdes	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan Gebrak Gotongroyong Jumlah Desa yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotongroyong Jumlah kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotongroyong	12 desa 224 desa 15 kelurahan	185.000.000,00	185.000.000,00		P1
0207.020701.03.003	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG)	Dinpermasdes	Jumlah orang yang memiliki keterampilan ekonomi produktif Jumlah orang/kelompok masyarakat Mitra P2MBG yang memperoleh pembinaan peningkatan kapasitas	50 orang 50 kk	982.330.000,00	25.000.000,00		P1
0207.020701.03.004	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Desa	Dinpermasdes	Jumlah Pasar Desa yang memperoleh pembinaan Jumlah Lumbung Desa yang memperoleh pembinaan Jumlah BUMDes yang memperoleh pembinaan	36 pasar desa 60 lumbung desa 60 unit/bumdes	92.000.000,00	92.000.000,00		P1
0207.020701.03.006	Fasilitasi TMMD	Dinpermasdes	Jumlah Desa yang melaksanakan TMMD Sengkuyung Jumlah Desa yang melaksnakan TMMD-Karya Bhakti	3 desa 2 desa	74.000.000,00	74.000.000,00		P1
0207.020701.03.007	Pemanfaatan dan Pengenalan TTG	Dinpermasdes	Jumlah Kelompok TTG Unggulan Jumlah Kelompok Inovasi Baru TTG	1 kelompok 1 kelompok	43.000.000,00	43.000.000,00		P1
0207.020701.03.008	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa	Dinpermasdes	Jumlah Lembaga Masyarkat Desa	611 lembaga masyarakat desa	92.000.000,00	92.000.000,00		P1
020901	**DINAS PERHUBUNGAN**				**10.918.192.000,00**	**11.466.541.000,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**10.918.192.000,00**	**11.466.541.000,00**		
0209	**PERHUBUNGAN**				**10.918.192.000,00**	**11.466.541.000,00**		
0209.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**1.365.368.000,00**	**1.615.543.000,00**		
0209.020901.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Tersedianya bahan dan jasa perkantoran	12 bulan	759.950.000,00	644.950.000,00	KSB	P1
0209.020901.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsurtasi serta Perjalanan dinas luar dan dalam daerah	506 kegiatan	135.000.000,00	132.000.000,00	KSB	P1
0209.020901.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	7 Gedung, 8 Kendaraan Roda 4, 20 Kendaraan Roda 2, Peralatan Kantor (komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik), Meja Kursi	12 bulan	302.168.000,00	302.168.000,00	KSB	P1
0209.020901.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga			32.800.000,00	400.975.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0209.020901.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan bintek	15 ASN	35.000.000,00	35.000.000,00	KSB	P1
0209.020901.01.007	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	tersusunnya dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, Renja, Evaluasi Renja	15 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	KSB	P1
0209.020901.01.008	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	95 stel PDH	85.450.000,00	85.450.000,00	KSB	P1
0209.02	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**				**1.623.824.000,00**	**2.721.998.000,00**		
0209.020901.02.001	Pengelolaan Terminal	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Terminal Bukateja, Terminal Kejobong, Terminal Penaruban, dan Terminal Jompo yang dapat dikelola kebersihannya	6 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	KSB	P1
0209.020901.02.002	Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal	Desa Kutasari	Terminal Kutasari	2 Unit	0,00	1.838.328.000,00	KB	P1
0209.020901.02.004	Perencanaan dan pembinaan angkutan	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Jumlah Awak angkutan yang dibina Jumlah pembinaan awak angkutan	20 stel / pakaian 3 kali	379.750.000,00	199.750.000,00	KSB	P1
0209.020901.02.005	Pengelolaan PKB	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	12.000 Kendaraan KBWU	12000 Unit	353.920.000,00	353.920.000,00	KSB	P1
0209.020901.02.018	Penertiban, Pembinaan dan Pengendalian Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Terlaksananya Penertiban dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	5 Kali	160.000.000,00	160.000.000,00	KSB	P1
0209.020901.02.019	Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK)				560.154.000,00			P1
0209.03	**PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN FASILITAS LALU LINTAS**				**7.929.000.000,00**	**7.129.000.000,00**		
0209.020901.03.001	Pemyediaan fasilitasi perlengkapan jalan	Kabupaten Purbalingga	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	7 paket	1.843.000.000,00	1.843.000.000,00	KSB	P1
0209.020901.03.002	Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan	Kabupaten Purbalingga	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan	12 bulan	190.000.000,00	190.000.000,00	KSB	P1
0209.020901.03.003	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Kabupaten Purbalingga	Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Umum	5600 titik LPJU	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	KSB	P1
0209.020901.03.004	Pengadaan dan pemasangan LPJU	Kabupaten Purbalingga	Terpasangnya LPJU baru	135 titik	3.500.000.000,00	2.700.000.000,00	KSB	P1
0209.020901.03.005	Perencanaan dan pegaturan Lalu Lintas	Kabupaten Purbalingga	Perencanaan dan Pengaturan Lalu Lintas	3 paket	500.000.000,00	500.000.000,00	KSB	P1
0209.020901.03.006	Penataan dan pengelolaan parkir	Kabupaten Purbalingga	Tertibnya Jumlah penyelenggaraan parkir	10 titik parkir	330.000.000,00	330.000.000,00	KSB	P1
021001	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**3.827.700.000,00**	**3.562.240.000,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**3.827.700.000,00**	**3.562.240.000,00**		
0210	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**3.377.240.000,00**	**3.562.240.000,00**		
0210.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**836.700.000,00**	**621.700.000,00**		
0210.021001.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	12 bulan	312.000.000,00	297.000.000,00	KSB	P1
0210.021001.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Keikutsertaan Dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi	135 kegiatan	135.400.000,00	135.400.000,00	KSB	P1
0210.021001.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	1 Paket	149.300.000,00	149.300.000,00	KSB	P1
0210.021001.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				200.000.000,00			P1
0210.021001.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dinkominfo Kabupaten Purbalingga	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan bintek	10 orang ASN	30.000.000,00	30.000.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0210.021001.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Dinkominfo Kabupaten Purbalingga	tersusunnya dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, Renja, Evaluasi Renja	5 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00		P1
0210.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI**		Persentase SKPD yang memiliki website	37 SKPD	**1.169.275.000,00**	**1.569.275.000,00**		
			Intensitas updating informasi pada website Pemerintah Daerah	7 Hari dalam seminggu				
			Cakupan sistem informasi manajemen (SIM) milik Pemerintahan Daerah yang berfungsi dan aktif	37 SKPD				
			Jumlah pelayanan publik secara online	9 Pelayanan				
0210.021001.02.001	Pemeliharaan Website dan jaringan internet	Kabupaten Purbalingga	Terpelihara pengembangan website OPD	30 OPD	130.000.000,00	130.000.000,00		P1
0210.021001.02.002	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi	Kabupaten Purbalingga	Tersedianya penambahan server	1 unit	289.000.000,00	489.000.000,00		P1
0210.021001.02.003	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	Kabupaten Purbalingga	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi	6 aplikasi/jenis	100.000.000,00	100.000.000,00		P1
0210.021001.02.007	Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Jaringan	Kabupaten Purbalingga	Terpelihara dan tersedianya peralatan jaringan	5 OPD	650.275.000,00	850.275.000,00		P1
			Tersedianya free di ruang publik	7 Titik				
0210.03	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**		Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi	900 Kegiatan	**1.371.265.000,00**	**1.371.265.000,00**		
			Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah	18 Kecamatan				
			Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	15 Kecamatan				
			Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio	12 Kali				
			Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal	2 Kali				
			Cakupan komunikasi dan kerjasama dengan media massa (cetak dan online)	30 Kali				
			Cakupan kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media massa	20 Media				
			Cakupan penyusunan naskah kebijakan Pemda	250 Naskah				
0210.021001.03.002	Pembinaan Lembaga Komunikasi Sosial	Kabupaten Purbalingga	Terbinanya Lembaga Komunikasi Sosial	13 lembaga	55.000.000,00	55.000.000,00		P1
0210.021001.03.003	Penguatan Kapasitas Informasi Daerah	OPD di Kabupaten Purbalingga	Kapasitas Informasi Daerah terjangkau lebih luas	1 paket	50.000.000,00	50.000.000,00		P1
0210.021001.03.004	Penyiaran Media Massa dan Peliputan OPD	Kabupaten Purbalingga	Tersedianya media massa Pemerintah Daerah dan peliputan OPD	50 kali	482.000.000,00	482.000.000,00		P1
0210.021001.03.009	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab	Kabupaten Purbalingga	Terpublikasinya hari hari besar nasional dan kegiatan hari besar keagamaan,even	100 kali	784.265.000,00	784.265.000,00		P1
0214	**STATISTIK**				**217.460.000,00**	**0,00**		
0214.01	**PROGRAM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH**		Cakupan ketersediaan data dasar pembangunan	100 persen	**217.460.000,00**	**0,00**		
0214.021001.01.001	Penyusunan data dasar dan informasi pembangunan daerah		Tersusunnya data dasar dan informasi Pembangunan daerah	18 kecamatan	176.960.000,00	0,00		P1
0214.021001.01.006	Pengelolaan data statistik sektoral		Tersedianya Data Statistik Sektoral	51 OPD	40.500.000,00	0,00		P1
0215	**PERSANDIAN**				**233.000.000,00**	**0,00**		
0215.01	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSANDIAN**				**233.000.000,00**	**0,00**		
0215.021001.01.003	Pengelolaan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terkelolanya persandian	4 paket	73.000.000,00	0,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0215.021001.01.004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara		Terkendalinya menara BTS	164 BTS	160.000.000,00	0,00		P1
021101	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**2.647.085.500,00**	**3.514.680.000,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**2.647.085.500,00**	**3.514.680.000,00**		
0211	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**2.647.085.500,00**	**3.514.680.000,00**		
0211.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**597.607.000,00**	**599.871.000,00**		
0211.021101.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinkop UKM	Tersedianya kebutuhan bahan dan jasa perkantoran	12 bulan	251.457.000,00	221.721.000,00		P1
0211.021101.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat - rapat kordinasi dan konsultasi Dalam Daerah (DD) dan Luar Daerah (DL) Dalam Daerah Luar Daerah	358 OK 250 kali 108 kali	135.695.000,00	135.695.000,00		P1
0211.021101.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinkop UKM	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	192.720.000,00	192.720.000,00		P1
0211.021101.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinkop UKM	Jumlah Pengadaan Sarpras yang diadakan	0 unit	0,00	32.000.000,00		P1
0211.021101.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dinkop UKM	Jumlah Terdidik dan terlatihnya pegawai	10 ASN	8.000.000,00	8.000.000,00		P1
0211.021101.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Dinkop UKM	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	5 dokumen	9.735.000,00	9.735.000,00		P1
0211.02	**PROGRAM PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN KOPERASI**		Jumlah koperasi sehat Jumlah anggota koperasi	125 Koperasi 52708 Orang	**400.850.000,00**	**364.025.000,00**		
0211.021101.02.005	Pengendalian dan Pengawasan Usaha Koperasi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah SDM Koperasi yang dilatih Laporan Keuangan Koperasi yang di periksa (%)	90 orang 75 %	141.065.000,00	141.065.000,00		P1
0211.021101.02.006	Penumbuhan Koperasi	Kabupaten Purbalingga	Penambahan anggota baru Peningkatan Aset Koperasi	100 orang 2 %	80.940.000,00	80.940.000,00		P1
0211.021101.02.007	Pengembangan Koperasi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Koperasi yang berkembang dan melakukan diversifikasi usaha	3 %	178.845.000,00	142.020.000,00		P1
0211.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN, PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING PRODUK UMKM**		Pertumbuhan jumlah UMKM Pertumbuhan jumlah UMKM berorientasi ekspor	0 UMKM 0 UMKM	**666.048.500,00**	**1.743.709.000,00**		
0211.021101.03.006	Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil	Kabupaten Purbalingga	Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang dibina	110 pelaku UMKM	250.184.000,00	598.022.000,00		P1
0211.021101.03.007	Sertifikasi Produk Usaha Mikro dan Kecil	Kabupaten Purbalingga	Jumlah fasilitasi sertifikat bagi usaha mikro dan kecil	50 sertifikat	86.250.000,00	155.000.000,00		P1
0211.021101.03.008	Pengembangan produktivitas usaha mikro dan kecil	Kabupaten Purbalingga	Jumlah produk usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar pengemasan	55 Produk	0,00	203.187.000,00		P1
0211.021101.03.009	Pemberdayaan Ekonomi Pesantren	Kabupaten Purbalingga	Jumlah pesantren yang terfasilitasi	75 pesantren	279.614.500,00	787.500.000,00		P1
0211.021101.03.010	Kemasan Produk UKM (DBH-CHT)				50.000.000,00			P1
0211.04	**PROGRAM KEMITRAAN, PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UMKM**		Cakupan UMKM yang difasilitasi promosi dan pemasaran Cakupan UMKM yang difasilitasi promosi melalui internet	200 UMKM 100 UMKM	**982.580.000,00**	**807.075.000,00**		
0211.021101.04.004	Gelar Produk UMKM	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Event gelar produk yang diikuti	10 event	789.800.000,00	719.575.000,00		P1
0211.021101.04.005	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang difasilitasi pemasaran	5 pelaku UMKM	192.780.000,00	37.500.000,00		P1
0211.021101.04.006	Temu Usaha Pelaku UMKM	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Event temu pelaku usaha UMKM	2 event	0,00	50.000.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
021201	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				**1.460.172.000,00**	**1.460.172.000,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**1.460.172.000,00**	**1.460.172.000,00**		
0212	**PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU**				**1.460.172.000,00**	**1.460.172.000,00**		
0212.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**758.272.000,00**	**758.272.000,00**		
0212.021201.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	DPMPTSP	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran	12 bulan	427.700.000,00	427.700.000,00		P1
0212.021201.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Purbalingga dan Luar Kab. Purbalingga	Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	120 OK	133.630.000,00	133.630.000,00		P1
0212.021201.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Purbalingga	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	166.942.000,00	166.942.000,00		P1
0212.021201.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	DPMPTSP	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	0 Unit	0,00	0,00		P1
0212.021201.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	DPMPTSP	Terlaksananya diklat bagi ASN	15 ASN	20.000.000,00	20.000.000,00		P1
0212.021201.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	DPMPTSP	Tersedianya Dokumen perencanaan , Pelaporan dan evaluasi kinerja	6 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00		P1
0212.02	**PROGRAM PROMOSI PEMASARAN POTENSI DAN FASILITASI INVESTASI**		Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN (baru) Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA (baru) Pertumbuhan nilai investasi PMDN (baru/Rp. 000 Pertumbuhan nilai investasi PMA (baru/Rp.000) Realisasi investasi total (baru/Rp. 000)	700 Unit 2 Unit 550000000 Ribu Rupiah 20000000 Ribu Rupiah 570000000 Ribu Rupiah	**310.000.000,00**	**310.000.000,00**		
0212.021201.02.001	Promosi dan pemasaran potensi daerah	Jabodetabek, Semarang/DIY/Surakarta	Jumlah pameran dan promosi	3 kali	125.000.000,00	125.000.000,00	KB	P1
0212.021201.02.002	Business gathering (temu bisnis)	Kabupaten Purbalingga, Jabodetabek	Temu usaha pelaku bisnis	3 kali	100.000.000,00	100.000.000,00	KB	P1
0212.021201.02.005	Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal	Kabupaten Purbalingga	Tersusunnya data dan informasi penanaman modal eksisting	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00		P1
0212.021201.02.006	Penyusunan Profil Investasi dan Penanaman Modal	DPMPTSP	Tersusunnya dokumen informasi/buku induk penanaman modal Kabupaten Purbalingga	2 dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00		P1
0212.03	**PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU**		Indek kepuasan masyarakat pelayanan perijinan Rata-rata jangka waktu proses perijinan Jumlah ijin yang dilayani di PTSP	81.9 Point 4.8 Hari 20 Jenis	**391.900.000,00**	**391.900.000,00**		
0212.021201.03.001	Pelayanan non Perijinan	Kabupaten Purbalingga	Pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan serta pengawasan pelaksanaan perizinan	750 subyek/obyek	0,00	257.500.000,00		P1
0212.021201.03.002	Pemeriksaan dan Pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan dalam daerah	DPMPTSP	Tersusunnya arsip perizinan	2400 berkas	257.500.000,00	15.000.000,00		P1
0212.021201.03.003	Penguatan Pelayanan Perijinan (sosialisasi perijinan)	Kabupaten Purbalingga	Jumlah sosialisasi perijinan	4 kali	119.400.000,00	119.400.000,00		P1
0212.021201.03.004	Akuisisi arsip perizinan				15.000.000,00			P1
021301	**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**				**18.795.414.000,00**	**7.756.252.000,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**13.945.557.000,00**	**3.755.757.000,00**		
0213	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**				**13.945.557.000,00**	**3.755.757.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0213.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**661.905.000,00**	**772.105.000,00**		
0213.021301.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinporapar Kab. Purbalingga	Tersedianya Kebutuhan	1 Tahun	332.120.000,00	332.120.000,00	KB	P1
0213.021301.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah rapat2 dan konsultasi dalam daerah (DD) Jumlah rapat2 koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (LD)	93 kali 134 kali	131.975.000,00	131.975.000,00	KB	P1
0213.021301.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah pemeliharaan sarpras kantor yang dilaksanakan	1 Tahun	176.050.000,00	176.050.000,00	KB	P1
0213.021301.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinporapar Kab. Purbalingga			0,00	110.200.000,00	KB	P1
0213.021301.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah diklat yang akan dilaksanakan	1 Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00	KB	P1
0213.021301.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen yang disusun : LKPJ, LKD, Laporan Kinerja, Perjanjian kinerja, RKPD dan Renja	6 dokumen	9.260.000,00	9.260.000,00	KB	P1
0213.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI PEMUDA**		Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	11 organisasi 21 kelompok	**821.610.000,00**	**821.610.000,00**		
0213.021301.02.008	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan kempemudaan yang dilaksanakan dan dibina	7 Kegiatan	0,00	612.441.000,00	KB	P1
0213.021301.02.009	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah event organisasi kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	6 event 13 organisasi	0,00	209.169.000,00	KB	P1
0213.021301.02.010	Pembinaan Kegiatan Kepemudaan				612.441.000,00			P1
0213.021301.02.011	Pembinaan Organisasi Kepemudaan				209.169.000,00			P1
0213.03	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA**		Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/Provinsi Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional Cakupan kelompok/organisasi olahraga yang difasilitasi Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi	100 piagam 20 piagam 1 organisasi 30 kegiatan	**12.462.042.000,00**	**2.162.042.000,00**		
0213.021301.03.011	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah prasarana olah raga yang dipelihara	3 unit	10.600.404.000,00	350.404.000,00	KB	P1
0213.021301.03.012	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Dinporapar Kab. Purbalingga	Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang difasilitasi	7 kegiatan	1.861.638.000,00	1.811.638.000,00	KB	P1
03	**URUSAN PILIHAN**				**4.849.857.000,00**	**4.000.495.000,00**		
0302	**PARIWISATA**				**4.849.857.000,00**	**4.000.495.000,00**		
0302.01	**PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**		Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/dikembangkan Jumlah desa wisata yang dikembangkan	0 Paket 0 Desa	**3.547.325.000,00**	**2.432.285.000,00**		
0302.021301.01.006	Pemeliharaan dan Pengelolaan Obyek Wisata	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah Obyek Wisata dalam kondisi baik	6 Obyek wisata	372.297.000,00	372.297.000,00	KB	P1
0302.021301.01.007	Pengembangan Destinasi Wisata (DAK)	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah Destinasi wisata yang difasilitasi/dikembangkan	6 destinasi	2.305.324.000,00	1.887.088.000,00	KB	P1
0302.021301.01.008	Pengembangan Destinasi Wisata	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah Destinasi wisata yang difasilitasi/dikembangkan	1 Destinasi	172.900.000,00	172.900.000,00	KB	P1
0302.021301.01.009	Pelayanan Kepariwisataan (DAK NON FISIK)				696.804.000,00			P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0302.02	**PROGRAM PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA**		Angka kunjungan wisatawan Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti	2779000 Orang 0 Kali	**893.635.000,00**	**968.210.000,00**		
0302.021301.02.001	Promosi daya tarik wisata	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah Promosi Pariwisata yang dilakukan	3 kegiatan	583.635.000,00	583.635.000,00	KB	P1
0302.021301.02.010	Apresiasi Duta Wisata Purbalingga	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah event-event duta wisata yang dilaksanakan dan diikuti	3 event	280.000.000,00	184.575.000,00	KB	P1
0302.021301.02.012	Pengembangan Industri dan Usaha Pariwisata	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah rekomendasi ijin industri & usaha pariwisata yang dikeluarkan	150 TDUP	30.000.000,00	200.000.000,00	KB	P1
0302.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN WISATA**		Jumlah Pokdarwis yang dibina	0 Kelompok	**408.897.000,00**	**600.000.000,00**		
0302.021301.03.004	Pembinaan Desa Wisata dan Pokdarwis	Dinporapar Kab. Purbalingga	Jumlah Desa Wisata yang dibina Jumlah Pokdarwis yang dibina	26 desa wisata 26 pokdawis	408.897.000,00	600.000.000,00	KB	P1
021801	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**				**2.224.180.000,00**	**1.839.270.060,00**		
02	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				**2.224.180.000,00**	**1.839.270.060,00**		
0217	**PERPUSTAKAAN**				**1.788.980.000,00**	**1.491.070.060,00**		
0217.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**				**552.470.200,00**	**498.270.200,00**		
0217.021801.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinas Arpusda Kabupaten Purbalingga	Tersedianya bahan dan jasa perkantoran Terfasilitasinya bahan dan jasa perkantoran	1 tahun 46 orang	239.127.000,00	239.127.000,00		P1
0217.021801.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun 75 Kegiatan	87.200.000,00	87.000.000,00	KSB	P1
0217.021801.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Tahun 8 Kegiatan	176.143.200,00	152.143.200,00	KSB	P1
0217.021801.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Tersedianya Peralatan Kantor sebagai Penunjang Pelayanan Bagi Pengunjung Tersedianya Peralatan Kantor sebagai Penunjang Pelayanan Bagi Pengunjung	1 Tahun 2 Kegiatan	30.000.000,00	0,00	KSB	P1
0217.021801.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Tahun 15 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	KSB	P1
0217.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**1.236.509.800,00**	**992.799.860,00**		
0217.021801.02.002	Gerakan gemar membaca	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Lomba Perpustakaan Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Lomba Perpustakaan	1 Tahun 20 kali Kegiatan	121.492.800,00	214.007.860,00	KSB	P1
0217.021801.02.004	Pengolahan, Penyiangan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Jumlah Buku yang diolah Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Jumlah Buku yang dilestarikan Jumlah Buku yang dipeliharan	540 Exemplar 3000 Exemplar 3000 Exemplar 540 Exemplar	32.000.000,00	32.000.000,00		P1
0217.021801.02.011	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah pengembangan Jumlah pembinaan perpustakaan Replikas Perpuseru	75 sekolah 6 desa	144.000.000,00	144.000.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0217.021801.02.013	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Perpustakaan	Kabupaten Purbalingga	Terlaksananya kegiatan perpustakaan keliling	490 Titik	322.792.000,00	322.792.000,00		P1
			Terlaksananya kegiatan sirkulasi layanan di Dinarspus dan MTL	1000 Pemustaka				
			Terlaksananya jumlah anggota berkartu	35000 Anggota				
0217.021801.02.015	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan (DAK)	Kabupaten Purbalingga	Tersedianya perlengkapan fasilitas lainnya dan penunjang layanan	15 paket	556.225.000,00	220.000.000,00		P1
			Tersedianya pengembangan bahan pustaka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 paket				
0217.021801.02.016	Pengadaan Bahan Pustaka	Dinas Kaersipan dan perpustakaan Kab. Purbalingga	Terpenuhinya Buku Koleksi Layanan Perpustakaan Keliling	1500 exemplar	60.000.000,00	60.000.000,00		P1
			Terpenuhinya Tandon Buku Koleksi Perpustakaan Khusus untuk Layanan Silang	1500 exemplar				
			Terpenuhinya Kebutuhan Alat Permainan Edukatif untuk Ruang PAUD	300 buah				
			Terpenuhinya buku Brile untuk kalangan disabilitas	200 exemplar				
			Terpenuhinya CD/DVD Film Edukatif/Dokumen untuk ruang Audio	200 keping				
			Terpenuhinya buku elektronik (perpustiakaan) Digital	1000 judul				
0218	**KEARSIPAN**				**435.200.000,00**	**348.200.000,00**		
0218.01	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				**435.200.000,00**	**348.200.000,00**		
0218.021801.01.012	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan	Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kab. Purbalingga	Jumlah peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana kearsipan	8 unit	15.000.000,00	15.000.000,00		P1
0218.021801.01.013	Fasilitasi dan Pembinaan Kearsipan	OPD, UPTD, Desa, BUMD, Perusahaan, Ormas, Orpol dan Perorangan di Kabupaten Purbalingga	Jumlah layanan kearsipan	160 unit/kerja	162.000.000,00	162.000.000,00	KSB	P1
0218.021801.01.014	Pengelolaan dan Operasional Kearsipan	Beberapa OPD, Ormas, Orsospol Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Purbalingga	Tersedianya arsip aktif dan inaktif	0 Bok arsip	258.200.000,00	171.200.000,00	KSB	P1
030301	**DINAS PERTANIAN**				**8.355.402.000,00**	**8.524.534.000,00**		
03	**URUSAN PILIHAN**				**8.355.402.000,00**	**8.524.534.000,00**		
0303	**PERTANIAN**				**8.355.402.000,00**	**8.524.534.000,00**		
0303.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**1.727.364.000,00**	**1.621.510.000,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0303.030301.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kantor Dinas Pertanian	Terpenuhinya honor pengelola kegiatan	31 kegiatan	740.490.000,00	754.490.000,00		P1
			Terpenuhinya honor PTT SK Bupati	19 orang				
			Terpenuhinya ATK, listrik, telepon dan air	12 bulan				
			Terpenuhinya rumah tangga kantor	12 bulan				
0303.030301.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Purbalingga dan Luar Kab. Purbalingga	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	300 kali	197.000.000,00	197.000.000,00		P1
			Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	150 kali				
0303.030301.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Dinpertan	Terpeliharanya suku cadang kendaraan roda 4	6 unit	393.604.000,00	305.000.000,00		P1
			Tersedianya suku cadang kendaraan roda 3	5 unit				
			Tersedianya suku cadang kendaraan roda 2	60 unit				
			Terpeliharanya gedung kantor lingkup dinpertan	5 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0303.030301.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Dinpertan	Terpenuhinya sapras kantor	1 paket	21.000.000,00	0,00		P1
0303.030301.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Purbalingga dan Luar Kab. Purbalingga	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	128 ASN	20.000.000,00	35.000.000,00		P1
0303.030301.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Kantor Dinpertan	Tersusunnya dokumen RKJIP, LPPD, LKPJ, RENJA, Evaluasi Kinerja	48 buku/dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00		P1
0303.030301.01.007	Pengelolaan BPP Kecamatan	18 BPP Kecamatan	Jumlah BPP yang terfasilitasi	18 BPP	285.270.000,00	260.020.000,00		P1
0303.030301.01.008	Statistik Pertanian	Kab. Purbalingga	Tersusunnya buku statistik pertanian	5 buku	55.000.000,00	55.000.000,00		P1
0303.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PENGOLAAN HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN**		Produksi pangan : Padi Produksi pangan : Jagung Produksi pangan : Kedelai	259830 Ton 40936 Ton 230 Ton	**4.848.972.000,00**	**5.444.339.000,00**		
0303.030301.02.001	Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan	UPTD Mewek, Cendana, Karangkemiri dan Gunung karang	'produksi benih padi (ton) 'produksi bibit kopi (batang)	728128 kg 1500 kg	426.600.000,00	426.600.000,00		P1
0303.030301.02.002	Pengembangan Produksi Tanaman Pangan	Kab. Purbalingga	Jumlah kelompok yang difasilitasi UPSUS	600 kelompok	395.500.000,00	433.000.000,00		P1
0303.030301.02.003	Perlindungan Tanaman Pangan	Kab. Purbalingga	Luas areal kekeringan yang difasilitasi 'Luas tanaman padi yang difasilitasi pengendalian OPT	20 ha 15 ha	158.750.000,00	150.000.000,00		P1
0303.030301.02.004	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Kantor Dinpertan, Kab. Purbalingga	Jumlah kelompok yang difasilitasi	4 kelompok	88.000.000,00	94.000.000,00		P1
0303.030301.02.017	Pembinaan Kelembagaan dan SDM Pertanian Tanaman Pangan	Kab. Purbalingga, Sumatera Barat	Jumlah kelembagaan petani/ pemuda/P3A/GP3A yang dibina Jumlah peserta kartu tani Sertifikasi organik (ha)	12 P3A 66024 Kartu tani 10 ha	459.210.000,00	612.320.000,00		P1
0303.030301.02.026	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)	Kab. Purbalingga, 18 BPP kecamatan, Kec. Kaligondang dan Kec. Kertanegara	'Jumlah kelompok yang terfasilitasi sarpras	10 kelompok	2.149.662.000,00	3.548.419.000,00		P1
0303.030301.02.027	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Kab. Purbalingga	Jumlah kelompok yang terfasilitasi sarpras	20 kelompok	1.171.250.000,00	180.000.000,00		P1
0303.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN HOLTIKULTURA**		Produksi pangan : Cabe Besar Produksi pangan : Cabe Rawit Produksi pangan : Bawang merah Produksi pangan : Duku Produksi pangan : Durian Produksi pangan : Pisang Produksi pangan : Nanas Produksi pangan : Mangga Produksi pangan : Jeruk	749 Ton 595 Ton 0 Ton 7874 Ton 3924 Ton 14619 Ton 425 Ton 745 Ton 0 Ton	**193.000.000,00**	**127.000.000,00**		
0303.030301.03.011	Pengembangan Benih Unggul / Perbanyakan Benih Hortikultura	Kec. Pengadegan, Kec. Kejobong, Ds. Kalikajar Kec. Kaligondang	Jumlah penangkar/ produsen benih hortikultura yang difasilitasi	4 penangkar	76.500.000,00	76.500.000,00		P1
0303.030301.03.014	Pengembangan Produksi Tanaman Hortikultura	Kab. Purbalingga	'luasan tanaman hortikultura	10 ha	116.500.000,00	50.500.000,00		P1
0303.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN**		Produksi pangan : Kopi Produksi pangan : Lada Produksi pangan : Kelapa Dalam Produksi pangan : Kelapa Deres Produksi pangan : Cengkeh Produksi pangan : Nilam	601 Ton 182 Ton 13168 Ton 55287 Ton 58 Ton 739 Ton	**659.626.000,00**	**593.995.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0303.030301.04.005	Perlindungan Tanaman Perkebunan	Kec. Rembang	Jumlah kelompok fasilitasi pengendalian OPT tanaman perkebunan	6 kelompok	99.750.000,00	99.750.000,00		P1
0303.030301.04.007	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan SDM Pertanian Perkebunan	Kab. Purbalingga	Jumlah kelembagaan petani perkebunan yang dibina	8 kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00		P1
0303.030301.04.019	Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan (DBH-CHT)	Kec. Karangreja	Jumlah penangkar/ produsen benih perkebunan yang difasilitasi	7 penangkar	100.000.000,00	100.000.000,00		P1
0303.030301.04.020	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Kab. Purbalingga, Soropadan,	Jumlah Festival dan lomba hasil pertanian	2 kali	281.876.000,00	240.245.000,00		P1
			'Jumlah pasar murah/ pasar tani	6 kali				
			Jumlah expo	1 kali				
0303.030301.04.021	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Perkebunan	Kec. Karangreja	'luasan tanaman perkebunan	50 ha	78.000.000,00	54.000.000,00		P1
			Jumlah sarpras yang difasilitasi	5 unit				
0303.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PETERNAKAN**		Populasi ternak siap potong : Sapi	1274.73 Ton	**362.000.000,00**	**285.000.000,00**		
			Populasi ternak siap potong : Kambing	288.6 Ton				
			Populasi ternak siap potong : Domba	84.42 Ton				
			Populasi ternak siap potong : Ayam layer	48671 Ton				
			Populasi ternak siap potong : Ayam broiler	4800538 Ton				
			Populasi ternak siap potong : Ayam buras	8570524 Ton				
			Populasi ternak siap potong : Itik	19604 Ton				
			Populasi ternak siap potong : Entog	5297 Ton				
			Produksi hasil peternakan: Susu	299953 Liter				
			Produksi hasil peternakan: Telur	12814 Ton				
0303.030301.05.002	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Peternakan	Kab. Purbalingga	Jumlah kelompok ternak yang dilatih	2 kelompok	162.000.000,00	70.000.000,00		P1
			Jumlah peternak yang difasilitasi pelatihan luar daerah	40 orang				
0303.030301.05.003	Pengembangan Bibit Unggul Peternakan	Kab. Purbalingga	Jumlah ternak yang mendapatkan IB	4000 ekor	70.000.000,00	85.000.000,00		P1
0303.030301.05.011	Pengembangan Komoditas Peternakan	Kec. Bojongsari	Jumlah jenis ternak yang dikembangkan	3 Jenis	130.000.000,00	130.000.000,00		P1
0303.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN PRODUK PETERNAKAN**		Produksi olahan daging	447 Ton	**283.750.000,00**	**205.000.000,00**		
			Produksi olahan telur	96033 Ton				
			Produksi olahan susu	99741 Liter				
0303.030301.06.002	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kab. Purbalingga	'Jumlah kelompok ternak yang dilatih	2 kelompok	60.000.000,00	60.000.000,00		P1
0303.030301.06.003	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kab. Purbalingga	Jumlah kelompok pengolah hasil ternak yang terfasilitasi	12 kelompok	223.750.000,00	145.000.000,00		P1
			Jumlah jenis olahan produk hasil ternak	4 Jenis				
0303.07	**PROGRAM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINAIR**		Prevalensi penyakit (%)	22.08 %	**280.690.000,00**	**247.690.000,00**		
			Penyakit zoonosis (%)	5.61 %				
0303.030301.07.001	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan	Kab. Purbalingga	Jumlah ternak yang divaksinasi dan diobati	3000 ekor	105.000.000,00	105.000.000,00		P1
0303.030301.07.002	Pengelolaan UPT Puskeswan	Kembaran Kulon	Jumlah ternak yang divaksinasi dan diobati	3000 ekor	46.000.000,00	46.000.000,00		P1
			Terlaksananya pengobatan hewan kecil (kambing)	1600 ekor				
0303.030301.07.003	Pengelolaan Rumah Potong Hewan	Kembaran Kulon	Jumlah ternak sapi yang dipotong	2555 ekor	89.690.000,00	56.690.000,00		P1
			Jumlah pemeriksaan ante dan post mortem pada 2 hari raya	36 pemeriksaan/kali				
0303.030301.07.005	Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veterinair	Kab. Purbalingga	'Jumlah sampel daging yang diperiksa	40 sampel	40.000.000,00	40.000.000,00		P1
030601	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**				**18.095.350.000,00**	**16.258.622.000,00**		
03	**URUSAN PILIHAN**				**18.095.350.000,00**	**16.258.622.000,00**		
0304	**PERDAGANGAN**				**13.610.414.000,00**	**14.508.622.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0304.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**1.006.900.000,00**	**971.900.000,00**		
0304.030601.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tersedianya bahan dan jasa perkantoran	12 bulan	515.000.000,00	540.000.000,00	KB	P1
0304.030601.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya rapat - rapat kordinasi dan konsultasi Dalam Daerah (DD) dan Luar Daerah (DL)	220 OK	200.000.000,00	200.000.000,00	KB	P1
0304.030601.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	261.900.000,00	201.900.000,00	KB	P1
0304.030601.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah sarana prasarana kantor yang di adakan	0 Unit	0,00	0,00	KB	P1
0304.030601.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Purbalingga dan Luar Kab. Purbalingga	Terdidik dan terlatihnya pegawai	20 ASN	20.000.000,00	20.000.000,00	KB	P1
0304.030601.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Kabupaten Purbalingga	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	5 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	KB	P1
0304.02	**PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN**		Persentase pemantauan terhadap distribusi barang penting dan strategis	0 %	**1.045.731.000,00**	**795.629.000,00**		
0304.030601.02.001	Pengawasan distribusi barang	Kabupaten Purbalingga	Jumlah barang yang diawasi distribusinya	3 jenis/barang	132.000.000,00	132.000.000,00	KB	P1
0304.030601.02.002	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	Kabupaten Purbalingga	Informasi harga barang kebutuhan pokok	32 jenis/barang	913.731.000,00	663.629.000,00	KB	P1
0304.03	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPORT**		Jumlah eksportir Jumlah/jenis barang yang diekspor Nilai ekspor	0 Orang 60 Unit 0 Ribu Rupiah	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**		
0304.030601.03.002	Pelatihan Manajemen dan Prosedur Ekspor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah peserta IKM yang memahami prosedur eksport	30 IKM	50.000.000,00	50.000.000,00	KB	P1
0304.04	**PROGRAM STANDARISASI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**		Persentase pengawasan terhadap komoditas barang yang peredarannya diawasi Persentase pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus persentase sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang Persentase pasar tertib ukur	0 % 0 % 15 % 28000 Unit 2 %	**300.000.000,00**	**1.689.500.000,00**		
0304.030601.04.002	Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen	UPT Metrologi Kab. Purbalingga	Tersedianya operasional untu pengelolaan dan pemeliharaan UPT Metrologi	29337 UTTP	0,00	400.000.000,00	KB	P1
0304.030601.04.003	Pengelolaan dan pemeliharaan UPT Metrologi Legal	Kabupaten Purbalingga	Jumlah sarpras metrologi legal yang dicukupi	12 unit	300.000.000,00	1.289.500.000,00	KB	P1
0304.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SARANA & PRASARANA PERDAGANGAN**		Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar SNI Cakupan Pedagang Kaki Lima yang ditata dan diberdayakan	3 Unit 12 PKL	**11.207.783.000,00**	**11.001.593.000,00**		
0304.030601.05.001	Pembangunan pasar	Kabupaten Purbalingga	Jumlah beroperasinya pasar milik Pemkab dan tercapainya target PAD	21 pasar	0,00	719.570.000,00	KB	P1
0304.030601.05.002	Pengelolaan dan Pemeliharaan pasar Kabupaten	Pasar Mandiri dan Pasar Tobong	Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi	2 pasar	0,00	3.168.331.000,00	KB	P1
0304.030601.05.003	Penataan dan pengawasan pedagang kaki lima	Kabupaten Purbalingga	Jumlah pasar yang direvitalisasi	2 pasar	100.000.000,00	1.513.810.000,00	KB	P1
0304.030601.05.004	Pengelolaan dan pemeliharaan pasar wilayah I	Kabupaten Purbalingga	Jumlah lokasi PKL tertata dan terawasi	5 lokasi	2.200.000.000,00	60.000.000,00	KB	P1
0304.030601.05.005	Pengelolaan dan pemeliharaan pasar wilayah II	Kabupaten Purbalingga	Jumlah pasar yang dikelola di wilayah I	8 pasar	543.600.000,00	2.200.000.000,00	KB	P1
0304.030601.05.006	Pengelolaan dan pemeliharaan pasar wilayah III	Kabupaten Purbalingga	Jumlah pasar yang dikelola (Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Cipaku, STA Kutabawa, Karangnangka dan Banjarsari)	7 pasar	296.282.000,00	543.600.000,00	KB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0304.030601.05.007	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPTD Pasar Wilayah III	Kabupaten Purbalingga	Jumlah pasar yang dikelola (Bukateja, Panican, Arjobinangun, Kutawis, Sinduraja, Kaligondang)	6 pasar	0,00	296.282.000,00	KB	P1
0304.030601.05.008	Pembangunan Kawasan PKL	PKL Kawasan GOR Gontoer Darjono	Jumlah kawasan PKL yang dibangun	1 lokasi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	KB	P1
0304.030601.05.009	Manajemen dan Pengelolaan Pasar				609.570.000,00			P1
0304.030601.05.010	Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana pasar				4.958.331.000,00			P1
0305	**PERINDUSTRIAN**				**4.484.936.000,00**	**1.750.000.000,00**		
0305.11	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI**		Persentase fasilitasi HKI Persentase penerapan standarisasi produk industri Persentase fasilitasi sertifikasi halal	100 % 100 % 100 %	**4.484.936.000,00**	**1.750.000.000,00**		
0305.030601.11.001	Peningkatan SDM Industri Agro	Kabupaten Purbalingga	Jumlah IKM yang dilatih	10 IKM	75.000.000,00	75.000.000,00	KB	P1
0305.030601.11.002	Pemenuhan sarana dan prasarana Industri Agro	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Industri Agro yang difasilitasi sarpras	3 IKM	340.000.000,00	340.000.000,00	KB	P1
0305.030601.11.003	Standarisasi produk Agro	Kabupaten Purbalingga	Produk Agro yang terstandarisasi	15 unit produk	0,00	510.000.000,00	KB	P1
0305.030601.11.004	Peningkatan SDM Industri non Agro	Kabupaten Purbalingga	Jumlah pelaku industri Non Agro yang terlatih	10 Produk	75.000.000,00	75.000.000,00	KB	P1
0305.030601.11.005	Pemenuhan sarana dan prasarana Industri non Agro	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Industri Non Agro yang difasilitasi sarpras	2 IKM	240.000.000,00	240.000.000,00	KB	P1
0305.030601.11.006	Peningkatan Daya Saing produk Industri non Agro	Kabupaten Purbalingga	Jumlah produk Non Agro yang terstandarisasi	2 produk terstandar sertifikat	210.000.000,00	210.000.000,00	KB	P1
0305.030601.11.007	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sentra Industri IKM/UPT Logam	Sentra IKM / UPT Logam	Tersedianya operasional untu pengelolaan dan pemeliharaan Sentra Industri IKM/UPT Logam	12 bulan	375.000.000,00	275.000.000,00	KB	P1
0305.030601.11.008	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok (DBH-CHT)	Kabupaten Purbalingga	Pendataan dan pengawasan kepemilikan dan penggunaan mesin peliting rokok	1 IKM se kab	25.000.000,00	25.000.000,00	KB	P1
0305.030601.11.009	Peningkatan Daya Saing Produk Industri Agro				510.000.000,00			P1
0305.030601.11.010	Pembangunan Sentra Industri IKM (DAK)				2.634.936.000,00			P1
040103	**SEKRETARIAT DAERAH**				**42.756.605.000,00**	**34.749.014.916,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**42.756.605.000,00**	**34.749.014.916,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**42.756.605.000,00**	**34.749.014.916,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**23.742.774.000,00**	**30.759.605.200,00**		
0401.040103.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kabupaten Purbalingga	Prosentase bahan dan jasa perkantoran yang tersedia	100 persen	16.319.645.000,00	19.065.696.300,00	KSB	P1
0401.040103.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	2000 kegiatan	1.233.990.000,00	1.459.974.000,00		P1
0401.040103.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Purbalingga	Prosentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100 persen	1.697.102.000,00	1.871.054.000,00		P1
0401.040103.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Purbalingga	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	1 buah/unit/set/paket	0,00	192.386.000,00		P1
0401.040103.01.012	Pengadaan kendaraan dinas	Kabupaten Purbalingga	Jumlah kendaraan dinas	5 unit	850.000.000,00	1.271.025.000,00		P1
0401.040103.01.015	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kabupaten Purbalingga	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	48 stel	96.000.000,00	105.840.000,00		P1
0401.040103.01.001	Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Kepala Daerah	Kabupaten Purbalingga	Prosentase kegiatan kepala daerah yang terfasilitasi	92 persen	2.390.388.000,00	2.390.388.000,00		P1
0401.040103.01.002	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepala Daerah	Kabupaten Purbalingga	Prosentase kegiatan wakil kepala daerah yang terfasilitasi	92 persen	746.996.000,00	1.463.616.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.040103.01.003	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Kepala Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah perlengkapan rumah jabatan kepala daerah yang tersedia	28 buah/unit/set/paket	323.000.000,00	496.650.000,00		P1
0401.040103.01.004	Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Purbalingga	Prosentase kegiatan wakil kepala daerah yang terfasilitasi	92 persen	0,00	1.463.616.000,00		P1
0401.040103.01.005	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Purbalingga	Prosentase sarana dan prasarana wakil kepala daerah yang terpelihara	100 persen	0,00	633.517.500,00		P1
0401.040103.01.006	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	47 buah/unit/set/paket	0,00	225.842.400,00		P1
0401.040103.01.013	Pendidikan dan pelatihan pegawai	Kabupaten Purbalingga	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	40 orang	85.653.000,00	120.000.000,00		P1
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**19.013.831.000,00**	**3.989.409.716,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040103.05.099	Penunjang Analisis Kebijakan Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah	20 rekomendasi	350.000.000,00	420.000.000,00		P1
0401.040103.05.002	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00		P1
0401.040103.05.004	Laboratorium INAGARA	Kabupaten Purbalingga	Jumlah inovasi desa/ pemerintah/ sekolah	30 inovasi	45.000.000,00	50.000.000,00		P1
0401.040103.05.005	Evaluasi Kelembagaan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah OPD yang dievaluasi SOTK	6 OPD	75.000.000,00	75.000.000,00		P1
0401.040103.05.007	Penyusunan LKj IP dan Perjanjian Kinerja	Kabupaten Purbalingga	Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang disusun	2 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00		P1
0401.040103.05.008	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP), Perjanjian Kinerja (PK) dan Renja Setda		Laporan Kinerja, perjanjian kinerja dan renja setda yang disusun	3 dokumen	22.000.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.009	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen SSH yang disusun	1 dokumen	65.000.000,00	70.000.000,00		P1
0401.040103.05.010	Pengendalian dan Koordinasi Bidang Organisasi dan Tatalaksana	Kabupaten Purbalingga	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang organisasi dan tatalaksana	12 rekomendasi	130.000.000,00	140.000.000,00		P1
0401.040103.05.077	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (Manajerial dan Teknis)	Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan yang disusun	1 dokumen	60.000.000,00	90.000.000,00		P1
0401.040103.05.011	Pengendalian dan Koordinasi Bidang Hukum dan HAM	Kabupaten Purbalingga	Jumlah terverifikasinya rancangan produk hukum	33 perangkat daerah	60.000.000,00	75.000.000,00		P1
0401.040103.05.024	Penyusunan dan sinkronisasi produk hukum daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah konsep produk hukum yang disusun	413 perda, perbup, kepbup	280.000.000,00	300.000.000,00		P1
0401.040103.05.026	Bantuan dan Konsultasi Hukum	Kabupaten Purbalingga	Jumlah bantuan dan konsultasi hukum pada tahun berjalan	45 kasus	462.000.000,00	400.000.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.040103.05.027	Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Kabupaten Purbalingga	Lapaoran kegiatan rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan	1 dokumen	395.000.000,00	60.000.000,00		P1
0401.040103.05.028	Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat, lomba kadarkum dan desa sadar hukum	Kabupaten Purbalingga	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum, desa sadar hukum dan lomba kadarkum	900 orang	275.000.000,00	215.000.000,00		P1
0401.040103.05.030	Penyusunan Himpunan Perda, Abstrak Perda, Himpunan Perbup dan Keputusan Bupati	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Himpunan Perda, Abstrak Perda, Perbup dan Keputusan Bupati	505 buku	100.000.000,00	125.000.000,00		P1
0401.040103.05.031	Pengadaan Buku Peraturan Perundang - undangan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah peraturan perundang - undangan yang dibeli	100 buku	40.000.000,00	60.000.000,00		P1
0401.040103.05.032	Penyediaan, Penyempurnaan dan Pengelolaan SJDI Hukum	Kabupaten Purbalingga	Penambahan sarana pengelolaan SJDI	1 paket	50.000.000,00	60.000.000,00		P1
0401.040103.05.014	Pengendalian dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah kebijakan pada bidang pemerintahan	8 dokumen	191.480.000,00	198.000.000,00		P1
0401.040103.05.018	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen LKPJ yang disusun	1 dokumen	193.880.000,00	200.000.000,00		P1
0401.040103.05.019	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen LPPD dan ILPPD yang disusun	2 dokumen	238.080.000,00	250.000.000,00		P1
0401.040103.05.020	Harmonisasi kerjasama daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah MoU/ Perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani	15 MoU/Perjanjian	64.480.000,00	100.000.000,00		P1
0401.040103.05.061	Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa	Kabupaten Purbalingga	Jumlah produk hukum yang disusun	2 produk hukum	102.480.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.062	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan	25 desa	56.518.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.064	Evaluasi Produk Hukum Pemerintahan Desa		Jumlah peraturan desa yang dievaluasi	25 perdes	44.480.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.065	Pemilihan Kepala Desa		Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	0 desa	247.930.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.066	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		Jumlah kecamatan yang dimonitoring PATENnya	18 kecamatan	39.480.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.067	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten		Jumlah rakor pemerintahan yang terlaksana	10 rakor	159.280.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.068	Penyusunan dan Identifikasi Rupa Bumi		Data nama - nama rupa bumi unsur buatan/ warisan	30 unsur	48.186.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.094	Sosialisasi Batas Desa		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 paket	0,00	0,00		P1
0401.040103.05.016	Pengendalian dan Koordinasi Bidang Perekonomian				60.000.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.051	Peningkatan kapasitas BUMD				388.761.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.053	Pembinaan Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM)				45.000.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.054	Pengendalian Inflasi Daerah				100.000.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.055	Pengendalian BBM dan LPG 3 Kg				34.000.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.056	Pengawasan dan Monitoring Pupuk Pestisida				43.000.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.057	Pengumpulan Informasi dan koordinasi penggunaan DBH CHT (DBH CHT)				96.530.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.058	Pengelolaan Program Subsidi Bunga dan Dana Bergulir bagi LKM.				45.000.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.059	Fasilitasi Kegiatan Dekranasda dan Promosi Potensi Daerah				375.726.500,00	0,00		P1
0401.040103.05.060	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR				75.000.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.015	Pengendalian dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan				107.470.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.080	Fasilitasi Ibadah Haji dan Umroh				0,00	0,00		P1
0401.040103.05.081	Religius Keagamaan				4.735.053.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.040103.05.082	Tarawih keliling dan buka puasa bersama				545.625.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.083	Fasilitasi Guru Madin dan P3N				4.322.400.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.085	Pembinaan Olahraga Jum'at pagi, minggu pagi dan olahraga lainnya				445.080.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.086	Pemberdayaan Keluarga melalui Organisasi Wanita				279.060.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.100	Fasilitasi Ibadah haji				1.370.530.000,00			P1
0401.040103.05.044	Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Kabupaten Rakor (POK)	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Rakor POK yang dilaksanakan	4 rakor	174.608.500,00	200.000.000,00		P1
0401.040103.05.045	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang di monev	18 kecamatan	225.000.000,00	260.000.000,00		P1
0401.040103.05.046	Penyusunan SIMBANGDA Kab. Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Admin OPD yang mengikuti bintek sekaligus pelaporan kegiatan belanja langsung	200 peserta	150.000.000,00	50.000.000,00		P1
0401.040103.05.049	Fasilitasi Sumber daya alam untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (kegiatan baru)	Kabupaten Purbalingga			0,00	100.000.000,00		P1
0401.040103.05.050	Fasilitasi sarana dan Prasarana Infrastruktur (kegiatan baru)				0,00	0,00		P1
0401.040103.05.037	Fasilitasi Bagian Layanan Pengadaan.		Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses pemilihan penyedia barang/ jasa di BLP	225 paket pekerjaan	755.156.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.038	Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Purbalingga	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pengadaan barang/ jasa	50 orang	180.000.000,00	180.000.000,00		P1
0401.040103.05.039	Pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pengadaan barang/ jasa	200 orang	35.000.000,00	56.409.716,00		P1
0401.040103.05.040	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa	Kabupaten Purbalingga	Jumlah OPD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/ jasa	52 OPD	35.000.000,00	75.000.000,00		P1
0401.040103.05.096	Peningkatan Kapasitas Kehumasan				57.441.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.097	Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Konferensi Pers				215.214.000,00	0,00		P1
0401.040103.05.098	Pengendalian dan Koordinasi Bidang Humas dan Protokol				142.902.000,00	0,00		P1
040104	**SEKRETARIAT DPRD**				**25.399.606.000,00**	**22.684.803.000,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**25.399.606.000,00**	**22.684.803.000,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**25.399.606.000,00**	**22.684.803.000,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**6.162.738.000,00**	**3.905.613.000,00**		
0401.040104.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURBALINGGA	Jumlah Bahan dan Jasa Perkantoran yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinpermasdes	3 Jenis	2.175.884.000,00	1.988.995.000,00		P1
0401.040104.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dapat dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinpermasdes	2700 kegiatan	484.130.000,00	484.130.000,00		P1
0401.040104.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinpermasdes	49 unit	1.478.849.000,00	623.416.000,00		P1
0401.040104.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang disediakan	40 unit	1.500.000.000,00	285.197.000,00		P1
0401.040104.01.013	Pendidikan dan pelatihan pegawai	Sekretariat DPRD	Jumlah ASN yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.040104.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang tersedia/tersusun.	11 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00		P1
0401.040104.01.015	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	DPRD Kabupaten Purbalingga	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	135 unit	493.875.000,00	493.875.000,00		P1
0401.06	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**		Persentase usulan Raperda yang disetujui	100 %	**19.236.868.000,00**	**18.779.190.000,00**		
0401.040104.06.001	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	DPRD Kabupaten Purbalingga	Jumlah Peraturan Daerah yang disusun	10 buah	6.935.719.000,00	6.935.719.000,00		P1
0401.040104.06.002	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	DPRD Kabupaten Purbalingga	Peningkatan kualitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah referensi dan data pembanding yang tersedia	45 orang 2700 dokumen	7.535.201.000,00	7.535.201.000,00		P1
0401.040104.06.003	Reses	Kabupaten Purbalingga	TJumlah kegiatan Reses Anggota DPRD yang terselenggara Jumlah Produk Hukum Daerah	135 kegiatan 12 dokumen	3.247.800.000,00	3.200.000.000,00		P1
0401.040104.06.004	Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Jumlah Produk Hukum Daerah	48600 kegiatan 12 perda	1.159.878.000,00	750.000.000,00		P1
0401.040104.06.005	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Edisi majalah gema legislatif Jumlah profil DPRD	12 edisi 1 dokumen	294.892.000,00	294.892.000,00		P1
0401.040104.06.006	Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum DPRD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Produk Hukum Daerah	60 dokumen	63.378.000,00	63.378.000,00		P1
040105	**KECAMATAN KEMANGKON**				**688.677.000,00**	**774.084.308,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**688.677.000,00**	**774.084.308,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**688.677.000,00**	**774.084.308,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**259.554.000,00**	**325.426.183,00**		
0401.040105.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kecamatan Kemangkon	Insentif/Honor PNS-Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan	12 Bulan 12 Bulan	119.239.000,00	120.032.745,00		P1
0401.040105.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi / Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	20 orang	14.696.000,00	23.805.000,00		P1
0401.040105.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 paket	120.894.000,00	118.198.438,00		P1
0401.040105.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 paket	0,00	58.190.000,00		P1
0401.040105.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD		Tersusunnya RENSTRA, LAKIP, RENJA, dan LPP SKPD	12 buku	4.725.000,00	5.200.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**429.123.000,00**	**448.658.125,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040105.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		Terlaksananya kegiatan pemerintahan dengan tertib	19 desa	231.388.000,00	116.181.162,00		P1
0401.040105.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Terlaksananya kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan kemangkon dengan lancar	19 desa	58.050.000,00	114.398.697,00		P1
0401.040105.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya pembinaan bidang Kesejahteraan Rakyat	19 desa	139.685.000,00	218.078.266,00		P1
040106	**KECAMATAN BUKATEJA**				**708.364.000,00**	**0,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**708.364.000,00**	**0,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**708.364.000,00**	**0,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**250.000.000,00**	**0,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040106.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				115.000.000,00	0,00		P1
0401.040106.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				25.000.000,00	0,00		P1
0401.040106.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				105.000.000,00	0,00		P1
0401.040106.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0401.040106.01.013	Pendidikan dan pelatihan pegawai				5.000.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**458.364.000,00**	**0,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040106.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban				233.364.000,00	0,00		P1
0401.040106.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				80.000.000,00	0,00		P1
0401.040106.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat				145.000.000,00	0,00		P1
040107	**KECAMATAN KEJOBONG**				**672.286.000,00**	**0,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**672.286.000,00**	**0,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**672.286.000,00**	**0,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**272.016.000,00**	**0,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040107.01.001	Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Kepala Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	6 Paket	0,00	0,00		P1
0401.040107.01.002	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepala Daerah		Sarana dan prasarana kantor yang dapat dipelihara	1 Paket	101.637.000,00	0,00		P1
0401.040107.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran		Jumlah barang dan jasa	1 tahun	90.429.000,00	0,00		P1
0401.040107.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	310 kali	28.950.000,00	0,00		P1
0401.040107.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Sepeda Motor, Laptop	1 Paket	51.000.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**400.270.000,00**	**0,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040107.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		Bintek bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum	13 desa	216.286.000,00	0,00		P1
0401.040107.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Bintek bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	13 desa	85.850.000,00	0,00		P1
0401.040107.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat	13 desa	98.134.000,00	0,00		P1
040108	**KECAMATAN KALIGONDANG**				**683.429.000,00**	**0,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**683.429.000,00**	**0,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**683.429.000,00**	**0,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**269.250.000,00**	**0,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040108.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				115.000.000,00	0,00		P1
0401.040108.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				36.500.000,00	0,00		P1
0401.040108.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				110.000.000,00	0,00		P1
0401.040108.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0401.040108.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD				7.750.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**414.179.000,00**	**0,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040108.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban				238.429.000,00	0,00		P1
0401.040108.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				61.500.000,00	0,00		P1
0401.040108.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat				114.250.000,00	0,00		P1
040109	**KECAMATAN PURBALINGGA**				**8.233.415.000,00**	**550.000.000,00**		
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**6.116.000.000,00**	**0,00**		
0104	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**6.116.000.000,00**	**0,00**		
0104.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA PERMUKIMAN**				**6.116.000.000,00**	**0,00**		
0104.040109.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0104.040109.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040109.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**2.117.415.000,00**	**550.000.000,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**2.117.415.000,00**	**550.000.000,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**1.710.547.000,00**	**260.000.000,00**		
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kecamatan Purbalingga	Belanja Pegawai Belanja Bahan Kantor Belanja Jasa Kantor	60 Bulan 60 Bulan 60 Bulan	111.810.000,00	111.810.000,00	KSB	P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Purbalingga	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	75 Kegiatan 30 Kegiatan	12.540.000,00	12.540.000,00	KSB	P1
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Purbalingga	Gedung Kendaraan Dinas Jasa Kebersihan	5 Unit 44 Unit 60 Unit	82.150.000,00	82.150.000,00	KSB	P1
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Purbalingga			150.000.000,00	50.000.000,00	KSB	P1
0401.040109.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Kecamatan Purbalingga	Dokumen Perencanaan Dokumen Laporan Kinerja OPD	10 Dokumen 10 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	KSB	P1
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				57.090.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				19.900.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				34.060.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				48.844.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				19.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				44.500.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				73.686.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				18.550.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				27.930.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				63.339.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				18.010.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				29.971.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran		Belanja Pegawai : Belanja Pakai Habis, belanja Kantor, Belanja cetak dan penggandaan, Belanja makan dan minum	2 Jenis	61.001.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas Dalam daerah	30 Kegiatan	17.500.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				30.356.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				51.400.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				16.900.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				40.643.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				58.856.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				19.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				23.800.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				39.324.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				15.880.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				41.556.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				72.759.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				18.010.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				23.971.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				71.521.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				16.600.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				41.660.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				70.554.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				17.500.000,00	0,00		P1
0401.040109.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				36.876.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.040109.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**406.868.000,00**	**290.000.000,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040109.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	Kecamatan Purbalingga	Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan dan Ormas	60 Kegiatan	196.868.000,00	80.000.000,00	KSB	P1
0401.040109.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Purbalingga	Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	60 Kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00	KSB	P1
0401.040109.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Purbalingga	Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Kegiatan	140.000.000,00	140.000.000,00	KSB	P1
040110	**KECAMATAN KALIMANAH**				**2.718.190.000,00**	**550.000.000,00**		
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**1.668.000.000,00**	**0,00**		
0104	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**1.668.000.000,00**	**0,00**		
0104.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA PERMUKIMAN**				**1.668.000.000,00**	**0,00**		
0104.040110.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040110.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
0104.040110.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040110.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
0104.040110.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040110.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.050.190.000,00**	**550.000.000,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**1.050.190.000,00**	**550.000.000,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**636.326.000,00**	**271.800.000,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.040110.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kecamatan Kalimanah	Belanja Pegawai	12 Bulan	111.445.000,00	111.445.000,00	KSB	P1
			Belanja Barang dan Jasa	12 Bulan				
0401.040110.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Kalimanah	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120 Kegiatan	22.337.000,00	22.337.000,00	KSB	P1
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 Kegiatan				
0401.040110.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Kalimanah	Gedung	8 Unit	83.990.000,00	83.990.000,00	KSB	P1
			Kendaraan Dinas	11 Unit				
			Peralatan Kantor	23 Unit				
			Mesin	1 Unit				
0401.040110.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Kalimanah	Peralatan Kantor	120 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	KSB	P1
0401.040110.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Kecamatan Kalimanah	Penyusunan Laporan Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	12 Bendel	4.028.000,00	4.028.000,00	KSB	P1
0401.040110.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				44.046.000,00	0,00		P1
0401.040110.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				22.250.000,00	0,00		P1
0401.040110.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				42.737.000,00	0,00		P1
0401.040110.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040110.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				58.254.000,00	0,00		P1
0401.040110.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				20.200.000,00	0,00		P1
0401.040110.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				46.410.000,00	0,00		P1
0401.040110.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.040110.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				47.141.000,00	0,00		P1
0401.040110.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				22.450.000,00	0,00		P1
0401.040110.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				31.038.000,00	0,00		P1
0401.040110.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00	0,00		P1
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**413.864.000,00**	**278.200.000,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.040110.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	Kecamatan Kalimanah	Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan , Kelembagaan Desa, dan Ormas.	17 Kegiatan	231.827.000,00	96.163.000,00	KSB	P1
0401.040110.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kalimanah	Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.	17 Kegiatan	67.651.000,00	67.651.000,00	KSB	P1
0401.040110.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Kalimanah	Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.	17 Kegiatan	114.386.000,00	114.386.000,00	KSB	P1
040111	**KECAMATAN KUTASARI**				**671.986.000,00**	**0,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**671.986.000,00**	**0,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**671.986.000,00**	**0,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**260.899.000,00**	**0,00**		
0401.040111.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				127.247.000,00	0,00		P1
0401.040111.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				15.710.000,00	0,00		P1
0401.040111.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				112.502.000,00	0,00		P1
0401.040111.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0401.040111.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD				5.440.000,00	0,00		P1
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement Tingkat capaian target laba Perusda Tingkat capaian target deviden perusda Jumlah LKM berbadan hukum Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	6 SKPD 60 point 95 % 100 % 100 % 3 % 37366292 Ribu rupiah 18458489 Ribu rupiah 56 Unit 90 % 100 % 100 % 100 %	**411.087.000,00**	**0,00**		
0401.040111.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban				218.337.000,00	0,00		P1
0401.040111.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				92.300.000,00	0,00		P1
0401.040111.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat				100.450.000,00	0,00		P1
040112	**KECAMATAN MREBET**				**694.869.000,00**	**550.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**694.869.000,00**	**550.000.000,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**694.869.000,00**	**550.000.000,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**258.031.000,00**	**258.031.000,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040112.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kecamatan Mrebet	Belanja Pegawai	12 bulan	138.692.000,00	88.692.000,00	KSB	P1
			Belanja Bahan Kantor	3 bulan				
			Belanja Jasa Kantor	12 bulan				
0401.040112.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Mrebet	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120 kegiatan	21.040.000,00	21.040.000,00	KSB	P1
			Belanja Perjalanan Luar Daerah	10 kegiatan				
0401.040112.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Mrebet	Belanja Bahan Pakai Habis	2 kegiatan	93.509.000,00	93.509.000,00	KSB	P1
			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3 kegiatan				
			Belanja Pemeliharaan	4 kegiatan				
0401.040112.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Mrebet	Belanja Modal Rehab Pagar Keliling Kantor	0 unit	0,00	50.000.000,00	KSB	P1
0401.040112.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Kecamatan Mrebet	Belanja Pegawai	1 Bulan	4.790.000,00	4.790.000,00	KSB	P1
			Belanja Barang dan Jasa	1 Bulan				
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**436.838.000,00**	**291.969.000,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040112.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	Kecamatan Mrebet	Belanja Pegawai	2 Bulan	252.147.000,00	107.278.000,00	KSB	P1
			Belanja Barang dan Jasa	3 Bulan				
0401.040112.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Mrebet	Belanja Pegawai	3 Bulan	66.565.000,00	66.565.000,00	KSB	P1
			Belanja Barang dan Jasa	3 Bulan				
0401.040112.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Mrebet	Belanja Pegawai	8 Bulan	118.126.000,00	118.126.000,00	KSB	P1
			Belanja Barang dan Jasa	3 Bulan				
040113	**KECAMATAN BOBOTSARI**				**679.772.000,00**	**580.000.000,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**679.772.000,00**	**580.000.000,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**679.772.000,00**	**580.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**293.740.000,00**	**329.000.000,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040113.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kecamatan Bobotsari	Terpenuhinya Belanja Pegawai	12 Bulan	104.740.000,00	110.000.000,00	KSB	P1
			Terpenuhinya Belanja Barang dan Jasa	12 Bulan				
0401.040113.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Bobotsari	Terlaksananya Perjanalan Dinas	16 Orang Tahun	48.000.000,00	48.000.000,00	KSB	P1
0401.040113.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Bobotsari	Tercukupinya Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bobotsari	1 Tahun	136.000.000,00	136.000.000,00	KSB	P1
0401.040113.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Bobotsari	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bobotsari	1 Tahun	0,00	30.000.000,00	KSB	P1
0401.040113.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Kecamatan Bobotsari	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Laporan Keuangan, LPJ, LKjIP	8 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	KSB	P1
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**386.032.000,00**	**251.000.000,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040113.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	Kecamatan Bobotsari	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan dalam Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	211.772.000,00	82.000.000,00	KSB	P1
0401.040113.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bobotsari	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	64.260.000,00	64.260.000,00	KSB	P1
0401.040113.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Bobotsari	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	110.000.000,00	104.740.000,00	KSB	P1
040114	**KECAMATAN KARANGREJA**				**652.670.000,00**	**0,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**652.670.000,00**	**0,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**652.670.000,00**	**0,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**305.000.000,00**	**0,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040114.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				120.000.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.040114.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				40.000.000,00	0,00		P1
0401.040114.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				100.000.000,00	0,00		P1
0401.040114.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				40.000.000,00	0,00		P1
0401.040114.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD				5.000.000,00	0,00		P1
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**347.670.000,00**	**0,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040114.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban				177.670.000,00	0,00		P1
0401.040114.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				60.000.000,00	0,00		P1
0401.040114.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat				110.000.000,00	0,00		P1
040115	**KECAMATAN KARANGANYAR**				**664.288.000,00**	**110.650.000,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**664.288.000,00**	**110.650.000,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**664.288.000,00**	**110.650.000,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**273.150.000,00**	**110.650.000,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040115.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kecamatan Karanganyar	Jumlah barang dan jasa perkantoran	1 1 paket	106.650.000,00	106.650.000,00	KSB	P1
0401.040115.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	1 paket	45.500.000,00	0,00		P1
0401.040115.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	87.000.000,00	0,00		P1
0401.040115.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah item pengadaan sarana dan prasarana	1 paket	30.000.000,00	0,00		P1
0401.040115.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Kecamatan Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinera	3 paket	4.000.000,00	4.000.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**391.138.000,00**	**0,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040115.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		Terlaksananya koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentrman dan Ketertiban Umum	1 paket	216.688.000,00	0,00		P1
0401.040115.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1 paket	64.450.000,00	0,00		P1
0401.040115.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Terlaksanannya koordinasi dan pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 paket	110.000.000,00	0,00		P1
040116	**KECAMATAN KARANGMONCOL**				**671.080.000,00**	**550.000.000,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**671.080.000,00**	**550.000.000,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**671.080.000,00**	**550.000.000,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**234.674.000,00**	**234.674.000,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040116.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kecamatan Karangmoncol	mengoptimalkan kerja pegawai Kantor	1000 barang	104.069.500,00	104.069.500,00	KSB	P1
0401.040116.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Karangmoncol	melancarkan program-program kerja dan koordinasi.	100 100	48.720.000,00	48.720.000,00	KSB	P1
0401.040116.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Karangmoncol	menjaga sarana prasarana kantor agar bekerja dengan baik	100 barang	73.730.000,00	73.730.000,00	KSB	P1
0401.040116.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Karangmoncol	agar kerja lebih baik dan optimal	10 barang	3.434.500,00	3.434.500,00	KSB	P1
0401.040116.01.013	Pendidikan dan pelatihan pegawai	Kecamatan Karangmoncol	melatih kerja pegawai agar lebih baik	20 orang	4.720.000,00	4.720.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**436.406.000,00**	**315.326.000,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040116.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	Kecamatan Karangmoncol	kerja lebih baik, hasil pelayanan kepada masyarakat lebih memuaskan	100 kerja	226.318.000,00	105.238.000,00	KSB	P1
0401.040116.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karangmoncol	kerja lebih baik, hasil pelayanan kepada masyarakat lebih memuaskan	100 kerja	71.370.000,00	71.370.000,00	KSB	P1
0401.040116.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Karangmoncol	kerja lebih baik, hasil pelayanan kepada masyarakat lebih memuaskan	100 orang	138.718.000,00	138.718.000,00	KSB	P1
040117	**KECAMATAN REMBANG**				**677.488.000,00**	**0,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**677.488.000,00**	**0,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**677.488.000,00**	**0,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**216.224.000,00**	**0,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040117.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				126.213.000,00	0,00		P1
0401.040117.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				21.205.000,00	0,00		P1
0401.040117.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				58.806.000,00	0,00		P1
0401.040117.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0401.040117.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD				10.000.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**461.264.000,00**	**0,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040117.05.014	Pengendalian dan Koordinasi Bidang Pemerintahan				0,00	0,00		P1
0401.040117.05.015	Pengendalian dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan				0,00	0,00		P1
0401.040117.05.045	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan				0,00	0,00		P1
0401.040117.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban				224.875.500,00			P1
0401.040117.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				136.013.000,00			P1
0401.040117.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat				100.375.500,00			P1
040118	**KECAMATAN BOJONGSARI**				**673.834.000,00**	**0,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**673.834.000,00**	**0,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**673.834.000,00**	**0,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**233.000.000,00**	**0,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040118.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				100.000.000,00	0,00		P1
0401.040118.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				17.000.000,00	0,00		P1
0401.040118.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				112.500.000,00	0,00		P1
0401.040118.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0401.040118.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD				3.500.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**440.834.000,00**	**0,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040118.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban				220.834.000,00	0,00		P1
0401.040118.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				90.000.000,00	0,00		P1
0401.040118.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat				130.000.000,00	0,00		P1
040119	**KECAMATAN PADAMARA**				**1.325.055.000,00**	**446.377.000,00**		
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**556.000.000,00**	**0,00**		
0104	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**556.000.000,00**	**0,00**		
0104.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA PERMUKIMAN**				**556.000.000,00**	**0,00**		
0104.040119.03.005	Pengembangan Wilayah Kelurahan				206.000.000,00	0,00		P1
0104.040119.03.006	Pengembangan Wilayah Kelurahan (DAU Tambahan)				350.000.000,00	0,00		P1
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**769.055.000,00**	**446.377.000,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**769.055.000,00**	**446.377.000,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**373.579.000,00**	**161.664.000,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040119.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kecamatan Padamara	Belanja Pegawai	36 bulan	126.657.000,00	126.657.000,00	KSB	P1
			Belanja Bahan Kantor	36 bulan				
			Belanja Jasa Kantor	36 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.040119.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Padamara	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120 Kegiatan	30.107.000,00	30.107.000,00	KSB	P1
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	13 Kegiatan				
0401.040119.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				103.623.000,00			P1
0401.040119.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Kecamatan Padamara	Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	4.900.000,00	4.900.000,00	KSB	P1
			Dokumen Laporan Kinerja OPD	5 Dokumen				
0401.040119.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				40.767.000,00	0,00		P1
0401.040119.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				28.600.000,00	0,00		P1
0401.040119.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				28.925.000,00	0,00		P1
0401.040119.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				10.000.000,00			P1
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**395.476.000,00**	**284.713.000,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040119.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	Kecamatan Padamara	Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan , Kelembagaan Desa, dan Ormas.	14 Kegiatan	211.196.000,00	100.433.000,00	KSB	P1
0401.040119.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Padamara	Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.	14 Kegiatan	77.230.000,00	77.230.000,00	KSB	P1
0401.040119.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Padamara	Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.	14 Kegiatan	107.050.000,00	107.050.000,00	KSB	P1
040120	**KECAMATAN PENGADEGAN**				**656.973.000,00**	**0,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**656.973.000,00**	**0,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**656.973.000,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**262.250.000,00**	**0,00**		
0401.040120.01.002	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepala Daerah				94.000.000,00	0,00		P1
0401.040120.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				121.250.000,00	0,00		P1
0401.040120.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				42.000.000,00	0,00		P1
0401.040120.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0401.040120.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD				5.000.000,00	0,00		P1
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement Tingkat capaian target laba Perusda Tingkat capaian target deviden perusda Jumlah LKM berbadan hukum Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	6 SKPD 60 point 95 % 100 % 100 % 3 % 37366292 Ribu rupiah 18458489 Ribu rupiah 56 Unit 90 % 100 % 100 % 100 %	**394.723.000,00**	**0,00**		
0401.040120.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban				203.973.000,00	0,00		P1
0401.040120.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				70.300.000,00	0,00		P1
0401.040120.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat				120.450.000,00	0,00		P1
040121	**KECAMATAN KARANGJAMBU**				**638.006.000,00**	**0,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**638.006.000,00**	**0,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**638.006.000,00**	**0,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**255.000.000,00**	**0,00**		
0401.040121.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran				140.000.000,00	0,00		P1
0401.040121.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				40.000.000,00	0,00		P1
0401.040121.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				70.000.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.040121.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0401.040121.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD				5.000.000,00	0,00		P1
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**383.006.000,00**	**0,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040121.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban				193.006.000,00	0,00		P1
0401.040121.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				85.000.000,00	0,00		P1
0401.040121.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat				105.000.000,00	0,00		P1
040122	**KECAMATAN KERTANEGARA**				**657.148.000,00**	**808.848.000,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**657.148.000,00**	**808.848.000,00**		
0401	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**657.148.000,00**	**808.848.000,00**		
0401.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	100 %	**263.152.000,00**	**522.000.000,00**		
			Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	100 %				
			Rata-rata capaian SKP	84.3 point				
0401.040122.01.007	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kecamatan Kertanegara	Honor Pengelola Keuangan Pada SKPD	12 bulan	111.542.000,00	110.000.000,00		P1
			Honor PTT	12 bulan				
			Belanja Barang dan Jasa	12 bulan				
0401.040122.01.008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Kertanegara	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300 kali	42.000.000,00	33.000.000,00		P1
0401.040122.01.009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Kertanegara	Belanja Barang dan Jasa	12 bulan	105.610.000,00	235.000.000,00		P1
0401.040122.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Kecamatan Kertanegara	Belanja Modal	4 unit	0,00	140.000.000,00		P1
0401.040122.01.014	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Kantor Kecamatan Kertanegara	Jumlah Dokumen yang disusun	4 buah	4.000.000,00	4.000.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0401.05	**PROGRAM KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**		Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	6 SKPD	**393.996.000,00**	**286.848.000,00**		
			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60 point				
			Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	95 %				
			Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	100 %				
			Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	100 %				
			Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	3 %				
			Tingkat capaian target laba Perusda	37366292 Ribu rupiah				
			Tingkat capaian target deviden perusda	18458489 Ribu rupiah				
			Jumlah LKM berbadan hukum	56 Unit				
			Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90 %				
			Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100 %				
			Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	100 %				
			Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100 %				
0401.040122.05.090	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan	11 desa	203.388.000,00	96.240.000,00		P1
0401.040122.05.091	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bidang PMD	11 desa	73.620.000,00	73.620.000,00		P1
0401.040122.05.092	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Bidang Kesra	100 %	116.988.000,00	116.988.000,00		P1
040123	**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**3.266.283.000,00**	**171.961.464,00**		
01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				**3.266.283.000,00**	**171.961.464,00**		
0105	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**3.266.283.000,00**	**171.961.464,00**		
0105.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**				**541.645.800,00**	**171.961.464,00**		
0105.040123.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Kantor Kesbangpol	Jumlah Bahan dan Jasa Perkantoran yang tersedia	25 Jenis/Unit	171.961.463,00	171.961.464,00		P1
0105.040123.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kantor Kesbangpol	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dapat diselenggarakan/diikuti	1500 Kegiatan	142.920.077,00	0,00		P1
0105.040123.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara	25 Jenis/Unit	124.122.440,00	0,00		P1
0105.040123.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Kesbangpol	Jumlah arana dan Parsarana Kantor yang dapat disediakan	30 Jenis/Unit	0,00	0,00		P1
0105.040123.01.006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Jumlah Personil/ASN yang memeproleh Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	76.145.820,00	0,00		P1
0105.040123.01.007	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Kantor Kesbangpol	Jumlah Dokumen yang tersusun	8 dokumen	26.496.000,00	0,00		P1
0105.02	**PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK**				**825.160.680,00**	**0,00**		
0105.040123.02.038	Fasilitasi Kegiatan Ormas, LSM, dan Pemantauan Aspirasi Masyarakat	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Ormas, LSM yang trfasilitasi	20 Ormas/LSM	296.563.680,00	0,00		P1
			Jumlah Dokumen dan Rekomendasi Pemantauan Aspirasi Masyarakat	6 dokumen				
0105.040123.02.045	Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Parpol dan Fasilitasi Kegiatan Parpol.	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Parpol yang memperoleh fasilitasi kegiatan	20 parpol	36.000.000,00	0,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0105.040123.02.048	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Kabupaten Purbalingga	Jumlah rekomendasi hasil kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 dokumen	45.900.000,00	0,00		P1
0105.040123.02.049	Desk Pemeilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Anggota Desk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati	1000 Orang	0,00	0,00		P1
0105.040123.02.051	Desk Pemilihan Umum				446.697.000,00			P1
0105.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**				**1.178.907.000,00**	**0,00**		
0105.040123.03.012	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita	80 Orang	76.000.920,00	0,00		P1
0105.040123.03.013	Pendidikan Kader Bela Negara	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk	500 Orang	0,00	0,00		P1
0105.040123.03.014	Sarasehan Pembauran Etnis		Jumlah Unsur/Lembaga Kemasyarakatan	20 unit/lembaga	32.400.000,00	0,00		P1
0105.040123.03.015	Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Ormas, Kelompok Masyarkat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Organisasi, Organisasi Profesi dll.	175 Jenis/Unit/organisasi/lembaga	1.070.506.080,00	0,00		P1
0105.05	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**621.929.520,00**	**0,00**		
0105.040123.05.006	Kegiatan Pengamanan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VIP	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Obyek Pengamanan	20 Objek	51.552.000,00	0,00		P1
0105.040123.05.037	Pemberdayaan Badan Koordinasi dan Informasi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah rekomendasi hasil kegiatan Bakorinfo	12 dokumen	300.359.520,00	0,00		P1
0105.040123.05.038	Keamanan Terpadu	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Obyek Pengamanan	200 Orang	261.378.000,00	0,00		P1
0105.040123.05.039	Fasilitasi Jaringan Komunikasi Masyarakat	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam kerjasama kegiatan pemantauan keamanan Hari besar keagamaan dan hari besar nasional dan kondisi darurat bencana dan lainnya	2 Ormas/LSM	8.640.000,00	0,00		P1
0105.06	**PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**				**98.640.000,00**	**0,00**		
0105.040123.06.011	Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba	Kabupaten Purbalingga	Jumlah orang terfasilitasi P4GN.	1135 Orang	98.640.000,00	0,00		P1
040201	**INSPEKTORAT DAERAH**				**3.530.500.000,00**	**2.557.500.000,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**3.530.500.000,00**	**2.557.500.000,00**		
0402	**PENGAWASAN**				**3.530.500.000,00**	**2.557.500.000,00**		
0402.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**765.000.000,00**	**690.000.000,00**		
0402.040201.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Inspektorat Kab. Pubalingga	Jumlah bahan dan Jasa perkantoran yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tupoksi inspektorat	3 jenis/barang	250.000.000,00	250.000.000,00		P1
0402.040201.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Inspektorat Kab. Purbalingga	Jumlah rapat dan koodinasi yang dapat dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat	460 kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00		P1
0402.040201.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Inspektorat Kab. Purbalingga	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara untuk menunjang pelaksanaan tupoksi inspektorat	49 kegiatan	265.000.000,00	240.000.000,00		P1
0402.040201.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00		P1
0402.040201.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Inspektorat Kab. Purbalingga	Jumlah ASN yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	15 orang	100.000.000,00	50.000.000,00	KB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0402.02	**PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**		Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa Persentase penanganan kasus/khusus Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan Level kapabilitas APIP	0 Obyek 100 % 85 % 4 point	**2.765.500.000,00**	**1.867.500.000,00**		
0402.040201.02.001	Pengawasan Internal Secara Berkala dan Penanganan Kasus/Khusus	Inspektorat Kab. Purblingga	Jumlah Obyek Pemeriksaaan yang terperiksa	1000 obrik	1.700.000.000,00	830.000.000,00		P1
0402.040201.02.002	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	Inspektorat kab. Purbalingga	Jumlah Hasil Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	1500 obrik	382.000.000,00	382.000.000,00	KB	P1
0402.040201.02.003	Tes Uji Laboratorium	Inspektorat Kab. Purblingga	Jumlah Tes Uji Laboratoarium yangdilaksanakan	250 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	KB	P1
0402.040201.02.004	Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) PNS	Inspektorat Kab. Purbalingga	Jumlah LP2P yang dilaporkan	1500 orang	10.500.000,00	10.500.000,00	KB	P1
0402.040201.02.005	Implementasi SPIP	Kab.Purbalingga	Jumlah Kegiatan Pengukuran/Penilaian SPIP OPD	100 kegiatan	74.000.000,00	65.000.000,00	KB	P1
0402.040201.02.006	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah OPD yang melakukanPMPRB	150 unit	39.000.000,00	20.000.000,00	KB	P1
0402.040201.02.007	Penegakan Integritas	Kab. Purbalingga			70.000.000,00	70.000.000,00	KB	P1
0402.040201.02.008	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemeriksa	Inspektorat Kab. Purbalingga	Jumlah Pemeriksa	45 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	KB	P1
0402.040201.02.009	Fasilitasi Tim Saber Pungli	Kab. Purbalingga	Jumlah Kegiatan Tim Saber Pungli yang terlaksana	12 kegiatan	200.000.000,00	150.000.000,00	KB	P1
0402.040201.02.010	Fasilitasi TP4D	Kab. Purbalingga	Jumlah Kegiatan TP4D	1200 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	KB	P1
0402.040201.02.011	Peningkatan Kapabilitas APIP		Jumlah APIP yang meningkat kapabilitasnya	45 orang	40.000.000,00	40.000.000,00	KB	P1
0402.040201.02.012	Implementasi Revolusi Mental	Kab. Purbalingga	Jumlah OPD yang melaksanakan ZI	150 unit	0,00	50.000.000,00	KB	P1
040301	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**4.803.944.000,00**	**5.466.179.000,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**4.803.944.000,00**	**5.466.179.000,00**		
0403	**PERENCANAAN**				**4.404.944.000,00**	**5.067.179.000,00**		
0403.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rata-rata Capaian SKP	100 persen 79 point 88 point	**1.132.679.000,00**	**2.132.679.000,00**		
0403.040301.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Bappelitbangda Purbalingga	Jumlah Bahan dan Jasa Perkantoran yang tersedia	25 Jenis/unit	454.521.000,00	454.521.000,00		P1
0403.040301.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bappelitbangda Purbalingga	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dapat diselenggarakan/diikuti	477 kegiatan	275.460.000,00	275.460.000,00		P1
0403.040301.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Bappelitbangda Purbalingga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara	60 Jenis/unit	312.698.000,00	312.698.000,00		P1
0403.040301.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Bappelitbangda Purbalingga	Parkir lantai 2 PC Komputer Printer TV proyektor	0 paket 0 unit 0 unit 0 unit	0,00	1.000.000.000,00		P1
0403.040301.01.005	Penataan Arsip	Bappelitbangda Purbalingga	Jumlah Dokumen yang tersusun	8 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00		P1
0403.040301.01.006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Yogyakarta - Semarang - Jakarta	Terkirimnya SDM dalam pelatihan teknis	20 orang/hari	30.000.000,00	30.000.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0403.040301.01.007	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Bappelitbangda Purbalingga	Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00		P1
			LKPJ	1 dokumen				
			LKjIP	1 dokumen				
			RTP	1 dokumen				
			Laporan Evaluasi/Pengedelaian Kinerja OPD	4 dokumen				
			Laporan bulanan realisasi kinerja	12 dokumen				
0403.02	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	30 persen	**2.472.265.000,00**	**1.809.500.000,00**		
			Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	97 persen				
			Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu	100 persen				
			Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur	100 persen				
0403.040301.02.001	Penyelenggaraan Musrenbang	Kabupaten Purbalingga	Konsultasi Publik	1 kali	275.000.000,00	250.000.000,00		P1
			Musrenbang kecamatan	4 kali				
			Forum OPD	4 kali				
			Musrenbangkab	1 kali				
0403.040301.02.002	Penyusunan RKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Rancangan Awal RKPD	100 buku	210.000.000,00	200.000.000,00		P1
			Jumlah Rancangan RKPD	350 buku				
			Jumlah Rancangan Akhir RKPD	25 buku				
			Jumlah Peraturan Bupati tentang RKPD	80 buku				
0403.040301.02.003	Penyusunan RKPD Perubahan	Kabupaten Purbalingga	Rancangan RKPD Perubahan	80 buku	150.000.000,00	115.000.000,00		P1
			Rancangan Akhir RKPD Perubahan	100 buku				
			Peraturan Bupati tentang RKPD Perubahan	80 buku				
0403.040301.02.004	Penyusunan KUA PPAS	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Rancangan KUA	80 buku	150.000.000,00	120.000.000,00		P1
			Jumlah Rancangan PPAS	80 buku				
			Jumlah Rancangan Akhir KUA	80 buku				
			Jumlah Rancangan Akhir PPAS	80 buku				
			Jumlah Nota Kesepakatan Bersama KUA	80 buku				
			Jumlah Nota Kesepakatan Bersama KUA	80 buku				
0403.040301.02.005	Penyusunan KUA PPAS Perubahan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Rancangan KUA Perubahan	80 buku	140.000.000,00	150.000.000,00		P1
			Jumlah Rancangan PPAS Perubahan	80 buku				
			Jumlah Rancangan Akhir KUA Perubahan	80 buku				
			Jumlah Rancangan Akhir PPAS Perubahan	80 buku				
			Jumlah Nota Kesepakatan tentang KUA Perubahan	80 buku				
			Jumlah Nota Kesepakatan tentang PPAS Perubahan	80 buku				
0403.040301.02.006	Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Terimputnya data perencanaan Usulan Desa	239 dokumen	685.000.000,00	174.500.000,00		P1
			Jumlah Terimputnya data perencanaan Usulan Kecamatan	18 dokumen				
			Jumlah Terimputnya data perencanaan Usulan OPD	45 dokumen				
			Jumah Terimputnya data perencanaan Usulan Musrenbang	45 dokumen				
			Jumlah Terimputnya data perencanaan Usulan Pokir	45 dokumen				
			Jumlah Terimputnya data perencanaan Usulan RKPD	1 dokumen				
			Jumlah Terimputnya data perencanaan Usulan PPAS	1 dokumen				
0403.040301.02.007	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Purbalingga	Jumlah Pelatihan Tematik	3 kali	190.000.000,00	150.000.000,00		P1
0403.040301.02.008	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun Ekonomi	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Renja Rumpun Ekonomi	6 dokumen	125.000.000,00	100.000.000,00		P1
			Jumlah Rekomendasi Evaluasi/Pengendalian Kinerja	24 dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0403.040301.02.009	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun IPW		Jumlah Renja OPD Rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	6 dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00		P1
			Jumlah Rekomendai evaluasi/pengendalaian kinerja	24 dokumen				
0403.040301.02.010	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun PK	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Renja OPD Rumpun PK	34 dokumen	172.265.000,00	150.000.000,00		P1
			Jumlah Rekomendasi Evaluasi/Pengendalian Kinerja OPD rumpun PK	136 dokumen				
0403.040301.02.011	Penyusunan RPJMD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Beckgraoundstudy RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 20121-2025	5 buku	225.000.000,00	250.000.000,00		P1
			Jumlah Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 20121-2025	0 buku				
			Jumlah Rancangan awal RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 20121-2025	0 buku				
			Jumlah Rancangan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 20121-2025	0 buku				
			Jumlah Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 20121-2025	0 buku				
			Jumlah Perda tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 20121-2025	0 dokumen				
			Jumlah Musrenbang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 20121-2025	0 forum				
0403.03	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen	**800.000.000,00**	**1.125.000.000,00**		
			Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	100 persen				
			Tingkat Rekomendasi pengendalian dan Evaluasi Perencanaan yang ditindaklanjuti OPD	100 persen				
0403.040301.03.001	Sinkronisasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub	Kabupeten Purbalingga	Jumlah Usulan DAK / TP / Bangub	3 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00		P1
			Jumlah Pelaporan DAK / TP / Bangub	36 dokumen				
0403.040301.03.002	Evaluasi RKPD	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi / Pengendalian Kinerja RKPD	4 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00		P1
0403.040301.03.004	Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Analisis Makro Ekonomi Daerah	10 buku	0,00	70.000.000,00		P1
0403.040301.03.008	Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia	Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi KInerja Pembangunan Manusia	10 buku	0,00	60.000.000,00		P1
0403.040301.03.010	Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra	Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Ekonomi dan Kesra	10 buku	0,00	75.000.000,00		P1
0403.040301.03.013	FGD tematik Kebijakan daerah	Kabupaten Purbalingga	Jumlah FGD Tematik	6 tema	310.000.000,00	310.000.000,00		P1
0403.040301.03.014	Analisis survey Nilai Tukar Petani (NTP)	Kabupaten Purbalingga	Jumlah Dokumen Laporan Hasil survey Nilai Tukar Petani	12 buku	0,00	100.000.000,00		P1
0403.040301.03.015	Analisis Pemerataan Pembangunan Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen Laporan Ketimpangan pendapatan antar wilayah kecamatan, antar individu dan antar kelompok penghasilan	10 buku	0,00	150.000.000,00		P1
0403.040301.03.016	Evaluasi Kinerja Infrastruktur Pengembangan Kewilayahan	Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen Profile Infrastruktur Pengembangan Wilayah	10 buku	0,00	60.000.000,00		P1
0403.040301.03.017	Analisis Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Jumlah dokumen Laporan Gap penyediaan infrastruktur masing-masing Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp, PKL, PKLp, PPK dan PPL)	10 buku	0,00	100.000.000,00		P1
0403.040301.03.018	Penyusunan Data Kinerja Pembangunan				290.000.000,00			P1
0406	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**399.000.000,00**	**399.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0406.01	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikansebagai bahan masukan kebijakan daerah Jumlah kerjasama kelitbangan	100 persen 100 persen 6 kerjasama	**399.000.000,00**	**399.000.000,00**		
0406.040301.01.001	Fasilitasi KKN	Kabupaten Purbalingga	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Fasilitasi Mahasiswa KKN	4 perguruan tinggi 600 mahasiswa	199.000.000,00	199.000.000,00		P1
0406.040301.01.002	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kabupaten Purbalingga	Evaluasi Penerpan SIDA Lomba Krenova Pameran Krenova Deseminasi Hasil Kelitbangan	1 dokumen 1 even 1 even 1 deseminasi	200.000.000,00	200.000.000,00		P1
040401	**BADAN KEUANGAN DAERAH**				**6.883.415.000,00**	**6.464.885.000,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**6.883.415.000,00**	**6.464.885.000,00**		
0404	**KEUANGAN**				**6.883.415.000,00**	**6.464.885.000,00**		
0404.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**3.032.039.000,00**	**3.093.779.000,00**		
0404.040401.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Bakeuda Kab. Purbalingga	Jumlah Bahan dan Jasa Perkantoran yang tersedia	25 Jenis/unit	2.251.242.000,00	2.286.572.000,00	KSB	P1
0404.040401.01.002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dapat diselenggarakan/diikuti	150 kegiatan	202.667.000,00	202.667.000,00	KSB	P1
0404.040401.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara	150 Jenis/unit	514.830.000,00	479.540.000,00	KSB	P1
0404.040401.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga			38.300.000,00	100.000.000,00	KSB	P1
0404.040401.01.005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Personil/ASN yang memeproleh Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	KSB	P1
0404.040401.01.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen yang tersusun	8 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	KSB	P1
0404.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan aset sesuai ketentuan Ketepatan waktu pengiriman Laporan Keuangan sesuai ketentuan Ketepatan waktu pengiriman Laporan Aset sesuai ketentuan	100 % 100 % 96 % 100 %	**3.048.502.000,00**	**2.568.232.000,00**		
0404.040401.02.001	Penyusunan APBD	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen APBD	70 buku	267.792.000,00	241.713.000,00	KSB	P1
0404.040401.02.002	Penyusunan Perubahan APBD	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	70 buku	242.116.000,00	268.195.000,00	KSB	P1
0404.040401.02.003	Penyusunan Sistem dan Prosedur Tata Usaha Keuangan	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen SISDUR Tata Usaha Keuangan	225 buku	59.067.000,00	59.067.000,00	KSB	P1
0404.040401.02.004	Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah OPD yang terpenuhi kebutuhan operasional kegiatannya	181 opd	286.759.000,00	286.759.000,00	KSB	P1
0404.040401.02.005	Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Obyek Penyaluran Dana Perimbangan Keuangan	1441 kelompok/sasaran	84.381.000,00	84.381.000,00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0404.040401.02.006	Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah OPD yang memperoleh pembinaan Bendahara - Pengelola Keuangan	181 opd	82.391.000,00	82.391.000,00	KSB	P1
0404.040401.02.007	Pengelolaan Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah OPD yang melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Barang - Aset Milik Daerah	181 opd	455.705.000,00	197.435.000,00	KSB	P1
0404.040401.02.008	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Buku LKPD dan Laporan per Semester	210 dokumen	320.103.000,00	298.103.000,00		P1
0404.040401.02.013	Pengamanan Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Barang/Aset Milik Daerah yang diasuransikan	156 barang/aset milik daerah	1.250.188.000,00	1.050.188.000,00	KSB	P1
0404.03	**PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH**		Persentase PBB yang terbayar oleh wajib pajak Capaian PAD	100 % 0 rupiah	**802.874.000,00**	**802.874.000,00**		
0404.040401.03.001	Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Pelayanan Pajak Daerah	200000 wajib pajak	127.573.000,00	127.573.000,00	KSB	P1
0404.040401.03.002	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Desa/target/objek/lokasi /pungutan pajak daerah jumlah kelurahan/objek/lokasi/pungutan target pajak Jumlah/nilai target pajak	224 desa 15 kelurahan 250000000000 rupiah	389.354.000,00	389.354.000,00	KSB	P1
0404.040401.03.003	Operasional Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga	Jumlah Wajib Pajak	650000 wajib pajak	285.947.000,00	285.947.000,00	KSB	P1
040501	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH**				**5.410.403.000,00**	**6.816.988.000,00**		
04	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**5.410.403.000,00**	**6.816.988.000,00**		
0405	**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**5.410.403.000,00**	**6.816.988.000,00**		
0405.01	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**		Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Tingkat ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan Rata-rata capaian SKP	100 % 100 % 84.3 point	**703.425.000,00**	**703.425.000,00**		
0405.040501.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	BKPPD	Jumlah Bahan dan Jasa Perkantoran yang tersedia	25 Jenis/unit	410.873.000,00	410.873.000,00	KSB	P1
0405.040501.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	BKPPD	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dapat diselenggarakan/diikuti	441 kegiatan	107.786.000,00	107.786.000,00	KSB	P1
0405.040501.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	BKPPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara	25 Jenis/unit	174.766.000,00	174.766.000,00	KSB	P1
0405.040501.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	BKPPD			0,00	0,00	KSB	P1
0405.040501.01.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	BKPPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	8 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	KSB	P1
0405.02	**PROGRAM FASILITASI DAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH**		Persentase ASN yang mengikuti Diklat sesuai standar Persentase penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Persentase administrasi file kepegawaian yang terupdate	100 % 100 % 100 % 100 %	**4.706.978.000,00**	**6.113.563.000,00**		
0405.040501.02.002	Fasilitasi Pengurusan Administrasi Pensiun	BKPPD	Jumlah ASN yang terlayani (Layanan Administrasi Pensiun)	400 orang	33.000.000,00	33.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.004	Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional	BKPPD	Jumlah ASN yang terlayani (Layanan Administrasi Jabatan Fungsional)	600 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
0405.040501.02.005	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	BKPPD	Jumlah ASN yang terlayani (Layanan Administrasi Kenaikan Pangkat)	800 PNS	52.000.000,00	52.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.006	Fasilitasi Pengurusan Administrasi Mutasi PNS	BKPPD	Jumlah Mutasi ASN sesaui Formasi Jabatan dan Kapasitas-Kompetensi Personil/ASN	600 orang	30.000.000,00	30.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.007	Penataan File Kepegawaian	BKPPD	Jumlah file Kepegawaian	8000 file	15.000.000,00	15.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.008	Pemutakhiran Program dan Data SIMPEG	BKPPD	Jumlah Program	1 unit	50.000.000,00	50.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.009	Penyusunan Buku Profil PNS	BKPPD	Jumlah Profil PNS-ASN	180 unit	17.000.000,00	17.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.010	Fasilitasi Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Pilihan	BKPPD	Jumlah ASN yang memperoleh kenaikan pangkat sesuai Norma dan Ketentuan yang berlaku / SOP	400 ASN	39.000.000,00	39.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.011	Fasilitasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PTT	BKPPD	Jumlah PTT	175 PTT	206.000.000,00	206.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.012	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	BKPPD	Diklat Prajab CPNS Golongan 1,Golongan 2, Golongan 3	200 orang	2.898.108.000,00	3.865.700.000,00	KSB	P1
			Tugas Belajar	10 orang				
			Pelatihan dan Kursus-Kursus	5 orang				
			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar	100 %				
0405.040501.02.013	Pengadaan CPNS	BKPPD	Jumlah ASN - PNS baru	413 orang	800.000.000,00	800.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.015	Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan	BKPPD	Jumlah ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi	5 orang	0,00	280.860.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.016	Pengelolaan Administrasi PTT	BKPPD	Jumlah PTT yang terlayani tertib administrasi kepegawaian	196 Orang	7.293.000,00	7.293.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.017	Penyusunan Formasi PNS	BKPPD	Jumlah Dokumen Data/Informasi Kebutuhan ASN	1 dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	KSB	P1
			Jumlah Aplikasi e Formasi yang tersedia	1 sim/aplikasi e formasi				
0405.040501.02.018	Fasilitasi Masalah Kepegawaian dan Pemantauan Disiplin PNS	BKPPD	Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam penyelesaian masalah kepegawaian dan disiplin ASN-PNS	200 PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	KSB	P1
			Jumlah pemantauan Disiplin PNS-ASN	150 Kegiatan				
			Prosentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	50 %				
0405.040501.02.019	Peningkatan Kapasitas Kompetensi ASN	BKPPD	Jumlah PNS-ASN yang meningkat potensi dan kapasitasnya	80 ASN-PNS	121.000.000,00	121.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.020	Pelaksanaan E-Kinerja	BKPPD	Jumlah OPD yang mengalami peningkatan kinerja manajemen kepegawaiaan	158 OPD	60.000.000,00	60.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.021	Penyusunan Standarisasi SKP	BKPPD	Jumlah OPD yang memiliki Standarisasi SKP	160 OPD	60.000.000,00	60.000.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.022	Assesment PNS	BKPPD	Jumlah ASN yang mengikuti Asessment Center	100 ASN-PNS	73.577.000,00	231.710.000,00	KSB	P1
0405.040501.02.023	Penyusunan Indeks Profesionalitas Pegawai ASN	BKPPD	Jumlah ASN-PNS yang terukur Nilai Indeks Profesionalitas-nya	7389 ASN-PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	KSB	P1
			Jumlah Data/Informasi Indeks Profesionalitas Pejabat Fungsional	7389 Orang/ASN				
0405.040501.02.024	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	BKPPD	Jumlah K KGB, KARIS, KARSU, KArtu Taspen, Piagam Penghargaan Satya Lencana	1500 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	KSB	P1
				JUMLAH	803.134.734.570,00	729.139.896.748,00		

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai ukuran keberhasilan yang disepakati dalam mengukur tingkat pencapaian Visi Misi Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil kumulatif dan akumulasi pencapaian kinerja *outcome* dari setiap program pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan demikian, capaian kinerja pada akhir periode RPJMD dapat tergambarkan dan terukur tingkat keberhasilannya.

Di samping itu, penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga bertujuan untuk memberikan panduan dalam melakukan evaluasi tingkat pencapaian kinerja tahunan. Indikator kinerja ini menjadi indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci, yang dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap akhir tahun perencanaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi hasil evaluasi, guna perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Secara teknis, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, dapat fokus dikelompokan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila mendasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat sasaran (dampak/impact) pemerintah daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu : 1). Aspek Kesejahteraan Masyarakat; 2). Aspek Pelayanan Umum; dan 3). Aspek Daya Saing Daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, adalah sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2020
			2017	2018	
A.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**				
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) - Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,12	5,2*	> 5
2	PDRB Per kapita	Rp. (juta)	23,42	25,27*	28,45
3	Laju Inflasi	Persen	3,72	3,01	< 5
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,72	68,41	> 70
	a. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,86	72,98	73,3
	b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,94	11,95	12,3
	c. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,87	7,00	7,76
	d. Pengeluaran Per Kapita	Rp. (ribu)	9.340	9.786	11.123
5	Angka Kemiskinan	Persen	18,80	15,62	13 – 15
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,33	6,06	< 4
7	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,31	92,32	>92
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,98	0,98	< 1
B.	**Aspek Daya Saing Daerah**				
1	Lama Waktu Perijinan Investasi	Hari	5,2	5,0	4,2
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan	Angka	78,51	79,37	80,5
3	Angka Kriminalitas	Persen	2,46	1,73	Na
C.	**Aspek Layanan Umum**				
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.	**Urusan Pendidikan**				
	APK SD/sederajat	Angka	109,91	107,01	110
	APK SMP sederajat	Angka	102,36	97,44	100
	APM SD/sederajat	Angka	95,34	94,37	94
	APM SMP/sederajat	Angka	73,73	72,03	70
	APK PAUD	Angka	76,81	57,86	80

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2020
			2017	2018	
2	**Urusan Kesehatan**				
	Angka Kematian Ibu	Per 100 rb KH	76,80	75,05	47
	Angka Kematian Bayi	Per seribu KH	8,03	7,5	4
	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	9,8	9,28	11,66
	Prevalensi Balita gizi buruk	Persen	2,69	0,08	0,1
3	**Urusan PUPR**				
	Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	80,75	85,66	90,49
	Persentase Infrastruktur Jalan dalam kondisi Baik	Persen	49,84	54,67	59,50
	Persentase Infrastruktur Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	95,57	89,25	94,75
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	42,9	43,9	45,85
	Lajur Jalan Minimal 5,5 M	Persen	18,33	21,75	25,5
	Bangunan Pengairan Kondisi Baik	Persen	42,20	41,57	48,2
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persen	22	17,12	19,11
	Cakupan Air irigasi	Persen	87,50	89,60	90,5
	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan	Persen	80	82	86
	Cakupan Pelayanan Limbah Perkotaan	Persen	84,35	89,45	100
	Cakupan Timbulan Sampah Terlayani	Persen	55,5	66,75	66
4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	91,93	93,29	93
	Cakupan Kepemilikan Rumah / Persentase rumah per KK	Persen	81,96	81,98	87,6
	Luasan Kawasan Kumuh	Persen	13,65	0	0
	Persentase Drainase Perkotaan	Persen	20,20	87,48	25,16
	Cakupan Pelayanan Air Bersih	Persen	83,28	90,43	100
	Tanah Pemda yang Bersertifikat	Persen	63,07	63,81	95
5	**Urusan Trantibum dan Linmas**				
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	Persen	-	68,80	-

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2020
			2017	2018	
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif	Persen	-	-	-
	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres	Persen	-	-	-
	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditangani	Persen	100	100	100
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Korban Bencana Alam	Persen	100	100	100
	Indeks Resiko Bencana dan Kebakaran	Angka	NA	NA	NA
	Persentase Desa dan Kelurahan Tanggap Bencana	Persen	100	100	100
	Tingkat Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	31	90	60
6	**Urusan Sosial**				
	Persentase PMKS yang terlayani	Persen	68,56	85,58	80
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1	**Urusan Tenaga Kerja**				
	Rasio Tenaga Kerja dengan upah sesuai UMK	Persen	93,46	94,1*	95
	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	41,40	47,15	70
	Tenaga Kerja yang Mengikuti Jaminan Sosial	Persen	81,00	81,07	86
2	**Urusan PP dan PA**				
	Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Angka	12	46	6
	Cakupan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	Persen	100	100	100
	Cakupan Desa dan Kelurahan Layak Anak	Persen	7,5	7,5	11,72
	Predikat Penilaian Kabupaten Layak Anak	Prestasi	-	-	Pratama
3	**Urusan Pangan**				
	Pola Pangan Harapan	Skor	85,2	85,60	86,76
	Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Kg/kap./th	132,9	152	173

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2020
			2017	2018	
	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok (beras)	Persen	< 5	< 5	< 5
	Persentase Pangan Segar Bersertifikat Aman	Persen	4	5	7
4	**Urusan Lingkungan Hidup**				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	43,6	54,15	66,5
	Pencemaran Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	1,42	NA	0
5	**Urusan Adminduk Capil**				
	Kepemilikan KTP	Persen	95,56	99,65	100
	Kepemilikan KK	Persen	88,76	98,54	100
	Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen	28,57	37,68	47
6	**Urusan PMD**				
	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,6394	0,65422	0,66904
	Jumlah Desa Swasembada	Desa	1	5	8
	Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya (Rp)	2.170.000 .000,-	2.600.000 .000,-	2.750.000 .000,-
	Cakupan Desa dengan BUMDes Sehat	Persen	22,32 (50 Desa)	22,32 (50 Desa)	30,36 (68 Desa)
7	**Urusan Dalduk dan KB**				
	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	78,09	79,91	95
	Cakupan PUS Tak Terlayani (Unmetneed KB)	Persen	10,3	10,28	9
	Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	56,73	80,30	80
	Rata – Rata Angka Kelahiran Total (TFR)	Per 1000 wanita	1,96	1,99	2,05
8	**Urusan Perhubungan**				
	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	556	430	301
	Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memadai	Persen	89	90	95
9	**Urusan Komunikasi & Informatika**				
	SKPD yang Memiliki Website	Persen	74,42	79,07	100
	Cakupan SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	Persen	74,42	79,07	100
10	**Urusan KUKM**				

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2020
			2017	2018	
	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Unit	2.012	2.388	2.399
	Persentase Koperasi Sehat	Persen	62	49,15	76
	Usaha mikro bersertifikat / berijin	Unit	1.194	1.350	1.193
11	**Urusan Penanaman Modal**				
	Realisasi Nilai Investasi	Rp. (juta)	547.461	617.870	770.000
12	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**				
	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Regional dan Nasional	medali / piagam	0	2	2
	Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Regional / Provinsi	medali / piagam	0	115	110
	Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	medali / piagam	29	23	30
13	**Urusan Kebudayaan**				
	Cakupan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	-	63,64	65
	Cakupan Pelestarian Cagar Budaya	Persen	-	14,29	14,5
	Jumlah pementasan seni budaya daerah	Kali	69	77	74
	Jumlah Gedung Pementasan Kesenian	Unit	11	17	12
14	**Urusan Perpustakaan**				
	Rasio Perpustakaan per Jumlah Penduduk	Rasio	0,001581	0,0092	0,001214
	Rasio Anggota Perpustakaan per Jumlah Penduduk	Rasio	0,053556	0,267	0,039
	Rasio Buku Perpustakaan per Jumlah Penduduk	Rasio	0,063	0,087	0,097
	Cakupan Perpustakaan Desa	Persen	32,22	33,47	65,2
15	**Urusan Kearsipan**				
	Persentase OPD/ormas/BUMD /lembaga desa/ kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baik	Persen	18	20	22
	URUSAN PILIHAN				
1.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				
	Nilai PDRB Sub Sektor	Rp. (miliar)	121.52*	331,35	360

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2020
			2017	2018	
	Perikanan				
	Produksi ikan konsumsi	Ton	6.303	6.083	5.293
	NTP Sektor Perikanan	Nilai	NA	NA	NA
	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap./th	10,8	14,66	12
2	**Urusan Pariwisata**				
	Jumlah Destinasi Wisata yang yang dikembangkan/difasilitasi	DTW	5	5	6
	Angka kunjungan wisata	Orang	2.262.738	3.793.184	2.979.000
3	**Urusan Pertanian**				
	NTP Subsektor Padi dan Palawija	Nilai	NA	NA	NA
	NTP Subsektor Tanaman Hortikultura	Nilai	NA	NA	NA
	NTP Subsektor Perkebunan	Nilai	NA	NA	NA
	NTP Subsektor Peternakan	Nilai	NA	NA	NA
	NTP Subsektor Pertanian	Nilai	NA	NA	NA
	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp. (triliun)	5,6	5,68	6,9
	Produksi Padi	Ton	237.887	261.140	269.053
	Produksi Jagung	Ton	52.150	39.679	41.759
	Produksi Kedele	Ton	126,2	10.474	235
	Produksi Daging	Ton	13.721	15.865	15.229
4	**Urusan Perdagangan**				
	Jumlah Pasar ber-SNI	Unit	0	0	3
5	**Urusan Perindustrian**				
	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp. (triliun)	5,76	6,29*	5,9
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	26,85	26,98*	28,12
	Persentase Sarpras Perdagangan yang Direvitalisasi	Persen	9,52	28,57	19,04
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	Opini Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	Kategori Akuntabilitas Kinerja	Kategori	57,75 (CC)	58,79 (CC)	65 (B)
	Hasil Penilaian LPPD	Nilai	3,2954	NA	3,33
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78,51	79,49	81

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) Tahun 2016-2021, sekaligus sebagai kelanjutan dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Purbalingga pada tahun – tahun sebelumnya. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan dengan mendorong peningkatan kinerja, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien dan optimal. Upaya tersebut tentu saja dengan tetap mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, memperhatikan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, lingkungan strategis dan tantangan pokok yang masih mungkin dihadapi, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran yang dimiliki.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. RKPD juga dijadikan dasar bagi masyarakat untuk mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sekaligus mengawasi dan memonitor dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, dengan tersusunnya RKPD Tahun 2020 diharapkan juga dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan Visi Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia.

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Dipindai dengan CamScanner